



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**MADRASAH DALAM KONTEKS  
GLOBALISASI PENDIDIKAN**

**Studi terhadap Madrasah Pembangunan  
Ciputat, Tangerang Selatan**

**DISERTASI**

**Muhamad Murtadlo**

NPM : 0606028376

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI PASCASARJANA ANTROPOLOGI  
UNIVERSITAS INDONESIA  
DEPOK  
JULI, 2012



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**MADRASAH DALAM KONTEKS  
GLOBALISASI PENDIDIKAN**

**Studi terhadap Madrasah Pembangunan  
Ciputat, Tangerang Selatan**

**DISERTASI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Doktor Pada Program Antropologi  
Universitas Indonesia

**Muhamad Murtadlo**

NPM : 0606028376

FAKULTAS ILMU SOCIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI PASCASARJANA ANTROPOLOGI  
UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK  
JULI, 2012



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI  
PROGRAM STUDI PASCASARJANA**

Gedung B (Prof. Dr. T.O Ihromi) Lt. 1 Kampus Baru UI, Depok 16424 Telp/Faks : (021) 78849022  
E-mail: pascant@gmail.com

## HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi ini diajukan oleh:

Nama : Muhamad Murtadlo  
NPM : 0606028376  
Program Studi : Antropologi  
Judul Disertasi : Madrasah dan Konteks Globalisasi Pendidikan  
Studi terhadap Madrasah Pembangunan Ciputat, Tangerang Selatan.

Telah berhasil telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

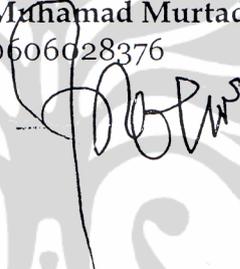
### DEWAN PENGUJI

NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
Edy Prasetyono S.Sos., MIS, Ph.D.	Ketua	1.
Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Suwarno, MA	Promotor	2.
Iwan Tjitradjaja, Ph.D	Ko-Promotor	3.
Prof. Dr. Achmad Fedyani Saifuddin, MA, SS	Anggota	4.
Prof. Dr. Musdah Mulia	Anggota	5.
Prof. Dr. Rusmin Tumanggor	Anggota	6.
Dr. Tony Rudyansjah, MA	Anggota	7.

Di tetapkan di : Depok  
Tanggal : 10 Juli 2012

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
Telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Muhamad Murtadlo  
NPM : 0606028376  
Tanda Tangan :   
Tanggal :

## KATA PENGANTAR

Globalisasi disebut-sebut oleh para pemerhati sebagai salah satu tantangan besar bagi dunia pendidikan. Para pemerhati dalam melihat pendidikan dalam konteks globalisasi ada yang bersikap pesimis dan ada juga yang optimis. Pandangan yang pesimis, diantaranya Kazamias (2001) menyebutkan bahwa di era globalisasi pendidikan seakan berada di persimpangan. Di satu sisi pendidikan secara ideal ditujukan untuk membentuk pribadi yang berpuncak pada kesempurnaan pikiran dan jiwa, di sisi lain tuntutan pasar menghendaki pendidikan diarahkan pada produksi pengetahuan instrumental dan penguasaan ketrampilan-ketrampilan khas pasar. Pandangan yang optimis, Menon (2007) menyebutkan meski globalisasi telah melahirkan berbagai hal negatif seperti komersialisasi pendidikan, ternyata ada beberapa keuntungan globalisasi bagi dunia pendidikan seperti munculnya kesadaran ketertinggalan praktik dunia pendidikan sejauh ini dan tuntutan pendekatan pendidikan yang lebih efektif dan memacu kompetisi.

Dalam konteks globalisasi, semua institusi sosial yang ingin survive dan tetap berperan dituntut untuk memahami posisi lembaganya dalam perubahan yang terjadi, khususnya terkait dengan globalisasi. Mengkaji institusi pendidikan dalam konteks globalisasi pendidikan, tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tema politik pendidikan dan persoalan itu tak terpisahkan dari wilayah pembahasan politik identitas. Castells (2010: 8) menyebutkan bahwa penguatan identitas banyak dilakukan oleh kekuatan sosial yang lemah sebagai bentuk usaha mencari pembeda dari (*differ from*) dan bentuk perlawanan (*oppose to*) dari kekuatan dominan. Dari pernyataan Castells, nampak ada dua usaha dalam melakukan resistensi yaitu mencari pembeda dan mengambil sikap perlawanan dari kekuatan dominan yang ada. Penelitian ini mencoba menguji, benarkah proses resistensi identitas selalu dalam bentuk mencari pembeda dan mengambil sikap perlawanan?

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana sebuah lembaga pendidikan mengambil posisi dalam konteks globalisasi pendidikan. Penelitian diarahkan pada sebuah jenis lembaga pendidikan yang bernama madrasah. Gambaran umum madrasah di Indonesia, seperti yang diungkapkan salah satu mantan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (2004-2007), Yahya Umar, bahwa madrasah adalah fenomena lembaga pendidikan yang serba memprihatinkan: 90 % madrasah adalah swasta; 90 % madrasah berada di desa; 90 % pendukung madrasah adalah masyarakat miskin. Bisa dibayangkan bahwa

karena kebanyakan madrasah didirikan oleh masyarakat dengan swadaya dan berkembang sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat menyediakan sarana prasarana, maka madrasah di berbagai tempat, terutama di pedesaan-pedesaan berjalan dengan tertatih dengan sarana prasarana seadanya.

Beberapa tulisan mengenai madrasah sering menyoroti belum suksesnya lembaga pendidikan madrasah dalam membangun daya saing (Supriyoko, 2004; Saifudin, 2004; Djunaidi, 2005; Dahrman, 2002; Musahadi, 2002; Fata, 2006). Ada dua penyebab utama madrasah menjadi lembaga pendidikan yang tertinggal. Pertama, sebab internal adalah kurangnya daya pendukung baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), minimnya daya pendukung keuangan, dan lemahnya manajemen organisasi (Saifudin, 2004; Djunaidi, 2005). Kedua, sebab eksternal, yaitu sikap diskriminatif pemerintah yang membedakan perlakuan antara sekolah umum dengan madrasah baik dalam pembinaan maupun dalam bantuan keuangan, di mana sekolah umum lebih diutamakan (Dahrman, 2002; Musahadi, 2002; Fata, 2006).

Namun dibalik gambaran madrasah yang terbatas itu, dihubungkan dengan konteks global, belakangan muncul beberapa madrasah saat ini yang berhasil muncul sebagai lembaga pendidikan yang unggul, diminati oleh masyarakat bahkan masyarakat berlatar belakang ekonomi menengah di perkotaan. Beberapa madrasah seperti itu tidak hanya madrasah negeri seperti Madrasah Insan Cendekia Serpong, Madrasah Insan Cendekia Gorontalo, Madrasah Aliyah Negeri I Malang; tetapi juga madrasah swasta seperti: Madrasah Pembangunan Ciputat Tangerang, Madrasah Asih Putera Cimahi Bandung, Madrasah Amanatul Ummah Surabaya. Dari beberapa contoh ini, saya tertarik untuk mengkaji madrasah swasta, mengingat adalah wajar kalau lembaga pendidikan berstatus negeri itu lebih maju karena memang anggaran operasionalnya ditanggung oleh Negara, namun apabila ada madrasah swasta berhasil menarik masyarakat perkotaan, adalah sebuah catatan tersendiri.

Untuk kepentingan penelitian ini saya menetapkan salah satu madrasah swasta, yaitu Madrasah Pembangunan Ciputat Tangerang sebagai obyek dalam studi kasus madrasah menghadapi globalisasi pendidikan. Dasar pertimbangan pemilihan ini adalah: *pertama*, Madrasah Pembangunan berada di lingkungan ibukota Negara RI, Jakarta. Keberhasilan madrasah swasta di ibukota adalah kasus yang menarik dicermati, bagaimana para aktor didalamnya mengembangkan model pendidikan yang diminati oleh masyarakat perkotaan; *kedua*, Madrasah Pembangunan dari kajian awal saya telah melakukan beberapa langkah dalam menghadapi globalisasi pendidikan seperti mengikuti penilaian ISO 9000, pengembangan website yang bisa diakses secara global, dan beberapa bentuk usaha lain yang searah dengan usaha merespon globalisasi.

Madrasah dewasa ini telah berkembang sedemikian rupa. Saat ini madrasah di Indonesia telah bermetamorfosis menjadi sekolah formal yang berdiri sejajar dengan lembaga pendidikan umum yaitu SD, SMP dan SMA. Semula madrasah merupakan lembaga pendidikan keagamaan dan sering

dianggap sebagai lembaga pelengkap (suplemen) dari pendidikan formal yang ada. Penggunaan dan pilihan nama 'madrasah' sebagai identitas lembaga pendidikan merupakan realitas simbolik dengan segala implikasinya menarik saya untuk mencermati secara antropologis realitas simbolik nama itu dikaitkan dengan struktur sosial, praktik sosial, eksplanasi agama dan kemungkinan-kemungkinan lain yang terkait dengan kajian ini. Pergumulan pemaknaan lembaga pendidikan bernama madrasah dalam memerankan fungsinya telah mengalami proses yang panjang dalam konteks pendidikan di Indonesia. Madrasah yang awalnya merupakan satu langkah modernisasi pendidikan tradisional bernama pesantren, kini dengan nama yang sama telah menjadi salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui dan dituntut siap bersaing dengan sekolah formal lainnya.

Persoalan kompleks terjadi, seiring perkembangan teknologi informasi yang telah berkembang sedemikian rupa sehingga madrasah harus berhadapan dengan budaya yang disebut globalisasi. Globalisasi telah menciptakan suasana sedemikian rupa yang memaksa seorang individu atau sebuah institusi bisa tercerabut dari akar historisnya dan terjebak dengan kultur instans budaya global. Bagaimana nasib institusi bernama madrasah dalam konteks globalisasi ini?. Mampukah madrasah bertahan, beradaptasi atau bahkan kemungkinan-kemungkinan madrasah berimprovisasi dalam rangka mempertahankan diri?.

Atas telah selesainya penulisan disertasi ini, penulis merasa perlu mengucapkan puji syukur kepada ilahi dan mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada beberapa pihak yang telah membantu penulis baik dalam proses studi di S3 Pascasarjana Antropologi Universitas Indonesia (UI) maupun dalam penyelesaian tugas akhir dalam bentuk disertasi ini. Khususnya kepada Promotor saya Ibu Prof Dr Sulistiowati Irianto dan Ko-Promotor Dr. Iwan Tjitradjaja yang telah dengan sabar memberikan bimbingan selama proses penulisan disertasi.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada para dosen di lingkungan program antropologi UI yang telah berbagi ilmunya sehingga memperluas cakrawala pemikiran penulis. Mereka itu adalah Dr. Fedyani Saifuddin, yang telah mengenalkan kepada penulis belantara paradigma studi antropologi; Dr. Iwan Tjitradjaja, yang telah mengasah dan memperhalus kemampuan metodologi penelitian; Dr. Nico Kalangie, Dr. Amri Marzali, Dr. Ninuk Kleden (beserta suami).

Atas kelancaran dan bantuan studi, saya erlu mengucapkan terima kasih kepada pimpinan unit kerja penulis di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Mereka itu adalah Kepala Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama (Prof. DR Atho' Mudzhar, Prof Dr. Abdul Djamil) yang telah mengizinkan saya untuk menempuh studi S3 dan memberikan bea siswa selama studi. Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Dr. Nurhayati Djamas, Drs Choirul Fuad Yusuf MA, Dr Amin Haedari, Dr. Imam Tholchah) yang telah memberikan

rekomendasi ketika saya akan masuk memilih program studi Antropologi Universitas Indonesia. Beberapa atasan saya langsung seperti Drs. Imran Siregar, Dr Iyoh Mastiyah, Wakhid Khozin M. Si sebagai yang telah mengizinkan saya menempuh studi, dan memudahkan saya selama proses penyelesaian studi.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan sekerja yang telah memberikan pengertiannya kepada saya. Mereka itu antara lain Drs Djamaludin, Nunu An Nahidz, Nurudin, Umul Hidayati, Erlina, Sumarni, Lisakdiyah Ma'rifatain, Hermansyah, Endang, Neni Setianingsih, Husein dan semua pegawai di lingkungan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Atas bantuan dan pengertian mereka saya dapat nyaman belajar dan beraktifitas baik di dalam kantor dan diluar kantor.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman bagian sekretariat program antropologi Pascasarjana Universitas Indonesia: Mas Tommy, Mbak Tina, Mbak Wati, Mbak Wiwin yang dengan ramah dan bersahabat selalu melayani kebutuhan administrasi saya dalam menyelesaikan studi.

Kepada Bapak Ibu kandung saya, yang tercinta H. Mualif Sahlany M. Pd yang sampai wafat belum menyaksikan keberhasilannya mendorong pendidikan anaknya hingga jenjang doktor. Ibunda Dra. Romlah Djumali serta Bapak H. Harsan dan Ibunda Hj. Sumawiyah (mertua) yang telah menjadi lantaran Sang Pencipta mengenalkan kami ke dunia, memberikan doa restunya untuk studi dan kemajuan kami sekeluarga.

Tak lupa, kepada mereka yang saya tidak akan berhasil tanpa keterlibatan mereka, yaitu kepada Istriku tercinta, Elma Haryani MA yang dengan sabar dan penuh pengertian mendampingi saya sebelum, selama dan tentu saja sesudah menempuh studi ini. Hanya dengan pengertiannya, kesulitan-kesulitan permasalahan keluarga yang sedikit terpengaruh karena saya menempuh studi dapat diatasi. Anak-anakku Syiva Amadea Ishtifa, Rezha Fareez Ibrahiem yang menjadi kebanggaan saya, yang menjadi penghibur sekaligus inspirasi bagi proses studi dan karir saya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga disertasi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Muhamad Murtadlo  
Depok, 2012

(positioning) saat ini siap berkompetisi dengan lembaga pendidikan lain. Ketiga, relasi negara dan madrasah di Indonesia sejauh ini berkembang baik dan berguna bagi usaha peningkatan kualitas serta arah perkembangan paham keagamaan di lingkungan madrasah.

Kata Kunci:

Globalisasi, Pendidikan, Identitas, Madrasah dan Negara



## ABSTRACT

Name : Muhamad Murtadlo  
Program : Anthropology  
Title : **Madrasah in Global Contexts: Study of Madrasah  
Pembangunan Ciputat, South Tangerang**

*Globalization is one thing that must be faced by all educational institutions. In a changing world, educational institutions must face some crucial issues. First, educational competitiveness is a priority in the current education system which makes educational practitioners work harder in order to maintain the existence of their institutions. Second, educational institutions should take into consideration the new secular/humanity values such as democracy and multiculturalism in their theory and practice. Third, in line with societal demand to match education with the market, education institutions must review its position so that its alumni are able to compete in job market.*

*One of institutional education in Indonesia is education that manage by religious community. There are madrasahs (Islamic schools) that services for about 18-20 % Indonesia schools follows its each levels. The number madrasahs in Indonesia is approximately 39.469 unit (2007). The main research question is how are practitioners of madrasahs facing globalizatian challenges? For this research, I carried out a case study of Madrasah Pembangunan, located in Ciputat, Tangerang. The Madrasah is very successful. It's students come from urban middle class family and that school has a favorable image and efficient administration. This phenomenon is different from the more common madrasahs found in the country with poor condition and second class in quality.*

*This research concluded to the following statement: first, in the context of globalization, identity issues become important and can even become a source of inspiration for the development of educational institutions that characterized and competitive. The word of 'madrasah' to mention some Islamic schools becomes one identity that contesting in the local, national and international context. Second, madrasah as one of education institution in Indonesia in facing globalization must have same opportunity with the general schools both in position legal claims and in the context of competition. Now, one of madrasahs like Madrasah Pembangunan Ciputat, Tangerang begin ready to follow competition with the others. Third, the position of the state to madrasah preferable concerned to keep benefit of the integration and modernization of the nation's need to drive quality through the helping in financing, management, and direction for developing of Islamic education.*

Keywords: globalization, education, identity, madrasah, and state

## ABSTRAK

Nama : Muhamad Murtadlo  
Program Studi : Antropologi  
Judul : **Madrasah dalam Konteks Globalisasi Pendidikan:  
Studi terhadap Madrasah Pembangunan Ciputat,  
Tangerang Selatan**

Globalisasi pendidikan adalah suatu tantangan besar yang harus dihadapi oleh semua institusi pendidikan. Dalam dunia yang berubah, institusi pendidikan harus menghadapi beberapa isu penting. Pertama, Pendidikan harus kompetitif, yang memaksa pelaku pendidikan harus bekerja lebih serius untuk mempertahankan eksistensi lembaga pendidikan mereka; Kedua, lembaga pendidikan perlu mempertimbangkan penerimaan terhadap nilai-nilai humanitas baru seperti pemahaman multikultural dan demokrasi sebagai ihtiar menyiapkan peserta didik memasuki dunia baru; Ketiga, sesuai dengan tuntutan sosial dan pasar, lembaga pendidikan perlu mengambil posisi sedemikian rupa sehingga alumni lulusannya dapat berkompetisi dan terserap pasar.

Madrasah adalah salah satu jenis lembaga pendidikan di Indonesia yang mempunyai segmen masyarakat tertentu. Lembaga pendidikan ini mengambil porsi kurang lebih 18-20 % dari layanan pendidikan sesuai dengan jenjang tingkat pendidikannya. Jumlah madrasah di Inonesia kurang lebih 39.469 lembaga. Permasalahan penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaku madrasah mengambil posisi dalam menghadapi globalisasi pendidikan. Untuk penelitian ini, saya mengambil kasus Madrasah Pembangunan di Ciputat Tangerang Banten. Madrasah ini berhasil membuktikan diri sebagai lembaga pendidikan alternatif. Siswa-siswinya berasal dari masyarakat urban kelas menengah secara ekonomi, dan lembaga pendidikan itu berhasil memperbaiki kinerja dan image secara mengagumkan. Fenomena ini adalah sebuah pengecualian dari kebanyakan madrasah yang cenderung terbatas, memprihatinkan.

Penelitian ini menyimpulkan beberapa pernyataan berikut: Pertama, dalam konteks globalisasi di dunia pendidikan, identitas adalah sesuatu yang penting dan menjadi salah satu sumber inspirasi utama untuk pengembangan lembaga pendidikan yang berkarakter dan berkeunggulan. Nama 'madrasah' merujuk pada sebuah jenis pendidikan di Indonesia menjadi nama identitas yang berkontestasi baik secara lokal, nasional maupun internasional. Kedua, madrasah sebagai salah satu jenis lembaga pendidikan di Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi pendidikan harus mempunyai posisi yang sama dengan sekolah umum dalam legalitas dan akses terhadap negara. Kasus Madrasah Pembangunan, karena keberhasilan dalam memposisikan diri

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Murtadlo  
NPM : 0606028376  
Program Studi: Pascasarjana  
Departemen : Antropologi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Disertasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

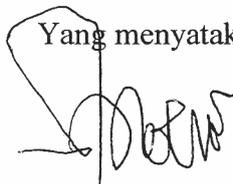
**MADRASAH DALAM KONTEKS GLOBALISASI PENDIDIKAN :  
STUDI TERHADAP MADRASAH PEMBANGUNAN CIPUTAT,  
TANGERANG SELATAN**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : di Depok  
Pada tanggal : 10 Juli 2012

Yang menyatakan

  
( M. Murtadlo )

# Daftar Isi

Halaman Judul		
Abstract		
Halaman Pengesahan		
Kata Pengantar		
Daftar Isi		
Daftar Gambar		
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang	1
	1. Madrasah di Indonesia	3
	2. Globalisasi Pendidikan: Sebuah Konteks	10
	3. Madrasah Pembangunan: Sebuah Fenomena	13
	B. Permasalahan Penelitian	15
	C. Tujuan Penelitian	16
	D. Manfaat Penelitian	16
	E. Kerangka Analisis	17
	F. Metode Penelitian Yang Digunakan	24
<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN TEORI: GLOBALISASI, PENDIDIKAN DAN IDENTITAS</b>	<b>32</b>
	A. Globalisasi Pendidikan	32
	B. Tujuan Pendidikan	39
	C. Identitas: Isu Penting dari Globalisasi	41
	D. Negara dan Eksistensi Madrasah	44
	E. Etnografi Pendidikan: Membaca Konstruksi Identitas Madrasah	55
<b>BAB III</b>	<b>MADRASAH PEMBANGUNAN CIPUTAT</b>	<b>67</b>
	A. Profile Madrasah Pembangunan Ciputat	68
	B. Ciputat: Seting Sosial Madrasah Pembangunan	73
	C. Peta Kekuatan Di Sekitar Madrasah Pembangunan	80
	D. Madrasah Pembangunan: Membidik Masyarakat Kelas Ekonomi Menengah	83
	E. Madrasah Dengan Segudang Prestasi	86
<b>BAB IV</b>	<b>MERINTIS LEMBAGA PENDIDIKAN UNGGUL</b>	<b>89</b>
	A. Ikhtiar Keluar dari Stigma Keterbatasan	90
	B. Melacak Konsepsi Pendidikan Bermutu	100

	C. Memilih Status Swasta, Mensiasati Pembiayaan	105
	D. Sistem Pembelajaran dan Pengembangan Kurikulum	108
	E. Membangun Daya Saing Madrasah	113
BAB V	MADRASAH PEMBANGUNAN MENGHADAPI GLOBALISASI	125
	A. Awal Kesadaran: Globalisasi Sebuah Tantangan	125
	B. Persoalan-persoalan Yang Dihadapi Madrasah Dalam Konteks Globalisasi Pendidikan	135
	C. Strategi Madrasah Menghadapi Globalisasi Pendidikan	145
	D. Akomodasi Nilai Baru : Pendidikan Multikultural	163
	E. Menggagas Lembaga Pendidikan Standar Internasional	170
BAB VI	KONSTRUKSI IDENTITAS MADRASAH	174
	A. Madrasah dan Konstruksi Identitas	176
	B. Arena Kontestasi Madrasah	187
	C. Pilihan Politik Madrasah Pembangunan	202
	D. Bentuk-bentuk Kreasi Identitas di Madrasah	207
	E. Inovasi Pembelajaran Agama: Mempertahankan Identitas Madrasah	216
	F. Implikasi Identitas Madrasah dalam Peta Pendidikan di Indonesia	221
BAB VII	GLOBALISASI PENDIDIKAN: SEBUAH PELUANG	229
	A. Gagasan Madrasah Unggul	230
	B. Madrasah dan Identitas	232
	C. Kontestasi Lembaga Pendidikan Madrasah	237
	D. Madrasah Menghadapi Globalisasi	243
	E. Kilas Balik Teoritis	248
BAB VIII	KESIMPULAN	254
	Daftar Pustaka	
	Lampiran	

## DAFTAR GAMBAR

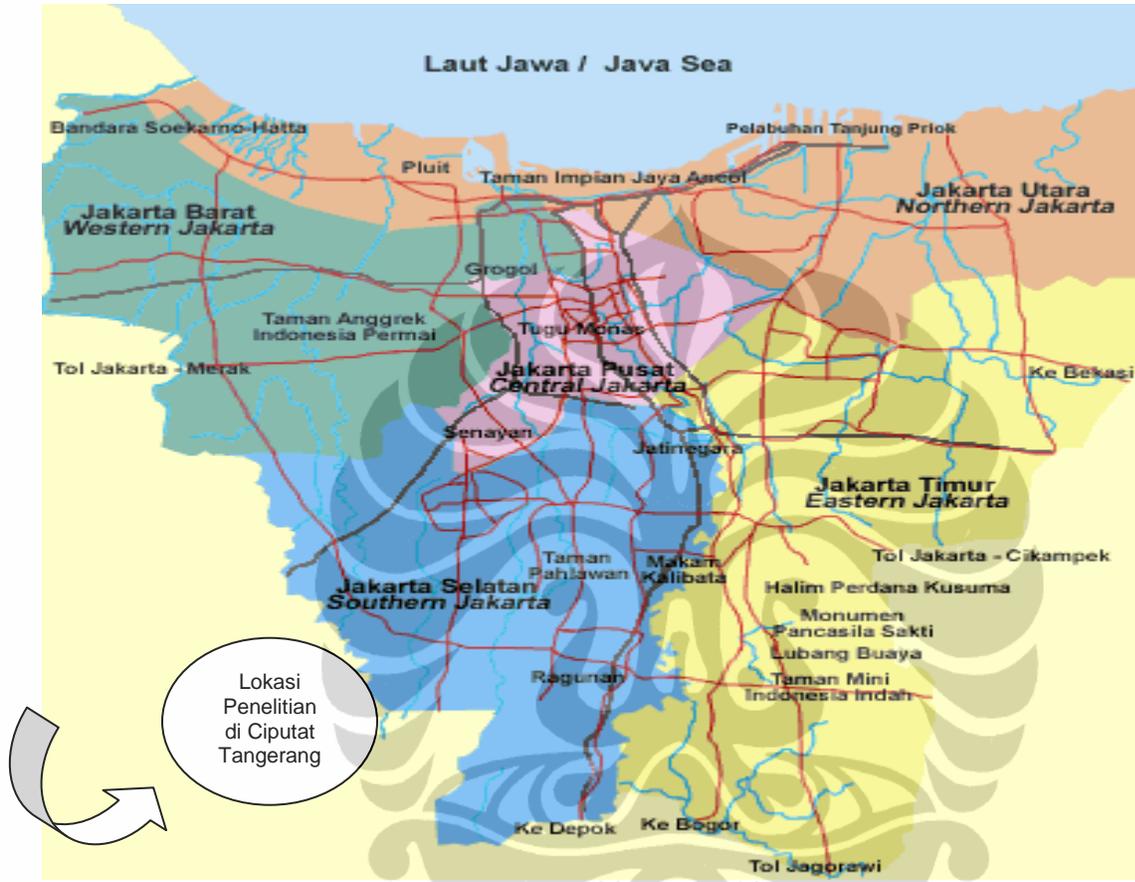
Gambar 1	Peta Lokasi Penelitian (dilihat dari Prov DKI Jakarta)	vii
Gambar 2	Gedung Madrasah Pembangunan Ciputat Tangerang Selatan	71
Gambar 3	Suasana Pagi Ketika Para Orang Tua Dengan Berbagai Jenis Mobil Mengantar Anak Masuk Madrasah Pembangunan	76
Gambar 4	Peta Kawasan Ciputat dan Kompleks Madrasah Pembangunan	77
Gambar 5	Jalan Layang Ciputat (Mengurai Kawasan Macet)	79
Gambar 6	Grafik Tingkat Penghasilan Orang Tua Siswa MP	84
Gambar 7	Grafik Tingkat Pendidikan Orang Tua Siswa MP	85
Gambar 8	Peta Jenis Pekerjaan Orang Tua Siswa MP	86
Gambar 9	Tiga Pilar Keunggulan Gagasan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Madrasah Pembangunan	109
Gambar 10	CD dan Majalah Al Ashri, Media Ekspose Madrasah Pembangunan	154
Gambar 11	Sarana Gedung Madrasah Pembangunan Yang Megah	155
Gambar 12	Perubahan Logo Madrasah Pembangunan Logo Bola Dunia (Logo Madrasah Pembangunan)	161
Gambar 13	Diabadikan Dalam Atap Sebuah Halte Bus Arena Konstruksi Identitas dan Kontestasi Madrasah	162
Gambar 14	Peta Arena Kontestasi Identitas Madrasah	238

## DAFTAR SKEMA

Skema 1	Kerangka Analisis Permasalahan	21
Skema 2	Melacak Konstruksi Identitas Madrasah (Disusun Berdasarkan Teori Identitas Castells)	24
Skema 3	Konsep Pendidikan dalam Berbagai Konteks (Ringkasan Dari Berbagai Sumber)	39
Skema 4	Peta Persoalan Yang Dihadapi Madrasah Pembangunan Dalam Konteks Globalisasi	136
Skema 5	Kilas Balik Teoritis: Konstruksi Identitas di Madrasah	252

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Madrasah di Indonesia, 2007	6
Tabel 2	Praktek Pendidikan Dalam Konteks Globalisasi	35
Tabel 3	Teori Tujuan/Orientasi Pendidikan	38
Tabel 4	Proses Integrasi Madrasah Ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional	44
Tabel 5	Perkembangan Relasi Madrasah dengan Negara	51
Tabel 6	Daftar Prestasi Siswa Madrasah Pembangunan Bidang Akademis	87
Tabel 7	Daftar Prestasi Siswa Madrasah Pembangunan Bidang Non Akademis	88
Tabel 8	Perkembangan Siswa Madrasah Pembangunan (Jenjang SD) 1974 - 2010	97
Tabel 9	Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Mata Pelajaran di Madrasah Pembangunan	120
Tabel 10	<i>Core Values</i> Pengembangan Budi Pekerti Dalam Satu Tahun Di Madrasah Pembangunan	169
Tabel 11	Perbandingan Beberapa Respon Madrasah Terhadap Kebijakan Negara	188
Tabel 12	Peta Lembaga Pendidikan Berdasarkan Corak Pembelajaran Agama	223
Tabel 13	Perbandingan Model Antara Sekolah Umum, Sekolah Umum berlatar belakang Agama dan Madrasah	226
Tabel 14	Konstruksi Identitas dan Strategi Madrasah	241



**Gambar 1. Lokasi Penelitian  
Dilihat Dari Peta Prov DKI Jakarta**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu dampak globalisasi informasi, sebuah peristiwa serangan teror 11 September 2001 di menara *World Trade Center* (WTC) Amerika Serikat yang konon dihubungkan dengan organisasi Al Qaeda yang berpusat di Afganistan telah menyebabkan munculnya pandangan bahwa semua lembaga pendidikan Islam seperti madrasah pantas dicurigai menjadi tempat reproduksi ekstrimis muslim yang berani melakukan tindakan teror seperti itu. Pandangan generalisasi bahwa semua madrasah di Negara-negara muslim juga berpotensi menjadi tempat melahirkan orang-orang ekstrim adalah pandangan sekelompok orang yang kemudian mengalami proses meng-global (globalisasi), seakan-akan semua madrasah berkecenderungan sama. Menurut saya, generalisasi seperti itu tidaklah tepat dan bijaksana dalam melihat madrasah di semua Negara tanpa melihat kultur lokal yang mungkin mewarnai.<sup>1</sup>

Globalisasi informasi mampu menyebabkan sebuah opini sekelompok orang di suatu tempat menjadi suatu image yang mengglobal. Gambaran madrasah di Afganistan yang memang cenderung hanya mengajarkan pendidikan agama dan tidak berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal sebagaimana madrasah di Indonesia, tidak tepat apabila gambaran seperti itu ditimpakan kepada madrasah di negeri ini. Madrasah di Indonesia sampai saat ini telah mengalami proses yang panjang, madrasah telah bermetamorfosis dari lembaga pendidikan yang semula hanya mengajarkan pendidikan agama saja menjadi lembaga pendidikan formal

---

<sup>1</sup> Azra (2005) menyebutkan bahwa karakteristik madrasah di berbagai kawasan mempunyai warna berbeda. Di Mesir, madrasah telah dinasionalisasi sepenuhnya oleh pemerintah Presiden Nasser pada tahun 1960-an sehingga sepenuhnya menjadi 'sekolah umum' untuk tidak menyebut sekolah 'sekuler'. Di Turki, madrasah telah dihapuskan sama sekali sejak 1920-an oleh Kemal Ataturk diganti dengan sekolah-sekolah sekuler. Di India dan Pakistan, madrasah enggan disentuh oleh Negara, sehingga pada gilirannya tetap berada dalam alam tradisionalisme.

yang juga mengajarkan pelajaran umum sebagaimana sekolah yang diakui Undang-Undang (UU No. 20 tahun 2003).

Globalisasi disebut-sebut oleh para pemerhati sebagai salah satu tantangan besar bagi dunia pendidikan. Para pemerhati mempunyai pendapat yang beragam mengenai pendidikan dalam konteks globalisasi (Kazamias, 2001; Menon, 2007; Tilaar, 1999: 145-147; Mastuhu, 2003: 10; Sirozi, 2005: 189;). Diantara pandangan para pemerhati, ada yang bersikap pesimis dan ada juga yang optimis melihat pendidikan dalam konteks globalisasi. Pandangan yang pesimis, diantaranya Kazamias (2001) menyebutkan bahwa di era globalisasi pendidikan seakan berada di persimpangan. Di satu sisi pendidikan secara ideal ditujukan untuk membentuk pribadi yang berpuncak pada kesempurnaan pikiran dan jiwa, di sisi lain tuntutan pasar menghendaki pendidikan diarahkan pada produksi pengetahuan instrumental dan penguasaan ketrampilan-ketrampilan khas pasar. Pandangan yang optimis, Menon (2007) menyebutkan meski globalisasi telah melahirkan berbagai hal negatif seperti komersialisasi pendidikan, ternyata ada beberapa keuntungan globalisasi bagi dunia pendidikan seperti munculnya kesadaran ketertinggalan praktik dunia pendidikan sejauh ini dan tuntutan pendekatan pendidikan yang lebih efektif dan memacu kompetisi.

Dalam kajian ini, saya ingin melihat bagaimana sebuah lembaga pendidikan, dalam hal ini madrasah, mengambil posisi dalam rangka mengembangkan institusi dan identitas lembaga pendidikan dalam konteks globalisasi pendidikan. Alasan saya memilih lembaga pendidikan madrasah sebagai obyek kajian ini adalah: *Pertama*, lembaga pendidikan 'madrasah' adalah sebuah institusi sosial yang tidak bisa menghindarkan diri dari dampak globalisasi; *Kedua*, lembaga pendidikan ini banyak diprakarsai justru oleh masyarakat (non Negara) atau pihak swasta. Hampir 91.5 % madrasah di

Indonesia berstatus swasta.<sup>2</sup> Fakta ini menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan lembaga pendidikan. *Ketiga*, dari tinjauan sejarah, madrasah di Indonesia merupakan lembaga yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka.<sup>3</sup> Sejarah madrasah di Indonesia menarik dicermati untuk melihat perkembangan posisi madrasah, dalam beradaptasi dengan warna budaya lokal dan global.<sup>4</sup>

## 1. Madrasah di Indonesia

Sejarah awal institusi madrasah sering dikaitkan dengan keberadaan madrasah yang dibangun oleh Nizam al Mulk (459 H/1081 M) di Bagdad. Kehadiran lembaga madrasah ini membedakan sejarah pendidikan di dunia muslim antara sebelum dan sesudah kehadiran madrasah (Syalabi, 1987). Sebelum hadirnya lembaga madrasah, pendidikan di dunia Islam lebih banyak diselenggarakan di masjid-masjid. George Makdisi (1961) menyebutkan bahwa sebelum pendidikan melembaga pada madrasah, penyelenggaraan pendidikan yang semula berbasis di masjid-masjid, bertransformasi ke masjid khan (masjid yang didampingi pemondokan), kemudian melembaga ke madrasah. Fenomena pendidikan berbasis masjid terjadi pada abad kedelapan dan kesembilan, fenomena masjid khan terjadi pada abad kesepuluh dan awal kesebelas, fenomena madrasah muncul pada akhir abad kesebelas.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Buku Statistik Pendidikan Islam 2009/2010 Kementerian Agama RI menunjukkan jumlah madrasah di Indonesia telah mencapai 42.158 buah, dengan jumlah siswa sebanyak 6.472.286 anak. Dari sisi status, 91,5 % dari jumlah madrasah tersebut adalah berstatus swasta, 8,5 % berstatus negeri. Fakta ini berbanding terbalik dengan lembaga pendidikan yang bernama sekolah. Sekolah di Indonesia, hampir 90 % jumlah sekolah di Negara ini berstatus sebagai sekolah Negara (negeri).

<sup>3</sup> Di Indonesia, nama madrasah dipergunakan pertama kali di Indonesia adalah pada penyebutan nama lembaga pendidikan yang didirikan oleh Syaikh Abdullah Ahmad di Padang tahun 1908, yaitu Madrasah Adabiyah (Shaleh, 2004: 11-18).

<sup>4</sup> Hugh Lauder (2006: 7) melihat realitas Negara dalam globalisasi masih merupakan salah satu kekuatan yang sangat berpengaruh terhadap kelompok-kelompok budaya atau institusi yang ada dalam wilayah Negara itu.

<sup>5</sup> George Makdisi, "Muslim Institution of Learning in Eleventh-Century Baghdad," dalam *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 25: 1961, h. 1-56. Uraian yang lebih detail mengenai

Di Indonesia, nama madrasah dipergunakan pertama kali adalah pada penyebutan nama lembaga pendidikan yang didirikan oleh Syaikh Abdullah Ahmad di Padang tahun 1908, yaitu Madrasah Adabiyah (Shaleh, 2004: 11-18).<sup>6</sup> Pada tahun 1915 madrasah ini berubah menjadi HIS Adabiyah. Pada tahun 1910 Syaikh M. Taib Umar mendirikan Madrasah Schoel di Batusangkar, demikian juga dengan Mahmud Yunus pada tahun 1918 mendirikan Diniyah Schoel sebagai lanjutan dari *Madrasah Schoel*. Syaikh Abdul Karim Amrullah mendirikan Madrasah Tawalib di Padang Panjang. Di Jambi, H. Abd. Somad mendirikan Madrasah Nurul Iman (1913). Pada tahun 1922 juga lahir Madrasah Saadah al-Darain oleh H. Achmad Syakur, Madrasah Nurul Iman oleh H. M. Saleh; Madrasah Juharain oleh H. Abd Majid. Di Aceh, madrasah pertama kali didirikan pada tahun 1930 bernama Madrasah Saadah Adabiyah oleh Tengku Daud Beureuh. Madrasah al-Muslim didirikan oleh Tengku Abdu Rahman Munasah Mencap. Di berbagai tempat lain di Indonesia juga bermunculan madrasah seperti di Sumatera timur, Tapanuli, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Jawa.

Madrasah di Indonesia merupakan fenomena modern yang muncul pada abad 20, yang sedikit berbeda dengan Madrasah di Timur Tengah, negeri asal istilah 'madrasah'. Kalau sejarah di Timur Tengah istilah madrasah lebih cenderung untuk menyebut lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran ilmu agama tingkat tinggi, di Indonesia madrasah justru berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang melayani siswa usia sekolah di tingkat dasar dan menengah (Shaleh, 2004). Abdurahman Shaleh (2004) menyebutkan bahwa perkembangan madrasah diperkirakan lebih merupakan reaksi terhadap faktor eksternal, seperti munculnya pendidikan modern dari Barat. Dengan kata lain, madrasah dilahirkan

---

madrasah dalam konteks pembentukan tradisi skolastik dalam Islam karyanya, *The Rise of Colleges Intitution of Learning in Islam and the West* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981)

<sup>6</sup> Sumber lain menyebutkan Syeh Zainudin Labai sebagai orang pertama yang mendirikan madrasah di Padang Panjang pada tanggal 10 Oktober 1915. Lihat Maksum (1999). *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. h. 7.

dari hasil tarik-menarik antara pesantren sebagai lembaga pendidikan asli (tradisional) di satu sisi<sup>7</sup> dengan pendidikan Barat (modern) di sisi lain.<sup>8</sup>

Kontribusi madrasah dalam dunia pendidikan di Indonesia tidaklah kecil. Jumlah madrasah di Indonesia sampai tahun 2008 telah mencapai 40.115 buah, yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah (setingkat Sekolah Dasar/SD), Madrasah Tsanawiyah (setingkat Sekolah Menengah Pertama/SMP) dan Madrasah Aliyah (setingkat Sekolah Menengah Atas/SMA). Dari jumlah madrasah sebanyak itu, 91,5 % diantaranya adalah berstatus swasta, yaitu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat (bukan Negara). Lembaga pendidikan madrasah secara nasional menggarap anak usia sekolah kurang lebih 20 % dari seluruh anak usia sekolah dari SD hingga SMA di Indonesia.

Dari seluruh jumlah madrasah di Indonesia, sekitar 91,5 persen lembaga pendidikan madrasah dikelola oleh swasta. Kenyataan ini, menurut pakar pendidikan, Muchtar Buchori, menjadi dasar bila ingin menyukseskan pendidikan nasional, maka peran madrasah tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Angka ini menjadi bukti bahwa peran masyarakat di madrasah sangat besar. Muchtar menjelaskan fenomena madrasah ini merupakan fenomena pendidikan berbasis komunitas (baca: masyarakat sipil --- pen.)<sup>9</sup>, yang hal ini akan menjadi modal yang bagus dalam penguatan masyarakat sipil. Posisi sebagai kekuatan masyarakat juga merupakan kasus yang menarik untuk memotret fenomena resistensi institusi pendidikan dalam menghadapi globalisasi.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Pesantren adalah lembaga pendidikan agama yang berada pada kepemimpinan kyai, dan mengkonsentrasikan pembelajarannya pada ilmu-ilmu agama. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang mencoba menggabungkan adanya pendidikan agama dan pendidikan umum sekaligus. Madrasah bisa dikatakan sebagai usaha modernisasi lembaga pendidikan Islam.

<sup>8</sup> Maksum (1999) menyebutkan bahwa madrasah di Indonesia lahir dari dua situasi yaitu perkembangan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia dan respon dari sistem pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 82

<sup>9</sup> Imam Prihadiyoko, "Pendidikan Madrasah dan Hancurnya Sebuah Otoritas Masyarakat " *KOMPAS*, 20 September 2001.

<sup>10</sup> Yang menarik adalah masyarakat sipil ketika berpartisipasi mendirikan lembaga pendidikan mereka lebih memilih mendirikan madrasah yang bernaung di bawah Kementerian Agama

**Tabel 1**  
**Jumlah Madrasah di Indonesia, 2007**

JENJANG	NEGERI	SWASTA	TOTAL LEMBAGA	TOTAL SISWA
Madrasah Ibtidaiyah/MI (Sekolah Dasar)	1.568	20.621	22.189 (55%)	2.870.839 (47%)
Madrasah Tsanawiyah/MTs (Sekolah Menengah Pertama)	1.256	11.363	12.883 (32%)	2.347.186 (39%)
Madrasah Aliyah/MA (Sekolah Menengah Atas)	644	4.339	5.043 (13%)	855.553 (14%)
Total			40.115 (100%)	6.073.578 (100%)

Sebuah film di tahun 2008 berjudul *Laskar Pelangi* karya sutradara Riri Reza yang menggambarkan sebuah lembaga pendidikan yang serba terbatas merupakan gambaran yang pas untuk menggambarkan secara umum kondisi madrasah di Indonesia. Di sana digambarkan bagaimana kondisi sebuah sekolah yang reot, jumlah murid perkelas tidak lebih dari 10 anak, tidak didukung buku perpustakaan yang lengkap dan berbagai keterbatasan lainnya. Menurut saya, gambaran fasilitas sekolah seperti dalam film itulah kondisi mayoritas madrasah yang ada di penjuru Tanah air. Film yang diolah dari novel karya Adrea Hirata yang menggambarkan lembaga pendidikan dengan keadaan gedung yang sederhana, murid yang terbatas, semangat juang para guru yang mengandalkan keikhlasan merupakan gambaran yang sepadan dengan realitas umum madrasah di banyak pedesaan di Indonesia.

Ada stereotype di masyarakat bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang konon penuh keterbatasan. Sebuah gambaran menyatakan bahwa madrasah di Indonesia adalah fenomena lembaga pendidikan yang serba memprihatinkan:

---

ketimbang sekolah umum. Kalaupun ada lembaga pendidikan swasta seperti SDIT, SD Muhammadiyah, yang memilih bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Nasional adalah lembaga-lembaga pendidikan yang didukung oleh organisasi sosial yang berskala nasional seperti Muhammadiyah, atau yayasan yang berada di perkotaan seperti Yayasan Pendidikan Al Azhar, Jakarta.

90 % madrasah adalah swasta; 90 % madrasah berada di desa; 90 % pendukung madrasah adalah masyarakat miskin.<sup>11</sup> Bisa dibayangkan bahwa karena kebanyakan madrasah didirikan oleh masyarakat dengan swadaya dan berkembang sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat menyediakan sarana prasarana, maka madrasah di berbagai tempat di pedesaan-pedesaan berjalan dengan tertatih dengan sarana prasarana seadanya.<sup>12</sup>

Saat ini, madrasah di Indonesia telah mengalami adaptasi sedemikian rupa sehingga akhirnya lembaga ini telah mendapatkan pengakuan menjadi sekolah formal yang diakui oleh Negara, yang berdiri sejajar dengan sekolah umum, melalui UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003. Pendidikan madrasah di Indonesia terdiri dari jenjang dasar yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs); sedangkan pada tingkat pendidikan menengah di sana ada Madrasah Aliyah (MA).<sup>13</sup>

Madrasah sebagai lembaga pendidikan telah ikut dan terlibat dalam berbagai proses perubahan baik yang terjadi dalam skala Negara dan tidak bisa dihindari tuntutan perubahan akibat globalisasi. Kini madrasah juga dituntut untuk melakukan berbagai perubahan (reformasi). M Sirozi (2005) menyebutkan bahwa pada momentum reformasi pendidikan madrasah saat ini juga ditantang

---

<sup>11</sup> Yahya Umar, Mantan Dirjen Pendidikan Islam Dep. Agama RI, menyebutkan kondisi memprihatinkan dari dunia madrasah. Tentu saja angka ini tidak tepat benar, tapi gambaran makro dunia madrasah di Indonesia kurang lebih seperti itu. Dalam sebuah Seminar Pendidikan Islam, Januari 2009 di Hotel Mercury di Ancol Jakarta Utara

<sup>12</sup> Data tahun 2004 menunjukkan bahwa ruang kelas di madrasah se-Indonesia yang layak untuk digunakan hanya sebanyak 55,2 %. Sedangkan sisanya sebanyak 47,8 % pembelajaran madrasah dilakukan di ruang kelas yang kurang memadai atau menggunakan 'kelas siang'. (Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan, tahun 2004).

<sup>13</sup> Secara nasional, kondisi madrasah (Data 2007) bisa digambarkan jumlah madrasah tingkat ibtidaiyah sebanyak 22.189 lembaga terdiri dari 1.568 negeri (7,1 %) dan 20.621 swasta (92,9 %); Madrasah Tsanawiyah sebanyak 12.619 lembaga yang terdiri 1.256 negeri (10 %) dan 11.363 swasta (90 %); Madrasah Aliyah sebanyak 5.043 lembaga yang terdiri 644 negeri (12,8 %) dan 4.399 swasta (87,2 %).

oleh adanya tiga tema besar yang harus dijawab oleh lembaga pendidikan, yaitu globalisasi, demokrasi dan desentralisasi.<sup>14</sup>

Dalam seting globalisasi, madrasah terlibat dalam relasi-relasi baik lokal maupun global yang mempengaruhi baik dalam pembentukan makna maupun dalam bentuk praktek-praktek sosial. Misalnya adanya bantuan pendidikan melalui program-program yang dibiayai oleh lembaga bantuan asing seperti *Basic Education Project (BEP)*,<sup>15</sup> *Junior Secondary Education Project (JSEP)*, *Development of Madrasah Aliyahs Project (DMAP)*. Dampak bersinggungan dengan kerjasama luar negeri menyebabkan madrasah mau tidak mau mengenal nilai-nilai baru seperti perlunya modernisasi pemikiran, kesadaran citizenship, pluralitas. Dalam waktu yang sama, madrasah juga dituntut bertahan dengan identitas dan sejarahnya yaitu lembaga pendidikan yang berlatar belakang nilai-nilai keagamaan. Dua sisi antara beradaptasi dan mempertahankan cirri khas, merupakan dua hal yang harus diperankan oleh madrasah dalam menghadapi globalisasi.

Dalam seting demokrasi, madrasah dituntut berpartisipasi dalam mengembangkan nilai tersebut. Demokrasi merupakan salah satu dari nilai-nilai humanitas baru yang merupakan kebutuhan bagi masyarakat saat ini. Saat ini, demokrasi menjadi kebutuhan mendasar bagi usaha perbaikan sendi-sendi kehidupan berbangsa dari segala sisi. Hanya dengan demokrasi inilah dipercaya sebuah Negara akan menjadi rasional dan maju. Sekalipun untuk perjuangan

---

<sup>14</sup> Dalam bukunya *Politik Pendidikan*, M Sirozi menyebutkan sketsa perkembangan sejarah pendidikan di tanah air dapat dibagi menjadi enam periode perkembangan: 1) Periode prasejarah sampai pertengahan 1800-an (periode penyebaran nilai-nilai agama dan sosialipasi ketrampilan hidup); 2) Periode 1800-an hingga 1942 (Periode modernisasi, pengumpulan pendidikan kolonial dan pendidikan pribumi); 3) Periode pendudukan Jepang 1942-1945 (Periode diseminasi semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan bangsa), 4) Periode Orde Lama 1945-1965 (Periode pemantapan nilai-nilai nasionalisme, identitas bangsa dan pembangunan fondasi ideologi kehidupan berbangsa); 5) Periode Orde Baru 1965-1998 (Periode akselerasi pembanunan nasional); 6) Periode reformasi (Periode desentralisasi, demokrasi dan globalisasi). Sirozi, M, *Politik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005) h. 185-189.

<sup>15</sup> Tahun 1996 *Asian Development Bank (ADB)* berkomitmen untuk pengembangan pendidikan dasar/*Basic Education Project (BEP)* dengan membangun 24 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 15 Madrasah Tsanawiyah (MTs) se Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai madrasah model. Laporan Asian Development Bank (ADB), PCR:INO 28069, tahun 2003.

menegakkan demokrasi di Indonesia akan membutuhkan biaya yang sangat mahal, namun proses demokratisasi menurut mereka yang pro demokratisasi harus tetap dilanjutkan. Dari sisi potensi dan tuntutan demokrasi yang besar ini, konon Indonesia pantas disebut sebagai negara demokrasi ketiga, setelah Amerika dan India.

Dalam seting desentralisasi, madrasah menghadapi permasalahan baru ketika ada tuntutan penyelenggaraan pendidikan perlu didesentralisasikan. Di satu sisi, UU Sisdiknas No. 23/2003 menyiratkan semua kegiatan penyelenggaraan pendidikan dituntut melakukan desentralisasi. Tetapi di sisi lain UU Pemerintahan Daerah No. 22/1999 menyuratkan bahwa bidang agama tidak termasuk bidang yang didesentralisasikan. Belum lagi pertanyaan kritis yang mencoba mempermasalahkan apakah memang pendidikan agama perlu dikelola secara sentralistik.

Madrasah dewasa ini telah berkembang sedemikian rupa. Sebagaimana telah disebutkan, saat ini madrasah di Indonesia<sup>16</sup> telah bermetamorfosis menjadi sekolah formal yang berdiri sejajar dengan lembaga pendidikan umum yaitu SD, SMP dan SMA. Semula madrasah merupakan lembaga pendidikan keagamaan dan sering dianggap sebagai lembaga pelengkap (suplemen) dari pendidikan formal yang ada. Penggunaan dan pilihan nama 'madrasah' sebagai identitas lembaga pendidikan merupakan realitas simbolik dengan segala implikasinya menarik saya untuk mencermati secara antropologis realitas simbolik nama itu dikaitkan dengan struktur sosial, praktik sosial, eksplanasi agama dan kemungkinan-kemungkinan lain yang terkait dengan kajian ini. Pergumulan pemaknaan lembaga pendidikan bernama madrasah dalam memerankan fungsinya telah mengalami proses yang panjang dalam konteks pendidikan di Indonesia. Madrasah yang awalnya merupakan satu langkah modernisasi

---

<sup>16</sup> Siswa madrasah berdasarkan data EMIS tahun 2007, siswa tingkat MI/SD berjumlah 2.870.839 anak, siswa tingkat MTs/SMP berjumlah 2.347.186 anak, siswa tingkat MA/SMA sebanyak 855.553 siswa (EMIS, 2007)

pendidikan tradisional bernama pesantren, kini dengan nama yang sama telah menjadi salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui dan dituntut siap bersaing dengan sekolah formal lainnya.

Persoalan kompleks terjadi, seiring perkembangan teknologi informasi yang telah berkembang sedemikian rupa sehingga madrasah harus berhadapan dengan budaya yang disebut globalisasi. Globalisasi telah menciptakan suasana sedemikian rupa yang memaksa seorang individu atau sebuah institusi bisa tercerabut dari akar historisnya dan terjebak dengan kultur instans budaya global. Bagaimana nasib institusi bernama madrasah dalam konteks globalisasi ini?. Mampukah madrasah bertahan, beradaptasi atau bahkan kemungkinan-kemungkinan madrasah berimprovisasi dalam rangka mempertahankan diri?<sup>17</sup>

## **2. Globalisasi Pendidikan: Sebuah Konteks**

Kazamias (2001) menyebutkan bahwa di era globalisasi pendidikan seakan berada di persimpangan. Menurutnya, di satu sisi pendidikan secara ideal ditujukan untuk membentuk pribadi yang berpuncak pada kesempurnaan pikiran dan jiwa, di sisi lain tuntutan pasar menghendaki pendidikan diarahkan pada produksi pengetahuan instrumental dan penguasaan ketrampilan-ketrampilan khas pasar. Kazamias mempermasalahkan peta dunia pendidikan setelah mengalami globalisasi. Dunia pendidikan, dimulai dari pendidikan dasar hingga universitas, sebagai institusi sosial budaya dan berperan signifikan dalam masyarakat demokratik modern mengalami perubahan identitas dan peran

---

<sup>17</sup> Azra (2000: 16-20) menyebutkan faktor-faktor yang menghambat proses modernisasi pendidikan Islam di Indonesia: 1) lemahnya masyarakat ilmiah, seperti kenyataan bahwa mayoritas mahasiswa muslim lebih berminat pada bidang-bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial daripada sains dan teknologi; 2) kurang integralnya kebijakan sains nasional yang terjadi karena kurangnya dialog dan koordinasi yang kontinyu antara badan sains dengan bidang ekonomi; 3) tidak memadainya anggaran penelitian, yang pada umumnya dialami oleh Negara miskin dan berkembang; 4) kurang kesadaran di kalangan sector ekonomi tentang pentingnya penelitian ilmiah, yang mengakibatkan ketergantungan kepada pengimporan tenaga ahli dan spesialisasi asing; 5) kurang memadai fasilitas perpustakaan, dokumentasi, dan pusat informasi; 6) isolasi ilmuan, terjadi karena jarang mereka berinteraksi dengan kaum ilmuan Negara-negara maju; dan 7) birokrasi, restriksi dan kurang insentif merupakan hal-hal umum yang terjadi dalam pemerintahan.

mereka. Dari aspek sosial kultural, peran utama pendidikan sebagai pembentukan pribadi dan warga yang berpuncak pada 'pikiran dan jiwa', telah bermetamorfosis ke arah produksi pengetahuan instrumental dan penguasaan ketrampilan-ketrampilan khas pasar.

Kazamias menggambarkan fenomena dunia pendidikan yang harus mengikuti kecenderungan globalisasi ini mirip dengan cerita legenda Yunani, Agamemnon. Dalam cerita itu, Agamemnon yang berambisi menakhlukkan Troy harus menghadapi kenyataan alam yang tidak mendukung, yaitu gelombang laut yang tidak bersahabat. Maka untuk menjinakkan laut itu, Agamemnon harus mengorbankan anak perempuannya Iphigenia untuk dibunuh di altar pemujaan. Setelah anaknya dikorbankan, dan beranggapan para dewa telah merestui, maka penakhlukkan Troy pun dilakukan. Untuk kepentingan hal yang dianggap besar, maka mengorbankan anak manusia dianggap sesuatu yang wajar. Gambaran ini mirip yang menimpa dunia pendidikan, atas nama globalisasi, pendidikan yang mengikuti kecenderungan global dianggap wajar saat ini. Bagi Kazamias, pendidikan yang mengikuti tuntutan arus globalisasi adalah suatu tragedi.

Memahami sejarah dunia pendidikan, kita perlu mengetahui isu-isu utama yang berkembang sepanjang sejarah pendidikan. Untuk itu kita perlu membaca tulisannya Denis Lawton dan Robert Cowen (2001) yang telah membuat periodisasi sejarah kecenderungan pergerakan dunia pendidikan, dengan referensi dunia Barat. Menurutnya, secara singkat bisa dipaparkan bahwa kecenderungan pendidikan pada periode awal masih didominasi pandangan agama dan pandangan dunia (sampai abad 19). Periode berikutnya berkembang wacana baru dalam pendidikan bersamaan dengan munculnya fenomena nation state, pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai citizenship dan nasionalisme. Periode berikutnya berkembang wacana pendidikan yang berorientasi ekonomi. Dalam orientasi pendidikan ini sesuai dengan prinsip ekonomi maka dikembangkanlah nilai-nilai efisiensi dan efektifitas. Periode berikutnya, menyadari dampak dari teknologi informasi yang telah melahirkan fenomena

globalisasi, maka pendidikan dituntut untuk mengembangkan nilai-nilai baru yang lebih humanis seperti munculnya kesadaran baru untuk mengembangkan moral bersama seperti 'inklusivitas', 'pluralisme' dan 'kesamaan kesempatan.'

Menon (2007) menyebutkan meski globalisasi telah melahirkan berbagai hal negatif seperti komersialisasi pendidikan, ternyata ada beberapa keuntungan globalisasi bagi dunia pendidikan seperti munculnya kesadaran ketertinggalan praktik dunia pendidikan sejauh ini dan tuntutan pendekatan pendidikan yang lebih efektif dan memacu kompetisi.

Beberapa kecenderungan dunia pendidikan dalam konteks globalisasi, Burbules dan Torres (2000: p. 18) menyebutkan kecenderungan diantaranya: 1) meningkatnya beberapa kebijakan populer seperti privatisasi, pilihan, dan desentralisasi sistem pendidikan yang menjadi arah pembentukan pendidikan dan pencapaian riset berbasiskan organisasi rasional dan teori manajemen; 2) meningkatnya peran organisasi pendidikan baik nasional maupun internasional, termasuk organisasi guru, organisasi orang tua dan gerakan sosial; 3) meningkatnya tawaran beasiswa bagi pelajar berdasarkan kelompok, kelas, negara (terkait tema misalnya multikulturalisme, permasalahan identitas, teori kritik, feminisme, poskolonialisme, komunitas diaspora dan gerakan sosial baru.

Beberapa pemikir muslim lokal tentang pendidikan mempunyai berbagai konsep tentang agenda penting madrasah di Indonesia. Abdurahman Saleh (2004) menyebutkan dua agenda penting yang harus dihadapi oleh madrasah ke depan: *Pertama*, dalam konteks globalisasi, madrasah dituntut melahirkan manusia-manusia yang kompetitif dan berdaya saing global. Negara menghadapi persaingan yang berorientasi kualitas lulusan lembaga pendidikan. Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan di negeri ini dituntut menyesuaikan dengan perkembangan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Kedua*, dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, madrasah dituntut mengembangkan semangat desentralisasi ini dalam bentuk

pengembangan lembaga pendidikan yang lebih demokratis, berbasis pada masyarakat.

Azra (2005) mengungkapkan bahwa untuk menjadi lembaga pendidikan yang berdaya, madrasah perlu terus diperjuangkan masuk menjadi arus utama (*mainstream*) pendidikan nasional. Usaha pengarus utamaan (*mainstreaming*) madrasah sejauh ini dengan lahirnya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 telah dan baru berhasil di tingkat produk hukum/perundangan dan kerangka ideal isi umum pendidikan. Usaha pengarus utamaan madrasah ini belum diikuti kesuksesan dalam hal penganggaran, demikian juga dalam kualifikasi guru. Akibatnya madrasah masih sering terkesan menjadi lembaga pendidikan kelas dua.

### 3. Madrasah Pembangunan Ciputat: Sebuah Fenomena

Gambaran umum madrasah di Indonesia adalah fenomena lembaga pendidikan yang memprihatinkan: 90 % madrasah adalah swasta; 90 % madrasah berada di desa; 90 % pendukung madrasah adalah masyarakat miskin.<sup>18</sup> Bisa dibayangkan bahwa karena kebanyakan madrasah didirikan oleh masyarakat dengan swadaya dan berkembang sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat menyediakan sarana prasarana, maka madrasah di berbagai tempat, terutama di pedesaan-pedesaan berjalan dengan tertatih dengan sarana prasarana seadanya.<sup>19</sup>

Beberapa tulisan mengenai madrasah sering menyoroti belum suksesnya lembaga pendidikan madrasah dalam membangun daya saing (Supriyoko, 2004; Saifudin, 2004; Djunaidi, 2005; Dahrman, 2002; Musahadi, 2002; Fata, 2006). Ada

---

<sup>18</sup> Yahya Umar, Mantan Dirjen Pendidikan Islam Dep. Agama RI (periode 2004-2007), menyebutkan kondisi memprihatinkan dari dunia madrasah. Tentu saja angka ini tidak tepat benar, tapi gambaran makro dunia madrasah di Indonesia kurang lebih seperti itu. Dalam sebuah Seminar Pendidikan Islam, Januari 2009 di Hotel Mercury di Ancol Jakarta Utara

<sup>19</sup> Data tahun 2004 menunjukkan bahwa ruang kelas di madrasah se-Indonesia yang layak untuk digunakan hanya sebanyak 55,2 %. Sedangkan sisanya sebanyak 47,8 % pembelajaran madrasah dilakukan di ruang kelas yang kurang memadai atau menggunakan 'kelas siang'. (Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan, tahun 2004).

dua penyebab utama madrasah menjadi lembaga pendidikan yang tertinggal. Pertama, sebab internal adalah kurangnya daya pendukung baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), minimnya daya pendukung keuangan, dan lemahnya manajemen organisasi (Saifudin, 2004; Djunaidi, 2005). Kedua, sebab eksternal, yaitu sikap diskriminatif pemerintah yang membedakan perlakuan antara sekolah umum dengan madrasah baik dalam pembinaan maupun dalam bantuan keuangan, di mana sekolah umum lebih diutamakan (Dahriman, 2002; Musahadi, 2002; Fata, 2006).

Namun dibalik gambaran madrasah yang terbatas itu, dihubungkan dengan konteks global, belakangan muncul beberapa madrasah saat ini yang berhasil muncul sebagai lembaga pendidikan yang unggul, diminati oleh masyarakat bahkan masyarakat berlatar belakang ekonomi menengah di perkotaan. Beberapa madrasah seperti itu tidak hanya madrasah negeri seperti Madrasah Insan Cendekia Serpong, Madrasah Insan Cendekia Gorontalo, Madrasah Aliyah Negeri I Malang; tetapi juga madrasah swasta seperti: Madrasah Pembangunan Ciputat Tangerang, Madrasah Asih Putera Cimahi Bandung, Madrasah Amanatul Ummah Surabaya. Dari beberapa contoh ini, saya tertarik untuk mengkaji madrasah swasta, mengingat adalah wajar kalau lembaga pendidikan berstatus negeri itu lebih maju karena memang anggaran operasionalnya ditanggung oleh Negara, namun apabila ada madrasah swasta berhasil menarik masyarakat perkotaan, adalah sebuah catatan tersendiri.

Untuk kepentingan penelitian ini saya menetapkan salah satu madrasah swasta, yaitu Madrasah Pembangunan Ciputat Tangerang sebagai obyek dalam studi kasus madrasah menghadapi globalisasi pendidikan. Dasar pertimbangan pemilihan ini adalah: *pertama*, Madrasah Pembangunan berada di lingkungan ibukota Negara RI, Jakarta. Keberhasilan madrasah swasta di ibukota adalah kasus yang menarik dicermati, bagaimana para aktor didalamnya mengembangkan model pendidikan yang diminati oleh masyarakat perkotaan; *kedua*, Madrasah Pembangunan dari kajian awal saya telah melakukan beberapa langkah dalam

menghadapi globalisasi pendidikan seperti mengikuti penilaian ISO 9000, pengembangan website yang bisa diakses secara global, dan beberapa bentuk usaha lain yang searah dengan usaha merespon globalisasi.

## **B. Permasalahan Penelitian**

Madrasah di Indonesia secara umum sering dilihat sebagai lembaga pendidikan formal kelas dua yang tingkat kompetitifnya di belakang jenis lembaga pendidikan lain. Satu prediksi, banyaknya persoalan yang mengitari madrasah menjadi sebab mengapa lembaga pendidikan ini berat untuk bersaing dengan jenis lembaga pendidikan lain. Persoalan-persoalan itu antara lain label madrasah yang mengharuskan lembaga pendidikan ini memberikan materi pelajaran agama dalam porsi lebih yang kadang dipahami membebani peserta didik, hegemoni Negara dalam pendidikan nasional yang menuntut standarisasi dalam ukuran negara, sikap diskriminasi birokrasi pendidikan di pemerintah daerah yang sebelah mata dalam memberikan perhatian kepada madrasah dengan alasan lembaga ini termasuk lembaga vertikal dalam tata pemerintahan Indonesia, tantangan globalisasi yang menuntut kemampuan manajemen satuan pendidikan dalam menghadapinya. Menghadapi beberapa persoalan tersebut, studi ini bermaksud menganalisisnya dalam satu payung bahasan, yaitu madrasah dalam konteks globalisasi pendidikan.

Globalisasi pendidikan mensyaratkan beberapa kesiapan institusi pendidikan untuk menghadapinya seperti kesiapan satuan pendidikan memenuhi standarisasi yang ada baik nasional maupun internasional, kesiapan dan kemampuan praktisi pendidikan menyeleksi nilai-nilai baik global maupun lokal untuk didiseminasikan kepada anak didik, kesiapan satuan pendidikan membangun image lembaga pendidikan yang berhasil di tengah keterbukaan media dan informasi. Institusi pendidikan di dalam konteks globalisasi pendidikan dituntut mengembangkan sistem pendidikan yang melahirkan lulusan yang berdaya saing dan kompetitif.

Di balik stereotipe umum mengenai madrasah 'yang serba tertinggal', ternyata ada beberapa madrasah yang mampu menarik minat masyarakat kelas ekonomi menengah di perkotaan dalam menyekolahkan anaknya. Salah satu madrasah yang dimaksud adalah Madrasah Pembangunan Ciputat Tangerang Selatan yang dijadikan obyek studi ini. Dalam studi awal (*pre-research*) peneliti, madrasah Pembangunan menunjukkan bahwa lembaga pendidikan ini mampu keluar dari gambaran umum madrasah yang serba tertinggal, lembaga ini berhasil memajukan diri (berprestasi), menjadi lembaga pendidikan pilihan masyarakat perkotaan. Salah satu faktor utama yang menjadi kata kunci kemajuan praktisi Madrasah Pembangunan dalam kesimpulan peneliti adalah 'kesadaran identitas' pelaku pendidikan madrasah ini dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Berangkat dari konteks seperti itu, permasalahan penelitian dirumuskan untuk mengetahui mengapa Madrasah Pembangunan dapat menjadi 'madrasah unggul' yang diminati oleh masyarakat ekonomi kelas menengah perkotaan. Kasus ditelusuri dari tema 'identitas' sebagai pintu masuk memahami madrasah dalam memposisikan institusi ini diantara beberapa kepentingan yang hadir seperti agama, Negara, globalisasi dan kompetisi antar jenis dan satuan lembaga pendidikan. Selanjutnya rumusan permasalahan dirinci dalam pertanyaan: 1) Bagaimana identitas dikonstruksi oleh para pendukung lembaga pendidikan Madrasah Pembangunan?; 2) bagaimana lembaga pendidikan Madrasah Pembangunan mengambil posisi (*positioning*) diantara kepentingan-kepentingan dan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi proses pendidikan?; dan 3) strategi apa saja yang dilakukan penyelenggara Madrasah Pembangunan dalam mensikapi tantangan global dan menjadikan lembaga ini berdaya saing?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan teoretik dan tujuan praktis. Tujuan teoretis penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konstruksi identitas yang terjadi pada satuan pendidikan bernama madrasah, dengan mengambil fenomena

Madrasah Pembangunan Ciputat Tangerang Selatan dalam konteks menghadapi globalisasi pendidikan.

Tujuan praktis penelitian ini adalah, selain untuk memenuhi tugas akhir pendidikan S3 penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan para praktisi madrasah dalam memperkaya wawasan dan mengembangkannya dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengembangan madrasah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat untuk melihat bentuk-bentuk atau konsep-konsep seputar penyelenggaraan satuan pendidikan dalam konteks teoretik maupun konteks praktis (terapan). Dari konteks teoretik, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui konsep-konsep yang terkait dengan usaha memposisikan diri (*positioning*) sebuah institusi pendidikan dalam konteks globalisasi pendidikan. Konsep-konsep itu berguna bagi usaha penyediaan bahan untuk ditelaah ulang, dikaji dan diteliti untuk penyempurnaan dan atau untuk melengkapi dari konsep-konsep yang telah ada.

Dalam konteks praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memetakan apa saja yang perlu dilakukan oleh satuan pendidikan dalam mengantisipasi atau memposisikan suatu lembaga pendidikan dalam konteks globalisasi. Peta yang dihasilkan sangat berguna bagi siapa saja baik praktisi pendidikan maupun pemerhati pendidikan dalam melihat konteks permasalahan pendidikan hubungannya dengan globalisasi pendidikan.

#### **E. Kerangka Analisis**

Penelitian tentang madrasah di Indonesia, terkait dengan isu globalisasi pendidikan, menurut penulis belum banyak dilakukan. Beberapa hasil penelitian mengenai madrasah di Indonesia yang telah dibukukan baik dari penulis luar maupun dalam negeri dapat disebutkan antara lain: Karel A. Steenbrink, *Pesantren,*

*Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern (1974), Maksun, Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya (1999), Supiana, Sistem Pendidikan Madrasah Unggulan (2007), Rahmat Rais, Modal Sosial sebagai Strategi Pengembangan Madrasah (2009).*

Karel A. Steenbrink (1974) secara garis besar belum banyak bicara tentang isu globalisasi. Buku ini termasuk buku awal yang mengkaji tentang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, termasuk madrasah di dalamnya. Steenbrink menggambarkan bahwa ada dua pandangan apresiasi kontribusi madrasah terhadap sistem pendidikan nasional. Di lingkungan Kementerian Agama, sistem madrasah dianggap merupakan sumbangan kepada bangsa baik menurut tuntutan zaman modern maupun menurut Islam, meski diakui bahwa mata pelajaran umum belum diajarkan secara optimal; sebaliknya di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, sistem madrasah sering tidak dihargai sebagai sumbangan besar terhadap sistem pendidikan. Pengakuan formal hanya dipandang sebagai konsesi kepada umat Islam saja. Ada gagasan waktu itu (tahun 1960-an) bahwa madrasah suatu saat akan dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional, dan karenanya perlu dibina dalam rangka integrasi.<sup>20</sup>

Maksun (1999) menyebutkan bahwa Madrasah secara historis adalah lembaga pendidikan yang lebih mengutamakan ilmu-ilmu agama. Namun mulai disadari mempertahankan tradisi keilmuan madrasah semata di tengah-tengah perkembangan sains modern justru dikhawatirkan akan mengancam eksistensi madrasah. Karenanya madrasah perlu menyesuaikan diri dengan pendidikan modern, sekalipun madrasah masih dituntut untuk menampilkan cirinya sendiri untuk memperhatikan ilmu-ilmu agama secara lebih proporsional. Sikap madrasah yang terlalu konservatif akan menyebabkan madrasah terasing, namun sikap madrasah yang terlalu akomodatif akan menyebabkan madrasah masuk dalam pendidikan sekuler.

---

<sup>20</sup> Tetapi sekitar tahun itu MPRS, tepatnya pada tahun 1960 dan kemudian 1963, menetapkan bahwa madrasah akan tetap berada di bawah Departemen Agama (Steenbrink, 1974: 98-99).

Maksum menyatakan bahwa dinamika madrasah di Indonesia terletak pada interaksi yang kuat antara aspek teori (pemikiran) dan aspek realita (kenyataan obyektif). Pada perkembangan dekade terakhir, aspek teori atau pemikiran itu sudah dituangkan ke dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dari kebijakan antar menteri. Sedangkan pada segi empirik (realitas), kondisi politik nasional dan kematangan sosial, ekonomi, budaya dan politik bangsa Indonesia, khususnya umat Islam menunjukkan kemajuan yang berarti. Perkembangan pendidikan Islam (madrasah) pada periode 1966-1998 menunjukkan adanya proses adaptasi yang tinggi. Jika pada masa sebelumnya, madrasah di bawah Kementerian Agama terkesan eksklusif dan cenderung asing, maka pada periode ini lembaga-lembaga pendidikan tersebut sangat intens dalam proses perkembangan dan semakin menyatu dengan pendidikan nasional.<sup>21</sup>

Supiana (2008) dalam *Sistem Pendidikan Madrasah Unggulan* mencoba mengkaji sistem pendidikan pada 3 (tiga) madrasah yang diminati masyarakat.<sup>22</sup> Dalam kajian ini, Supiana belum banyak menyinggung tentang apa yang terjadi pada madrasah terkait dengan tema globalisasi. Penulis hanya menyebutkan salah satu lembaga pendidikan madrasah unggulan, dengan contoh Madrasah Insan Cendekia Serpong, telah menetapkan tujuan pendidikan dengan standar internasional, dan mewujudkan peningkatan siswa yang berhasil pada kejuaraan olimpiade sains.

---

<sup>21</sup> Menurut Maksum (1999), ada empat aspek perkembangan di lingkungan madrasah: *Pertama*, madrasah mengembangkan kurikulum yang memberikan porsi yang cukup besar untuk mata pelajaran non-keagamaan; *Kedua*, sebagian madrasah menggunakan kurikulum yang dominan berorientasi kepada mata pelajaran keagamaan; *Ketiga*, banyak madrasah yang memanfaatkan potensi kurikulum muatan lokal untuk mengintensifkan cirri-ciri keagamaan, kejuruan, atau orientasi keilmuan tertentu; *Keempat*, murid-murid taman madrasah dapat melanjutkan ke sekolah dan perguruan tinggi di lingkungan Depdikbud (Maksum 1999: 2)

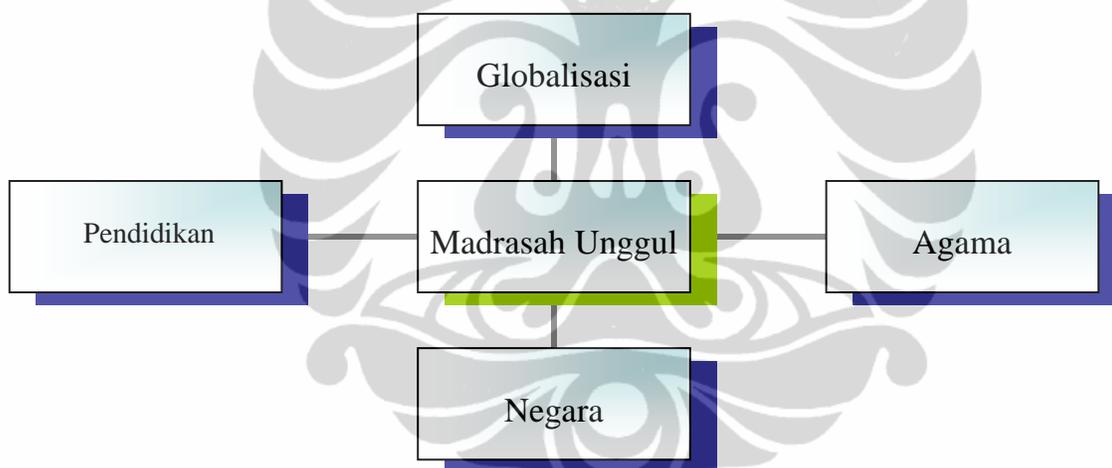
<sup>22</sup> Supiana (2008) melakukan kajian pada 3 (tiga) madrasah yang cukup diminati masyarakat, yaitu Madrasah Aliyah Insan Cendekia Serpong, Madrasah Aliyah I Bandung, dan Madrasah Aliyah Darussalam Ciamis. Dari ketiga madrasah itu, hanya Madrasah Insan Cendekia Serpong yang jelas-jelas telah menyebutkan kata internasional sebagai standar pembelajaran.

Rahmat Rais (2009), dalam *Modal Sosial sebagai Strategi Pengembangan Madrasah* mencoba memetakan bahwa belum berhasilnya lembaga pendidikan di Indonesia menghasilkan lulusan yang siap menghadapi dunia global adalah karena beberapa unsur pendidikan di lingkungan madrasah yang belum tergarap secara baik. Rahmat Rais mengidentifikasi bahwa *human capital* dan *financial capital* belum menjamin keberhasilan lembaga pendidikan. Menurutnya, modal sosial (*social capital*) adalah salah satu unsur pendidikan yang perlu dikembangkan, apalagi terkait dengan lembaga pendidikan madrasah yang mayoritas adalah swasta. Berdasarkan kajian di Madrasah Aliyah I di Surakarta, dengan mencoba melihat madrasah pasca Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 --di mana madrasah sudah mempunyai status yang sama dengan sekolah--, Rahmat Rais berkesimpulan bahwa madrasah telah memiliki beberapa modal sosial (*social capital*). Modal sosial itu berupa kepercayaan (*trust*), jaringan (*network*), dan nilai-nilai yang dimiliki bersama (*shared value*). Mengenai kepercayaan (*trust*), madrasah telah dipercaya masyarakat memberikan pembelajaran agama yang lebih bila dibandingkan dengan sekolah umum, di samping juga memberikan ketrampilan tambahan kepada murid apa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti ketrampilan mengajarkan dasar-dasar dan praktek agama secara sederhana, contohnya baca tulis al Qur'an. Mengenai jaringan (*network*), madrasah memiliki beberapa bentuk jaringan seperti komunitas pendukung di masyarakat, jaringan dengan pemerintah daerah, dan juga Kementerian Agama sebagai lembaga Pembina madrasah selain Kementerian Pendidikan Nasional. Mengenai nilai-nilai yang dimiliki bersama (*shared value*), madrasah memiliki budaya demokrasi dalam menentukan kebijakan madrasah, komunikasi kekeluargaan yang harmonis, kebebasan akademik, transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulannya, terkait modal-modal sosial yang dimiliki ini, madrasah berpotensi untuk menjadi lembaga pendidikan alternatif.

Dari peta hasil dari beberapa kajian mengenai madrasah di atas, penelitian ini mencoba menambah kajian dari sisi yaitu bagaimana ikhtiar satuan

pendidikan, yaitu Madrasah Pembangunan mencoba membangun posisi dalam rangka keluar dari gambaran umum madrasah yang serba tertinggal dan bagaimana Madrasah Pembangunan membangun posisi diantara beberapa kepentingan yang melingkupinya seperti persaingan antar satuan pendidikan, kebijakan pendidikan negara, tradisi pembelajaran agama, tantangan globalisasi, dalam upayanya menjadikan lembaga pendidikan Madrasah Pembangunan sebagai madrasah unggul. Bahasan tema-tema tersebut, terangkai dalam satu benang merah, yaitu identitas pendidikan madrasah.

### Skema 1 Kerangka Analisis Permasalahan



Untuk meneliti Madrasah dalam konteks globalisasi pendidikan, merujuk Donald Horton, ada beberapa kekuatan yang perlu dilihat dalam melihat di sekitar madrasah. Donald Horton memetakan kekuatan-kekuatan yang ada di seputar lembaga pendidikan: 1) sistem pendidikan, dalam konteks tulisan ini sistem pendidikan yang dikaji adalah sistem pendidikan yang dikembangkan lembaga pendidikan madrasah, yang memberikan porsi lebih pembelajaran agama (Agama); 2) masyarakat lokal atau orang tua siswa, dalam konteks penelitian ini adalah keberadaan orang tua siswa madrasah atau konsumen pendidikan dalam

konteks globalisasi; 3) dunia pendidikan, dalam konteks penelitian ini adalah keberadaan lembaga pendidikan di sekitar MP yang secara langsung atau tidak langsung menjadi kompetitor (Lembaga Pendidikan lain); 4) birokrasi pendidikan, dalam konteks madrasah di Indonesia adalah Kebijakan negara terhadap madrasah (Negara).

Dalam membaca proses pengambilan posisi (*positioning*) lembaga pendidikan madrasah ditelusuri dengan pendekatan teori identitas. Diskusi tentang teori identitas, Gordon Marshall merumuskan dua pendekatan utama memahami identitas: psikhodinamis dan sosiologis. Pokok utama dari kedua pendekatan itu adalah diskusi menghadapi pendekatan esensialis yang membangun asumsi bahwa identitas adalah sesuatu yang unik, esensial dalam konteks 'sesungguhnya saya (*real me*)' yang koheren dan kurang lebih sama sepanjang hidup. Menghadapi asumsi ini, kedua pendekatan teori psikoanalitis dan sosiologis mengembangkan asumsi bahwa di sana terdapat variasi derajat yang menunjukkan bahwa identitas adalah entitas yang dibentuk (*constructed*). Dalam pandangan Marshall, pendekatan psikhodinamik berkembang dari teori identifikasi Freud, di mana seorang anak manusia hadir ke dunia mengalami asimilasi dengan orang atau obyek lain, biasanya adalah superego dari orang tua. Di sisi lain pendekatan sosiologis memandang identitas sebagai sesuatu yang berkaitan dengan interaksi simbolik dan berkembang dari teori pragmatism yang dikembangkan oleh William James dan George Herbert Mead.<sup>23</sup>

Judith Friedman Hansen menyebutkan bahwa proses pendidikan mempunyai implikasi penting, yakni tidak hanya transmisi sistematis nilai-nilai pengetahuan, tetapi juga dalam pembentukan identitas baik personal maupun sosial. Identitas merujuk pada kategori-kategori yang digunakan partisipan untuk mendefinisikan seorang individu terkait dengan keberadaan kelompok ataupun

---

<sup>23</sup> Marshall, G., (1998). *Oxford Dictionary of Sociology*. New Ed., Oxford: OUP

pada kategori-kategori yang digunakan individu untuk mendefinisikan dirinya (Hansen, 1979: 145)

Kajian mengenai identitas kelompok, Harold R. Isaacs (1993) mencoba mempelajari aspek-aspek yang menjadi dasar munculnya politik identitas pada kelompok-kelompok masyarakat manusia. Dari penelitian yang dilakukan Isaacs berkesimpulan bahwa identitas kelompok dasar itu bersifat dinamis dan konstans. Identitas kelompok dasar adalah sesuatu yang hidup, bertumbuh, berubah, dan maju dengan pesat atau layu sesuai dengan peningkatan atau kemunduran vitalitasnya sendiri dan kondisi tempat identitas kelompok dasar itu berada. Bisa juga identitas kelompok dasar itu mati atau menghilang ke dalam kelompok organisme yang sedang berkembang, atau muncul kembali ke dalam kesatuan baru dari unsur-unsur lama yang bergabung kembali.

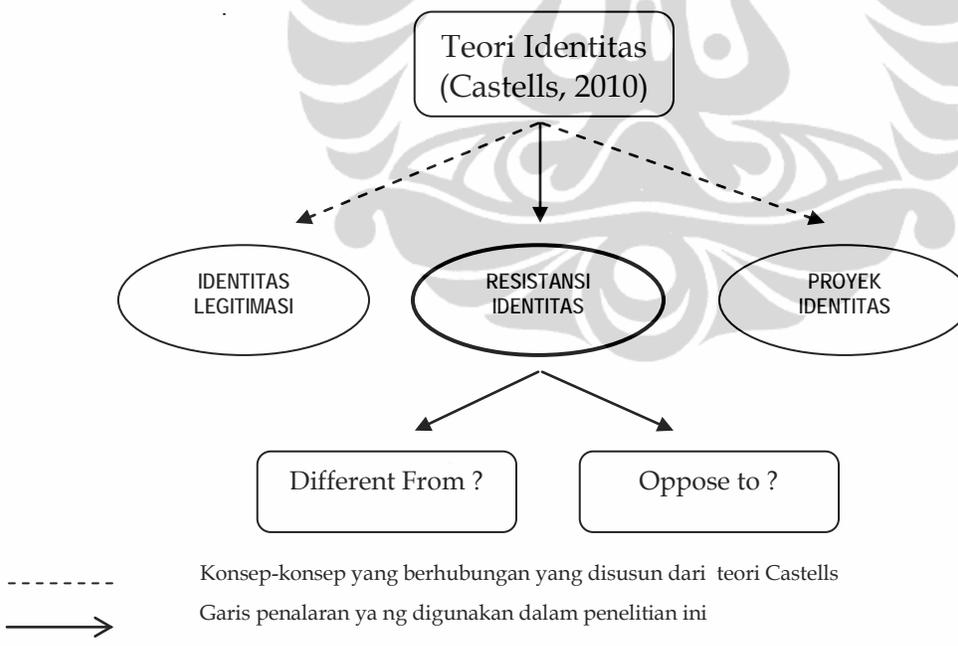
Implikasi proses pendidikan di sekolah dalam bentuk pembentukan identitas, juga dipengaruhi oleh setting lembaga pendidikan tersebut. Thomas Barfield menyebutkan setting pendidikan itu bisa terkait dengan hubungan institusi pendidikan dengan institusi-institusi lain. Thomas Barfield mencontohkan bentuk keterkaitan institusi pendidikan dengan institusi lain itu seperti institusi pendidikan dengan agama seperti yang terjadi pada masa-masa sebelum modern, keterkaitan institusi pendidikan dengan institusi ekonomi, keterkaitan institusi pendidikan dengan institusi militer (Thomas Barfield, 1977: 143-145).

Untuk melacak konstruksi identitas yang terjadi pada madrasah dengan mengambil fenomena Madrasah Pembangunan, saya mengutip Castells (2010: 8) yang menyebutkan ada tiga teori tentang identitas. Pertama, *legitimizing identity*, yaitu penguatan identitas yang dilakukan oleh institusi dominan untuk merasionalisasikan dominasi mereka berhadapan dengan kekuatan sosial lain; Kedua, resistansi identitas, yaitu penguatan identitas yang dilakukan oleh kekuatan sosial yang lemah sebagai bentuk usaha mencari pembeda dari (*differ from*) dan bentuk perlawanan (*oppose to*) dari kekuatan dominan; Ketiga, proyek identitas, yaitu penguatan identitas dengan merumuskan identitas baru bagi

kelompok tertentu untuk menjelaskan posisi mereka dan mengusahakan transformasi ke struktur sosial.

Mengingat bahwa lembaga pendidikan mempunyai fungsi pengembangan tujuan individu (*privat*) melalui proses pendidikan dan tujuan kolektif (*public*) dalam fungsi pengembangan identitas,<sup>24</sup> maka penelitian ini mencoba melacak pengembangan identitas pada pelaksanaan pendidikan dan pengembangan identitas institusi. Pemaparan tentang kedua permasalahan yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan identitas itu merupakan bentuk *positioning* madrasah dalam konteks globalisasi pendidikan. Kajian ini juga menguji teori identitas, khususnya teori Castells yang menyebutkan bahwa penguatan identitas itu ada dalam tiga bentuk (*legitimizing identity, resistance identity, project identity*).

**Skema 2. Melacak Konstruksi Identitas Madrasah  
(Disusun Berdasarkan Teori Identitas Castells)**



<sup>24</sup> Goodlad (1984) menyatakan bahwa pendidikan dilihat dari sisi orientasi, ada pendidikan yang memfokuskan pada pemberdayaan individu peserta didik atau berorientasi pada tujuan personal (*private goals*), dan ada pula pendidikan yang orientasinya memfokuskan pada pencapaian tujuan kolektif (*public goals*). Pemikiran pendidikan yang berorientasi pada tujuan personal (*private goals*), yaitu pendidikan yang mengembangkan peserta didik dalam 4 tujuan: *vocational, social, intellectual, dan personal*.

Dari teori Castells, perkiraan awal peneliti, kajian identitas pada Madrasah Pembangunan ini termasuk dalam kategori identitas yang beresistensi (*resistance identity*). Operasional jenis resistansi identitas ini adalah usaha penguatan mencari pembeda (*differ from*) dan perlawanan (*oppose to*) dari kekuatan dominan yang ada. Kekuatan dominan yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah termasuk negara dan kekuatan global. Dari kerangka konseptual seperti itu, bagaimana madrasah mereproduksi identitasnya dan mengembangkan strategi pendidikan dalam memasuki globalisasi.

Penelitian etnografi ini merujuk tehnik etnografi dalam konteks globalisasi sebagaimana diteorikan Burawoy (2000) dilakukan melalui beberapa tahapan: *Pertama*, penggambaran profil satuan pendidikan yang dijadikan obyek penelitian, dalam hal ini Madrasah Pembangunan. *Kedua*, bagaimana Madrasah Pembangunan merintis pendidikan bermutu dan bagaimana pula masyarakat madrasah menghadapi globalisasi. Deskripsi ini menjadi bahan paparan pada bab-bab berikutnya. *Ketiga*, paparan tentang konstruksi identitas yang dikaji melalui kasus utama, dan bagaimana globalisasi bisa ditangkap sebagai peluang. Tehnik ini digunakan pada pembahasan pada bab-bab bagian akhir.

## **F. Metode Penelitian Yang Digunakan**

Sesuai dengan tujuan teoretis penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konstruksi identitas yang terjadi pada satuan pendidikan bernama madrasah, dengan mengambil fenomena Madrasah Pembangunan Ciputat Tangerang Selatan dalam konteks menghadapi globalisasi pendidikan. Dengan fokus Madrasah Pembangunan Ciputat Tangerang, penelitian ini hendak mendeskripsikan permasalahan eksistensi, esensi dan substansi lembaga pendidikan madrasah tersebut dalam menghadapi globalisasi pendidikan. Pembahasan eksistensi mengarah pada upaya pelacakan *positioning* Madrasah Pembangunan terhadap globalisasi pendidikan. Pembahasan esensi mengarah pada apa saja yang menjadi

fokus permasalahan oleh praktisi Madrasah Pembangunan untuk menghadapi globalisasi pendidikan. Pembahasan substansi mengarah pada jawaban pertanyaan ke mana Madrasah Pembangunan menentukan arah pengembangan lembaga pendidikan dalam menghadapi globalisasi pendidikan.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif. Mengingat Madrasah Pembangunan terdiri dari beberapa jenjang, maka penelitian ini fokus pada kajian satuan pendidikan madrasah jenjang madrasah ibtidaiyah (sekolah dasar).<sup>25</sup> Pilihan ini diambil mengingat jenjang yang dianggap paling berhasil dari madrasah Pembangunan Ciputat Tangerang Selatan berdasarkan penelitian awal saya adalah jenjang pendidikan tingkat dasar, yaitu Madrasah Ibtidaiyah.

Penelitian ini saya mulai sejak tahun 2007, yaitu sejak disetujuinya proposal penelitian ini oleh Program Antropologi, Pascasarjana Universitas Indonesia. Untuk kepentingan penelitian ini saya kebetulan tinggal di salah satu kompleks perumahan yang tidak jauh dari lokasi. Lokasi perumahan itu dengan lokasi Madrasah Pembangunan sekitar 4 Km. Saya diuntungkan lagi karena secara kebetulan sebagian anak-anak di kompleks di mana saya tinggal banyak anak-anak yang menempuh studi di Madrasah Pembangunan. Dari lokasi ini saya bisa mengamati kesibukan anak-anak kompleks yang berangkat ke Madrasah Pembangunan, sekaligus saya dapat mengkonstruksi gambaran atau sejarah wilayah Ciputat, lokasi madrasah tersebut. Dari sini saya bisa membaca semangat orang perumahan yang secara kebetulan rata-rata dari latar belakang ekonomi menengah menyekolahkan anak mereka ke Madrasah Pembangunan.

Jenis-jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi: 1) data primer, yaitu data terkait dengan makna, persepsi pelaku dan masyarakat pendukung Madrasah Pembangunan. Data ini lebih bersifat internal, yaitu data-data yang berkaitan dengan konstruksi makna dalam satuan pendidikan

---

<sup>25</sup> Madrasah Pembangunan mempunyai tingkat madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD), Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP) dan Madrasah Aliyah (setingkat SMA).

madrasah ini; 2) data sekunder, yaitu data-data mengenai makna-makna yang terkait dengan dunia antar madrasah, sebagai data pendukung untuk memperjelas persoalan.

Pengumpulan data penelitian di lapangan meliputi dua langkah, yaitu *pertama*, wawancara mendalam. Teknik ini digunakan untuk mengetahui persepsi, interpretasi serta tindakan yang muncul. Teknik ini digunakan sebagai upaya memperjelas persoalan dan mengkonfirmasi berbagai catatan atau data peneliti. *Kedua*, pengamatan terlibat. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh informan utama dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh madrasah Pembangunan.

Sumber informasi untuk mendapatkan data secara mendalam saya memilih teknik melakukan wawancara mendalam terhadap 4 (empat) orang yang saya anggap masing-masingnya memiliki pemahaman tertentu dan merupakan perwakilan dari unsur-unsur pendukung Madrasah Pembangunan. Keempat orang itu terdiri dari unsur orang tua, guru, kepala Madrasah dan pimpinan Yayasan yang menaungi lembaga pendidikan tersebut.

Untuk orang tua murid, saya memilih Ibu Hry (39 tahun) yang berprofesi sebagai pendidik di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Data yang ingin didapatkan dari informan ini adalah data pandangan dan harapan mereka terhadap pendidikan dalam konteks globalisasi. Untuk unsur guru (pendidik), saya memilih YS (42 tahun) yang sudah menjadi guru di sana kurang lebih selama 15 tahun. Guru ini dipercaya oleh pimpinan Madrasah Pembangunan menjadi ketua pengembangan pendidikan multikultural, satu tema penting pembelajaran dalam konteks globalisasi pendidikan. Data yang ingin saya dapatkan dari informan ini adalah data tentang tentang proses diseminasi dan transformasi makna globalisasi dan pendidikan multikultural pada peserta didik. Untuk unsur pengelola, saya memilih kepala Madrasah Pembangunan jenjang dasar, Myd (40 tahun). Data yang ingin didapatkan dari informan ini adalah data tentang gambaran profil, sejarah, inisiasi program dalam pengembangan pendidikan di

madrasah tersebut. Untuk unsur organisasi sosial pendukung saya memilih Sfy (45 tahun) yang kebetulan dia adalah Ketua Yayasan Madrasah Pembangunan. Data yang ingin dapatkan dari informan ini adalah data terkait dengan gagasan dasar pengembangan lembaga pendidikan.

Di samping informan utama, saya juga melakukan penelitian dengan mewawancari informan-informan lain sebagai data tambahan untuk memperjelas beberapa persoalan, dan di sini diposisikan sebagai data pendukung. Beberapa informan pendukung ini antara lain bisa disebutkan ibu Mtq, seorang guru yang mengajar paling lama yaitu 33 tahun di Madrasah Pembangunan. Wawancara juga dilakukan pada seorang pemerhati pendidikan AS (66 tahun) yang tinggal di daerah Ciputat, dan beberapa orang yang tidak dapat disebutkan mengingat datanya yang bersifat pelengkap dan meletakkan pemahaman penulis.

Pengamatan terlibat saya lakukan dengan cara: 1) mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh keempat informan utama tersebut dalam aktifitas yang berkaitan dengan Madrasah Pembangunan; 2) mengamati keseharian praktik sosial yang terjadi di madrasah sasaran yang melibatkan pada para anggota komunitas Madrasah meliputi siswa, orang tua, guru, pengurus sekolah.

Sebagai penguatan studi kepustakaan penelitian ini, secara kebetulan saya berkesempatan untuk mengikuti *Graduate Student Fellowship Program* di *National University of Singapore* (NUS) selama tiga bulan yaitu bulan April sampai dengan Mei 2009. Kesempatan ini sangat berguna sekali bagi saya untuk mempertajam bangunan teori dari penelitian ini. Selain di dua kota yaitu Jakarta dan di Singapura, peneliti juga mengkaji madrasah secara meluas yang secara kebetulan penulis berkesempatan terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian tentang madrasah di berbagai Kota di Indonesia.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi: 1) data tentang konstruksi makna, persepsi mengenai pendidikan dan globalisasi yang terdapat pada para pelaku atau aktor serta konsumen madrasah baik itu berupa percakapan, diskursus terhadap teks maupun ekspresi-

ekspresi yang ditimbulkan. Data ini saya peroleh dengan mewawancarai secara mendalam pada informan utama Kepala Madrasah, guru, orang tua dan pengurus yayasan. 2) data tentang ruang sosial terciptanya praktik sosial yang dibentuk dan terbentuk oleh proses dialektik antara interpretasi aktor dengan norma-norma atau kaedah dan realitas yang melingkupinya. Data ini saya dapatkan dengan cara pengamatan langsung dan terlibat dalam aktivitas institusi Madrasah Pembangunan Ciputat.

Data sekunder dapat berupa data-data mengenai konsep-konsep atau makna-makna dengan tema terkait yang berada di wilayah eksternal dari konteks kajian ini. Data tersebut dibutuhkan untuk menjadi bahan penjas, pelengkap dari pembahasan laporan penelitian ini. Dalam pengumpulan data ini saya tempuh dengan menggunakan teknik: 1) studi kepustakaan (*Library Research*). Metode tersebut ditempuh untuk mendapatkan data-data selengkap-lengkapnyanya dalam memahami dan menganalisa obyek penelitian. Studi kepustakaan bisa berupa penelusuran dalam bentuk media cetak baik itu berupa buku, jurnal, koran ataupun majalah; 2) Penelitian di lapangan, yaitu dengan cara peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mengamati, mencatat dan menginterpretasikan terhadap gejala-gejala yang terjadi pada sasaran penelitian.

Beberapa perpustakaan di Jakarta dan di Singapura, sesuai dengan kesempatan yang saya peroleh pada tahun 2009, sangat membantu dalam proses penulisan dalam penelitian ini. Perpustakaan-perpustakaan itu antara lain Perpustakaan Program Studi Antropologi, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan di Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Republik Indonesia. Sedangkan di Singapura, saya sempat mengoleksi data dari beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Pusat di *National University of Singapore* (NUS), Perpustakaan di *Asian Research Institute* (ARI) di NUS, Perpustakaan di *Institute of South East Asian Studies* (ISEAS) di Singapura.

Analisa dilakukan dengan tehnik prosesual, di mana peneliti mencoba menganalisis secara mengalir mengikuti tema, konteks dan ketersediaan data yang

mendukung. Penulisan ini bermaksud melukiskan atau menggambarkan keadaan subyek penelitian berdasarkan data yang telah didapatkan. Sifat data yang digali lebih mengarah pada konsep emik, yakni membaca makna berdasarkan ukuran nilai masyarakat yang sedang diteliti (Pelto & Pelto, 1978: 55). Walaupun tidak dipungkiri dalam eksplanasi laporan ini penulis akui lebih bernuansa etik, mengingat dalam membaca kasus dalam konteks global menurut Marcus analisis cenderung berwarna etik (George Marcus, 1998). Secara terperinci peneliti ingin menguraikan hal-hal yang bersifat kualitatif mengenai image-image para praktisi madrasah yang bergerak dan berkontestasi, proses resistensi dan akomodasi terhadap kekuatan-kekuatan luar, proses kreasi dan reproduksi yang terjadi di madrasah (Burawoy et al., 2000: 5). Analisa dilakukan dengan gaya prosesualisme yang menekankan pada aspek bagaimana seseorang atau orang-orang mengkonstruksi makna. Prosesualisme dimulai dari yang partikular dan melacak bentuk relasi yang melampaui waktu dan bentuk-bentuk variasi mereka (Borofsky 1994: 352).

Sistematika penulisan setelah bab I ini, berturut-turut dipaparkan dalam tujuh bab, yang isinya dapat dijelaskan: Bab kedua berisi tentang kajian konsep kunci yang digunakan dalam penulisan disertasi ini, yaitu meliputi pembahasan sekitar globalisasi, pendidikan, identitas, madrasah dan negara. Bagian ini menjadi relasi konseptual yang menjadi ruang konteks dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Bab ketiga, berisi profil Madrasah Pembangunan Ciputat Tangerang. Pada bab ini juga dijelaskan secara umum deskripsi profil Madrasah Pembangunan, sejak kapan Madrasah Pembangunan mulai menggagas pendidikan bermutu, dan apa yang berhasil diraih oleh madrasah tersebut. Kurang lebih bab ini merupakan argumen kenapa Madrasah Pembangunan pantas dipilih sebagai objek bahasan sebagai jendela untuk memahami salah satu jenis lembaga pendidikan bernama madrasah.

Bab Keempat, bagian ini berisikan jawaban tentang bagaimana Madrasah Pembangunan berusaha keluar dari gambaran umum tentang madrasah yang tertinggal dan bagaimana para pengelola Madrasah Pembangunan memulai menggagas pendidikan bermutu (unggul) untuk menarik minat masyarakat kelas ekonomi menengah di Kota Jakarta dan sekitarnya. Bagian ini diberi judul “Merintis Lembaga Pendidikan Unggul.”

Bab kelima, bagian ini menggambarkan bagaimana Madrasah Pembangunan dalam menghadapi globalisasi pendidikan. Bagaimana strategi Madrasah Pembangunan dan membangun image (*image building*) dalam mensikapi teknologi komunikasi dan informasi yang banyak berpusat pada strategi membangun image. Langkah apa saja yang dilakukan dalam Madrasah Pembangunan dalam membangun image ini. Bagian ini diberi judul “Masyarakat Madrasah Menghadapi Globalisasi.”

Bab keenam, bagian ini merupakan analisa bagaimana konstruksi identitas terjadi pada Madrasah Pembangunan. Identitas sebagai tema oposisi dari globalisasi dilacak proses pembentukannya dalam kasus institusi satuan pendidikan bernama madrasah. Ada gejala bahwa institusi madrasah dengan nama khasnya menuntut masyarakat pendukungnya untuk menunjukkan bahwa madrasah harus mempunyai nilai lebih bila dibandingkan dengan sekolah umum. Bagian ini diberi judul “Konstruksi Identitas Madrasah.”

Bab ketujuh, bagian ini merupakan analisa terhadap strategi Madrasah Pembangunan menghadapi globalisasi pendidikan. Bab ini juga merangkai benang merah dari bab awal hingga bab terakhir, yang semuanya difokuskan dalam kajian membaca strategi yang dikembangkan Madrasah Pembangunan dalam menghadapi globalisasi. Bagian ini diberi judul “Globalisasi Pendidikan: Sebuah Peluang”

Bab kedelapan, bagian ini berisi “Kesimpulan.” Bagian ini berisikan jawaban dari permasalahan penelitian.

## BAB II KAJIAN TEORI : GLOBALISASI, PENDIDIKAN, IDENTITAS

Untuk membaca madrasah dalam konteks globalisasi pendidikan, kita perlu membaca beberapa pengertian sekitar konsep globalisasi, pendidikan, identitas, madrasah dan negara. Bab ini mencoba mengungkap beberapa konsep yang ada berdasarkan studi literatur dan merangkainya dalam alur pemikiran yang dijadikan pengantar bagi pembaca, kenapa ujung penelitian ini mengalir pada analisis politik identitas di dunia pendidikan, khususnya yang terjadi pada madrasah di Indonesia. Dimulai dari usaha penelusuran pengertian sekitar globalisasi, pendidikan dan identitas.

Dimulai dengan konsep globalisasi pendidikan, kita perlu mengenal konsep globalisasi terlebih dahulu. Manuel Castells (2000) menyebutkan globalisasi adalah sebuah bentuk dari jejaring informasi, yang berpengaruh dalam berbagai bidang termasuk pemerintahan, kebudayaan, dan struktur korporasi. Bahkan jejaring ini dapat dianggap inti dari berbagai persoalan seperti ekonomi, komunikasi, sains, dan teknologi; demikian juga globalisasi sangat menentukan semua konteks, sekaligus globalisasi mengadaptasi dan melakukan internalisasi pengaruh dari semua konteks yang dihadapi.

### **A. Globalisasi Pendidikan**

George Ritzer dan Douglas J. Goodman (Edisi 6, 2003) menyebutkan ada beberapa bentuk perpektif fokus analisa ilmu-ilmu sosial berkaitan dengan tema globalisasi, yaitu kultural, ekonomi, politik dan atau institusi. Dalam konteks kultural ditunjukkan adanya proses homogenitas atau heterogenitas terhadap kultur. Kecenderungan homogenitas ditandai adanya pemusatan perhatian sebagai kekuatan imperial pada misalnya dominannya kultur Amerika (Kuisel, 1993; Ritzer, 1995), negara-negara pusat (Hannerz, 1990). Kebalikannya, adalah munculnya kecenderungan heterogenitas ditandai dengan adanya *glocalization* di

mana dunia global dilihat berinteraksi dengan dunia lokal untuk menghasilkan suatu yang berbeda – *Glocal* (Robertson, 1992).

Dalam konteks ekonomi, terjadi homogenitas dalam bentuk penyebaran sistem ekonomi pasar ke seluruh kawasan dunia yang didukung oleh lembaga-lembaga keuangan dunia seperti World Bank, WTO, IMF. George Stiglitz (2002) seorang pemenang nobel ekonomi, mengkritik proses hegemonitas ini dan menyatakan perlunya kebijakan yang tidak seragam (*differentiated*) terhadap masyarakat manusia sebagai bentuk pengakuan heterogenitas di bidang ekonomi.<sup>1</sup> Dalam konteks institusi/politik, ada yang menekankan pada penyebaran model *nation state* di seluruh dunia, yaitu munculnya tata pemerintahan di seluruh dunia dalam model yang serupa (Meyer, 1997), ada pula pemikiran yang menekankan pada fenomena penguatan institusi dan organisasi transnasional, sehingga mengurangi kekuasaan Negara bangsa dan struktur sosial lokal (Hobsbawm, 1997 dan Appadurai, 1996).

Kellner (2002) membangun perspektif baru dalam memandang globalisasi, dia tidak lagi berpijak pada ekonomi atau teknologi semata sebagai faktor dominan dari globalisasi. Namun hubungan dialektik antara techno-sains dan ekonomi kapitalis atau tekno-kapitalisme yang menjadi kunci globalisasi. Kunci untuk memahami globalisasi adalah menyusun teori tentangnya sebagai produk dari revolusi teknologi sekaligus restrukturisasi global kapitalisme. Akan tetapi, perubahan-perubahan ini saling berkaitan dengan faktor-faktor politik dan sosial. Jadi kita harus menengok kepada hubungan dialektis antara teknologi, ekonomi, politik dan kultur. Perspektif dialektis juga terjadi dalam penyesuaian diri terhadap kesalinghubungan itu, tetapi juga konflik, kontradiksi, dan ambiguitasnya. Perspektif dialektis juga terjadi dalam ciri-ciri progresif dan

---

<sup>1</sup> Mengutip Giddens : Globalisasi ekonomi selanjutnya merupakan sebuah realitas, tidak sekedar kelanjutan atau perulangan, untuk tahun-tahun mendatang. Sementara banyak pedagang yang mempertahankan regional, di sana ada ekonomi yang sepenuhnya global pada level keuangan pasar. Namun, ide globalisasi telah disalahfahami jika ia hanya diterapkan dalam kaitan secara bahasa hanya perluasan dunia dan hanya masalah ekonomi. Globalisasi ... tidak hanya mengenai saling keterkaitan ekonomi, tetapi mengenai transformasi ruang dan waktu kehidupan kita. Implikasi berikutnya, baik ekonomi atau yang lain kalau sebelumnya mempengaruhi kita lebih langsung dan seketika. Sebaliknya, keputusan-keputusan yang kita ambil secara individual sering mempunyai implikasi di tingkat global (Giddens, 1998: 30-31).

emansipatoris dari globalisasi. Globalisasi terjadi tidak hanya dari atas, tetapi juga dari bawah (Kellner, 2002: 286).

Terkait dengan globalisasi pendidikan, Burbules dan Torres (2000) menyatakan beberapa kecenderungan penting dunia pendidikan dalam konteks globalisasi meliputi: 1) munculnya beberapa kebijakan populer seperti privatisasi, pilihan, dan desentralisasi sistem pendidikan yang menjadi arah pembentukan pendidikan dan pencapaian riset berbasiskan organisasi rasional dan teori manajemen; 2) meningkatnya peran organisasi kependidikan baik nasional maupun internasional, seperti organisasi guru, organisasi orang tua dan gerakan sosial; 3) tersedianya beberapa bentuk beasiswa berdasarkan kelompok, kelas, negara (terkait tema misalnya multikulturalisme, permasalahan identitas, teori kritik, feminisme, poskolonialisme, komunitas diaspora dan gerakan sosial baru (2000: p. 18)

Denis Lawton dan Robert Cowen (2001) telah membuat periodisasi sejarah kecenderungan pergerakan dunia pendidikan, dengan referensi dunia Barat. Menurutnya, secara singkat bisa dipaparkan bahwa kecenderungan pendidikan pada periode awal masih didominasi pandangan agama dan pandangan dunia (sampai abad 19). Periode berikutnya berkembang wacana baru dalam pendidikan bersamaan dengan munculnya fenomena *nation state*, pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai citizenship dan nasionalisme. Periode berikutnya berkembang wacana pendidikan yang berorientasi ekonomi. Dalam orientasi pendidikan ini sesuai dengan prinsip ekonomi maka dikembangkanlah nilai-nilai efisiensi dan efektifitas. Periode berikutnya, menyadari dampak dari teknologi informasi yang telah melahirkan fenomena globalisasi, maka pendidikan dituntut untuk mengembangkan nilai-nilai baru yang lebih humanis seperti munculnya kesadaran baru untuk mengembangkan moral bersama seperti 'inklusivitas', 'pluralisme' dan 'kesamaan kesempatan.'

Kazamias (2001) menyebutkan bahwa di era globalisasi pendidikan seakan berada di persimpangan. Di satu sisi pendidikan secara ideal ditujukan untuk membentuk pribadi yang berpuncak pada kesempurnaan pikiran dan jiwa, di sisi lain tuntutan pasar menghendaki pendidikan diarahkan pada produksi

pengetahuan instrumental dan penguasaan ketrampilan-ketrampilan khas pasar. Kazamias mempermasalahkan peta dunia pendidikan setelah mengalami globalisasi. Dunia pendidikan, dimulai dari pendidikan dasar hingga universitas, sebagai institusi sosial budaya dan berperan signifikan dalam masyarakat demokratik modern mengalami perubahan identitas dan peran mereka. Dari aspek sosial kultural, peran utama pendidikan sebagai pembentukan pribadi dan warga yang berpuncak pada 'pikiran dan jiwa', telah bermetamorfosis ke arah produksi pengetahuan instrumental dan penguasaan ketrampilan-ketrampilan khas pasar.

Tabel 2  
Praktek Pendidikan Dalam Konteks Globalisasi

Nama Tokoh	Praktek Pendidikan dalam Konteks Globalisasi
Waters (1995)	1) Penerjemahan ide-ide serta keyakinan-keyakinan yang terkait dengan globalisasi, yang menghasilkan bentuk sinkretisme; 2) Penguatan kembali tradisi sebagai bentuk pertahanan terhadap dampak globalisasi, yang menghasilkan fundamentalisme
Denis Lawton dan Robert Cowen (2001)	Pendidikan dituntut untuk mengembangkan nilai-nilai baru yang lebih humanis seperti munculnya kesadaran baru untuk mengembangkan moral bersama seperti 'inklusivitas', 'pluralisme' dan 'kesamaan kesempatan.'
Kazamias (2001)	Pendidikan cenderung diarahkan pada produksi pengetahuan instrumental dan penguasaan ketrampilan-ketrampilan khas pasar.
Hugh Lauder (2006)	Pendidikan pasca kolonial ( <i>post kolonial</i> ) berpusat pada keberbedaan ( <i>diversity</i> ), inklusifitas and kewarganegaraan ( <i>citizenship</i> ).

Pandangan lain, Hugh Lauder (2006) menyebutkan tema utama perdebatan pendidikan dewasa ini yang dia sebut sebagai era pasca kolonial (*post kolonial*) berpusat pada keberbedaan (*diversity*), inklusifitas and kewarganegaraan (*citizenship*). Dua kunci teoritis dan isu praktis pendidikan kontemporer, menurutnya meliputi isu demokratisasi dan perubahan ekonomi global. Dua tema ini yaitu demokratisasi dan ekonomi global berpengaruh pada dunia pendidikan ini tidak saja terjadi pada era saat ini, tetapi terjadi jauh sejak zaman kolonial (Lauder et al. 2006: 19).

Menghadapi globalisasi pendidikan, Waters (1995) mengidentifikasi adanya dua tipe respon entitas lokal yang berbeda, yaitu: 1) penerjemahan ide-ide serta keyakinan-keyakinan yang terkait dengan globalisasi, yang menghasilkan bentuk sinkretisme; 2) penguatan kembali tradisi sebagai bentuk pertahanan terhadap dampak globalisasi, yang menghasilkan fundamentalisme (Waters, 1995: 165).

Menon (2007) menyebutkan meski globalisasi telah melahirkan berbagai hal negatif seperti komersialisasi pendidikan, ternyata ada beberapa keuntungan globalisasi bagi dunia pendidikan seperti: 1) kita harus mengakui bahwa sistem pendidikan saat ini telah ketinggalan. Metode pengajaran, kurikulum, peminat, departementalisasi yang miskin inovasi; 2) pelajaran bisa dipetik dari sisi bahwa dunia bisnis dan industri mampu selalu menciptakan produk baru yang bisa menggantikan produk lama baik dari sisi penampilan, kualitas dan semacamnya; 3) globalisasi memacu pengembangan baru dalam pendekatan yang dipilih organisasi dan hal-hal yang berfungsi efektif dalam dunia kompetisi (Menon, 2007: 33)

Kazamias (2001) menyebutkan secara ideal pendidikan ditujukan untuk membentuk pribadi yang berpuncak pada kesempurnaan pikiran dan jiwa. Kazamias mempermasalahkan peta dunia pendidikan setelah mengalami globalisasi. Dunia pendidikan, dimulai dari pendidikan dasar hingga universitas, sebagai institusi sosial budaya dan berperan signifikan dalam masyarakat demokratik modern mengalami perubahan identitas dan peran mereka. Pendidikan diarahkan pada produksi pengetahuan instrumental dan penguasaan ketrampilan-ketrampilan khas pasar.

Praktisi Madrasah Pembangunan, sasaran penelitian ini, memetakan permasalahan pendidikan yang harus dihadapi ke depan, meliputi: 1) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) Globalisasi yang memungkinkan sangat cepatnya arus perubahan dan mobilitas antar dan lintas sektor serta tempat; 3) Era informasi; 4) Pagaruh globalisasi terhadap perubahan

perilaku dan moral manusia; 5) Berubahnya kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan.<sup>2</sup>

## B. Tujuan Pendidikan

Kalau menelusuri ke mana substansi tujuan pendidikan itu diarahkan. Goodlad (1984) menyatakan bahwa pendidikan dilihat dari sisi orientasi, ada pendidikan yang memfokuskan pada pemberdayaan individu peserta didik atau berorientasi pada tujuan personal (*private goals*), dan ada pula pendidikan yang orientasinya memfokuskan pada pencapaian tujuan kolektif (*public goals*). Pemikiran pendidikan yang berorientasi pada tujuan personal (*private goals*), yaitu pendidikan yang mengembangkan peserta didik dalam 4 tujuan: *vocational*, *social*, *intellectual*, dan *personal*.<sup>3</sup>

Sebaliknya, pemikiran pendidikan yang berorientasi pada tujuan kolektif/umum (*public goals*) cenderung terikat dengan kepentingan kolektifitas masyarakat tertentu seperti Negara. Negara yang cenderung menekankan pengembangan ekonomi sebagai prioritas utama akan menciptakan model sekolah yang segaris dengan tujuan Negara dalam pembangunan ekonomi. Di sinilah terjadi kenyataan antara perbedaan sekolah yang berorientasi pada tujuan individu (*private goals*) dengan tujuan umum (*public goals*) (Joel Spring, 1989: 4-5).

Dalam konteks Negara, Ickhen Safa mengangkat permasalahan tentang peran pendidikan dalam proses modernisasi dan integrasi nasional. Proses '*national building*' meliputi konsolidasi tidak hanya pada aspek material, tetapi juga dalam wilayah ideologis, penekanan tidak hanya pada usaha mobilisasi dan pengembangan sumber-sumber daya yang dimiliki Negara melainkan juga usaha pencapaian pada konsensus ideologis yang mengikat orang dalam kebersamaan

<sup>2</sup>Lihat Kurikulum MI Pembangunan UIN Jakarta, Tahun 2007

<sup>3</sup> Tujuan *vocational* bertujuan membekali peserta didik untuk kepentingan pekerjaan; tujuan *sosial* bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam kepentingan kehidupan sosial yang kompleks; tujuan *intellectual* bertujuan mengembangkan ketrampilan akademis dan pengetahuan; tujuan *personal* bertujuan mengembangkan tanggungjawab, bakal dan kebebasan ekspresi individu peserta didik.

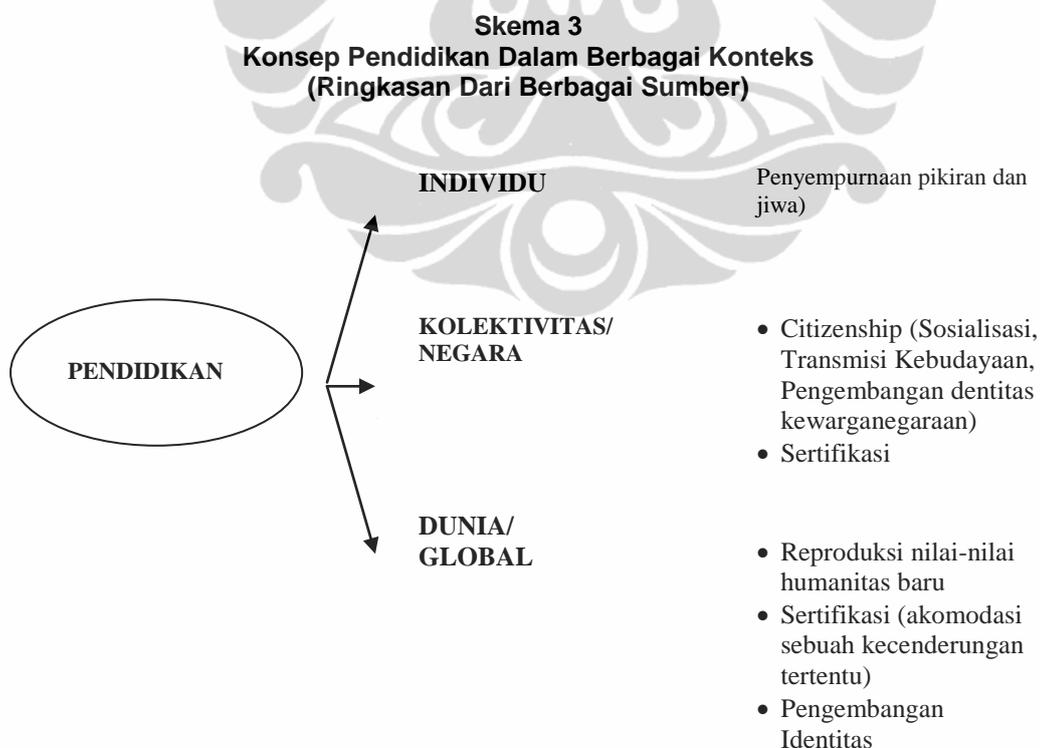
nilai-nilai dan tujuan.<sup>4</sup> Ickhen Safa mengutip salah satu antropolog yang peduli terhadap tema '*nation building*' yaitu Julian Steward (1950, pp. 107-108) yang menyatakan bahwa proses integrasi sosio kultural tidaklah hanya penyatuan sejumlah dan perbedaan aspek-aspek masyarakat, tetapi juga pada perkembangan fungsi interdependensi antar aspek itu. Dalam masyarakat kompleks, fungsi interdependensi diperankan melalui kelompok-kelompok sosial tertentu, yang disebut Steward sebagai segmen horizontal, dan melalui institusi-institusi formal Negara. Segmen-segmen horizontal itu meliputi kelompok-kelompok pekerjaan, kelas, kasta, ras, atau etnik yang melampau lokalitas dan mengikat komunitas-komunitas itu dalam subkultur-subkultur nasional baru. Institusi-institusi formal Negara itu bisa berupa keuangan, perbankan, perdagangan, sistem legal, tentara, konstitusi agama yang menciptakan masyarakat bersama dalam level nasional.

Tabel 3  
Teori Tujuan/Orientasi Pendidikan

Nama Tokoh	Teori Tujuan Pendidikan
Thomas F. Green (1971)	(a) tempat sosialisasi; (b) transmisi kebudayaan; (c) pengembangan identitas individu.
Goodlad (1984)	1. Tujuan personal ( <i>private goals</i> ), meliputi : <i>vocational, social, intellectual, dan personal</i> 2. Tujuan kolektif ( <i>public goals</i> ) seperti untuk kepentingan negara
Kazamias (2001)	Membentuk pribadi yang berpuncak pada kesempurnaan pikiran dan jiwa

<sup>4</sup> Dalam memaparkan tulisan ini, Ickhen Safa selain mengutip beberapa teori, dia menggunakan pendekatan komparasi antara dua penelitian kasus tentang posisi pendidikan dalam perubahan sosial. Dua penelitian yang dilakukan oleh Manning Nash (1965), yaitu tentang desa tertutup di Amatenango, Meksiko dengan desa Cantel di pegunungan Guatemala. Kajian ini menyebutkan peran penting pendidikan dalam proses '*nation building*', yaitu : 1) peran penting pendidikan dalam menjembatani antara komunitas tertutup dengan komunitas terbuka; 2) lembaga pendidikan yang berperan sebagai '*broker*'; 3) dalam menjalankan peran pendidikan diperlukan tambahan institusi pendukung pada sekolah; 4) pentingnya dukungan pemerintah.

Negara melakukan pendidikan secara kolektif atau massal. Thomas F. Green (1971) mengajukan pertanyaan: sebenarnya pendidikan massal itu untuk apa? Untuk kewargaan atau untuk kebutuhan sertifikasi? Dalam menjawab pertanyaan ini, Green menggunakan pendekatan historis dalam menggambarkan fungsi pendidikan, dia juga melakukan kritik di mana pendidikan tidak semata-mata berfungsi sebagai pendidikan kewargaan (*citizenship*) tetapi juga mempunyai fungsi lain. Berangkat dari permasalahan tersebut, Green kemudian mengembangkan tipologi bahwa pendidikan melayani dua kepentingan, yaitu: *Pertama*, merujuk Jefferson yang menyatakan bahwa fungsi paling fundamental dari pendidikan adalah berkaitan dengan pembangunan kewarganegaraan, pendidikan adalah usaha untuk membuat kesadaran menjadi warga yang demokratis.<sup>5</sup> *Kedua*, selain sebagai pendidikan kewargaan Green mengemukakan kenyataan bahwa pendidikan juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kemampuan sebagai bahan pertimbangan untuk pemenuhan dunia pekerjaan.



<sup>5</sup> Menurut Green (1971), dalam konteks ini, pendidikan mempunyai tiga fungsi fundamental: (a) tempat sosialisasi; (b) transmisi kebudayaan; (c) pengembangan identitas individu.

Dari berbagai teori orientasi pendidikan, peneliti merumuskan benang merah urgensi pendidikan secara umum untuk melayani beberapa kebutuhan: 1) kebutuhan individual, pendidikan dibutuhkan untuk kepentingan kesempurnaan pikiran dan jiwa manusia; 2) kebutuhan negara, pendidikan dipahami sebagai pembangunan kesadaran citizenship bagi warga bangsa dan sertifikasi sesuai tingkat pendidikan; 3) kebutuhan global, pendidikan diperlukan untuk membekali peserta didik dalam mensikapi nilai-nilai baru dari globalisasi, sertifikasi kecakapan dan pembentukan identitas.

Dari simpulan peta kebutuhan tersebut, dalam konteks globalisasi, lembaga pendidikan dituntut melakukan : 1) pensikapan terhadap nilai-nilai baru yang berkembang sebagai dampak globalisasi, di mana nilai-nilai itu sering dipandang lebih humanis dibandingkan dengan nilai-nilai lama seperti munculnya kebutuhan akan kesadaran baru untuk mengembangkan nilai moral bersama seperti 'inklusivitas', 'pluralisme' dan 'kesamaan kesempatan' (Denis Lawton dan Robert Cowen, 2001). Pensikapan dapat dilakukan dengan mengkritisi dan bersikap selektif dalam melakukan transformasi nilai terhadap peserta didik; 2) perlunya pendidikan memberikan wawasan dan ketrampilan kepada peserta didik untuk kepentingan memupuk daya saing peserta didik dalam mencari lapangan pekerjaan dan beradaptasi dengan kekuatan-kekuatan global. Dalam perspektif ini pendidikan mempunyai fungsi legitimasi akan kecakapan intelektual dan ketrampilan yang ditandai dengan pemberian sertifikat atau ijazah sebagai ukuran kompetensi seseorang; 3) pendidikan juga dituntut untuk menanamkan nilai-nilai identitas baik itu identitas kelompok, kebangsaan atau agama. Dalam konteks ini lembaga pendidikan mempunyai fungsi membentuk identitas atau jati diri siswa sesuai dengan posisi lembaga pendidikan tersebut.

### **C. Identitas: Isu Penting dari Globalisasi**

Identitas adalah salah satu konsep kungsi dan penting dalam bahasan globalisasi. Castells (2000) menyebutkan implikasi dari menguatnya globalisasi

adalah munculnya kekuatan lain dari kesadaran manusia untuk menemukan kembali 'self' atau identitas mereka. Dalam proses konstruksi identitas baik terjadi pada individu atau kolektifitas (termasuk institusi), tahap awal secara umum yang terjadi adalah proses penyesuaian dengan sesuatu yang di luar diri atau institusi. Penyesuaian itu dapat berbentuk penerimaan terhadap sesuatu yang datang dari luar ataupun sesuatu reaksi penyesuaian dalam bentuk menolak sesuatu yang datang dari luar.

Konsep identitas ternyata sering juga menjadi konsep kunci dalam pendidikan.<sup>6</sup> Konsep identitas dalam pendidikan dapat dilekatkan pada individu obyek pendidikan atau institusi pendidikan. Konsep identitas dalam kasus individu, dalam hal ini siswa, seperti yang dinyatakan Green (1971) bahwa pendidikan merupakan arena pengembangan identitas individu. Dalam perpektif Manuel Castells, konsep identitas juga dapat menyangkut sebuah institusi, seperti institusi pendidikan. Fenomena pertarungan, kompetisi antar satuan pendidikan merupakan bentuk kontestasi atas nama identitas yang ingin dijual oleh masing-masing satuan pendidikan.

Diskusi tentang teori identitas, Gordon Marshall merumuskan dua pendekatan utama: psikhodinamis dan sosiologis. Pokok utama dari kedua pendekatan itu adalah diskusi menghadapi pendekatan esensialis yang membangun asumsi bahwa identitas adalah sesuatu yang unik, esensial dalam konteks 'sesungguhnya saya (*real me*)' yang koheren dan kurang lebih sama sepanjang hidup. Menghadapi asumsi ini, kedua pendekatan teori psokhoanalitis dan sosiologis mengembangkan asumsi bahwa di sana terdapat variasi derajat yang menunjukkan bahwa identitas adalah entitas yang dibentuk (*constructed*). Dalam pandangan Marshall, pendekatan psikhodinamik berkembang dari teori identifikasi Freud, di mana seorang anak manusia hadir ke dunia mengalami

---

<sup>6</sup> Pembentukan identitas merupakan salah satu implikasi penting dari pendidikan. Judith Friedman Hansen menyebutkan bahwa proses pendidikan mempunyai implikasi penting, yakni tidak hanya transmisi sistematis nilai-nilai pengetahuan, tetapi juga dalam pembentukan identitas baik personal maupun sosial. Identitas merujuk pada kategori-kategori yang digunakan partisipan untuk mendefinisikan seorang individu terkait dengan keberadaan kelompok ataupun pada kategori-kategori yang digunakan individu untuk mendefinisikan dirinya (Hansen, 1979: 145)

asimilasi dengan orang atau obyek lain, biasanya adalah superego dari orang tua. Di sisi lain pendekatan sosiologis memandang identitas sebagai sesuatu yang berkaitan dengan interaksi simbolik dan berkembang dari teori pragmatism yang dikembangkan oleh William James dan George Herbert Mead.<sup>7</sup>

Kajian mengenai identitas kelompok, Harold R. Isaacs (1993) mencoba mempelajari aspek-aspek yang menjadi dasar munculnya politik identitas pada kelompok-kelompok masyarakat manusia. Dari penelitian yang dilakukan Isaacs berkesimpulan bahwa identitas kelompok dasar itu bersifat dinamis dan konstans. Identitas kelompok dasar adalah sesuatu yang hidup, bertumbuh, berubah, dan maju dengan pesat atau layu sesuai dengan peningkatan atau kemunduran vitalitasnya sendiri dan kondisi tempat identitas kelompok dasar itu berada. Bisa juga identitas kelompok dasar itu mati atau menghilang ke dalam kelompok organisme yang sedang berkembang, atau muncul kembali ke dalam kesatuan baru dari unsur-unsur lama yang bergabung kembali.

Implikasi proses pendidikan di sekolah dalam bentuk pembentukan identitas, juga dipengaruhi oleh setting lembaga pendidikan tersebut. Thomas Barfield menyebutkan setting pendidikan itu bisa terkait dengan hubungan institusi pendidikan dengan institusi-institusi lain. Thomas Barfield mencontohkan bentuk keterkaitan institusi pendidikan dengan institusi lain itu seperti institusi pendidikan dengan agama seperti yang terjadi pada masa-masa sebelum modern, keterkaitan institusi pendidikan dengan institusi ekonomi, keterkaitan institusi pendidikan dengan institusi militer (Thomas Barfield, 1977: 143-145).

#### **D. Negara dan Eksistensi Madrasah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

---

<sup>7</sup> Marshall, G., (1998). *Oxford Dictionary of Sociology*. New Ed., Oxford: OUP

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks pendidikan, maka butir ketiga yang berbunyi 'mencerdaskan kehidupan bangsa' menjadi inti amanat pengembangan pendidikan oleh Negara.<sup>8</sup>

Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang.<sup>9</sup> Kesatuan sistem pendidikan diperlukan untuk mengatasi adanya perbedaan jenis pendidikan seperti sekolah dan madrasah. Kedua jenis pendidikan ini harus tunduk dalam ketentuan undang-undang. Diharapkan dengan adanya kesatuan sistem, maka sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.<sup>10</sup>

Dalam konteks nasional, pendidikan di Indonesia dibangun dalam satu sistem, yaitu sistem pendidikan nasional. Kesatuan sistem ini dipandang perlu demi menegakkan Negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan keinginan itu maka kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan perlu memperhatikan asas: peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; keragaman potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; agama;

---

<sup>8</sup>Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang selanjutnya menjadi tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

<sup>9</sup> Konsideran UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, butir (b)

<sup>10</sup> Konsideran UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, butir (c)

dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.<sup>11</sup>

Tabel 4.  
Proses Integrasi Madrasah  
Ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional

TAHAPAN MOMENTUM	PROSES YANG TERJADI	CATATAN/ PERMASALAHAN
Kebijakan Menteri Agama, Fathurahman Kafrawi (2 Oktober 1946)	Departemen Agama mulai memasukkan pendidikan umum di Madrasah (Menccontoh Depdiknas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guru pelajaran umum di madrasah masih sangat terbatas</li> </ul>
Model Madrasah Wajib Belajar (MWB) tahun 1958	Depag mengembangkan pendidikan MWB dengan tehnik melaksanakan pendidikan 8 tahun, dengan kurikulum pendidikan meliputi: agama, pengetahuan umum dan ketrampilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Madrasah belum terorganisir dan terstruktur secara seragam dan standar</li> <li>Guru berkualitas rendah</li> <li>Fasilitas belum memadai</li> </ul>
Kurikulum 1973	Standarisasi kurikulum madrasah. Kurikulum memuat pelajaran agama, pelajaran umum dan kejuruan. Kurikulum diberlakukan untuk semua madrasah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kurikulum madrasah menyebabkan ada dua (dualisme) kurikulum pendidikan secara nasional</li> </ul>
SKB Tiga Menteri (Depag, Depdikbud, Depdagri), tahun 1975	Integrasi madrasah dalam sistem Pendidikan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurikulum perlu dirancang bersama antara Depag dengan Depdikbud</li> </ul>
Kurikulum 1984	Kompetensi dasar madrasah harus sama dengan sekolah umum. Lulusan madrasah bisa melanjutkan ke sekolah umum, demikian juga sebaliknya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Depag merekrut guru umum, Depdikbud merekrut guru agama.</li> </ul>
UU Sisdiknas 1989	Madrasah berdiri sejajar dengan sekolah umum. Status madrasah menjadi sekolah umum berciri khas Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Madrasah masih terkesan seperti lembaga pendidikan kelas dua, di belakang sekolah umum</li> </ul>
UU Sisdiknas 2003	Madrasah dan sekolah umum sama-sama sebagai pendidikan formal (berdiri sejajar penuh, penyebutan sekolah khas Islam dihilangkan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Madrasah yang kebanyakan swasta belum sepenuhnya mendapatkan kesamaan perlakuan dari Negara.</li> </ul>

Sumber: diringkaskan dari buku *Problematika Madrasah*. Jakarta: EMIS Direktorat Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, Tahun 2001

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 mengisyaratkan bahwa madrasah telah mempunyai kedudukan yang jelas yaitu sederajat dengan sekolah umum lainnya. Pengakuan yang lebih jelas dan tegas

<sup>11</sup> Pasal 36 ayat (3) UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003

tentang posisi Madrasah dinyatakan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pada Pasal 17 Ayat 2 dan Pasal 18 Ayat 3, yaitu: Pasal 17 ayat 2: "Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat, " Sedangkan Pasal 18 Ayat 3 yaitu, "Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. "

Pergulatan madrasah untuk masuk dalam sistem pendidikan nasional bukanlah hal yang mudah. Padahal sejarah madrasah sudah lahir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia telah jauh-jauh hari sebelum Indonesia merdeka. Perjuangan Madrasah mulai mendapatkan hasil yang menggembirakan ketika dikeluarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Turunan dari UU tersebut adalah PP No. 28 Tahun 1990 yang menyebutkan adanya pengakuan madrasah dalam sistem pendidikan nasional RI. Semula PP tersebut secara eksplisit baru menyebutkan madrasah tingkat dasar saja yaitu madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. <sup>12</sup> Sedangkan madrasah aliyah (setingkat SMA) belum disebutkan. Permasalahan itu, kemudian terselesaikan dengan munculnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/V/1992. <sup>13</sup>

Dengan pengakuan tersebut, madrasah selanjutnya dituntut melaksanakan sepenuhnya kurikulum sekolah-sekolah umum yang ada dalam naungan Kementerian Pendidikan Nasional- di samping juga tetap dituntut melaksanakan pendidikan Islam yang menjadi ciri khas pendidikan di Madrasah yang ditetapkan dalam kurikulum Kementerian Agama. Dalam UU tersebut dengan jelas memberikan pengakuan terhadap pendidikan di Madrasah yang sama persis

<sup>12</sup>Bab III Pasal 4 Ayat (3) dari PP No. 28 tahun 1990 menyatakan:"Sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama, masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah".

<sup>13</sup>Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/V/1992 tentang Sekolah Menengah Umum dalam Pasal 1 Ayat (6) disebutkan bahwa: Madrasah Aliyah adalah SMU yang berciri khas Agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama".

dengan pendidikan di sekolah dengan jenjang dan jalur yang sama pula. Sekolah dan Madrasah keduanya berusaha melaksanakan fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam UU tersebut, yakni "mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."<sup>14</sup>

Kehadiran UU no. 20 tahun 2003 telah mengangkat derajat madrasah dari label "*second class*"- dalam persepsi banyak orang - menjadi 'sama' atau sederajat dengan sekolah, minimal secara legal formalistik. Perkembangan yang terakhir ini signifikan dengan kontribusi madrasah yang besar dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa. Secara kultural, integrasi madrasah kedalam sistem pendidikan nasional, pada gilirannya menguatkan bangunan peradaban bangsa ini, karena ini berarti pendidikan bertumpu pada akar dan kesinambungan budaya (A. Malik Fadjar, 1998).

**Sejarah Integrasi Madrasah dalam Negara.** Membaca politik identitas di madrasah dalam kontek globalisasi tidak lengkap bila tanpa mengkaitkannya dengan konteks sistem pendidikan di Indonesia. Hugh Lauder (2006) melihat realitas Negara dalam kultur global masih merupakan salah satu kekuatan yang sangat berpengaruh terhadap kelompok-kelompok budaya atau institusi yang ada dalam wilayah Negara itu. Mengkaji sebuah institusi pendidikan dalam konteks globalisasi, tidak bisa lepas dari konteks nasional atau Negara di mana institusi itu berada. Dalam kultur di Indonesia, posisi Negara atau pemerintahan baik pemerintah tingkat nasional maupun pemerintah tingkat daerah dalam proses penyelenggaraan pendidikan masih dirasa mempunyai posisi yang amat kuat dan penting.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003

<sup>15</sup> Hugh Lauder (2006) menyebutkan beberapa aspek penting dari posisi Negara dalam konteks pendidikan dan konteks globalisasi yang menarik dicermati meliputi: 1) tingkat otonomi Negara

Untuk melihat secara utuh posisi madrasah dalam konteks Indonesia, kita perlu membaca sejarah relasi madrasah dengan Negara RI. Nama madrasah dipergunakan pertama kali di Indonesia adalah pada penyebutan nama lembaga pendidikan yang didirikan oleh Syaikh Abdullah Ahmad di Padang tahun 1908, yaitu Madrasah Adabiyah (Shaleh, 2004: 11-18).<sup>16</sup> Sejak itu madrasah muncul di berbagai tempat, seperti di Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Jawa.

Kalau mencermati asal muasal madrasah, madrasah di Indonesia merupakan fenomena modern yang muncul pada abad 20. Berbeda dengan di Timur Tengah, negeri asal istilah 'madrasah', di mana madrasah merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran ilmu agama tingkat tinggi, di Indonesia madrasah justru berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang melayani siswa usia sekolah di tingkat dasar dan menengah. Abdurahman Shaleh (2004) menyebutkan bahwa perkembangan madrasah diperkirakan lebih merupakan reaksi terhadap faktor eksternal, seperti munculnya pendidikan modern dari Barat. Dengan kata lain, madrasah dilahirkan dari hasil tarik-menarik antara pesantren sebagai lembaga pendidikan asli (tradisional) di satu sisi<sup>17</sup> dengan pendidikan Barat (modern) di sisi lain.<sup>18</sup>

---

dalam kebijakan pendidikan dalam konteks ekonomi dan budaya globalisasi; 2) tingkat perubahan kebijakan Negara, tingkat independensi berbagai kebijakan dalam konteks global, yang mempengaruhi mereka untuk mensikapi isu seperti kemiskinan anak dan kompetisi kepercayaan yang berpengaruh besar pada ketidaksetaraan dan kesempatan; 3) respon Negara terhadap tuntutan kompetisi ekonomi global, yang Nampak pada asosiasi kebijakan dengan ajaran pendidikan; 4) efektifitas agen global, seperti WTO, OECD dalam mensikapi isu-isu ekonomi dan ketidaksetaraan pendidikan (Lauder, 2006: 7)

<sup>16</sup> Sumber lain menyebutkan Syeh Zainudin Labai sebagai orang pertama yang mendirikan madrasah di Padang Panjang pada tanggal 10 Oktober 1915. Lihat Maksum (1999). *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. h. 7.

<sup>17</sup> Pesantren adalah lembaga pendidikan agama yang berada pada kepemimpinan kyai, dan mengkonsentrasikan pembelajarannya pada ilmu-ilmu agama. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang mencoba menggabungkan adanya pendidikan agama dan pendidikan umum sekaligus. Madrasah bisa dikatakan sebagai usaha modernisasi lembaga pendidikan Islam.

<sup>18</sup> Maksum (1999) menyebutkan bahwa madrasah di Indonesia lahir dari dua situasi yaitu perkembangan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia dan respon dari sistem pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 82

Madrasah selain dari sisi nama berasal dari timur tengah dan secara kelembagaan awalnya mempunyai misi yaitu mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, dalam konteks keindonesiaan madrasah lahir dan berbentuk sebagai lembaga adaptasi dan perpaduan antara lembaga pendidikan tradisional dengan pendidikan Barat. Madrasah juga telah berjalan di masyarakat dalam rentang waktu yang cukup lama dengan berbagai pola relasi yang dirasakan oleh para pelaku pendidikan di madrasah baik itu ketika zaman kolonial, masa kemerdekaan awal/orde lama, orde baru maupun masa reformasi. Berikut gambaran yang disarikan dari tulisan Abdurahman Shaleh (2004) berbagai perlakuan yang diterima oleh praktisi madrasah dalam sejarah.

*Masa kolonial*, Madrasah oleh penjajah Belanda diperlakukan sebagaimana pendidikan rakyat pribumi lainnya seperti pesantren, langgar, surau, di mana lembaga-lembaga itu dianggap merupakan pendidikan partikelir atau pendidikan liar. Oleh karena itu, menurut pemerintah kolonial madrasah tidak perlu dibantu atau usaha diperbaiki. Justru yang ada di kemudian hari adalah adanya usaha-usaha pengawasan terhadap lembaga pendidikan seperti itu dengan munculnya peraturan-peraturan mengenai persekolahan seperti (Stbl 1818 No. 4), yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

Kebijakan pendidikan kolonial yang mulanya dilaksanakan oleh VOC dikembangkan atas dasar untung dan rugi secara ekonomi. Pada masa Daendels, pihak kolonial hanya beranggapan bahwa hanya sekolah-sekolah pemerintah atau *staat onderwijs* saja yang mendatangkan manfaat bagi kolonial. Perkembangan terjadi setelah VOC (akibat kemunduran perusahaan) menyerahkan pengurusan Indonesia kepada pemerintah Hindia Belanda. Raja Belanda mengeluarkan keputusan No. 95 tahun 1848 yang memberi wewenang kepada Gubernur Jenderal untuk mendirikan sekolah dasar bagi anak bumi putera untuk dididik menjadi calon pegawai negeri. Kemudian keluar lagi keputusan Raja No. 25 tahun 1892 tentang diberlakukannya reorganisasi pendidikan dasar, yaitu: 1) Sekolah dasar kelas satu untuk anak-anak, para pemuda dan orang-orang terhormat bumi putera; 2) sekolahdasar kelas dua untuk anak-anak pribumi pada umumnya; 3)

Sekolah Dasar kelas satu dikembangkan untuk anak-anak Belanda dan anak bangsawan dengan dibentuk HIS (*Hollandsch Inlandsche School*).

Pada tahun 1901 datang *ethische politik* yang menggantikan model politik eksploitatif (*exploitatie politiek*). Pendidikan dikembangkan oleh pihak kolonial dalam tiga model, yaitu: sekolah untuk keturunan Eropa, sekolah untuk bumiputera golongan bangsawan, sekolah bumi putera untuk golongan rakyat biasa. Disamping pembagian itu, ada tiga penjenjangan pendidikan secara umum, yaitu pendidikan rendah, menengah dan tinggi. Pendidikan rendah meliputi sekolah rendah berbahasa Belanda (Sekolah rendah Eropa dan sekolah rendah boemi Poetra), sekolah rendah berbahasa daerah (sekolah bumi putera kelas dua atau *ongko loro* dan sekolah desa atau *Volks School*). Untuk pendidikan menengah ada *Meer Utigebreid Lager Onderwijs* (MULO) dan sekolah *Ambtenaar Middlebare School* (AMS). Sedangkan sekolah tinggi yang ada waktu itu adalah Sekolah Tinggi Tabib (Kedokteran) di Jakarta, Sekolah Tinggi Hukum di Semarang dan Sekolah Tinggi Teknik di Bandung.

Secara umum, madrasah pada masa kolonial belum mendapat perhatian sama sekali dari pemerintah kolonial. Yang ada justru peraturan-peraturan yang sifatnya membatasi karena melakukan pengaturan-pengaturan yang sifatnya mengekang seperti Stbl 1818 bahwa untuk mengadakan lembaga pendidikan harus izin berstuur; Stbl 1905: 550 memberikan pelajaran agama harus ada izin dan menyampaikan dulu tentang materi yang akan diajarkan; Stbl 1925: 219 tentang *guru ordonantie*: barang siapa memberikan pelajaran agama kepada orang lain harus seizin Gubernur Jenderal.

*Masa Kemerdekaan (Orde Lama)*, Setelah Indonesia merdeka, madrasah mulai ada sedikit perhatian dari pemerintah, namun tidak dengan sendirinya madrasah masuk dalam sistem pendidikan nasional. Perhatian pemerintah sifatnya masih sebatas dukungan moral seperti a) maklumat BP KNIP 22 Desember 1945 No. 15 Berita RI tahun II No. 4 dan No. 5 halaman 20 kolom 1 (agar pendidikan di langgar-langgar dan madrasah berjalan terus dan diperpesat); b) Keputusan BP KNIP 27 Desember 1949 agar madrasah mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah; c) Laporan Panitia Penyelidik Pengajaran RI tanggal 2 Mei 1946 yang

diketua Ki Hajar Dewantara dengan 51 anggota menyatakan: pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah dipandang perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasi serta diberi bantuan berupa biaya sesuai dengan keputusan BP KNIP.

Pada masa orde lama, pemerintah tidak menegerikan pendidikan madrasah. Hal tersebut ditegaskan dalam Pidato Kepala Jawatan dan Pendidikan Agama (Japenda) pada Konferensi Kerja, Desember 1952: *"Jadi jangan sampai kejadian Japenda bertindak mengurangi atau meniadakan inisiatif partikelir di lapangan pengajaran. Jangan mengambil over pengurusan partikelir yang berkembang untuk dijadikan madrasah, walau bernama madrasah model atau madrasah percobaan yang menjadi saingan bagi inisiatif rakyat."*

Namun pada masa ini, ada momentum penyerahan madrasah dari masyarakat ke Negara, yang di kemudian hari ini menjadi bentuk pertama dan cikal bakal sejarah penegerian madrasah. Penyerahan itu antara lain penyerahan 205 buah SRI (Sekolah Rakyat Islam) dari masyarakat Aceh tahun 1946; penyerahan 19 SRI dari Residen Lampung (1948); 1 buah Madrasah Mambaul Ulum Surakarta, warisan Kesunanan (1956).

*Masa Orde Baru*, Usaha-usaha menyatukan madrasah dalam sistem pendidikan nasional mulai dilakukan. Dimulai dengan dibukanya kemungkinan menegerikan madrasah secara terbatas yang diawali dengan Surat Menteri Agama No. 80 tahun 1967 yang menegerikan Madrasah Tsanawiyah Sabilul Muttaqin, Magetan Madiun dan Madrasah Aliyah Al Islam Surakarta. Penegerian madrasah ini dimaksudkan sebagai percontohan bagi kebanyakan madrasah yang berstatus swasta.<sup>19</sup>

Pada tahun 1975, keluar Surat Keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri yaitu antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 tahun 1975 tertanggal 24 Maret 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan madrasah. Keputusan ini merupakan

---

<sup>19</sup>Kebijakan penegerian madrasah dimulai dengan SK menteri Agama No. 80/1967 dan ditutup lagi dengan SK Menteri Agama No. 213 tahun 1970. jumlah madrasah yang sempat dinegerikan adalah untuk tingkat dasar 362 buah, unttuk tingkat Madrasah Tsanawiyah sebanyak 182 buah, untuk tingkat menengah atas (Madrasah Aliyah) sebanyak 43 buah.

pelaksanaan dari instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974, sesuai dengan petunjuk presiden pada sidang kabinet terbatas tanggal 26 November 1974. SKB ini berisikan: 1) ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum yang sederajat; 2) lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas; 3) siswa setingkat madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.<sup>20</sup>

**Tabel 5**  
**Perkembangan Relasi Madrasah dengan Negara**

MASA	RELASI MADRASAH-PEMERINTAH	BENTUK PENDIDIKAN MADRASAH
ERA KOLONIAL	Madrasah dianggap sebagai lembaga pendidikan partikelir/liar	Pendidikan keagamaan
INDONESIA MERDEKA (1945)/ORDE LAMA	Madrasah mulai mendapatkan perhatian pemerintah  Madrasah belum dianggap bagian dari sistem pendidikan nasional	Pendidikan keagamaan dan perlu dimodernisir  Ada momentum penyerahan madrasah dari masyarakat ke Negara (embrio pembinaan madrasah oleh negara) - Penyerahan 205 buah SRI (Sekolah Rakyat Islam) dari masyarakat Aceh tahun 1946; - Penyerahan 19 SRI dari Residen Lampung (1948); - Penyerahan 1 buah Madrasah Mambaul Ulum Surakarta, warisan Kesunanan (1956)
ZAMAN ORDE BARU	Madrasah masuk dalam sistem pendidikan nasional  Hanya sebagian kecil madrasah yang dibiayai oleh Negara sebagai percontohan	Pengakuan madrasah setingkat dengan sekolah umum melalui Surat Keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri) No. 6 tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 tahun 1975 tertanggal 24 Maret 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan madrasah. SKB itu berisi: 1) ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum yang sederajat; 2) lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas; 3) siswa setingkat madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.
ZAMAN REFORMASI (PASCA 1998)	Madrasah diakui sama dengan sekolah umum (UU Sisdiknas No. 20/2003)  Siswa madrasah mendapatkan Bantuan Operasional Siswa (BOS)	Madrasah telah menjadi sekolah umum  Pelajaran Agama untuk Madrasah tingkat dasar hanya 4 jam dalam seminggu

<sup>20</sup>Kebijakan peningkatan mutu pendidikan pada madrasah agar sama dan sederajat dengan sekolah umum, diikuti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama RI No. 70 tahun 1976 tentang persamaan tingkat/derajat madrasah dengan sekolah umum.

*Orde Reformasi (Pasca 1998)*, Perkembangan madrasah di Indonesia telah mengalami adaptasi sedemikian rupa sehingga akhirnya madrasah kemudian menjadi sekolah formal yang diakui oleh Negara, sejajar dengan sekolah umum, melalui UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003. Sejak itu lembaga pendidikan madrasah di Indonesia telah disamakan statusnya dengan sekolah umum (SD, SMP, SMA). Pendidikan di madrasah terdiri dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk tingkat pendidikan dasar; sedangkan pada tingkat pendidikan menengah di sana ada Madrasah Aliyah (MA).

**Desentralisasi Pendidikan.** Sirozi (2005) menyebutkan salah satu agenda pendidikan di Indonesia saat ini adalah adanya desentralisasi pendidikan.<sup>21</sup> Desentralisasi pendidikan merupakan penyerahan kewenangan pembinaan lembaga pendidikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pada era desentralisasi, sekolah-sekolah yang berada dalam pembinaan kementerian pendidikan nasional diserahkan pada daerah pemerintahan kabupaten/kota, dan berimplikasi pada pembiayaan yang diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Kebijakan desentralisasi telah memunculkan permasalahan yang erat kaitannya dengan pembiayaan pendidikan.

Desentralisasi pendidikan menjadi permasalahan baru bagi madrasah. Desentralisasi pendidikan bagi dunia madrasah dirasakan dampaknya sebagai bentuk marginalisasi madrasah. Abdul Aziz (2005) menyatakan ketika pengelolaan pendidikan didesentralisasikan dan dikelola dengan anggaran APBD, secara umum dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan desentralisasi pendidikan sebagaimana dimaksudkan oleh UU No. 22 tahun 1999 masih menyisakan banyak persoalan, terutama koordinasi antara pusat dengan daerah. Dalam catatan hasil pembahasan sidang tahunan MPR RI 2001 disebutkan bahwa "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan

---

<sup>21</sup>M Sirozi (2005) menyebutkan agenda utama dunia pendidikan di Indonesia pasca reformasi politik 1998 adalah globalisasi, demokrasi dan desentralisasi.

Daerah, khususnya mengenai kewenangan bidang pendidikan, belum terrealisasi sebagaimana mestinya sehingga pemerintah daerah belum merasa bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan di daerah. "Lima tahun setelah sidang tersebut berlalu, tentu telah terjadi banyak perubahan dalam hal koordinasi ini. Akan tetapi dalam konteks madrasah, komplikasi persoalan koordinasi sangat menentukan sikap pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah.

Sejauh ini, umumnya pemerintah daerah belum mau sepenuhnya membantu membiayai madrasah. Ini sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh para guru di lingkungan madrasah, padahal mereka sama-sama pelaksana pendidikan formal. Apalagi terjadi di beberapa daerah, pemerintah setempat memberikan tambahan uang kesejahteraan pada guru-guru di lingkungan diknas, sementara guru-guru di lingkungan Kementerian Agama tidak mendapatkan bantuan kesejahteraan sama sekali.<sup>22</sup>

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, meskipun inti dari UU tersebut adalah berkaitan dengan Pemerintah Daerah, namun ternyata ada beberapa pasal yang memungkinkan pendidikan madrasah mendapatkan layanan pemerintah daerah, diantaranya; Pasal 13 "*Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi (f) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial*". Pasal 14 "*Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi; (f) penyelenggaraan pendidikan*". Selain itu, pada Pasal 22 disebutkan bahwa "*Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban; (a) melindungi masyarakat, menjaga persatuan,*

---

<sup>22</sup>Padahal dalam UU No. 20 tahun 2003, terdapat hak dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Pasal 10 "*Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"; Pasal 11 ayat (1) "*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi*"; ayat (2); "*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun*"; Pasal 46 ayat (1) "*Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat*" ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

*kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; (c) mengembangkan sumber daya produktif di daerah.*

Undang-undang berwajah ganda. Di satu sisi, UU Sisdiknas No. 23/2003 menyiratkan semua kegiatan penyelenggaraan pendidikan terkena desentralisasi, tetapi di sisi lain UU Pemerintahan Daerah No. 22/1999 menyiratkan bahwa agama tidak termasuk bidang yang didesentralisasikan. Madrasah masih sering dipersepsikan sebagai persoalan agama, padahal Undang-undang telah menyebutkan bahwa madrasah adalah pendidikan formal. Dampak dari pemahaman bahwa madrasah merupakan persoalan agama yang diurus Pusat menyebabkan banyak madrasah di sejumlah daerah kabupaten/kota yang belum diterima secara bulat sebagai asset daerah dalam bidang pendidikan. Implikasinya, kebijaksanaan pemerintah daerah yang bersangkutan tidak menyentuh kepentingan madrasah, utamanya dalam penyediaan anggaran pendidikan.

Respons Kementerian Agama sendiri terhadap isu desentralisasi bidang pendidikan tertuang dalam surat Menteri Agama Nomor: MA/402/2000 tanggal 21 Nopember 2000 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, serta Menpan dan Gubernur seluruh Indonesia. Surat Menteri Agama itu berisi penegasan bahwa kewenangan penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah umum dan penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah diserahkan kepada kabupaten/kota, meliputi aspek-aspek operasional penyelenggaraan, penjabaran kurikulum, penyediaan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan anggaran. Namun surat Menteri tersebut juga menyatakan bahwa kewenangan lain di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam PP No 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom Bab II pasal 2 ayat (3) angka 11, sepanjang yang menyangkut pendidikan agama dan keagamaan masih tetap menjadi wewenang pemerintah pusat (Kementerian Agama).

Kecenderungan paling mutakhir dalam situasi di atas ialah bahwa madrasah sepertinya tetap merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dalam

konteks kelembagaan madrasah, pengelolaan yang tidak diotonomikan dan sepenuhnya tetap berada dalam kewenangan Kementerian Agama mengandung resiko kembalinya situasi lama di mana madrasah hanya mengandalkan penerimaan fasilitas pemerintah dari APBN bidang agama yang jumlahnya sangat kecil dan boleh jadi tidak memperoleh porsi memadai dalam skema rencana alokasi anggaran pendidikan 20%. Resiko lainnya ialah, madrasah juga tidak termasuk di dalam skema penyediaan fasilitas dan pendanaan pendidikan yang berada dalam kewenangan daerah otonom, sehingga Kementerian Agama di daerah-daerah memerlukan perjuangan yang keras melalui sektor agama untuk memperoleh keadilan pelayanan bagi madrasah sesuai yang diperoleh lembaga pendidikan sekolah.<sup>23</sup>

Dalam konteks ini, desentralisasi pendidikan kemudian dipahami dalam dua pengertian, yaitu: *pertama*, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (propinsi dan distrik), dan *kedua*, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah (Armida, 2000). Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Kebijakan pembangunan madrasah di lingkungan Kementerian Agama cenderung mengembangkan definisi desentralisasi pendidikan dalam makna yang kedua, yaitu pemberian wewenang yang lebih besar kepada satuan pendidikan. Sesuatu yang sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi dunia madrasah, mengingat madrasah lahir, tumbuh dan berkembang dilakukan

---

<sup>23</sup> Menteri Dalam Negeri, M. Ma'ruf, ketika ditanya mengenai sikap diskriminasi pemerintah terhadap pendidikan madrasah di forum Rakornas *Revitalisasi Pendidikan* di Hotel Sahid Jaya Jl Jendral Sudirman Jakarta (Januari 2007), diamentjelaskan justru madrasah mempunyai dua sumber pendanaan dari pemerintah. *Pertama*, dana pembinaan dari Pusat sebagai organisasi vertikal, dalam hal ini Dep. Agama; *Kedua*, dana dari dinas pendidikan di daerah, namun pengajuannya harus berdasarkan DIPA berbasis kinerja.

sendiri oleh masyarakat. Paling tidak jawaban ini bisa mengimbangi tuntutan para guru di madrasah, bahwa kementerian agama juga mengembangkan desentralisasi pendidikan ini.

### **E. Etnografi Pendidikan: Membaca Konstruksi Identitas Madrasah**

Globalisasi, suka atau tidak suka, telah memaksa dunia pendidikan untuk melakukan respon dan melakukan berbagai terobosan dalam melakukan reproduksi pengetahuan dan transformasi kesadaran manusia dalam menghadapinya. Burawoy (2000) menyebutkan adanya tiga hal yang menjadi titik fokus kajian antropologi dalam konteks globalisasi, yaitu kekuatan-kekuatan, koneksi-koneksi, dan imaginasi-imaginasi. Menurutnya, dalam melihat suatu permasalahan dalam konteks globalisasi, maka kita perlu memperhatikan: 1) kekuatan-kekuatan luar; 2) mengeksplorasi koneksi-koneksi antar situs; 3) membuka dan menyeleksi imaginasi-imaginasi dari kehidupan keseharian. Kekuatan-kekuatan, koneksi-koneksi, dan imaginasi-imaginasi menjadi tiga komponen yang esensial. Perbedaan dari tiga hal ini menjadi fokus masing-masing kasus dalam analisa global tertentu yang ditentukan oleh pengalaman globalisasi tertentu: manakala orang mengalami globalisasi sebagai sesuatu kekuatan luar maka dia akan melakukan resistensi atau akomodasi; apakah orang berpartisipasi dalam kreasi dan reproduksi koneksi-koneksi yang lintas dunia, apakah imaginasi orang bergerak dan atau berkontestasi dalam dimensi global (Burawoy et al., 2000: 5)

Kalau memetakan persoalan lembaga pendidikan dengan mengacu pada pemetaan Burawoy, kita dapat lanjutkan dengan melacak ketiga aksis tersebut pada lingkungan pendidikan madrasah. Pertama, kekuatan-kekuatan luar di lingkungan pendidikan madrasah. Mengutip Donald Horton,<sup>24</sup> antara lain berupa 1) masyarakat lokal tempat lembaga pendidikan berada. Dalam konteks ini, ada dua variasi hubungan, yaitu hubungan langsung dan hubungan tidak langsung.

---

<sup>24</sup> Donald Horton sendiri memetakan kekuatan-kekuatan yang berkontestasi dan mempengaruhi karakter lembaga pendidikan (sekolah) yang meliputi empat komponen, yaitu: 1) sistem sekolah itu sendiri, 2) masyarakat lokal, 3) pemerintah, 4) dunia pendidikan (kelompok intelektual dan profesional di bidang pendidikan).

Hubungan langsung dimaksudkan adalah orang tua murid, sedangkan hubungan tidak langsung disebutkan seperti pengaruh kelas sosial, pengaruh latar belakang agama, sistem politik pendidikan yang melekat pada masyarakat lokal, keterlibatan asosiasi profesional; 2) pemerintah, yaitu persoalan pendidikan yang berhubungan dengan persoalan ekonomi dan politik, serta birokrasi pendidikan di pemerintah; 3) dunia pendidikan, yang dimaksudkan adalah harapan-harapan terhadap dunia pendidikan yang biasanya hadir dari kelompok intelektual dan profesional di bidang pendidikan (Horton, 1971).

Kedua, koneksi antar situs. Untuk mencari makna dalam konteks globalisasi, perlu usaha memahami makna sebuah masalah dengan mengembangkan makna yang terjadi melalui kajian lintas situs. Kalau ada asumsi, kerja analisis kontruksi makna dan kebudayaan adalah (atau seharusnya) menerka makna-makna, menaksir terkaan-terkaan itu, dan menarik kesimpulan-kesimpulan eksplanatoris dari terkaan-terkaan yang lebih baik, bukan menemukan benua makna dan memetakan pemandangannya yang tak terwujud itu (Geertz).<sup>25</sup> Dalam konteks globalisasi, menurut George Marcus (1998), pendekatan Geertzian "*the thick description*" yang mengandalkan satu kasus tertentu dalam konteks globalisasi tidaklah cukup.

Dalam seting global, menurut Marcus perlu memperhatikan: 1) *Isu multi situs*, yaitu kemungkinan penelitian yang tidak hanya mengandalkan satu situs, tetapi melibatkan multi situs; 2) *Cenderung kembali ke etik daripada emik*. Dalam kajian etnografi multisite, menurut Marcus, penelitian cenderung lebih mengembangkan pemikiran etik untuk mencari persamaan dan perbedaan antar situs; 3) *Mempertanyakan konsep Kebudayaan dalam pengertian yang lama*. Menurut Marcus dalam 'proyek kedua' (sebutan untuk etnografi kembali ke negri sendiri) ada ketidaktentuan definisi kebudayaan. Marcus menyebutkan contoh etnografi Anna Tsing dan Lila Abu Lughod sebagai contoh di mana refleksi pribadi bisa

---

<sup>25</sup> Geertz menyebutkan empat ciri kajian etnografis: 1) paparan itu bersifat interpretative; 2) yang interpretative adalah aliran perbincangan sosial; 3) mencoba menyelamatkan apa yang 'dikatakan' dari perbincangan itu dari kesempatan-kesempatannya yang menentukan dan menetapkannya dalam istilah-istilah yang dapat dibaca dengan cermat; 4) mikroskopik.

menjadi sebuah karya etnografi. Mengkaji dua pendekatan itu, menurut kami bisa menjadi dua teknik kajian etnografi yang saling melengkapi.

Ketiga, Imaginasi-imaginasi dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan lembaga pendidikan, imaginasi-imaginasi yang terkait pada keberlangsungan lembaga pendidikan adalah imaginasi para aktor di lembaga tersebut. Para aktor lembaga pendidikan sangat menentukan dalam membentuk dan mempengaruhi sistem pendidikan yang dikembangkan.<sup>26</sup> Imaginasi-imaginasi keseharian para aktor pendidikan dalam mengembangkan lembaganya memasuki budaya global merupakan wajah seutuhnya dari lembaga pendidikan tersebut.

Untuk kepentingan penelitian ini, ketiga hal tersebut dipetakan dengan urutan: pertama, membaca imaginasi pelaku pendidikan Madrasah Pembangunan memahami globalisasi, termasuk implikasi nilai-nilai yang berkembang di dalamnya; kedua, melihat kekuatan-kekuatan yang terdapat di lingkungan madrasah sasaran penelitian dalam membaca strategi madrasah dalam arena persaingan; dan ketiga, melihat koneksi-koneksi yang terjadi antar situs yang terkait dengan dunia madrasah dalam membaca makna-makna yang berkembang di dunia madrasah.

Penelitian ini mengkaji apa yang dilakukan lembaga pendidikan (madrasah) dalam konteks globalisasi, yang dikaitkan dengan tema konstruksi identitas. Diskusi konseptual antara konsep globalisasi dan identitas melahirkan definisi atau konsep mengenai segala bentuk *positioning* madrasah dalam menghadapi globalisasi pendidikan. Konsep identitas menjadi titik tolak kajian untuk mengetahui bentuk dan proses reproduksi makna terkait dengan simbol intitusi pendidikan bernama 'madrasah.' Kajian ini penting mengingat keberadaan madrasah di Indonesia, menurut bacaan peneliti, adalah sebuah simbol politik

---

<sup>26</sup> Donald Horton menyebutkan ada empat faktor dinamis yang menentukan sistem di sekolah, meliputi: a) perluasan besaran, yaitu dengan bertambahnya murid, sarana prasarana dan tenaga kependidikan; b) elaborasi struktur dan fungsi, yaitu penambahan variasi posisi dan unit dalam organis asi, serta pengembangan bermacam-macam tugas dan fungsi; c) intensifikasi kinerja pendidikan, yaitu peningkatan perubahan pada performa kerja pendidikan; d) up-grading posisi, yaitu peningkatan kualitas tenaga pendidikan berdasarkan tugasnya, seperti Kepala Sekolah, Guru Pelajaran, Tata Usaha dan sebagainya.

identitas diantara nama atau jenis lembaga pendidikan lain yang ada di Indonesia.<sup>27</sup>

Castells (2010: 8) menyebutkan ada tiga teori tentang identitas. Pertama, *legitimizing identity*, yaitu penguatan identitas yang dilakukan oleh institusi dominan untuk merasionalisasikan dominasi mereka berhadapan dengan kekuatan sosial lain; Kedua, resistansi identitas, yaitu penguatan identitas yang dilakukan oleh kekuatan sosial yang lemah sebagai bentuk usaha mencari pembeda dari (*differ from*) dan bentuk perlawanan (*oppose to*) dari kekuatan dominan; Ketiga, proyek identitas, yaitu penguatan identitas dengan merumuskan identitas baru bagi kelompok tertentu untuk menjelaskan posisi mereka dan mengusahakan transformasi ke struktur sosial.

Sebelum berlanjut ke deskripsi politik identitas, kita tahu bahwa menghadapi Globalisasi banyak terkait dengan konsep perubahan dan adaptasi atau resistensi. Globalisasi pendidikan bisa disebut sebagai sebuah fenomena perubahan, dan untuk menghadapinya ada dua bentuk reaksi yaitu mengadaptasi perubahan yang terjadi atau melakukan resistensi sebagai usaha mendefinisikan diri di tengah perubahan.

Untuk membaca *positioning* sebuah subyek tertentu, ada baiknya secara selintas penulis paparkan beberapa teori dan perspektif paradigma atau pemikiran terkait dengan bagaimana sebuah subyek mengambil posisi di tengah perubahan. Paparan ini, penulis pahami sebagai interpretasi subyektif peneliti dalam mencoba menggambarkan peta permasalahan. Kita mulai dari isu adaptasi berujung pada isu resistensi.

Berangkat dari isu adaptasi, Saifudin (2005) menyebutkan beberapa bentuk proses adaptasi dalam menghadapi perubahan. Pembahasan ini penting untuk membaca beberapa bentuk adaptasi institusi pendidikan madrasah terhadap perubahan dalam globalisasi. Pertama, siklus diferensiasi yaitu proses di mana ada usaha pendefinisian persoalan dalam beberapa kategori, paling tidak

---

<sup>27</sup> Atho' Mudzhar (2003) menyebutkan beberapa bentuk atau proses pembentukan identitas yang mewarnai diskusi identitas di Indonesia, yaitu: 1) identitas terkait dengan pengelompokan primordial; 2) identitas terkait dengan keislaman; 3) identitas terkait dengan kebangkitan nasionalisme.

pendefinisian persoalan dalam pembagian dua kategori (*binary*). Kedua, siklus perubahan adaptif, yaitu ada proses penyesuaian terhadap lingkungannya. Setiap kategori dari proses diferensiasi memiliki bentuk penyesuaian kualitatif yang berbeda dalam proses adaptasi. Ketiga, siklus integrasi, yaitu dari proses diferensiasi muncul kebutuhan bersama untuk melakukan integrasi. Ada bentuk-bentuk simbol yang muncul sebagai implikasi dari keinginan berintegrasi. Keempat, siklus generalisasi nilai. Dari semua proses dan tahapan perubahan itu muncul kesadaran nilai baru yang diberlakukan secara umum untuk semua anggota kolektifitas sebagai tanda adanya perubahan.

Kajian terhadap ‘adaptasi’ dengan berbagai perubahan yang terjadi mengingatkan kita pada kajian kebanyakan pendidikan yang menggunakan pendekatan biologik organik, embrio pendekatan struktural fungsionalisme.<sup>28</sup> Pendekatan biologik organik atau struktural fungsionalisme merupakan pendekatan yang menganggap penting posisi ‘struktur’. Masyarakat sebagai suatu sistem terdiri dari struktur-struktur sosial. Ada struktur induk, dan ada struktur turunan (sub-struktur). Misalnya masyarakat Negara sebagai sebuah struktur induk, maka ada substruktur-substruktur level kedua, ketiga dan seterusnya seperti struktur politik, struktur ekonomi dan struktur lain sebagainya. Dalam perspektif penjelasan seperti inilah posisi agama dan pendidikan berada, di mana keduanya dianggap sebagai struktur pendukung dari struktur induk. Struktur agama dan struktur pendidikan dapat diposisikan sebagai sistem struktur yang berperan dalam mekanisme paradigma struktural fungsional (Saefuddin, 2005: 156-158).

Pandangan struktural fungsionalisme ini cenderung mengedepankan keteraturan sosial sebagai pencapaian sistem baku –baik pencapaian tata kebudayaan maupun simbol-simbol kolektif – ketimbang peran sentral pelaku. Artinya, subyek pelaku melakukan tindakan (sosial) berdasarkan keteraturan sistem sosial yang sudah tertata. Perkembangan lain dari pendekatan biologik

---

<sup>28</sup> Pendekatan biologi organik, yang dikenalkan oleh Herbert Spencer, mengembangkan istilah-istilah dan konsep-konsep seperti superorganik, fungsi, struktur dan sistem (Bohannon & Glazer, 1988: 5).

organik, seperti yaitu fungsionalisme sebagaimana dikembangkan Parson memandang masyarakat dipahami mempunyai empat prasyarat fungsional yang mesti dipenuhi untuk membentuk peran sosial yang ada. Keempat prasyarat itu adalah meliputi prasyarat tujuan (*goal*) yang disangga oleh institusi politik, prasyarat adaptasi (*adaptation*) yang disangga institusi ekonomi, prasyarat integrasi (*integration*) yang disangga institusi hukum, dan prasyarat perekat (*latency*) yang disangga institusi keluarga atau agama. Ketertundukan manusia sebagai anggota masyarakat dituntut oleh peran sosial yang diarahkan melalui mekanisme sanksi positif (penghargaan) dan sanksi negatif (hukuman). Peran dan sanksi sosial terlembagakan dalam sistem nilai masyarakat yang kemudian diadopsi menjadi penggerak tindakan manusia sebagai anggotanya. Dalam tindakan apapun, manusia sebagai anggota masyarakat merupakan pelaksana 'peran-peran sosial' tertentu (Parson & Erward Shill. Eds, 1951: 90).

Pendekatan struktural fungsional dan pendekatan fungsionalisme yang cenderung biologik organik ini menurut sebagian pakar antropologi saat ini dinyatakan semakin kurang relevan dalam menanggapi masalah sosial kontemporer. Penyebabnya adalah beberapa kelemahan yang terdapat pada pendekatan organik biologi itu sendiri. Beberapa kelemahan pendekatan biologik organik antara lain: 1) Karena asumsi pendekatan organik biologi menganggap bahwa sistem masyarakat sebagaimana suatu organisma. Sebagai suatu organisma, maka masing-masing bagiannya mempunyai andil dalam menumbuhkan atau mematikan organisme tersebut. Maka untuk berlangsungnya organisme itu disyaratkan adanya keadaan-keadaan tertentu. Kalau keadaan tertentu itu tidak terpenuhi, maka organisma tidak berjalan sebagaimana mestinya. Demikian juga terjadi pada masyarakat, bila keadaan tertentu tidak terpenuhi. Padahal mekanisme masyarakat tidaklah sepenuhnya demikian; 2) Ada kemungkinan jarak (*gap*) antara nalar logis pendekatan biologik organik dengan realitas sosial yang sesungguhnya. Karena pendekatan biologik organik sangat ditentukan oleh batas-batas istilah yang digunakan; 3) Pendekatan biologik organik terlalu fokus pada satu pertanyaan penelitian tertentu, sehingga membatasi kemungkinan penjelasan yang lebih luas dari sasaran penelitian; 4)

pendekatan biologi organik yang melahirkan pendekatan struktural fungsional, berkecenderungan pada analisa yang sifatnya institusi atau kelembagaan dan kurang intensif pada perubahan yang sifatnya khas pada kasus-kasus individual.

Berbeda dengan pandangan struktural fungsional yang menekankan adanya sistem sosial yang telah mempengaruhi tindakan individu, berikutnya muncul pendekatan yang lebih melihat pendidikan pada peran individu aktor sebagai faktor dominan, sebagaimana yang dikembangkan oleh pendekatan interaksionisme simbolik.<sup>29</sup> Menurut pendekatan interaksionisme simbolik, pada dasarnya tindakan sosial terjadi dari interaksi kongkret yang melibatkan setiap aktor (subyek pelaku) untuk melakukan respon terhadap aturan-aturan sosial yang ada. Setiap manusia berelasi dengan sesamanya dalam rangka membagi makna, maka tindakannya akan bertolak dari peranannya sebagai subyek bebas dengan segenap motif dan intrumen pembentuk maknanya sendiri. Subyek pelaku bebas merespon terhadap segala yang tampak (*seeming*) dan mengartikan gejala-gejala (*being*) atau juga memaknai segala kebenaran itu sendiri. Dengan demikian, tindakan sosial dapat dipahami lebih pada bagaimana orang menciptakan dan mempergunakan makna-makna, ketimbang bagaimana petunjuk, norma dan nilai-nilai kultural menyediakan penjelasan-penjelasan atas makna tindakan sosial tersebut (Blumer, 1969; Goffman, 1974: 247-300).

Pendekatan lain seperti pendekatan konstruktivisme mencoba mengembangkan paradigma dalam mendekati persoalan dengan asumsi-asumsi ontologi bahwa di sana ada kenyataan yang banyak (*multiple realities*); ada epistemologi yang subyektif, yaitu pengkaji dan yang dikaji bersama-sama menyusun pengertian; satu paket metodologi yang natural. Kriteria-kriteria positivis seperti validitas internal/eksternal, reabilitas dan obyektivitas sebagai ukuran ilmiah, dalam pendekatan konstruktivisme digantikan oleh istilah-istilah seperti kredibilitas (*credibility*), mudah berpindah (*transferability*), keterkaitan

---

<sup>29</sup> Mulai tahun 1970-an, selain interaksionisme simbolik banyak pendekatan ditawarkan membentang seperti dari interaksionisme simbolik sendiri hingga konstruktivisme, *naturalistic inquiry*, positivisme dan pos-positivisme, phenomenology, etnometodology, critical (Marxist), semiotic, strukturalisme, feminisme, dan bermacam-macam pendekatan etnik. Pada era ini, humaniora menjadi pusat pertimbangan teori kritis, interpretif dan proyek penelitian kualitatif. (Denzin & Yvonna S Lincoln, 1998: 1-3).

(*dependability*), dan konfirmatif (*confirmability*) (Denzin & Yvonna S Lincoln, 1998: 27). Lahirnya berbagai pendekatan baru ini berimplikasi pada kesimpulan yang berbeda secara radikal bila dibandingkan dengan pendekatan biologik organis yang cenderung positivistis.<sup>30</sup>

Salah satu contoh pemikiran di bidang pendidikan dengan pendekatan baru, adalah pendekatan konstruktivistis, Harry Wolcott menyampaikan perlunya peringatan awal dalam mengkaji antropologi mengenai sekolah. Beberapa peringatan awal itu antara lain: 1) walaupun kajian antropologi mengenai sekolah itu relative banyak, namun sesungguhnya masih sedikit antropolog yang benar-benar menguasai masalah sesuai dengan *fieldwork*-nya; 2) banyaknya terjadi penggunaan suatu kasus sekolah sebagai referensi untuk menangani sekolah pada umumnya, mereka seakan beranggapan bahwa sekolah-sekolah itu dalam struktur yang monolitik tertentu; 3) pendekatan yang cenderung monolitik itu akan menghasilkan penilaian bahwa sebuah sekolah lain dinyatakan 'disfungsi', padahal penilaian seperti ini tidaklah adil; 4) perlunya pandangan adanya perbedaan treatment dalam menangani status persoalan yang berbeda; 5) kajian terhadap *fieldwork* harus mengacu pada konteks sosial kasus itu sendiri, tidak menggunakan analogi kasus yang lain (Harry Wolcott, 1971)

Perkembangan berikutnya, pendekatan penelitian kualitatif lebih berwarna reflektif dan dengan sensibilitas baru (Denzin & Yvonna S Lincoln, 1998: 1-3). Misalnya Giddens (1984) yang mengembangkan pendekatan 'strukturasi', obyek utama ilmu sosial bukan lagi hanya sebatas peran berdasarkan pola sosial yang sudah ada sebagaimana dipahami oleh pendekatan biologik organik seperti fungsionalisme Parson, juga bukan keunikan peran aktif individu sebagaimana yang diyakini oleh interaksionisme simbolik. Menurutnya, obyek ilmu sosial adalah titik temu di antara keduanya, yakni munculnya praktik sosial para aktor secara menyeluruh yang berulang dan terpola dalam lintas

---

<sup>30</sup> Dalam dunia pendidikan, Denzin & Yvonna S Lincoln menyebutkan nama-nama pemikir yang telah menggunakan model-model analisis baru (naturalistic, pos-positivistis dan konstruktivisme) adalah karya-karya Harry Wolcott, Egon Guba, Yvonna Lincoln, Robert Stake dan Elliot Eisner (Denzin & Yvonna S Lincoln, 1998: 19).

ruang dan waktu. Praktek sosial para aktor secara menyeluruh yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu itu tertuang dalam aktivitas sehari-hari berupa perjumpaan satu dengan yang lain dalam konteks interaksi-interaksi yang secara fisik hadir bersama (*co-present*). Struktur dan agen hadir secara bersama secara dualitas. Kehadiran bersama itu memang tidak mampu memunculkan sifat-sifat khusus dari masing-masing individu, tetapi mereka mengintegrasikan pada praktik-praktek kebiasaan berdasarkan ruang dan waktu.

Menurut Gidden, tindakan yang dilakukan para aktor dalam kehidupan sehari-hari, berupa pertemuan sosial baik tradisional maupun kontemporer merupakan tongkat penuntun interaksi sosial, sederet perjanjian dengan orang lain yang tertata dengan rapi dalam siklus aktivitas sehari-hari. Rutinisasi pertemuan sangat penting dalam pengikatan kesalinghadiran secara cepat pada reproduksi sosial dan kemudian berguna bagi kekokohan institusi. Perjumpaan-perjumpaan yang melibatkan para aktor tersebut membentuk sistem sosial berdasarkan kontekstualitasnya. Dari sinilah akan terlihat identifikasi perjumpaan-perjumpaan yang terekspresi pada pengendalian tubuh setiap aktor dalam suatu interaksi sosial yang kemudian membentuk kaedah-kaedah, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan kebudayaan yang berlaku. Rutinitas perjumpaan yang membentuk struktur norma dan aturan diakui memang tidak selamanya bertahan dan memadai untuk mengorganisir berbagai praktik sosial yang terus berlangsung. Ada kalanya ia menjadi usang, sehingga para aktor – dengan kekuasaan yang melekat pada dirinya – kemudian akan memperbaiki dan mentransformasikan struktur tersebut sejalan dengan praktik sosial yang berkembang. Sehingga terciptalah mobilisasi struktur dominasi, yaitu penguasaan alokasi ekonomi dan politik. Dari penguasaan alokasi ekonomi dan politik inilah, praktik-praktik sosial para aktor –berupa negosiasi dan kontestasi- akan mengalami tarik menarik berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing.

Pemikir lain, Bourdieu (1984) dengan teori kompetisinya yang berpandangan bahwa praktik sosial itu merupakan titik pergumulan antara habitus dan berbagai jenis modal yang terjadi pada arena atau ranah (*field*) tertentu, sehingga terjadilah kompetisi antar para aktor . Habitus adalah struktur

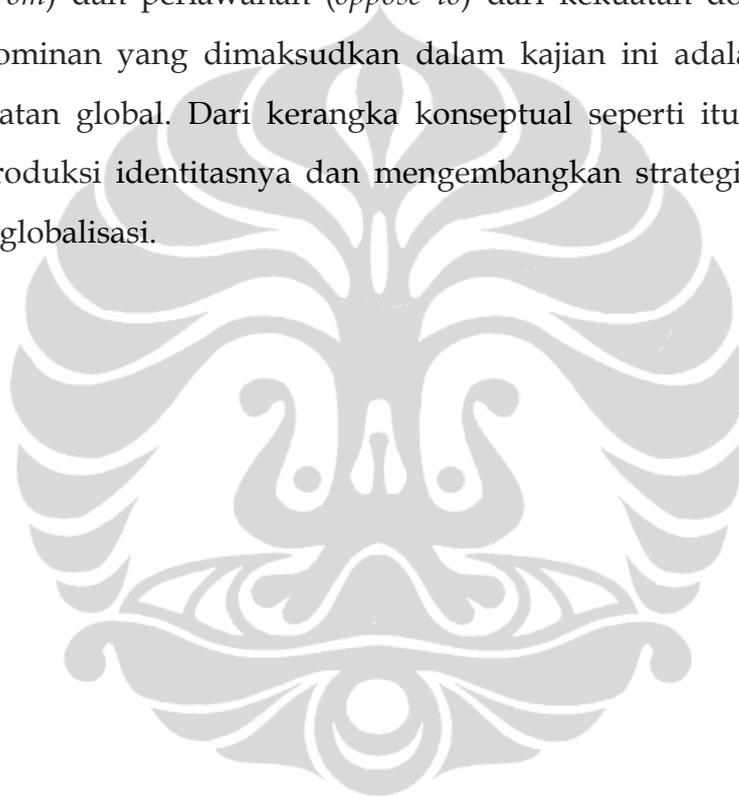
kognitif yang memperantarai para aktor dengan realitas sosial. Berbagai jenis modal yang berupa modal ekonomi, modal sosial dan modal budaya akan mendorong para aktor untuk memobilisasi kekuatannya berdasarkan kepentingan masing-masing. Ranah (*field*) merupakan jaringan relasi posisi-posisi objektif dalam suatu tatanan sosial yang hadir dan terpisah dari kesadaran individu. Ranah bukan ikatan intersubjektif antar individu, melainkan semacam hubungan yang terstruktur dan hingga tanpa disadari oleh individu yang terbentuk secara spontan dalam tatanan masyarakat. Peran aktor sebagaimana yang ditekankan pada pendekatan interaksionisme simbolik, mengedepankan siapa yang paling 'bermain' atau berpengaruh dalam konteks intitusi tersebut.

Dari berbagai konteks atau analisis teori tersebut, untuk kepentingan memilih pendekatan dalam penelitian ini, peneliti merasa perlu mengutip Martyn Hammersley (1990) yang menyebutkan beberapa pendekatan riset terkait dengan antropologi pendidikan, seperti: *Pertama*, penelitian yang melakukan kerjasama dengan guru-guru untuk membantu mereka mempraktekkan gagasan-gagasan pendidikan yang progresif di dalam ruang kelas, dan mereka menggunakan metode kualitatif untuk mencapai tujuan ini. *Kedua*, ada peneliti yang ingin membawa perubahan radikal pada pendidikan dan keadaan sosial, dan mereka semakin ingin menganalisis kendala-kendala yang dihadapi guru, yang diakibatkan oleh struktur sosial yang luas. *Ketiga*, ada peneliti yang dipengaruhi oleh interaksionisme simbolik, dan mereka memberikan tekanan utama pada penyelidikan dan pendokumentasian dunia kehidupan sekolah, yang umumnya demi kehidupan sekolah itu sendiri.

Kajian madrasah dalam konteks globalisasi ini merupakan kajian politik identitas di madrasah dalam menghadapi globalisasi. Konsep kunci dari kajian ini dipusatkan pada kajian teori identitas. Mengingat bahwa lembaga pendidikan mempunyai fungsi pengembangan tujuan individu (*privat*) melalui proses pendidikan dan tujuan kolektif (*publik*) dalam fungsi pengembangan identitas, maka penelitian ini mencoba melacak pengembangan identitas pada pelaksanaan pendidikan dan pengembangan identitas institusi. Pemaparan tentang kedua permasalahan yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan identitas

itu merupakan bentuk *positioning* madrasah dalam konteks globalisasi pendidikan. Kajian ini juga menguji teori identitas, khususnya teori Castells yang menyebutkan bahwa penguatan identitas itu ada dalam tiga bentuk (*legitimizing identity, resistance identity, project identity*).

Perkiraan awal peneliti, kajian identitas pada madrasah dalam penelitian ini termasuk dalam kategori identitas yang beresistensi (*resistance identity*). Operasional jenis resistansi identitas ini adalah usaha penguatan mencari pembeda (*differ from*) dan perlawanan (*oppose to*) dari kekuatan dominan yang ada. Kekuatan dominan yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah termasuk negara dan kekuatan global. Dari kerangka konseptual seperti itu, bagaimana madrasah mereproduksi identitasnya dan mengembangkan strategi pendidikan dalam memasuki globalisasi.



### BAB III MADRASAH PEMBANGUNAN CIPUTAT

*“ ... menyekolahkan anak di Madrasah Pembangunan adalah **prestige** tersendiri”*

Ibu Hry (wali murid siswa Madrasah Pembangunan)<sup>1</sup>

Dasar pemilihan Madrasah Pembangunan (selanjutnya disingkat MP) yang berlokasi di Ciputat, Tangerang Selatan sebagai fokus kajian ini adalah: *pertama*, MP berhasil menjadi lembaga pendidikan yang mampu keluar dari gambaran umum madrasah yang serba terbatas; *kedua*, madrasah ini berada di sekitar ibukota Negara RI, Jakarta. Keberhasilan madrasah swasta dalam menjangkau masyarakat urban di ibukota adalah kasus yang menarik dicermati, bagaimana para aktor di madrasah ini berhasil mengembangkan model pendidikan yang diminati oleh masyarakat perkotaan; *ketiga*, dari kajian awal saya MP telah melakukan beberapa langkah dalam menghadapi globalisasi pendidikan seperti mengikuti penilaian ISO 9000, pengembangan website yang bisa diakses secara global, dan beberapa bentuk usaha lain yang searah dengan usaha merespon globalisasi.

Penelitian ini fokus mengkaji Madrasah Pembangunan pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD), mengingat dari kesaksian banyak orang bahwa jenjang tersebut merupakan keunggulan MP. Pemilihan fokus pada Madrasah Pembangunan ini dimaksudkan sebagai jendela untuk memahami dan menjawab permasalahan penelitian yaitu bagaimana respon madrasah Pembangunan menghadapi globalisasi pendidikan. Di tengah gambaran madrasah yang serba memprihatinkan, bagaimana konstruksi pemikiran, imajinasi para subyek MP dalam mengembangkan model pendidikan dalam menghadapi globalisasi pendidikan.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan ibu Hry, seorang wali murid, 15 Nopember 2008

## A. Profile Madrasah Pembangunan Ciputat

Pagi itu, sengaja saya datang pagi sekali ke lokasi Madrasah Pembangunan, yaitu sebuah lembaga pendidikan yang saya jadikan 'jendela' melihat persoalan lembaga pendidikan dalam konteks globalisasi. Maksud kedatangan saya pagi-pagi sekali adalah karena saya ingin melihat lebih detil gambaran sehari-hari kesibukan dan aktifitas orang-orang di sekitar lembaga pendidikan tersebut. Dimulai sekitar jam 05.30 pagi, mulai ada satu atau dua anak datang dengan diantar orang tua mereka dengan mengendarai mobil pribadi yang kebetulan mereka juga akan pergi ke kantor. Jam tersebut memang jam toleransi orang Jakarta kalau ingin berangkat ke kantor tanpa khawatir terhalang macetnya jalan di Jakarta. Kalau berangkat kerja selepas jam tersebut, maka tidak disangsikan lagi, ancaman terjebak macet akan dihadapi. Demikian juga ketika orang tua mempunyai tugas mengantar anak ke sekolah, maka jam tersebut menjadi awal kegiatan mengantar anak mereka ke sekolah.

Mobil mulai datang dan pergi silih berganti menurunkan anak. Berbagai jenis mobil dari yang sederhana seperti *espass* (*Daihatsu*) hingga mobil terbaru seperti *CRV*, *Stream*, *Rush*, *Terrios*, *Avanza*, *Innova* kelihatan lalu lalang. Gambaran ini menunjukkan bahwa latar belakang keluarga siswa Madrasah Pembangunan adalah secara kelas sosial ekonomi termasuk kategori menengah ke atas. Suasana berkembang menjadi seperti terminal dadakan. Mobil dari dua arah sama-sama bertujuan menurunkan anak di depan pintu gerbang madrasah. Beberapa kali kemacetan terjadi, karena aktivitas menurunkan anak telah menghentikan beberapa mobil di belakangnya. Namun sebentar kemudian bergerak lagi. Demikian terjadi berulang-ulang.

Suasana memuncak sekitar jam 06.50 WIB hiruk pikuk antara mobil pengantar anak ditambah dengan jumlah kendaraan roda dua yang juga menurunkan anak di depan pintu gerbang. Keadaan ini sudah dianggap biasa, karena memang keadaan seperti itu sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Mendekati jam 07.00 WIB keadaan mulai surut. Barangkali semua orang berkeinginan agar anaknya tidak terlambat masuk kelas. Untuk itu mereka sudah mengantisipasi betul, agar kegiatan mengantar anak tidak terlambat.

Selain kendaraan pribadi, pihak madrasah juga menyediakan jasa antar jemput anak dengan menyediakan mobil kurang lebih sebanyak 30-an. Koordinasi kendaraan ini dilakukan oleh pihak koperasi sekolah bekerja sama dengan para pemilik mobil jemputan.

*Dengan sistem bagi hasil, pihak koperasi madrasah berhasil mengkoordinasikan sedemikian rupa aktivitas antar jemput anak madrasah. Setiba di MP mobil-mobil antar jemput itu akan parkir di lapangan hingga sore saat para anak yang menjadi tanggungjawab masing-masing sopir mobil keluar kelas.*

“Megah, ” kesan saya begitu melihat kompleks gedung dan bangunan Madrasah Pembangunan yang menjadi sasaran penelitian saya. Berbeda dengan kebanyakan madrasah yang penuh gambaran dengan segala keterbatasan, Madrasah Pembangunan adalah sebuah fenomena lain di mana madrasah bisa keluar dari kondisi serba keterbatasan. Saat itu juga, ketika melihat fenomena Madrasah Pembangunan Ciputat Tangerang, maka satu hal yang menarik perhatian peneliti adalah kemampuan lembaga pendidikan ini menarik masyarakat kelas menengah kota di Jakarta.

Untuk mulai mengenal profil Madrasah Pembangunan Ciputat Tangerang, pada tahun 2007 saya mulai dengan mendatangi Madrasah Pembangunan tersebut. Begitu sampai di lokasi, saya menyaksikan sebuah kompleks pendidikan yang terpadu didukung bangunan-bangunan berlanatai empat dengah halaman dan tempat parkir mobil yang luas. Sebagai awal, saya mencoba menemui bagian tata usaha untuk meminta informasi seputar Madrasah Pembangunan ini. Di sana saya mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan, saya juga diberi brosur pendaftaran, dokumen-dokumen dan CD mengenai lembaga pendidikan tersebut.

Dari dokumen yang diberikan, tertulis bahwa Madrasah Pembangunan Ciputat, Tangerang digagas sejak tahun 1972. Madrasah ini saat pertama kali dibuka hanya melayani pendidikan tingkat dasar (setingkat Sekolah dasar). Saat ini, Madrasah Pembangunan telah melayani pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah), pendidikan menengah pertama (Madrasah Tsanawiyah) dan pendidikan menengah atas (Madrasah Aliyah). Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di madrasah Pembangunan dimulai sejak tanggal 7 Januari 1974, dan tanggal

itulah yang kemudian ditetapkan sebagai "Hari Kelahiran" MP IAIN Jakarta.<sup>2</sup> Saat pertama kali Madrasah Pembangunan (MP) membuka kelas, siswa yang masuk hanya 7 anak. Tahun kedua juga hanya delapan anak. Baru tahun ketiga anak yang mendaftar meningkat yaitu 43 anak. Sejak itu tahun demi tahun jumlah siswa terus berkembang.<sup>3</sup>

Penulis mulai mengenal agak rinci tentang profil Madrasah Pembangunan, setelah melihat CD yang dibawakan kepada saya. Dalam CD itu digambarkan berbagai kegiatan serta visi dan misi madrasah ini. Sepintas saya terpesona oleh penggambaran yang ada dalam CD itu. Dengan lagu-lagu yang patriotik dan membahana mengiringi tampilan demi tampilan, membuat saya hanyut untuk mengikuti tayangan profil Madrasah Pembangunan itu dari awal hingga akhir. Dari sini sedikit banyak saya tahu tentang deskripsi madrasah Pembangunan. Dari sini pula saya tertarik untuk mengangkat madrasah Pembangunan sebagai kasus intitusi pendidikan yang berhasil menjadi sekolah yang maju yang siap menghadapi tantangan global.

Madrasah Pembangunan, letaknya berada pada arah Barat daya dari pusat kota Jakarta (Tugu Monas Jakarta). Berjarak kurang lebih 4 Km ke arah Barat dari salah satu terminal bus dan stadion sepak bola Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kalau berkendara dari Lebak Bulus ke arah Pamulang, maka letak Madrasah Pembangunan berada di sebelah kiri agak ke dalam. Setelah kita mendapatkan gedung bangunan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (dulu: IAIN Jakarta) maka kita harus mencari jalan ke arah kiri. Madrasah Pembangunan berada di sebelah kiri jalan Juanda, masuk kurang lebih 0,5 Km. Dari jalan raya, bangunan Madrasah Pembangunan ini tidak terlihat. Namun begitu memasuki pintu gerbang madrasah, maka kitamelihat kemegahannya. Kalau mau ke MP harus melalui jalan Kertamukti atau jalan lain dari arah Masjid Al Jamiah Ciputat.

---

<sup>2</sup> Namun sekarang, Madrasah ini tidak saja melayani pendidikan formal tingkat dasar melalui Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD), tetapi juga Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP), tetapi juga melayani pendidikan tingkat menengah yaitu melalui Madrasah Aliyah (Setingkat SMA).

<sup>3</sup> Saat penelitian ini dilakukan (2009) jumlah siswa Madrasah Pembangunan telah mencapai 1771 siswa. Angka yang fantastik untuk ukuran satuan pendidikan di Ibukota.

Di Lokasi, Gedung MP bersebelahan dengan Gedung Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



Gambar 2. Gedung Madrasah Pembangunan, Ciputat Tangerang Selatan

Gedung MP berdiri megah, bertingkat empat lantai dengan total kelas sebanyak 45 kelas dengan daya tampung masing-masing sekitar 35-40 anak. Di dukung dengan sarana prasarana yang lengkap seperti lapangan parkir, masjid, lapangan bola seluas lapangan futsal, jalan keluar masuk ke sekolah yang memadai membuat madrasah ini pantas disebut madrasah yang besar. Jalan masuk ke lokasi menembus dari arah depan dan dari belakang gedung madrasah tersebut, hal ini memudahkan mobil pribadi bisa menjemput dari arah mana saja tanpa harus susah-susah untuk membalik mobil. Masuk dari arah depan, keluar melalui jalan belakang, begitu sebaliknya.

Madrasah Pembangunan adalah sekolah terpadu, yaitu sekolah dengan berbagai tingkatan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas yang berada dalam satu lokasi. Untuk Madrasah Ibtidaiyah meliputi kelas I sampai dengan kelas VI, masing-masing jenjang kelas mempunyai 8 atau 9 rombongan belajar, total rombongan belajar 50 kelas. Untuk Madrasah Tsanawiyah meliputi tiga jenjang kelas VII sampai dengan kelas IX, masing-masing jenjang sebanyak 7

kelas, total kelas sebanyak 21 kelas. Untuk tingkat Madrasah Aliyah meliputi kelas X sampai dengan kelas XII, masing-masing kelas sebanyak 2 kelas, total kelas sebanyak 6 kelas. Jumlah siswa Madrasah Pembangunan secara keseluruhan berjumlah kurang lebih 2.500 siswa.<sup>4</sup>



Gambar 3. Suasana Pagi Ketika Para Orang Tua Dengan Berbagai Jenis Mobil Mengantar Anak Masuk Madrasah Pembangunan

Bisa dibayangkan betapa ramainya kalau siswa yang berjumlah ribuan itu beraktifitas bersama. Maka untuk mengatur lalu lintas anak manusia sebanyak itu, pihak pengelola Madrasah Pembangunan melakukan manajemen waktu

<sup>4</sup> Data tahun 2008, Jumlah total siswa pada ketiga tingkatan pendidikan tersebut dapat disebutkan untuk Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 1.721 siswa, untuk Madrasah Tsanawiyah terdapat 700 siswa, dan untuk tingkat Madrasah Aliyah sebanyak 180 siswa.

sedemikian rupa agar supaya tidak terjadi *crowded* (keramaian) yang memuncak. Beberapa adaptasi waktu dilakukan di sana sini.

MP dalam usahanya memenuhi harapan masyarakat dan menyiapkan lembaga pendidikan ini memasuki globalisasi telah membangun sistem sedemikian rupa dalam upayanya menjadi lembaga pendidikan yang bermutu dan kompetitif. Sistem itu dibangun dalam bentuk: membangun visi dan misi madrasah dalam konteks globalisasi, membuat beberapa motto pendidikan yang mengarahkan kinerja pendidikan untuk menjawab tantangan globalisasi seperti motto “Basic Sains, Bahasa dan Akhlakul Karimah” dan motto “*More than Islamic School*”, menciptakan simbol-simbol yang bernuansa global seperti perubahan logo dari segi lima yang berisi gambar kitab ke logo baru dalam bentuk bola dunia sebagai simbolisasi lembaga pendidikan ini ingin menjawab tantangan global.

## **B. Ciputat: *Seting Sosial Madrasah Pembangunan***

Madrasah Pembangunan berdiri di Ciputat, sebuah kawasan yang konon pada zaman Presiden Sukarno ingin digagas sebagai kawasan pendidikan.<sup>5</sup> Secara geografis, Ciputat berada dalam wilayah Kota Tangerang, Banten. Ciputat merupakan pintu masuk ke kota Jakarta dari arah Pamulang (Tangerang Selatan) dan Parung (Bogor). Posisi lokasi ini sangat strategis sehingga membuat MP mudah dijangkau dari beberapa arah. Orang-orang dari daerah Jakarta bisa menjangkau madrasah ini secara mudah, demikian juga masyarakat dari arah Pamulang Provinsi Banten, dan masyarakat dari arah Bogor. Ciputat berada pada titik perbatasan tiga provinsi sekaligus, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Lengkaplah, MP bisa melayani masyarakat dari ketiga provinsi tersebut.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Konon beritanya, untuk mewujudkan keinginan itu, pemerintah telah menghibahkan tanah seluas 10 Ha untuk IAIN Syarif Hidayatullah dan 20 Ha untuk Universitas Indonesia. IAIN memanfaatkan tanah itu untuk membangun kampus IAIN, sementara pihak UI menggunakan tanah tersebut untuk perumahan dosen dan memindahkan lokasi kampus ke kota Depok.

<sup>6</sup> Madrasah ini, sekalipun berada di wilayah geografis Kabupaten Tangerang, secara administrasi pendidikan mengikuti atau dimasukkan dalam wilayah administrasi Jakarta Selatan. Ini terjadi karena Madrasah Pembangunan mengikuti lingkungan organisasi pendidikan yang merupakan tempat lahirnya, yaitu lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, di mana

Dari kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat terletak di bagian timur dari ibukota kabupaten Tangerang Selatan. Jarak Kecamatan Ciputat dari Ibukota Kabupaten Tangerang Selatan adalah 5 Km. Luas Kecamatan Ciputat ini adalah 3.626 Ha, dengan letak ketinggian dari permukaan laut 44 m dan memiliki curah hujan rata - rata 2000 - 3000 mm/tahun. Berdasarkan data Sensus Tahun 2006, jumlah penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Ciputat berjumlah 260. 477 jiwa (Data Kec Ciputat tahun 2006).<sup>7</sup>

Menyebut kata Ciputat saat ini, bagi masyarakat Jakarta atau bahkan masyarakat luar Jakarta, bayangan akan langsung tertuju pada keberadaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dulunya bernama IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Kampus, tempat para mahasiswa dari segala pelosok penjuru tanah air mengenyam pendidikan tinggi di perguruan tinggi Islam. Ciputat juga dikenal sebagai tempat bersemai pikiran-pikiran dengan warna pembaruan Islam di Indonesia.

Dahulu, Ciputat adalah sebuah kawasan persawahan dengan penduduk yang jarang. Kata Ciputat berasal dari nama kali Putat (Ci - Cai = berarti air dalam bahasa Sunda). Putat adalah sejenis tanaman lalapan yang tumbuh di sepanjang sungai tersebut, sehingga diberi nama Ciputat (Namun tanaman ini kini telah musnah). Menurut salah seorang sumber, Kali Ciputat ini, setiap tahun diukur lebarnya dan bila ada tanaman atau tanah yang mempersempit kali maka segera diperlebar kembali. Kini Kali Ciputat tidak lagi diawasi dan dipelihara sehingga mengecil, bahkan banyak warga yang "nekad" membangun bangunan di atasnya.

Ciputat dulunya adalah tanah persawahan. Tidak ada perkampungan di sana. Dulu sekali Ciputat itu hanya tanah lapang di pinggir jalan. Di tanah lapang itu kemudian pada suatu kesempatan menjadi tempat orang mangkal untuk berjualan. Dari orang mangkal berjualan itu, makin lama makin ramai dan situ pula kemudian tercipta pasar Ciputat.

---

perguruan Tinggi Islam ini berstatus di Jakarta. Karena sulitnya mendapatkan lokasi yang memadai di Jakarta, maka sewaktu pembangunan gedung UIN digagas, panitia pembangunan mengambil lokasi di luar Jakarta (pinggiran kota Tangerang). Maka sejak saat itulah, UIN berstatus secara administrasi pendidikan di wilayah Jakarta, sekalipun lokasi berada di Tangerang.

<sup>7</sup> Batas-batas wilayah Kec Ciputat: Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pamulang dan wilayah Serpong; Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondok Aren; sebelah utara berbatasan dengan Propinsi DKI Jakarta; sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pamulang (Data Kec Ciputat tahun 2006).

Keramaian bertambah ketika kemudian di Ciputat dibangun Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah dan Gedung sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA). Sejak itu Ciputat kemudian mulai menjadi daerah pemukiman (Bapak Mkrf, 2008).<sup>8</sup>

Seorang informan, Pak Makruf yang tinggal di daerah Gaplek (perkampungan yang berada 3 Km sebelah selatan dari Ciputat) menceritakan, dulu orang Gaplek kalau hendak bepergian ke pasar, maka kalau ke utara pasar yang bisa dituju adalah Pasar Kebayoran Lama, sedangkan kalau ke selatan pasar yang bisa dituju adalah Pasar di Bogor. Dari Gaplek untuk menuju Pasar Kebayoran Lama, warga masyarakat harus berjalan kaki melalui daerah yang sekarang dikenal sebagai Ciputat. Dulu di situ tidak ada pasar.

Ciputat yang dulunya daerah persawahan seiring berjalannya waktu kawasan itu mulai dipenuhi oleh para pendatang dari luar daerah. Ciputat mulai menjadi magnet tersendiri. Kalau ditelusuri, berkembangnya Ciputat diduga berawal dari adanya dua kegiatan sosial yang melembaga, yaitu pasar Ciputat dan kehadiran lembaga pendidikan IAIN syarif Hidayatullah Jakarta (kini UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Pasar Ciputat merupakan magnet dalam bidang usaha, ekonomi dan perdagangan; sementara IAIN menjadi magnet dalam dunia pendidikan dan gerakan intelektual. Keberadaan pasar Ciputat dan kehadiran IAIN menyebabkan hadirnya para pendatang dari luar wilayah yang kemudian bermukim di wilayah itu. Mulailah wilayah Ciputat tidak hanya dihuni oleh orang Betawi yang dianggap penduduk asli, tetapi juga dihuni oleh para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia.

Saat ini, Ciputat telah menjadi kawasan yang ramai. Wilayah Kecamatan Ciputat terdiri dari 13 Desa, 154 RW dan 757 RT. Dari peta alokasi pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan Ciputat sebagiannya telah diperuntukkan sebagai perumahan terbatas. Kini jumlah perumahan/ Pemukiman KPR BTN maupun Real Estate di Kecamatan Ciputat adalah 46 buah. Ciputat dengan daerah-daerah kecamatan di sekitarnya, sekarang telah menjadi seperti kota kecil dengan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Pak Makruf (55 tahun), seorang warga masyarakat yang tinggal di daerah Gaplek (kurang lebih 4 Km) di sebelah Selatan dari Ciputat.

kelengkapan sarana prasarana yang memadai. Di kawasan sekitar Ciputat ini telah ada 6 buah Perguruan Tinggi/ Universitas. Seperti IAIN, Universitas Terbuka, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Pamulang, Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ), dan Sekolah Pariwisata Syahid.

Sejak tanggal 10 April 2007, kecamatan Ciputat telah dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu kecamatan Ciputat dan Ciputat Timur. MP, dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan Ciputat ini akhirnya masuk pada wilayah Kecamatan Ciputat Timur.<sup>9</sup> Dari konteks sosial budaya, masyarakat Kecamatan Ciputat Timur terdiri dari berbagai pemeluk agama baik Islam, Kristen, Hindu dan sebagainya. Di samping itu, di sana banyak terdapat tempat ibadah, panti sosial, lembaga perekonomian dan beberapa fasilitas sosial yang lain.<sup>10</sup>

Secara sosio kultural baik kecamatan Ciputat maupun Ciputat Timur berkembang dalam dinamika sosial kultural yang sama. Pertimbangan politik untuk pemekaran kabupaten Tangerang menjadi dua yaitu Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Tangerang Selatan, nampaknya menjadi alasan dibalik pemekaran kecamatan Ciputat menjadi dua kecamatan. Karena konon kabarnya untuk membentuk sebuah wilayah kabupaten/kota dibutuhkan kecamatan dalam jumlah tertentu. Ketika syarat itu belum terpenuhi, maka dibentuklah beberapa kecamatan baru.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Luas wilayah Kecamatan Ciputat Timur seluas 1.695 Ha. Pada saat penelitian ini dilakukan (2008), dari luas wilayah tersebut 1.103 Ha dipergunakan untuk daerah pemukiman, 62 Ha dipergunakan untuk daerah pengembangan industri, dan selebihnya masih belum jelas peruntukannya. Jumlah Penduduk Kec Ciputat Timur 150.033 jiwa, dengan tingkat migrasi per tahun 1.098 penduduk datang dan 730 penduduk pergi.

<sup>10</sup> Untuk jumlah tempat ibadah, di Kec. Ciputat Timur terdapat masjid sebanyak 70 buah, gereja 5 buah, pura 2 buah. Untuk jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebanyak 39 buah. Untuk jumlah Panti sosial sebanyak 22 buah. Tempat pertunjukan seni terdapat 54 galeri. Untuk lembaga perekonomian, di Kecamatan Ciputat Timur terdapat 4 bank pemerintah, 9 bank swasta, 2 kantor pegadaian, 2 pasar rakyat, hotel melati sebanyak 2 buah dan wisma sebanyak 7 buah. Obyek wisata alam terdapat dua tempat, dan 1 obyek wisata buatan.

<sup>11</sup> Pembentukan Kecamatan Ciputat Timur berbarengan dengan pembentukan dua kecamatan lainnya di Kabupaten Tangerang, yaitu Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Setu yang ketiganya dibentuk dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007. Kecamatan Ciputat membawahi 7 kelurahan yaitu Ciputat, Cipayang, Serua, Sawah lama, Sawah Baru, Serua Indah, dan Jombang, sedangkan Kecamatan Ciputat Timur membawahi 6 kelurahan, yaitu Cempaka Putih, Rempoa, Pondok Ranji, Rengas, Pisangan dan Cireundeu.



Gambar 4. Peta Kawasan Ciputat dan Kompleks Madrasah Pembangunan

Ciputat merupakan pintu gerbang sebelah Barat Daya DKI Jakarta yang dilalui kendaraan dari arah Bogor Jawa Barat dan Pamulang, Tangerang Banten. Ciputat saat ini telah berkembang menjadi kawasan perdagangan, perkantoran dan pendidikan. Beberapa icon muncul sebagai warna dari kawasan Ciputat, yaitu Plaza Ciputat (simbol perdagangan), Ciputat Indah Permai (Perkantoran), UIN Syarif Hidayatullah (Pendidikan), berbagai kompleks perumahan, bahkan sekarang mulai dirintis adanya terminal. Saat ini Ciputat dapat dilihat sebagai kawasan dengan beberapa predikat seperti kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan dan juga kawasan dengan lalu lintas yang macet.

*Kawasan Perdagangan*, Ciputat telah berkembang menjadi daerah perdagangan. Pasar Ciputat merupakan salah satu magnet dari kawasan Ciputat. Dulu pasar Ciputat dikenal sebagai salah satu pusat kemacetan. Sekarang dengan adanya jembatan layang (*fly over*) yang dibangun pada tahun 2008 Pasar Ciputat mulai berkurang kemacetannya. Namun begitu kemacetan di Ciputat hanya sedikit bergeser tidak lagi di Pasar Ciputat, melainkan di tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat itu yaitu di jalan yang kebetulan masih menyempit. Sebagai daerah perdagangan, Ciputat telah berkembang dari awalnya sekedar pasar tradisional sekarang telah bertambah institusi perdagangan lain seperti

kehadiran Ciputat Plaza, Ramayana Dept Store, Swalayan Tip Top, belakangan menyusul hypermarket berskala internasional Carrefour. Situasi ini menggambarkan kultur yang dinamis dari perkembangan perekonomian di daerah Ciputat.

*Kawasan Perkantoran*, Sebagai daerah perkantoran, Ciputat memiliki komplek ruko yang digunakan berbagai perusahaan membuka kantor. Berbagai kantor Bank juga membuka cabang di wilayah itu seperti BRI, Mandiri, BNI. Berbagai fasilitas public ini memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan atau usaha. Di samping beberapa kantor public, di sana juga terdapat pusat pendidikan dan latihan (Pusdiklat) bagi pegawai Kementerian Agama. Menempati areal tanah yang luas, Pusdiklat ini berdiri megah dan merupakan gedung pelayanan pelatihan tingkat nasional.

*Kawasan Pendidikan*, Sebagai daerah pendidikan, Ciputat telah berkembang sedemikian rupa sehingga di sana terdapat lembaga pendidikan dari pendidikan dini hingga universitas.<sup>12</sup> Bahkan di daerah sekeliling Ciputat telah menyatu menjadi kawasan pendidikan. Keberadaan UIN Syarif Hidayatullah menjadi pusat icon Ciputat sebagai kawasan pendidikan. UIN Syarif Hidayatullah sebagai icon kunci Ciputat, sejarahnya berawal dari lembaga pendidikan tinggi ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama) yang didirikan oleh Departemen Agama pada tanggal 1 Juni 1957, dengan tujuan mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri guna mencapai ijazah pendidikan akademi dan semi akademi untuk menjadi ahli didik agama pada Sekolah Menengah Umum, Sekolah Kejuruan dan sekolah Agama. Sebagai bukti menguatnya daerah Ciputat dan sekitarnya menjadi kawasan pendidikan, sekarang di kawasan itu telah dikelilingi oleh berbagai perguruan tinggi seperti Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Terbuka (UT) di Pondokcabe, Universitas Pamulang, Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an (PTIQ) di Pasar Jum'at.

---

<sup>12</sup> Dari peta pendidikan, Kecamatan Ciputat Timur memiliki banyak fasilitas pendidikan. Untuk tingkat SD/ sederajat terdapat 39 gedung, untuk tingkat SMP/ sederajat terdapat 15 sekolah, untuk tingkat SMA/ sederajat terdapat 10 sekolah dan untuk tingkat perguruan Tinggi terdapat 6 buah PT.

*Kawasan Macet*, Dibalik dinamika perkembangan Ciputat yang bergairah dan pesat, Ciputat juga dikenal sebagai daerah macet. Pusat kemacetan berada di dua titik, yaitu pasar Ciputat dan rempoa-pasar jumat. Kemacetan di Ciputat pada tahun 2008 telah dicoba ditekan dengan membuat jembatan layang (*fly over*) di atas Ciputat Plaza. Kemacetan di sekitar Pasar Ciputat mulai berkurang. Namun kemacetan masih terjadi antara rempoa -pasar jumat ketika pagi jam orang-orang berangkat ke kantor, demikian juga ketika sore orang pulang kantor. Mobil merambat dari arah pasar jum'at hingga perempatan dekat UIN Syarif Hidayatullah. Setiap waktu di daerah pasar Ciputat selalu menjadi daerah macet. Selain jalannya berlubang, di situ juga banyak tumpukan sampah yang bau. Sehingga kesremawutan Ciputat lengkaplah. Belakangan di atas pasar itu, telah dibangun jalan layang yang diharapkan bisa mengurangi kemacetan di tempat itu. Namun apa yang terjadi, kemacetan hanya berpindah tempat. Kalau dulu kemacetan ada di pasar Ciputat, sekarang kemacetan justru terjadi di atas jalan layang. Kalau sore hari, khususnya jam-jam orang-orang pulang dari kantor dari arah pasar Jum'at di Utara hingga ke Kampus UIN yang berjarak kurang lebih 3 Km terjadi kemacetan luar biasa. Mobil hanya merambat dan kejadian ini terjadi setiap hari.



Gambar 4. Jalan Layang Ciputat (Mengurai Kawasan Macet)

Gambaran lingkungan yang merupakan kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan dan kawasan yang macet menunjukkan bahwa Ciputat merupakan lingkungan sosial masyarakat urban yang sibuk. Dari konteks sosial dan lingkungan seperti itu, Madrasah Pembangunan berdiri dan mencoba mengukuhkan diri menjadi sebuah institusi madrasah yang berhasil menarik perhatian publik dan menjadi sekolah yang diminati.

### C. Peta Kekuatan di Sekitar Madrasah

Di Ciputat, Madrasah Pembangunan bukanlah satu-satunya lembaga pendidikan dasar yang bergerak untuk memperebutkan murid dari masyarakat yang tengah berkembang. Untuk meneliti Madrasah pembangunan sebagai suatu fenomena, merujuk Donald Horton,<sup>13</sup> ada beberapa kekuatan yang perlu dilihat dalam melihat di sekitar madrasah pembangunan. Peta kekuatan ini penting untuk menjawab pertanyaan Burawoy dalam membaca imaginasi sebuah komunitas dalam konteks globalisasi: apakah imaginasi-imaginasi komunitas itu bergerak dan atau berkontestasi dalam dimensi global (Burawoy, 2000: 5). Bila pertanyaan ini diajukan pada MP sebagai obyek kajian, maka sepenglihatan penulis terjadi beberapa bentuk kekuatan yang terjadi antara MP dengan realitas lingkungan pendidikan di sekitarnya.

Donald Horton memetakan kekuatan-kekuatan yang ada di seputar lembaga pendidikan: 1) sistem pendidikan, dalam konteks tulisan ini sistem pendidikan yang dikaji adalah sistem pendidikan yang dikembangkan MP; 2) masyarakat lokal atau orang tua siswa, dalam konteks penelitian ini keberadaan orang tua siswa madrasah terdiri dari kelas sosial ekonomi tertentu; 3) dunia pendidikan, dalam konteks penelitian ini adalah keberadaan sekolah-sekolah di sekitar MP yang secara langsung atau tidak langsung menjadi kompetitor di lingkungan lokasi; 4) birokrasi pendidikan, dalam konteks madrasah di Indonesia adalah Kementerian Agama

---

<sup>13</sup> Donald Horton memetakan kekuatan-kekuatan yang ada di seputar lembaga pendidikan: 1) sistem pendidikan; 2) masyarakat lokal atau orang tua siswa; 3) dunia pendidikan; 4) birokrasi pendidikan (Donald Horton, 1971)

Lingkungan pendidikan, di sekitar MP terdapat beberapa sekolah dasar yang juga berhasil menarik minat masyarakat sekitar. Di sebelah selatan dari MP terdapat Sekolah Dasar Al Fath dan Sekolah Dasar Internasional Karisma bangsa. SD Al Fath adalah sebuah sekolah yang mengedepankan pendekatan bilingual, yaitu proses pembelajaran yang menggunakan dua bahasa pengantar yaitu Indonesia dan Inggris. Sedang SD Karisma bangsa adalah sekolah internasional yang juga menggunakan pendekatan bilingual yang disponsori lembaga pendidikan dari Negara Turki. Di sebelah Barat ada Sekolah dasar Islam Terpadu al hikmah di Gaplek, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ciputat dan Sekolah dasar Muhammadiyah 22 Setia Budi di Pamulang. Di sebelah Timur terdapat SD Bakti Mulia lebak bulus dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pondok Pinang. Di Sebelah utara terdapat Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Cempaka Putih. SD Al Azhar Bintaro; sebelah selatan ada SD Al Fath. Kehadiran sekolah-sekolah itu selain menjadi mitra pendidikan juga dapat dilihat sebagai kompetitor dalam menjaring siswa. Menjadi sekolah yang diminati pasar telah menjadi arena kompetisi bagi sesama lembaga pendidikan di Indonesia.

Masyarakat lokal atau orang tua siswa, masyarakat pendukung dari keberadaan madrasah ini adalah kelompok tertentu (*segmented*), yaitu umumnya berasal dari kelompok sosial ekonomi menengah. Ini dibuktikan dengan kemampuan mereka dalam memenuhi persyaratan masuk lembaga ini yang cukup tinggi, sementara sekolah lain yang sederajat justru gratis.

Birokrasi pendidikan. Sejauh ini, pelaksana pendidikan formal tingkat dasar dan menengah di Indonesia diselenggarakan oleh dua jenis lembaga pendidikan yaitu sekolah dan madrasah. Adanya dua jenis lembaga pendidikan ini berimplikasi pada manajemen pengelolaan pendidikan oleh Negara dalam dua kementerian yaitu Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Sekolah dibina langsung oleh Kementerian Pendidikan Nasional, sedangkan madrasah di bawah pembinaan Kementerian Agama.

Sedangkan dalam konteks kekuatan persaingan antar satuan pendidikan, di sekitar MP ada beberapa lembaga pendidikan sederajat yang di satu sisi bisa merupakan mitra sekaligus di sisi lain adalah kompetitor. Peta kompetisi ini bisa

dilihat sebagai peta kontestasi MP terhadap satuan lembaga pendidikan yang lain. Peta konstestasi Madrasah Pembangunan dengan satuan atau jenis pendidikan yang lain dapat dipetakan sebagai berikut a) kontestasi MP dengan satuan pendidikan madrasah yang lain; b) kontestasi MP dengan satuan sekolah umum yang sederajat; c) kontestasi MP dengan satuan sekolah umum Islam yang sederajat seperti sekolah dasar Muhammadiyah, Sekolah Dasar Islam Terpadu dan sekolah dasar Islam yang bernaung pada yayasan lokal tertentu.

Kontestasi pertama, adalah kontestasi MP dengan sesama madrasah lain. Kontestasi ini terasa ketika MP, merasa harus berhadapan dengan kekuatan jaringan madrasah yang berada di bawah pembinaan Kemenag kota Jakarta Selatan. Pada kasus seperti pembuatan modul pembelajaran, MP berusaha berkreasi secara mandiri, di mana inisiatif ini menimbulkan ketidakbersamaan dengan madrasah-madrasah di sekitarnya. Madrasah-madrasah di sekitar menggunakan modul pembelajaran yang seragam yang dikoordinasikan oleh Kemenag Kota Jakarta Selatan. Keadaan ini sekaligus menjadi tantangan terdekat bagi MP untuk membuktikan diri bahwa institusi ini unggul dibandingkan dengan madrasah yang lain yang memang dalam koordinasi masing-masing kemenag kab/kota setempat. Sikap kemandirian MP ini sering terasa seperti sikap yang tidak seirama dengan sikap *mainstream* jaringan madrasah.

Seperti diakui oleh Kepala MP tingkat ibtidaiyah, faktor yang menjadi ancaman atau kekuatan yang tidak mendukung bagi usaha pencapaian tujuan pendidikan bagi MP yang dirasakan adalah: Pertama, birokrasi pendidikan di tingkat lokal (baca: pemerintah daerah) yang kadang-kadang belum kondusif bagi lahirnya lembaga pendidikan yang mandiri. Pemerintah daerah dalam beberapa hal kadang masih terkesan memposisikan eksistensi lembaga sebagai pemegang otoritas tunggal dalam kebijakan kependidikan di wilayahnya. Cara-cara seperti bahwa soal ujian harus dikoordinasikan dan diedarkan oleh pemerintah daerah, dan kebijakan-kebijakan seperti itu membuat suasana tergantung yang dirasakan oleh satuan pendidikan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Myd , Kepala MP tingkat Ibtidaiyah pada tanggal 3 Maret 2009

Kontestasi kedua, kontestasi MP dengan sekolah umum sederajat seperti sekolah dasar (SD). Jenis kontestasi ini dialami tidak hanya oleh MP saja, tetapi hampir oleh semua madrasah di manapun berada. Di berbagai tempat itu, madrasah harus bersaing dengan sekolah dasar untuk menarik perhatian masyarakat sehingga nantinya mereka menyekolahkan anak mereka ke kedua institusi tersebut. Madrasah diuntungkan apabila tingkat keberagaman masyarakat di suatu lokasi itu tinggi. MP membangun image kepada masyarakat bahwa institusi ini melakukan pembelajaran agama lebih banyak bila dibandingkan dengan sekolah umum.

Kontestasi ketiga, kontestasi MP dengan sekolah umum Islam. Gerakan imajinasi itu bisa dibaca dalam konteks kontestasi MP terhadap lembaga pendidikan formal sederajat seperti sekolah umum dan sekolah berlatar belakang agama seperti sekolah Islam, Sekolah Kristen, Sekolah Katholik. Kalau melihat peta posisi MP dalam kacamata sosial, maka di sana dapat dipetakan beberapa faktor yang menghadang sekaligus menjadi ancaman tersendiri bagi keberadaan MP.

#### **D. Madrasah Pembangunan: Membedik Masyarakat Kelas Ekonomi Menengah**

Di tengah kekuatan-kekuatan yang melingkupi, Madrasah Pembangunan berhasil keluar dari gambaran umum madrasah yang serba tertinggal dan membuktikan diri menjadi lembaga pendidikan yang berhasil. Madrasah Pembangunan berhasil menempatkan diri menjadi lembaga pendidikan yang diminati oleh masyarakat kelas ekonomi menengah di Kota Jakarta. Kenapa saya menyebut konsumen madrasah ini adalah masyarakat kelas sosial ekonomi menengah ke atas, hal ini saya simpulkan dari kemampuan orang tua membayar biaya pendidikan pada madrasah tersebut. Untuk tahun 2009, uang pangkal yang harus dibayarkan orang tua siswa kepada lembaga pendidikan itu sebanyak sepuluh juta rupiah. Jumlah yang cukup besar untuk ukuran biaya pendidikan jenjang sekolah dasar.

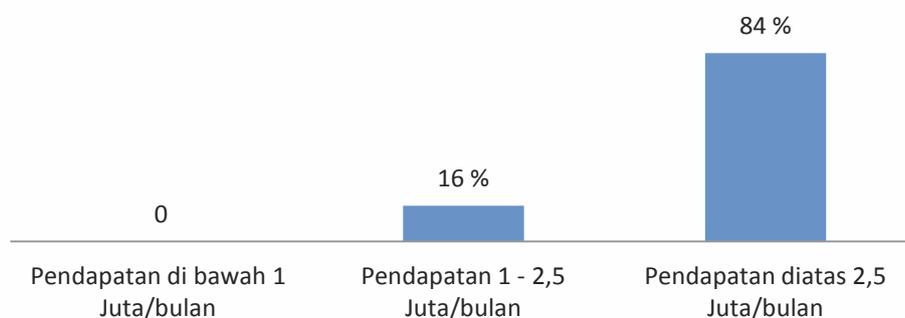
Untuk menggambarkan konsumen dari Madrasah Pembangunan, berikut penulis paparkan data deskripsi latar belakang keluarga siswa MP. Berdasarkan

data penerimaan siswa baru MP pada tahun 2010, menunjukkan bahwa semua ruang kelas I (Satu) sebanyak 8 ruang terisi penuh. Mengikuti prasyarat Sekolah Standar Nasional (SSN) yang mensyaratkan jumlah anggota tiap rombel yang ideal adalah 28 anak, maka MP hanya menampung delapan rombel dengan jumlah siswa baru sebanyak 224 anak. Kedelapan rombel/kelas dimaksud, dari tahun 2000 hingga tahun 2010 berhasil dipenuhi oleh MP, bahkan tidak jarang Madrasah Pembangunan menolak sebagian pendaftar yang lain.

Madrasah ini saya nilai telah berhasil dari sisi-sisi tertentu menjadi lembaga pendidikan yang diminati oleh masyarakat urban atau perkotaan di Jakarta. Keberhasilan madrasah Pembangunan ini menarik perhatian masyarakat kelas menengah kota merupakan suatu fenomena baru, dan barangkali bisa dikatakan suatu model atau trend baru dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Sengaja dalam penelitian ini saya memilih obyek sebuah institusi pendidikan, yaitu fenomena madrasah Pembangunan sebagai jendela untuk memahami realitas madrasah secara lebih luas di Indonesia, karena alasan prestasi keberhasilan lembaga tersebut. Madrasah Pembangunan ini tidak saja melayani pendidikan formal tingkat dasar melalui Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD) dan Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP), tetapi juga melayani pendidikan tingkat menengah yaitu melalui Madrasah Aliyah (Setingkat SMA).

Gambar 5

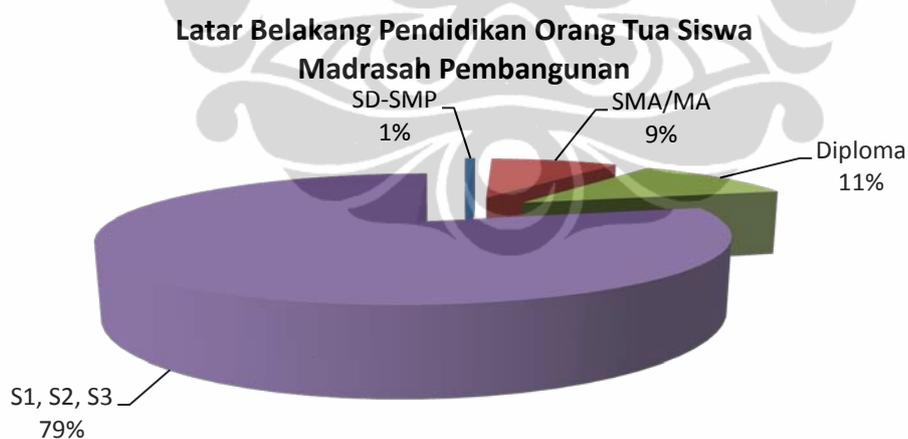
### Tingkat Penghasilan Orang Tua Siswa Madrasah Pembangunan, Ciputat



Sumber: Data Madrasah Pembangunan, Tahun 2010

**Latar belakang ekonomi.** Dilihat dari kelas ekonomi keluarga siswa Madrasah Pembangunan, diketahui bahwa sebagian besar (mayoritas) orang tua siswa MP berasal dari keluarga berkategori menengah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan indikator kemampuan orang tua dalam memenuhi prasyarat untuk menjadi siswa MP yang harus membayar uang gedung sebesar Rp. 13 juta. Dari data di lembaga pendidikan tersebut (lihat tabel), diketahui bahwa orang tua yang berpendapatan kurang dari satu juta ternyata tidak ada, dari orang tua dengan pendapatan antara 1 juta s.d 2.5 juta terdapat 15.9 %; dari orang tua berpendapatan di atas 2.5 juta sebanyak 84.1 %. Diduga, dibalik data tersebut masih banyak orang tua yang berpendapatan di atas 5 juta atau bahkan 10 juta, mengingat dari fasilitas antar jemput anak yang disediakan orang tua banyak menggunakan mobil pribadi dengan tahun keluaran di atas tahun 2000. Dari pendataan ini tidak terpetakan variasi diantara orang tua yang berpendapatan di atas 2.5 juta, karena budaya masyarakat kita belum terbiasa menyebutkan pendapatan riil mereka setiap bulan.

Gambar 6

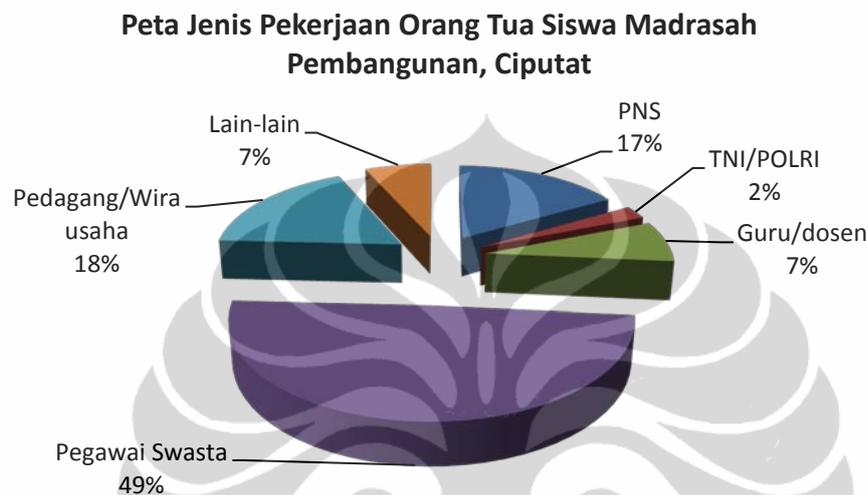


Sumber: Data Madrasah Pembangunan, Tahun 2010

Pendidikan orang tua. Dilihat dari latar belakang pendidikan orang tua siswa dapat disebutkan mayoritas orang tua siswa MP berpendidikan sarjana baik itu Strata satu (S1), Strata Dua (S2) maupun Strata Tiga (S3). Data menunjukkan orang tua berpendidikan S1 ke atas sebanyak 78.7 %; orang tua berlatar belakang

pendidikan Diploma sebanyak 11.5 %; sedangkan orang tua berpendidikan SLTA ke bawah sebanyak 9.8 %. Ini menunjukkan bahwa orang tua peminat terhadap MP yang sebagian besar berpendidikan S1 ke atas menunjukkan bahwa pilihan tersebut telah didukung oleh tingkat rasionalitas dan pendidikan yang memadai.

Gambar 7



Sumber: Data Madrasah Pembangunan, Tahun 2010

Pekerjaan Orang Tua. Dari jenis pekerjaan yang menjadi profesi orang tua, dapat ditunjukkan bahwa sebagian besar adalah pegawai swasta. Selengkapnya dapat disebutkan orang tua berprofesi sebagai pegawai swasta sebanyak 49.3 %; pegawai negara (PNS dan TNI-POLRI) sebanyak 18.9 %; Guru/dosen sebanyak 7.5 %; pedagang/wirusaha sebanyak 17.6 % dan lain-lain sebanyak 6.7 % (lihat gambar).

### E. Madrasah dengan Segudang Prestasi

Madrasah Pembangunan selain telah berhasil menarik perhatian masyarakat kelas ekonomi menengah kota di Jakarta, madrasah ini secara kelembagaan ternyata telah berhasil membuktikan diri menjadi madrasah berprestasi terbaik I di tingkat nasional pada tahun 2005. Setelah sebelumnya, pada tahun 2004 Madrasah Pembangunan masih berada di tingkat II madrasah terbaik secara nasional. Penghargaan diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dari sisi prestasi siswa, di Bidang akademis, Madrasah Pembangunan pernah 4 tahun berturut-turut dimulai tahun 1988 -2001 meraih perolehan rata-rata Nilai Ebtas Murni (NEM) terbaik se DKI Jakarta untuk tingkat Ibtidaiyah. Bahkan salah satu siswa Madrasah Pembangunan tingkat dasar telah berhasil mengantar salah satu siswanya, Iqbal Noval, pada tahun 2009 sebagai salah satu juara olimpiade sains nasional di bidang matematika.

Sementara di bidang non akademis, Madrasah Pembangunan telah mampu mengambil posisi yang menonjol pada lomba-lomba kegiatan non akademis yang di selenggarakan di wilayah Jabodetabek. Kegiatan-kegiatan seperti olahraga, seni, kreasi dan lomba-lomba yang bersifat keagamaan, Madrasah Pembangunan sering tampil sebagai juara. Lebih lengkapnya lihat dalam tabel berikut.

**Tabel 6**  
**Daftar Prestasi Siswa Madrasah Pembangunan**  
**Bidang Akademis**

PRESTASI	TAHUN
Juara I Lomba Bidang Studi Bahasa Indonesia MI se Jakarta Selatan di Kandepag Jaksel a.n. Farah Asnelly Putri	1996
Juara II Lomba Bidnag Studi Bahasa Indonesia MI se Jakarta Selatan di Kandepag Jaksel a.n. Shaula Afifah	1996
Juara I Lomba Bidang Studi IPA MI se Jakarta Selatan di Kandepag Jaksel a.n. Nahda Karana	1996
Juara I Lomba Mengarang Yayasan Kehati Tingkat Nasional a.n. Riska Inki Fitria	1997
Juara I Lomba Mengarang SD/MI se DKI Jakarta di SMP Harapan Ibu a.n. Amalia Zahra	1997
Juara II Lomba Bidang Studi Matematika se DKI Jakarta di Al Azhar Kemang a.n. Karlina	1997
Juara II Mengarang SD/MI Tingkat Nasional di Internat Al Kausar Sukabumi a.n. Farah Asnelly Putri	1997
Juara I Lomba Mengarang Tingkat Nasional Yayasan Kehati dan Lingkar Jurnalistik a.n. Kartika Juwita Ratri	1998
Juara I Lomba Mengarang Tingkat Nasional di Internat Al Kausar Sukabumi a.n. Rara Ayuningtyas	1998
Juara II Lomba Penulisan Sinopsis Tingkat Nasional KPI Pusat Jakarta, a.n. Andita Larasati	1999
Juara II Mengarang Tingkat Nasional di Internat Al Kausar Sukabumi a.n. Sakinah	2000
Juara III Mengarang Tingkat Nasional di Internat Al Kausar Sukabumi a.n. Aulia Miftah	2000
Juara II Olympiade Matematika se Jabodetabek	2003
Juara III Kompetisi Sains 2007 Tingkat Nasional di Internat Al Kausar	2007

**Tabel 7**  
**Daftar Prestasi Siswa Madrasah Pembangunan**  
**Bidang Non Akademis**

Juara I Turnamen Sepakbola Usia Dini Menpora Cup	2005
Juara II Turnamen Futsal antar SD/MI Piala Menpora	2007
Juara III Sepakbola Mini Se Jabodetabek PJ Festival	2007
Juara I, II, dan III Tahfizh Quran se Jabodetabek di Azhari Islamic School	2007
Juara I Lomba Kaligrafi se Ciputat dan Pamulang di SDIT As Salamah	2007
Juara I Lomba Da'i Cilik se Ciputat dan Pamulang di SDIT As Salamah	2007
Juara I Lomba Murattal Quran se Ciputat dan Pamulang di SDIT As Salamah	2007
Juara I, II dan III Lomba Tahfiz Alquran di Azhari Islamic School Jakarta	2007
Juara I Lomba Menari Gebyar Tari Nusantara di WTC Serpong	2007
Juara I Lomba Kaligrafi Gema Muharram 1428 H di SDIT As Salamah	2007
Juara I Lomba Dai Cilik Gema Muharram 1428 H di SDIT As Salamah	2007
Juara I Lomba Murratal Alquran Gema Muharram 1428 H di SDIT As Salamah	2007
Juara I Turnamen Tenis Meja SD/MI se Jakarta Selatan	2007
Juara I Lomba Menggambar SD/MI se Jakarta Selatan	2007
Juara I Lomba Melukis SD/MI se Jabodetabek di ITC Serpong	2007
Juara I Lomba Menari SD/MI se Jabodetabek di WTC Serpong	2007
Juara II Turnamen Sepak Bola Mini Piala Menpora di Senayan	2007
Juara I Futsal "Menpora Sport Festival" di Jakarta (2008)	2008
Juara I Lomba Baca Puisi SD/MI se Jabodetabek di SMP Al Azhar BSD	2008
Juara II Lomba Menulis Kesan dan Pesan Lakar Pelangi, Mizan Expo	2008
Juara III Lomba Story Telling Laskar Pelangi, Mizan Expo	2008

Dari gambaran prestasi seperti di atas, maka banyak masyarakat di Jakarta yang mengakui keunggulan Madrasah Pembangunan. Bahkan sepengetahuan penulis, pengakuan keunggulan terhadap Madrasah Pembangunan tidak saja diakui di lingkungan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau kota-kota yang sering di sebut Jabodetabek, tetapi pengakuan juga datang dari masyarakat madrasah di tingkat nasional. Terbukti pada tahun 2005, Madrasah Pembangunan secara kelembagaan dinobatkan sebagai lembaga pendidikan terbaik madrasah Ibtidaiyah di tingkat nasional. Belakangan, Madrasah Pembangunan juga menjadi tempat sasaran studi banding dari berbagai pelaku lembaga pendidikan baik dari dalam maupun luar negeri.

#### BAB IV MERINTIS LEMBAGA PENDIDIKAN UNGGUL

*“ ... Para pendiri lembaga ini lebih memilih nama madrasah justru sebagai usaha untuk pembuktian identitas bahwa madrasah juga bisa maju....”*  
(Ibu Mtq, 2009)<sup>1</sup>

Bab ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana praktisi Madrasah Pembangunan memposisikan lembaganya untuk menjadi lembaga pendidikan yang mampu keluar dari gambaran umum tentang madrasah yang tertinggal dan berhasil menarik minat masyarakat kelas ekonomi menengah kota. Madrasah Pembangunan sejauh ini menurut pengkaji telah berhasil membuktikan diri menjadi lembaga pendidikan swasta yang cukup mandiri, berhasil menjadi pilihan masyarakat kelas ekonomi di Jakarta, dan berhasil membuktikan sebagai lembaga pendidikan dengan segudang prestasi. Keberhasilannya tidak saja diakui oleh masyarakat, khususnya masyarakat madrasah di sekitar Jabodetabek dengan ditandai besarnya minat orang tua menyekolahkan anaknya ke sana, tetapi juga keberhasilannya diakui masyarakat madrasah secara nasional dengan ditetapkan menjadi madrasah terbaik nasional oleh Kementerian Agama pada tahun 2005.

Bukan rahasia lagi, ada stereotipe di masyarakat bahwa ‘madrasah’ adalah lembaga pendidikan yang konon penuh keterbatasan. Sebuah gambaran, bahwa madrasah di Indonesia adalah fenomena lembaga pendidikan yang serba memprihatinkan: 90 % madrasah adalah swasta; 90 % madrasah berada di desa; 90 % pendukung madrasah adalah masyarakat miskin.<sup>2</sup> Bisa dibayangkan bahwa karena kebanyakan madrasah didirikan oleh masyarakat secara swadaya dan berkembang sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat dalam menyediakan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan ibu Mtq, Guru Madrasah Pembangunan, dia telah mengajar di MP selama 33 tahun, yaitu sejak tahun 1976

<sup>2</sup> Yahya Umar, Mantan Dirjen Pendidikan Islam Dep. Agama RI, menyebutkan kondisi memprihatinkan dari dunia madrasah. Tentu saja angka ini tidak tepat benar, tapi gambaran makro dunia madrasah di Indonesia kurang lebih seperti itu. Dalam sebuah Seminar Pendidikan Islam, Januari 2009 di Hotel Mercury di Ancol Jakarta Utara

sarana prasarana, maka madrasah di berbagai tempat di pedesaan-pedesaan berjalan dengan tertatih dengan sarana prasarana seadanya.<sup>3</sup>

Namun di tengah gambaran madrasah seperti itu, ada beberapa madrasah di beberapa kota yang berhasil mengembangkan madrasah yang bermutu dan diminati masyarakat menengah di perkotaan.<sup>4</sup> Salah satu madrasah yang dimaksud adalah Madrasah Pembangunan yang berdiri pada tahun 1972. Madrasah ini telah berhasil membuktikan diri menjadi lembaga pendidikan swasta yang cukup mandiri dari sisi pembiayaan, berhasil menjadi pilihan masyarakat kelas ekonomi menengah di Jakarta, dan meraih banyak prestasi baik dari sisi kelembagaan maupun prestasi yang diraih peserta didiknya.

#### **A. Ikhtiar Keluar dari Stigma Keterbatasan**

Melacak mengapa dan bagaimana Madrasah Pembangunan mampu keluar dari gambaran umum madrasah yang tertinggal, saya berusaha mewawancari seorang guru yang dianggap paling senior di lembaga pendidikan tersebut. Saya berhasil menemui ibu Mtq (50 tahun) seorang guru yang telah mengajar di sana selama 33 tahun. Saya mencoba mencari jawaban sejarah mengapa para pengagas awal lembaga pendidikan ini memilih jenis 'madrasah' sebagai jenis lembaganya. Menurut ibu ini ada tarik menarik sewaktu menentukan jenis pendidikan pada saat pendirian Madrasah Pembangunan. Apakah Madrasah ini akan dinamai madrasah atau sekolah. Karena masing-masing nama itu mempunyai implikasi tersendiri. Ibu ini menyatakan:

*".... pada awal pendirian madrasah ini pernah ada gagasan yang tarik menarik dalam menetapkan jenis lembaga pendidikan ini antara gagasan menggunakan nama 'madrasah' atau menggunakan nama 'sekolah' dengan diberi label Islam (Sekolah Islam). Dengan asumsi bila bernama madrasah maka pembinaan akan*

<sup>3</sup> Data tahun 2004 menunjukkan bahwa ruang kelas di madrasah se-Indonesia yang layak untuk digunakan hanya sebanyak 55,2 %. Sedangkan sisanya sebanyak 47,8 % pembelajaran madrasah dilakukan di ruang kelas yang kurang memadai atau menggunakan 'kelas siang'. (Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan, tahun 2004).

<sup>4</sup> Beberapa contoh madrasah itu seperti Madrasah Asih Putera Cimahi Bandung, Madrasah Amanatul Ummah Surabaya, Madrasah Darul Hijrah Banjarmasin.

*berada di bawah koordinasi Kementerian Agama; sedangkan kalau menjadi sekolah dasar Islam maka pembinaan dan pendanaan pendidikan akan berada di bawah koordinasi Depdiknas. Keuntungan berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, menurut asumsi awal sementara mereka, selain mendapatkan pembinaan yang lebih intens bila dibandingkan dengan bila di bawah Kementerian Agama, juga kemungkinan mendapatkan bantuan pembiayaan lebih besar. Namun di akhir keputusan, gagasan memilih nama 'sekolah Islam' ternyata tidak mendapatkan persetujuan sebagian besar panitia pendiri, sehingga akhirnya nama lembaga yang dipilih adalah menggunakan nama madrasah. Para pendiri lembaga ini lebih memilih nama madrasah justru sebagai usaha untuk pembuktian identitas bahwa madrasah juga bisa maju. Pilihan itu juga didasarkan karena kebanyakan para pendiri adalah pegawai negeri di lingkungan Kementerian Agama. Dalam prinsip mereka, mereka akan bangun sekolah bermutu tapi dengan tetap berbentuk madrasah.<sup>5</sup>*

Jawaban ini menunjukkan bahwa nama 'madrasah' bagi praktisi pendidikan di MP merupakan sebuah pilihan dan mewakili semangat tertentu. Nama 'madrasah' menantang para pengelola lembaga ini untuk membuktikan bahwa lembaga pendidikan bernama madrasah layak menjadi jenis pendidikan yang eksis dan bisa bersaing dengan jenis lembaga pendidikan yang lain. Para pendiri dan pengelola madrasah ini berusaha untuk membuktikan bahwa Madrasah Pembangunan mampu untuk itu.

Menurut salah satu sumber, Madrasah Pembangunan yang berdiri tahun 1972, bermula dari gagasan beberapa mahasiswa yang sedang belajar di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Syarif Hidayatullah Ciputat, di mana mereka di pondokan (rumah kos) membawa serta istri dan anak-anak, mereka merasa perlu menyekolahkan anak-anak mereka. Untuk tidak repot-repot mencari sekolah, apalagi mereka menyingkinkan menyekolahkan anak pada sekolah dengan karakter tertentu, beberapa orang ini merasa perlu menggagas mendirikan madrasah.<sup>6</sup> Sumber lain menyatakan, Madrasah Pembangunan pada awalnya digagas oleh masyarakat komplek perumahan yang pada umumnya dosen IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menginginkan lembaga pendidikan yang dekat dengan

<sup>5</sup> Wawancara dengan ibu Mtq, Guru Madrasah Pembangunan, dia telah mengajar di MP selama 33 tahun, yaitu sejak tahun 1976

<sup>6</sup> Wawancara dengan Abdurahman Saleh, seorang saksi sejarah sekaligus pemerhati pendidikan Islam yang tinggal di daerah Ciputat, pada tanggal 21 Nopember 2008.

tempat tinggal mereka.<sup>7</sup> Sumber lain lagi menyatakan bahwa Madrasah Pembangunan berdiri berawal dari pemikiran orang-orang di lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang merasa perlu adanya lembaga pendidikan dasar dan menengah Islam yang bermutu.<sup>8</sup>

Hasil dari berbagai kebutuhan mahasiswa, warga kompleks perumahan di sekitar Kampus IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pihak kampus yang salah satunya memiliki fakultas dengan konsentrasi kependidikan (Fakultas Tarbiyah), maka lahirlah kerjasama mendirikan Madrasah Pembangunan. Merespon keinginan berbagai pihak yang menginginkan adanya lembaga pendidikan madrasah di lingkungan kampus IAIN, pada awal tahun 1972, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah saat itu, M Toha Yahya Omar, membentuk panitia pendirian dan gedung Madrasah Pembangunan.

Bulan Juni 1972, bertepatan dengan Lustrum III IAIN Syarif Hidayatullah, dimulailah pembangunan gedung madrasah yang berlokasi di Kompleks IAIN Syarif Hidayatullah dan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Agama RI pada masa itu, yaitu Prof. H. A. Mukti Ali dan oleh Rektor IAIN Syarif Hidayatullah.<sup>9</sup> Untuk pembinaan lembaga pendidikan Madrasah Pembangunan pada tahun 1974, diputuskan oleh Rektor IAIN Syarif dilakukan oleh suatu Tim Pembinaan yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah. Tugas tim ini diantaranya adalah menyiapkan Madrasah Pembangunan sebagai Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Mtq, Guru Madrasah Pembangunan yang telah mengajar selama 33 Tahun

<sup>8</sup> Tokoh-tokoh pendiri Madrasah Pembangunan adalah para pejabat IAIN Syarif Hidayatullah dan pejabat Depag pada masa itu, antara lain: Dr. Rahman Partosentono, Drs. Husen Segaf, Dr. Bakran Yakob, Dr. Agustiar, Drs. Muzakir, Drs. H. M. Ali Hasan (Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Guru dan Pengawasan Subdit V Direktorat Pendidikan Agama, Depag RI). H. Triwiryatmo, SH (Sekretaris IAIN Syarif Hidayatullah)

<sup>9</sup> IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai salah satu IAIN tertua di Indonesia, dan bertempat di Ibu Kota Jakarta, menempati posisi strategis dan unik, tidak hanya sebagai perguruan tinggi Islam tetapi juga sebagai "Jendela Islam di Indonesia" Konsep "*IAIN with wider mandate*" atau IAIN dengan mandate yang lebih luas menjadi dasar menuju terbentuknya Universitas Islam Negeri (UIN). Pada tanggal 20 Mei 2002, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta resmi menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan terbitnya Keputusan Presiden RI No. 031 Tanggal 20 Mei 2002. Keppres itu menjadi landasan legalitas formal perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dari penelusuran peneliti, selain keinginan para pelaku madrasah untuk membuktikan bahwa lembaga madrasah mampu berkualitas, ada unsur lain yang penting yang berkontribusi memajukan lembaga pendidikan ini, yaitu kepemimpinan. Ada dua unsur kepemimpinan yang turut menentukan dalam memajukan madrasah ini. *Pertama*, unsur kepemimpinan kepala madrasah. Dari tahun 1972 kepala Madrasah Pembangunan jenjang ibtidaiyah (dasar) sudah empat orang, yaitu: Tanjung (1972-1979), Masan AF (1980-1999), Nurzaman (2000-2006), dan Mulyadi, M Pd. (2006-2011). Kedua, unsur kepemimpinan Direktur yang membawahi madrasah dalam berbagai jenjang (MI, MTS, dan MA). Kepemimpinan direktur dimulai sejak Madrasah Pembangunan, disamping M,I membuka jenjang MTs (tingkat SMP) pada tahun 1977.<sup>10</sup>

Pada kepemimpinan Kepala Madrasah yang pertama, Bapak Tanjung (1972-1979), perkembangan madrasah Pembangunan berkembang layaknya lembaga pendidikan yang baru lahir. Persoalan yang terjadi pada periode awal ini secara umum sekitar bagaimana mendapatkan murid dan bagaimana menjalankan proses pembelajaran. Namun proses itu dapat dilampaui dengan berjalannya proses pendidikan yang berlanjut hingga meluluskan angkatan pertama. Belum ada *greget* yang menonjol yang membedakan dengan lembaga pendidikan lain pada periode ini selain suksesnya pendirian lembaga pendidikan baru. Lancar menyelenggarakan madrasah jenjang dasar (ibtidaiyah), Madrasah Pembangunan membuka jenjang Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP), di mana anak kelas-kelas tertentu telah lulus di kelas enam, maka dibutuhkan sekolah lanjutan sebagai tempat melanjutkan pendidikan. Maka pada awal tahun 1977 dibuka pendaftaran tingkat Tsanawiyah (setingkat SMP).

Kelahiran jenjang MTs dalam satu lingkungan Madrasah Pembangunan menjadikan madrasah ini selanjutnya mengarah menjadi madrasah terpadu. Hal ini kemudian dilirik Kementerian Agama RI bahwa Madrasah Pembangunan

---

<sup>10</sup> Hingga saat ini Madrasah Pembangunan telah dipimpin oleh 6 orang direktur secara berurutan, yaitu Muallimin (1977), Elman Sadri, Hamdi A Yusa, Purnomo, Farida Hamid, Ahmad Sufyan M.Pd (2010-sekarang).

layak menjadi model madrasah terpadu percontohan. Karena itu pada tahun 1978, sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Depag RI, Nomor: Kep/D/03/1978, Madrasah Pembangunan dinyatakan atau ditunjuk sebagai Madrasah Pilot Proyek Percontohan. Namun pernyataan atau penunjukan ini bukan berarti otomatis madrasah ini sudah unggul atau ada konsep operasional lembaga pendidikan unggul yang diberikan Kementerian Agama kepada Madrasah Pembangunan. Pernyataan dan penunjukkan ini masih sebatas keinginan dari berbagai pihak, khususnya orang-orang IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan orang-orang Kementerian Agama yang berpusat di Jakarta, agar di ibukota RI ini ada satu madrasah yang dijadikan percontohan.

Nampaknya efek dari penunjukkan ini mewarnai perkembangan Madrasah Pembangunan ini selanjutnya. Sejak saat itu dimulailah wacana penggagasan lembaga pendidikan yang bermutu, yaitu di akhir kepemimpinan Pak Tanjung. Bersamaan dengan semangat penggagasan itu, satu tahun kemudian ada pergantian kepala madrasah dari Pak Tanjung ke Pak Masan AF sebagai Kepala Madrasah. Pak Masan AF memimpin Madrasah Pembangunan selama kurang lebih 20 tahun (1979-1999). Pada zaman Pak Masan ini beberapa kegiatan terobosan untuk mencari model membuat lembaga pendidikan bermutu mulai dilakukan. Langkah yang pertama dilakukan, menurut pengakuan Pak Masan adalah para guru Madrasah Pembangunan pada tahun 1980 melakukan studi banding ke lembaga pendidikan Al Azhar, Jl. Sisingamangaraja Jakarta Selatan.<sup>11</sup> Kesimpulan dari studi ini, dalam evaluasi para guru adalah keberhasilan lembaga pendidikan Al Azhar adalah karena didukung pembiayaan pendidikan yang mahal. Menurut mereka adalah wajar sekolah Al Azhar bisa maju karena pembiayaannya sudah tercukupi.

Tidak puas dengan studi ke sekolah Al Azhar di Jakarta, tidak lama kemudian Pak Masan mengajak para guru untuk melakukan studi banding ke tempat lain, yaitu ke Jawa Tengah pada lembaga pendidikan di Pondok Pesantren

---

<sup>11</sup> Sekolah Al Azhar saat itu telah dikenal sebagai lembaga pendidikan yang berhasil merebut hati masyarakat di ibukota Jakarta.

Pabelan Magelang. Di Pabelan, para guru menyaksikan bagaimana proses pembelajaran berjalan dengan baik, sekalipun dengan gaji guru yang tidak berlebih. Nilai-nilai ibadah, keikhlasan, kesungguhan mewarnai proses pembelajaran di lembaga ini dan menghantarkan lembaga pendidikan ini menjadi pilihan masyarakat.

*“...Berebekal pengalaman studi di dua tempat itu, Madrasah Pembangunan mulai berbenah. Beberapa hal yang dilakukan adalah : lebih memperkenalkan Madrasah Pembangunan kepada masyarakat, dan meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. Usaha lebih memperkenalkan Madrasah Pembangunan dilakukan dengan cara Madrasah pembangunan lebih banyak bersosialisasi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan antar sekolah, muncul dalam salah satu acara di media televisi. Usaha meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran dilakukan dengan menerapkan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) sejak tahun 1984.”<sup>12</sup>*

Sejak itu, langkah-langkah pembenahan dilakukan baik pada wilayah kurikulum, pembinaan anak, pembinaan guru dan pengembangan cara belajar. Di bidang kurikulum, Madrasah Pembangunan menyamakan kurikulum di bidang mata pelajaran umum (non-agama) dengan kurikulum sekolah dasar umum, sedang kurikulum bidang agama tetap mengacu pada pengembangan kurikulum Kementerian Agama. Di bidang pembinaan anak, anak ditingkatkan partisipasinya dalam berbagai perlombaaan baik yang berkaitan dengan akademis siswa maupun yang non akademis seperti perlombaaan olahraga dan seni. Di bidang pembinaan guru, guru-guru mulai diikutkan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang ada di luar, dan sesekali mengundang orang ahli untuk diminta berceramah di Madrasah Pembangunan. Di bidang pengembangan cara belajar siswa, Madrasah Pembangunan mengadopsi sistem Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) yang didapatkan dari Cianjur.

Berbagai terobosan itu menyebabkan biaya pendidikan mulai naik. Maka pada tahun 1982 Pak Masan (Kepala Madrasah) dan Pak Elman Sadri (Direktur Madrasah Pembangunan) bersepakat menaikkan biaya pendidikan. Maka

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Masan AF, Kepala Madrasah Pembangunan periode 1979-1999. Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2011

diputuskanlah biaya SPP naik 100 % dari Rp. 1.500,- menjadi Rp. 3.000,-. Keputusan menaikkan biaya SPP sempat melahir pro dan kontra. Dari pihak yang pro, mereka memahami bahwa untuk melahirkan pendidikan yang berkeunggulan harus ada pengeluaran pembiayaan secara ekstra dari orang tua siswa. Dari pihak yang menolak, mereka mengatakan bahwa Madrasah Pembangunan tidak lagi berpihak ke rakyat kecil, tidak mensukseskan program pendidikan pemerintah yang sedang menggalakkan pendidikan wajib 6 tahun.

Ada dari salah satu orang tua siswa yang menolak kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih mahal di Madrasah Pembangunan, yang sempat menulis di koran harian ibukota saat itu dengan tujuan menggugat kebijakan pembiayaan di Madrasah tersebut. Tulisan itu berjudul kurang lebih "*Madrasah Pembangunan Menghambat Program Pendidikan Pemerintah 6 Tahun.*" Kebetulan saat itu Pemerintah RI sedang menggalakan wajib belajar 6 tahun. Untuk memperjelas hasilnya, orang tersebut kemudian bermaksud mengkonfrontir berita itu kepada Kepala Madrasah (Pak Masan AF).

Pak Masan bercerita, sekalipun dia agak kesal dengan ulah orang tua itu, namun dia berusaha menjawab secara diplomatis : "*...Bapak... kami terima kasih, Bapak telah menulis berita itu di koran. Bagi kami, berita ini adalah iklan gratis kami untuk mengenalkan madrasah kepada masyarakat. Belum tentu kami...kalau harus membuat iklan di koran kami mampu melakukannya...maka dengan tulisan ini, kami dengan sendirinya sudah terekspos...*" Jawaban Pak Masan terhadap orang itu. Menurut Pak Masan, barangkali orang itu mungkin kecewa mendapatkan jawaban itu, karena tidak sejalan dengan misi utamanya.

Sejak saat itu, ternyata perkembangan siswa Madrasah Pembangunan justru menunjukkan gejala meningkat. Dari tahun ke tahun jumlah siswa mengalami peningkatan yang fantastik. Puncaknya pada tahun 1996 Jumlah siswa Madrasah Pembangunan mencapai 1916 siswa. Masing-masing kelas (dari kelas I samapai VI) terdiri dari 8 rombongan belajar. Setelah tahun 1996, menyadari bahwa penerimaan murid perlu dibatasi, maka satu tahun kemudian tahun 1997, Madrasah Pembangunan mulai mengurangi penerimaan murid. Apalagi ada

himbauan dari pemerintah bahwa standar penyelenggaraan kelas untuk jenjang dasar paling ideal 28 siswa, maka secara perlahan Madrasah Pembangunan mulai menyesuaikan dengan jumlah itu.

**Tabel 8**  
**Perkembangan Siswa Madrasah Pembangunan (Jenjang SD) 1974 - 2010**

TAHUN	JUMLAH SISWA	TAHUN	JUMLAH SISWA
1974	58	1993	1726
1975	116	1994	1788
1976	160	1995	1889
1977	202	1996	1916
1978	243	1997	1882
1979	333	1998	1815
1980	380	1999	1790
1981	454	2000	1793
1982	503	2001	1769
1983	573	2002	1777
1984	648	2003	1821
1985	662	2004	1793
1986	720	2005	1801
1987	819	2006	1712
1988	945	2007	1765
1989	1029	2008	1710
1990	1191	2009	1638
1991	1405	2010	1576
1992	1600		

Catatan : Jumlah siswa tertinggi terjadi pada tahun 1996 dengan total siswa 1916 anak

Penunjang kemajuan Madrasah pembangunan yang lain adalah keberadaan yayasan. Pada tahun 1988, karena ada tuntutan dari pemerintah bahwa lembaga pendidikan swasta harus mempunyai badan hukum tersendiri, pada tahun itu Madrasah Pembangunan menggagas sebuah yayasan secara mandiri. Sesuai dengan Keputusan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah nomor 06 Tahun 1988, wewenang pembinaan dan pengelolaan Madrasah Pembangunan dilimpahkan kepada Yayasan Syarif Hidayatullah. Sedangkan dari sisi Madrasah Pembangunan sebagai Laboratorium IAIN Syarif Hidayatullah tetap dilaksanakan, khususnya terkait dengan sasaran pengembangan metode belajar mengajar dari Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah. Sejak saat itu, posisi

pimpinan IAIN hanyalah sebagai pembina. Keputusan tertinggi ada pada rapat umum yayasan Syarif Hidayatullah.

Perkembangan lain, kesuksesan Madrasah Pembangunan mengundang sekelompok masyarakat yang meminta Madrasah pembangunan untuk membuka kelas jauh. Memenuhi permintaan itu, pada tahun 1991 tidak hanya menyelenggarakan pendidikan di lokasi MP saat ini, tetapi MP juga membuka kelas jauh, yaitu di luar kompleks Madrasah Pembangunan yaitu di Kompleks Pamulang Permai I Pamulang Tangerang.<sup>13</sup>

Sejarah pertumbuhan Madrasah Pembangunan beriringan dengan sejarah perkembangan IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat Tangerang dari tahun 1972 hingga sekarang. Demikian juga ketika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah berubah status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah (2002), sesuai dengan Kepres No. 031 Tahun 2002, maka atas dasar Surat Edaran Rektor UIN Syarif Hidayatullah Nomor: EBI/Kp. 01. 1/1372/VI/2002, Yayasan Syarif Hidayatullah merubah nama Madrasah Pembangunan 'IAIN' Jakarta menjadi Madrasah Pembangunan 'UIN' Jakarta. yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Yayasan Syarif Hidayatullah Nomor 14 Tahun 2002.

Peran kepemimpinan Kepala Madrasah pada paruh perjalanan awal, nampaknya lebih mewarnai perkembangan madrasah. Mulai tahun 2000-an, diakui oleh para Kepala Madrasah,<sup>14</sup> peran Direktur di yayasan mulai besar. Ini dirasakan sejak kepemimpinan Ibu Farida Hamid (1999-2009) yang membuat berbagai terobosan pengembangan. Sesuai dengan latar belakang Ibu Farida Hamid sebagai orang-orang profesional, maka pengembangan Madrasah Pembangunan diperkuat dari sisi perencanaan dan infra strukturnya. Dari sisi perencanaan, mulailah dipertegas selain visi dan misi juga motto pendidikan. Madrasah pembangunan membuat motto : "*Basic science, Bahasa dan Akhlakul*

<sup>13</sup> Dalam hal ini, Yayasan Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan Yayasan Al Hidayah. Yayasan Syarif Hidayatullah sebagai penyelenggara pendidikan, sedangkan Yayasan Al Hidayah sebagai penyedia lahan.

<sup>14</sup> Wawancara terpisah dengan Pak Masan AF (Kepala Madrasah Pembangunan 1980-1999), dan dengan Pak Mulyadi (Kepala Madrasah Pembangunan jenjang ibtidaiyah 2006-2012)

Karimah.” Motto ini berarti Madrasah ingin membangun tiga keunggulan, yaitu penguasaan sains, penguasaan bahasa dan pembentukan akhlak yang baik. Dari sisi infrastruktur, pada tahun 2004 Gedung Madrasah Pembangunan dibangun secara besar-besaran.

Salah satu tanda kemajuan madrasah juga ditandai dengan keberadaan gedung Madrasah Pembangunan berdiri megah yang tidak kalah dengan gedung perguruan tinggi. Keberadaan gedung megah MP menjadi icon tersendiri di daerah Ciputat bahwa di sana sudah hadir sebuah sekolah dengan sarana-prasarana yang lengkap sehingga dapat diandalkan dalam menggaet siswa-siswa dari masyarakat menengah kota. Berbeda dengan kebanyakan madrasah di tanah air yang memiliki masyarakat pendukung yang biasanya dari kelas masyarakat bawah, MP berhasil membuktikan diri bahwa madrasah juga bisa menjadi sekolah dengan fasilitas yang memadai yang layak diminati oleh masyarakat kelas menengah kota.

Untuk membuktikan bahwa madrasah mampu menjadi lembaga pendidikan yang bermutu dan diminati masyarakat perkotaan, MP melakukan segala cara mencoba mewujudkan madrasah ini sebagai lembaga pendidikan alternatif. Langkah-langkah mewujudkan cita-cita itu dilakukan baik dari sisi kinerja pendidikan maupun dari sisi pembangunan image (*image building*). Hasilnya, ternyata tidak mengecewakan. Saat ini MP telah berhasil menjadi lembaga pendidikan yang diminati oleh masyarakat kelas menengah perkotaan. Sekalipun biaya masuk relatif mahal bila dibandingkan dengan lembaga pendidikan setingkat, namun dari 8 kelas yang disediakan untuk setiap tahunnya ternyata jumlah itu dapat dipenuhi, bahkan telah menolak sebagian pendaftar.

Dari catatan dan pengamatan peneliti, MP melakukan berbagai terobosan dalam rangka menjaring anak-anak dari masyarakat kelas menengah kota ini. Salah satunya, untuk mengakomodasi budaya masyarakat urban di Jakarta yang biasanya bekerja lima hari kerja dari Senin hingga Jum’at, maka MP inipun melakukan penyesuaian (adaptasi) yaitu dengan belajar hanya lima hari Senin sampai Jum’at. Strategi ini cukup berhasil menjadi daya tarik tersendiri untuk

mendekatkan madrasah ini dengan masyarakat kelas pekerja di Jakarta. Baik orang tua maupun anak mempunyai kesempatan berliburan secara bersama.

Terobosan lain yang dilakukan madrasah adalah membuat motto pendidikan yang menarik dari sisi periklanan. Sebuah spanduk dipasang di pintu gerbang masuk terdapat slogan yang menarik yang merupakan motto madrasah ini, yaitu *more than just islamic school* yang artinya “lebih dari sekedar sekolah Islam.” Menurut informasi yang berhasil saya peroleh slogan itu dimaksudkan agar MP ini mempunyai kelebihan dan prestasi lebih dibanding dengan sekolah Islam (baca: madrasah) lainnya.

## **B. Melacak Konsepsi Pendidikan Bermutu**

Keberhasilan Madrasah Pembangunan diminati masyarakat perkotaan, menurut saya adalah salah satu keberhasilan lembaga pendidikan ini dalam mempertaruhkan identitas dan mutu. Kultur perkotaan yang mulai cair, memudarnya peran kontrol masyarakat terhadap perkembangan anak menyebabkan banyak orang tua di kota was-was dengan perkembangan kepribadian anak. Para orang tua tidak memungkiri bahwa jam mereka habis untuk bekerja dan bersaing untuk hidup layak di kota. Dalam konteks demikian, maka lembaga pendidikan yang mengajarkan pelajaran agama dalam porsi yang cukup menarik perhatian masyarakat menengah perkotaan. Madrasah menjadi salah satu pilihan jawaban permasalahan tersebut. Namun memilih madrasah yang mengajarkan materi agama dalam porsi yang banyak saja tidak cukup, masyarakat perkotaan juga mempertimbangkan aspek mutu lembaga pendidikan. Artinya madrasah yang bermutu adalah lembaga pendidikan yang diminati.

Bicara mengenai mutu atau lembaga pendidikan dianggap bermutu adalah persoalan yang multitafsir.<sup>15</sup> Persoalan mutu, menjadi persoalan kedua dalam kontestasi yang terjadi antara lembaga madrasah dengan lembaga pendidikan

---

<sup>15</sup> Edward Sallis (2006: 51) menyebutkan Mutu merupakan suatu ide yang dinamis, sedang definisi-definisi yang kaku sama sekali tidak akan membantu. Memang, makna mutu yang demikian luas juga sedikit membingungkan pemahaman kita. Akan tetapi, beberapa konsekuensi praktis yang signifikan akan muncul dari perbedaan-perbedaan makna tersebut. Dengan alasan tersebut, mutu membutuhkan diskusi lebih lanjut.

lain. Sebelum memetakan posisi *bargaining* yang terjadi, terlebih dahulu saya ingin mengetahui bagaimana sebagian orang tua memahami persoalan mutu ini. Menjadi lembaga pendidikan yang bermutu, seperti yang telah disinggung sebelumnya, merupakan tujuan pendidikan Madrasah Pembangunan. Persoalannya, apa yang dimaksud madrasah bermutu oleh para guru di madrasah pembangunan? Untuk menggali jawaban sebagian pendukung madrasah saya mencoba mengeksplorasi dengan mengamati, bertanya kepada wali murid dan bertanya pada pimpinan Madrasah.

Ketika saya mencoba bertanya kepada salah satu wali murid Madrasah Pembangunan tentang bagaimana persepsinya mengenai lembaga pendidikan itu bermutu. Ibu Hry (37 tahun) menyebutkan alasan menyekolahkan anaknya ke Madrasah Pembangunan karena pertimbangan mutu. Dia menganggap bahwa Madrasah Pembangunan telah bisa dianggap bermutu, karena menurutnya.

*“ .... MP menawarkan pendidikan dengan pendekatan keagamaan dan umum. Selain itu MP sejauh ini sudah teruji diminati oleh masyarakat. Dan satu lagi menyekolahkan anak di MP adalah prestige tersendiri...”* Jawaban Ibu Hry (wali murid siswa MP).<sup>16</sup>

Menurut ibu Hry, mutu Madrasah Pembangunan telah teruji dalam sejarah. Sejak pendiriannya tahun 1974 hingga sekarang tahun 2009 sudah berusia 36 tahun, Madrasah Pembangunan makin berkembang dan makin besar saja. Terbukti, hingga kini MP diminati masyarakat, yang berarti sekolah itu sudah berkualitas dan diterima masyarakat. Selain aspek mutu, menurut ibu Hry ini ada juga orang tua yang menyekolahkan anaknya di Madrasah Pembangunan ini karena beranggapan menyekolahkan anak ke madrasah ini merupakan prestige tersendiri. Kalau ditanya orang: “anaknya sekolah di mana?” maka dengan rasa bangga, mereka akan menjawab: “di Madrasah Pembangunan.” Sekaligus menambahkan cerita bahwa untuk masuk di sana biayanya besar, yaitu sekitar 10 juta lebih.

---

<sup>16</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Januari 2008

Lain lagi, ketika saya mencoba menanyai Kepala Madrasah Pembangunan, tingkat ibtidaiyah (sederajat dengan sekolah dasar), tentang pemahaman dia mengenai mutu, dia menjawab.

*“ ... Sekolah itu bermutu kalau sekolah itu teruji dalam kualitas akademik dan non akademiknya. Teruji secara akademik bila sekolah itu mampu bersaing dengan sekolah luar dalam bidang-bidang akademik seperti olimpiade sains, nilai UAS. Teruji secara non akademik adalah bila sekolah itu mempunyai prestasi-prestasi tambahan seperti olahraga dan seni...”<sup>17</sup>*

Menurut Kepala Madrasah ini, lembaga pendidikan dianggap bermutu kalau lembaga pendidikan tersebut mempunyai nilai kompetitif baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

Di luar itu, ada yang beranggapan bahwa lembaga pendidikan yang berkualitas adalah lembaga pendidikan yang mampu meluluskan siswa dengan nilai tinggi. Apalagi ketika penerimaan siswa di lembaga pendidikan tingkat lanjut mensyaratkan nilai hasil ujian akhir nasional (UAN) siswa. Lembaga pendidikan yang bisa menghasilkan rata-rata siswa dengan nilai tinggi dianggap lebih bermutu dibandingkan lembaga pendidikan yang menghasilkan nilai ujian siswa dengan nilai rata-rata yang rendah. Implikasi dari pandangan seperti itu, orang tua murid berlomba-lomba mendorong anaknya untuk mendapatkan hasil UAN yang baik dengan menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan yang berhasil mendorong siswa dengan nilai tinggi waktu ujian akhir.

Diskusi mengenai ‘mutu’ sebuah pendidikan, nampaknya tidak pernah ada satu kata sepakat apa itu definisi mutu. Namun kalau boleh jujur semua pihak atau semua orang berkepentingan dengan apa yang disebut mutu itu tadi. Lain kepala orang lain pula asumsi mengenai mutu ini. Pada konteks Madrasah Pembangunan, saya mencatat ada tiga konsep yang berkembang dalam menjadikan lembaga pendidikan ini dapat disebut bermutu. Ini bukan berarti

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Mulyadi, Kepala Madrasah Pembangunan tingkat ibtidaiyah (dasar). Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Nopember 2007

pengertian bermutu itu terbatas pada tiga ini, barangkali masih banyak konsepsi mutu dilihat dari sudut pandang dan tinjauan lain yang bisa digunakan.

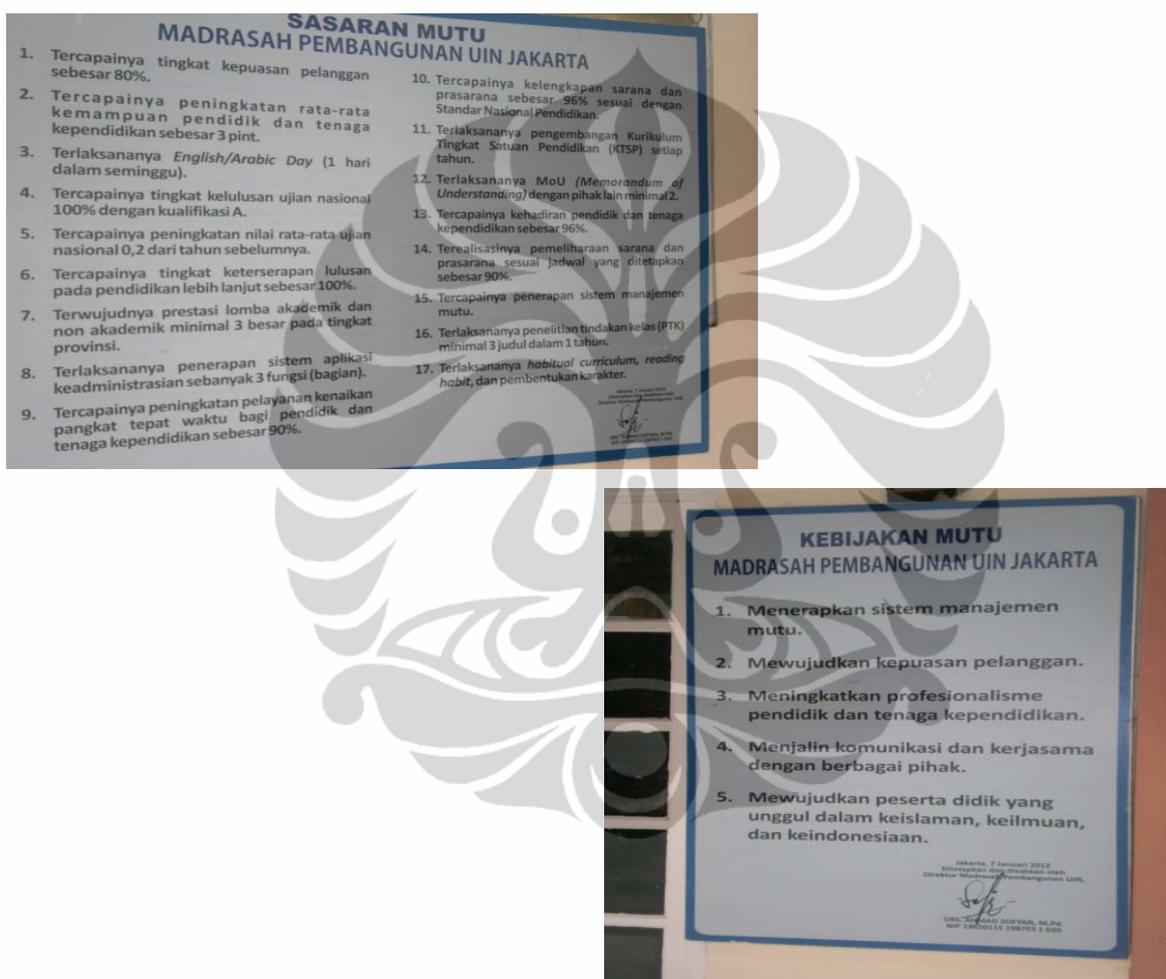
Ketiga konsepsi itu adalah: *pertama*, lembaga pendidikan dianggap bermutu bila lembaga pendidikan itu menghasilkan kepuasan masyarakat pendukungnya. Pendukung beranggapan bahwa madrasah bermutu karena lembaga pendidikan ini mengajarkan materi umum dan materi agama secara integral. Artinya lembaga pendidikan yang hanya dominan aspek pelajaran umumnya, atau sebaliknya hanya dominan mengajarkan pelajaran agama, dianggap belum lengkap dan sempurna untuk menjadi lembaga pendidikan bagi anak. Tidak cukup sampai di sana, lembaga pendidikan yang sudah mengajarkan pelajaran umum dan agama secara seimbang namun tidak memberikan nilai kompetitif juga belum bisa dianggap bermutu. Jadi gabungan dari ketiga hal (materi umum, agama dan kompetitif) menjadi nilai pokok untuk menyebut sekolah bermutu. *Kedua*, lembaga pendidikan dianggap bermutu kalau lembaga pendidikan tersebut mempunyai nilai kompetitif dalam bidang akademik dan non akademik. *Ketiga*, konsepsi dalam arti khusus yaitu lembaga pendidikan dianggap bermutu bila hasil pelajaran-pelajaran yang dianggap pokok atau utama seperti mata pelajaran yang di ujian negarakan (di UN kan) seperti Matematika, IPA dan Bahasa Inggris rata-rata siswa mendapatkan nilai yang bagus.

Sampai di sini, istilah bermutu dapat dibaca merentang dari unggul dalam makna khusus hingga unggul dipahami pada makna luas.<sup>18</sup> Pada makna khusus,

---

<sup>18</sup> Beberapa pemikir manajemen modern telah mencoba mengembangkan gagasan mutu dalam manajemen yang bisa kita ambil sebagai cermin dalam memandang manajemen mutu dalam pendidikan. Edward Sallis mencoba melacak sejarah pentingnya definisi mutu yang kemudian dia temukan dalam konteks proses produksi. Untuk mendapatkan produk yang bermutu, dalam sejarah manajemen telah terdapat beberapa model pendekatan untuk memperoleh produk yang bermutu. Pertama, melalui pendekatan kontrol mutu (*quality control*). Proses control mutu ini lebih memperhatikan produk pasca produksi dengan tehnik melacak dan menolak item-item produk yang cacat. Untuk pendekatan ini dibutuhkan peran orang sebagai inspektur kontrol mutu. Kedua, pendekatan jaminan mutu (*quality assurance*). Pendekatan ini dilakukan melalui pemenuhan spesifikasi produk secara konsisten atau menghasilkan produk yang 'selalu baik sejak awal'. untuk memperoleh produk yang bermutu, tanggungjawab menghasilkan mutu dibebankan kepada pelaksana/tenaga kerja. *Ketiga*, Pendekatan mutu terpadu (*total quality management/TQM*). Pendekatan ini dilakukan dengan usaha menciptakan sebuah kultur mutu, yang mendorong semua pelaksana yang terlibat berusaha memuaskan pelanggan. Beban tanggungjawab menjadi

unggul dipahami apabila sebuah sekolah yang mampu menghasilkan siswa-siswa yang kuat pada mata pelajaran yang di UN (ujian Negara) kan, yaitu sekolah yang menghasilkan siswa-siswa yang jago atau kuat pada mata pelajaran Matematika, IPA dan bahasa Inggris (atau ketiganya sekaligus). Unggul dengan makna luas, adalah sebuah kriteria unggul yang dibuktikan dengan unggul di semua bidang, yaitu bidang akademik dan non akademik.



Gambar 8. Slogan-slogan mutu ditempel di dinding Gedung Madrasah Pembangunan

beban semua pelaksana. Posisi pelanggan dianggap sebagai raja. Sallis, *Total Quality Management in Education* (Penerjemah, Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi). Yogyakarta: Ircisod. 2006

W. Edward Deming (1982) mengenalkan 14 poin tentang mutu.<sup>19</sup> Menurutnya, persoalan mutu adalah persoalan dalam manajemen. Kebanyakan perencanaan lebih terkonsentrasi pada apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan oleh organisasi, bukan demi mutu. Joseph Juran, mengenalkan konsep perhitungan 85/15. Menurutnya, 85 persen masalah mutu tergantung pada masalah manajemen, karena manajemen mengontrol 85 persen dari keseluruhan kegiatan. Sementara 15 persen adalah faktor non manajemen. Karena itu untuk mendapatkan mutu, menurut Juran ini adalah mengembangkan manajemen mutu strategis (*strategic quality management*). Lain lagi, Philip Crosby yang mengenalkan dua gagasannya: 1) mutu adalah gratis (*quality is free*); 2) semua hal yang tidak bermutu (kesalahan, kegagalan, pemborosan, penundaan waktu) pada dasarnya bisa dihilangkan apabila institusi memiliki kemauan untuk itu

Dalam menghadapi globalisasi atau keadaan yang serba mendunia, semua institusi berkepentingani dengan sebutan 'mutu' ini, tak terkecuali madrasah. Bagaimana madrasah menggagas dirinya menjadi lembaga pendidikan yang bermutu? Dalam kasus Madrasah Pembangunan, menjadi 'sekolah yang bermutu' merupakan kata kunci bagi mereka baik masyarakat bawah maupun kelompok kelas menengah dalam memilih madrasah untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Walaupun kata mutu itu sendiri masih mengundang banyak interpretasi, namun kata-kata mutu telah menjadi kata ajaib yang bisa menarik minat orang banyak.

---

<sup>19</sup> Keempat belas prinsip menurut Edward Deming itu meliputi: 1) ciptakan usaha untuk peningkatan produk dan jasa; 2) untuk perubahan, adopsi falsafah baru; 3) hindari kebergantungan pada inspeksi massa, bekali staf dengan teknik mendapatkan mutu; 4) kembangkan mutu terpadu; 5) tingkatkan secara konstan sistem produksi dan jasa; 6) lembagakan pelatihan kerja; 7) lembagakan kepemimpinan; 8) ciptakan rasa aman; 9) uraikan kendala-kendala antar departemen; 10) hapuskan slogan, desakan dan target serta tingkatkan produktifitas tanpa penambahan beban kerja; 11) hapuskan standar kerja yang menggunakan quota numeric; 12) hilangkan kendala-kendala yang merampas kebanggaan karyawan atas keahliannya; 13) lembagakan program-program yang meningkatkan semangat dan peningkatan kualitas kerja; 14) tempatkan orang-orang dalam setiap tim kerja agar dapat melakukan transformasi.

*Indikator mutu yang dipergunakan oleh Madrasah Pembangunan adalah: 1) Apabila kurikulum yang dikembangkan MP teruji, yaitu melahirkan output yang cerdas dan religius; 2) Output yang dihasilkan mempunyai keunggulan yang signifikan, artinya adanya distingsi antara alumni MP bila dibandingkan dengan sekolah lain; 3) Masyarakat melihat hasil yang nyata.<sup>20</sup>*

Untuk mengejar mutu akademis, Madrasah Pembangunan melakukan berbagai cara seperti:

*...memonitor semangat guru, meningkatkan pendekatan pembelajaran dengan berbagai pelatihan, selalu mengevaluasi sitem penilaian guru, melakukan remedial bagi siswa yang tertinggal, melakukan kerjasama dengan psikolog dalam menangani kasus-kasus khusus pada siswa, dan terakhir adalah membicarakan kepada orang tua siswa....<sup>21</sup>*

### **C. Memilih Status Swasta: Mensiasati Pembiayaan**

Ketika sebagian madrasah berlomba mengusulkan diri menjadi madrasah negeri untuk mendapatkan pembiayaan dari negara,<sup>22</sup> MP justru mengambil langkah sebaliknya. Hingga saat ini MP memilih untuk tetap menjadi madrasah dengan status swasta, dan tidak mau dinegerikan. Ini bukan berarti MP tidak bersinggungan dengan kebijakan langsung dari Negara.<sup>23</sup> Untuk alasan kemandirian, status kelembagaan yang swasta dianggap lebih strategis dan menantang bila dibandingkan kalau lembaga ini menjadi negeri. Karena dengan begitu, para pengelola bisa memasang target sekaligus berimprovisasi dalam

<sup>20</sup> Wawancara dengan Mulyadi pada tanggal 20 Januari 2008

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Sejak kemerdekaan Indonesia, sejarah perkembangan madrasah diwarnai gambaran dari madrasah yang pada awalnya berada di luar sistem Negara, kemudian secara bertahap berintegrasi dengan sistem pendidikan yang dibangun oleh Negara (Sisdiknas). Puncak integrasi itu terjadi ketika keluarnya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 di mana madrasah mempunyai kedudukan yang sama persis dengan sekolah, yakni sama-sama sebagai sekolah formal. Seiring dengan proses integrasi madrasah terhadap sistem pendidikan nasional, banyak madrasah yang mulai dinegerikan. Madrasah yang dianggap memadai untuk dinegerikan segera diusulkan untuk menjadi negeri.

<sup>23</sup> Pada tahun 1978, sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Depag RI, Nomor: Kep/D/03/1978, MP dinyatakan sebagai Madrasah Pilot Proyek Percontohan.

pencapaian target. Walau begitu, MP tidak menolak bila diberi bantuan guru dengan status negeri.

*... Madrasah Pembangunan sejak awal didirikan untuk menjadi sekolah yang bermutu. .... Madrasah Pembangunan sejak awal, mengingat statusnya yang swasta, menetapkan biaya yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa sekolah di sekelilingnya. Keberatan tentang biaya justru datang dari masyarakat dalam kompleks. Namun setelah dijelaskan maksudnya, keberatan itupun sirna. ...<sup>24</sup>*

Salah satu implikasi dan arena penguatan politik identitas pada satuan lembaga pendidikan adalah persoalan terkait dengan pertarungan pada persoalan pembiayaan pendidikan. Hal itu disadari betul oleh MP. Menyadari implikasi tersebut, tanpa mengabaikan sumber pembiayaan yang berasal dari negara, MP memilih menjadi lembaga pendidikan swasta. Dana yang berasal dari negara seperti Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dihitung berdasarkan jumlah satuan siswa diterima oleh Madrasah pembangunan sebagai tambahan pendanaan. Namun dari negara itu bukan dana yang paling dominan. Dana yang paling besar justru berasal dari masyarakat. Dengan menjadi lembaga pendidikan swasta, maka MP bisa menentukan harga biaya pendidikan yang ditawarkan. Kutipan berikut ini nampak sekali mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan pendidikan bermutu maka lembaga pendidikan ini sejak awal menerapkan biaya yang lebih tinggi. Strategi biaya lebih tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan ini adalah strategi yang biasa diambil oleh lembaga pendidikan swasta.

*Madrasah Pembangunan sejak awal didirikan digagas untuk menjadi sekolah yang bermutu. Didirikan oleh masyarakat kompleks perumahan dosen UIN Syarif Hidayatullah yang kebanyakan adalah para dosen di perguruan tinggi tersebut. Sambutan terhadap kehadiran madrasah datang tidak hanya dari masyarakat yang tinggal di dalam kompleks. Dari luar kompleks pun banyak masyarakat yang memasukkan anaknya ke madrasah. Madrasah Pembangunan sejak awal, mengingat statusnya yang swasta, menetapkan biaya yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa sekolah di sekelilingnya. Keberatan tentang biaya*

<sup>24</sup> Penjelasan Ibu Mtq, Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Nopember 2007

*justru datang dari masyarakat dalam kompleks. Namun setelah dijelaskan maksudnya, keberatan itupun sirna. Sementara masyarakat luar kompleks yang menyekolahkan ke madrasah tersebut justru kebanyakan dari para pegawai atau pengusaha swasta. Kebanyakan pegawai negeri di luar kompleks menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri baik sekolah dasar atau madrasah negeri.*

*Murid MP mulai melonjak banyak ketika MP sering tampil di Televisi. Melalui acara menyanyi atau cerdas cermat, Madrasah Pembangunan mulai dikenal oleh masyarakat luas. Sejak itu murid-murid mulai berdatangan. Biaya yang sedikit mahal tidak lagi menjadi soal bagi para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke Madrasah Pembangunan.<sup>25</sup>*

Dari cerita di atas, ada beberapa poin bisa digarisbawahi terkait dengan kebijakan MP mengembangkan lembaga pendidikan yang mandiri dan mampu berkontestasi dalam konteks globalisasi. Pertama, bahwa madrasah ini sejak awal memang telah digagas untuk menjadi sekolah yang lebih bermutu. Keinginan ini terkait dengan keberadaan madrasah ini yang berada di lingkungan perumahan orang terdidik, yaitu di lingkungan perumahan para dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kedua, untuk meraih mutu yang diinginkan, madrasah ini menetapkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya sekolah disekitarnya. Ini nampaknya terkait juga dengan kebijakan kenapa madrasah ini memilih berstatus swasta, tidak mau dijadikan madrasah negeri. Ketiga, perkembangan madrasah ini banyak didukung oleh peran masyarakat yang justru berasal dari kalangan pegawai swasta, di mulai masyarakat sekitar di luar kompleks Perumahan hingga masyarakat secara lebih luas. Keempat, madrasah ini semakin meningkat jumlah peminatnya ketika madrasah ini mulai melakukan usaha promosi atau membangun image melalui pemunculan kegiatan siswa madrasah melalui layar televisi.

#### **D. Sistem Pembelajaran dan Pengembangan Kurikulum**

Madrasah dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang memberikan porsi yang lebih besar dalam pembelajaran agama bila dibandingkan

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ibu Mtq, guru senior di MP. Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Nopember 2007

dengan sekolah umum.<sup>26</sup> Artinya, sebagian masyarakat memilih menyekolahkan anak ke madrasah, dan tidak ke sekolah umum, karena didorong agar anak mereka mendapatkan pelajaran agama lebih banyak. Masyarakat beranggapan, kalau madrasah tidak lagi bisa memberikan porsi yang cukup dalam pembelajaran agama, maka tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk memilih madrasah sebagai lembaga pendidikan untuk anak mereka.

Dalam mengembangkan arah pendidikan yang unggul, MP mencoba mengembangkan strategi pembelajaran dan kurikulum sedemikian rupa. MP menetapkan *trade mark* (ciri khas) tertentu sebagai landasan berpijak dan merumuskan strategi dalam proses pendidikan. *Trade mark* yang dirumuskan MP adalah "*basic science, bahasa, dan akhlaqul karimah.*" MP nampaknya ingin menjual motto di atas sebagai inti bisnis yang ingin dikembangkan di madrasah.

Dengan menggunakan tiga istilah kunci yang digunakan oleh para aktor MP dalam membangun image mengenai lembaga ini, yaitu "*Basic science, Bahasa, dan Akhlakul Karimah.*" Dalam upaya mempertahankan dan usaha untuk lebih meningkatkan prestasi dan reputasi, maka MP UIN Jakarta menitikberatkan pembinaan dan pengembangan pada ketiga istilah itu. Ketiga istilah itu menjadi ciri khas atau *trade mark* yang sengaja dibangun oleh para pelaku pendidikan di lembaga tersebut. Titik berat pembinaan dan pengembangan ini menjadi *trade mark* MP dan menjadi landasan penyusunan program tahunan sehingga hasilnya akan dirasakan oleh peserta didik. Kenaikan *grade* kualitas itu nampaknya dimotivasi oleh tantangan yang dikembangkan oleh MP. MP memosisikan tantangan globalisasi sebagai sebuah kenyataan kebudayaan yang harus dihadapi oleh masyarakat madrasah.

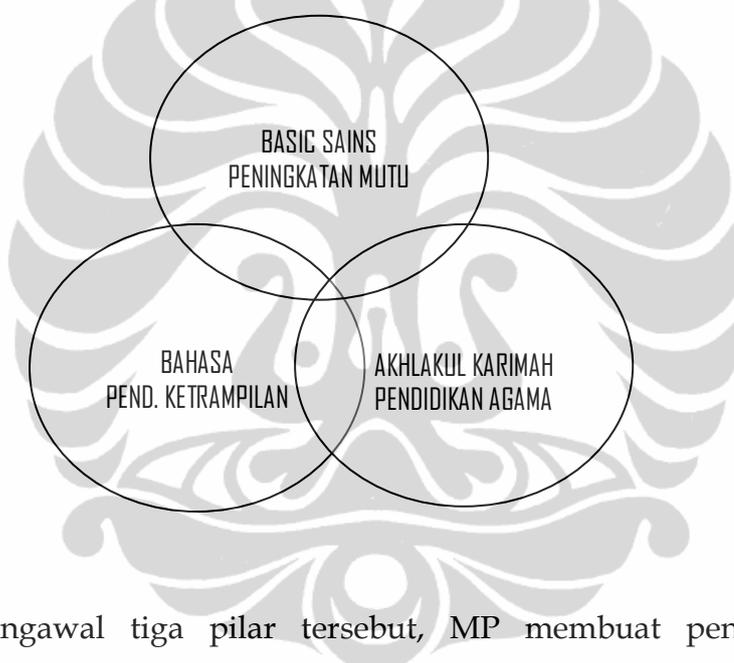
Dengan penetapan *trade mark* tersebut membawa konsekuensi logis pada perubahan kurikulum yang dilaksanakan pada tahun pelajaran. 1) Materi *Basic*

---

<sup>26</sup> Penting untuk diperhatikan bahwa ciri lain pendidikan madrasah adalah pembinaan jiwa agama dan akhlak anak didik. Inilah yang menjadi identitas sebenarnya dari pendidikan madrasah yang perlu diperhatikan oleh para pengelola dan guru lembaga pendidikan Islam itu. Pendidikan dan pengajaran dalam madrasah harus diarahkan kepada pembinaan keyakinan agama, sehingga hidupnya selalu berpedoman kepada ajaran Islam. Lihat Zakiah Daradjat dalam "*Pengantar*" buku Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. vii.

*science*, materi ini diberikan jam tatap muka lebih banyak dari yang ditetapkan dalam kurikulum, dalam upaya mencapai prestasi belajar yang lebih baik. 2) Materi Bahasa, yaitu bahasa asing yang terdiri dari Bahasa Arab dan Inggris jam tatap mukanya ditambah, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam komunikasi global; 3) Materi Akhlaqul Karimah. Materi ini terintegrasi pada setiap mata pelajaran yang tertuang dalam KBM dan dalam kegiatan *hidden curriculum* (HC).<sup>27</sup>

Gambar 9.  
Tiga Pilar Keunggulan:  
Gagasan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Madrasah Pembangunan



Untuk mengawal tiga pilar tersebut, MP membuat pengelompokan pelajaran yang masing-masing pengelompokan didukung tim yang beranggotakan guru sebagai konsorsium guru mata pelajaran. Pengelompokan dan konsorsium yang dibentuk meliputi: konsorsium agama, konsorsium ini menangani pengembangan mata pelajaran agama dalam rangka mewujudkan akhlaqul karimah; konsorsium bahasa menangani pengembangan bahasa pada anak didik yang meliputi penguatan bahasa Arab, Inggris dan Indonesia; dan konsorsium umum, menangani semua mata pelajaran umum (*Basic science*). Untuk konsorsium umum ini dipecah lagi menjadi dua, yaitu konsorsim umum

<sup>27</sup> Kurikulum MI Pembangunan UIN Jakarta, Tahun 2007

selain pelajaran MIPA (IPS, PPKN dan Bahasa Indonesia) dan konsorsium MIPA, konsorsium ini menangani pengembangan mata pelajaran Matematika dan IPA.

**Struktur Kurikulum.** Struktur Kurikulum yang dikembangkan MP Ciputat meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun mulai kelas I sampai kelas VI, yang memuat 12 Mata Pelajaran ditambah Muatan Lokal dan Pengembangan Diri. Pendekatan Pembelajaran Kelas I, II dan III menggunakan pendekatan semi tematik, sedangkan untuk Kelas IV, V dan VI tetap mengacu kepada pengajaran per mata pelajaran.

Struktur kurikulum MP terdiri dari 4 kelompok mata pelajaran, yaitu: 1) Kelompok mata pelajaran Agama, yaitu: Aqidah Akhlak, Fiqh, Al Quran Hadits, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI); 2) Kelompok mata pelajaran Umum, yaitu: Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Ilmu pengetahuan sosial, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bimbingan Konseling (BK), dan Keterampilan; 3) Kelompok mata pelajaran Bahasa, yaitu: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab; 4) Kelompok mata pelajaran MIPA, yaitu: Matematika, IPA, dan Sempoa.

**Muatan Kurikulum.** Struktur program pengajaran di Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan mengacu pada Permendiknas No. 22, 23 dan 24, Pedoman penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan BSNP, dan surat edaran Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia dengan beberapa penyesuaian menjadi kurikulum lokal MP UIN Jakarta. Muatan kurikulum meliputi: mata pelajaran wajib dan hidden curriculum.

Mata pelajaran Wajib, meliputi: a) Pendidikan Agama Islam terdiri dari: Al Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam; b) Pendidikan Kewarganegaraan; c) Bahasa Indonesia; d) Bahasa Arab; e) Bahasa Inggris; f) Matematika; g) Ilmu Pengetahuan Alam; h) Ilmu Pengetahuan Sosial; i) Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan; j) Seni Budaya dan Keterampilan

**Hidden Curriculum.** Salah satu program khusus di bidang kurikulum yang dikembangkan di MI Pembangunan UIN adalah *Hidden Curriculum* atau kurikulum tersembunyi. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum atau sesudah

proses kegiatan belajar mengajar secara bergantian setiap hari, meliputi: 1) pembinaan akhlak dan pembiasaan ibadah; 2) *Reading Hours* (Budaya Baca) dilakukan sebelum istirahat kedua atau ditengah kegiatan belajar mengajar; 3) *Tahsinul Qur'an* (Bina Baca al Qur'an). Kegiatan ini dilakukan setelah selesai kegiatan belajar mengajar.

Pembinaan akhlak dan pembiasaan ibadah dilakukan selama tiga puluh menit sebelum jam pelajaran pertama yang dilakukan setiap hari. Cakupan materinya meliputi: Al Qur'an Hadits,<sup>28</sup> Aqidah Akhlak,<sup>29</sup> Fiqh<sup>30</sup> dan PPKN.<sup>31</sup>

*Reading Hours* (Budaya Baca). Membaca adalah jendela dunia, menyadari itu MP berupaya untuk meningkatkan minat baca siswa dengan memberikan waktu khusus selama 15 menit untuk membaca buku yang telah ditentukan bersama antara guru dan siswa. Kegiatan budaya baca dilaksanakan dalam suasana santai, tanpa tuntutan apapun kecuali setiap siswa harus membaca sebuah buku yang telah disepakati dengan guru. Pada kondisi tertentu guru dapat meminta siswa untuk menceritakan atau membuat sinopsis dari buku yang dibacanya.

*Tahsinul Qur'an* (Bina Baca al Qur'an). MI Pembangunan memberikan pengayaan muatan agama, dengan melakukan penekanan sangat serius pada kemampuan membaca al Quran, karenanya kepada setiap siswa diharuskan memiliki kemampuan membaca al Quran yang baik. Bagi siswa yang belum memiliki kemampuan membaca al Quran yang baik diharuskan mengikuti

---

<sup>28</sup> Materi Al Quran - Hadits disusun mengacu kepada kaidah-kaidah serta tujuan kurikuler sebagaimana yang terdapat dalam Kurikulum sesuai dengan tingkatannya, dengan penekanan pada: mempraktekkan kemampuan membaca Al Quran dengan tartil dan Mempraktekkan kemampuan membaca Al Quran sesuai dengan bacaan yang telah ditentukan.

<sup>29</sup> Materi Aqidah Akhlaq mengacu kepada kaidah-kaidah serta tujuan kurikuler sebagaimana yang dikehendaki oleh kurikulum sesuai dengan tingkatannya, dengan penekanan pada: a) Kemampuan menunjukkan akhlaq yang baik dalam pergaulan antar sesama manusia. b) kemampuan menunjukkan akhlaq yang baik terhadap orang tua dan guru.

<sup>30</sup> Materi Fiqih disusun mengacu kepada nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta tujuan kurikuler sebagaimana terdapat dalam kurikulum sesuai dengan tingkatannya, dengan penekanan pada: a) Kemampuan melaksanakan shalat Dhuha dengan benar dan baik; b) Menghayati pentingnya melaksanakan shalat.

<sup>31</sup> Materi PPKn disusun mengacu kepada nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta tujuan kurikuler sebagaimana terdapat dalam kurikulum sesuai dengan tingkatannya, dengan penekanan pada: a) Kemampuan menghormati dan menghargai pendapat orang lain sesuai norma bangsa Indonesia. b) Kemampuan untuk berani berbicara dan mengemukakan pendapat di muka umum.

kegiatan Tahsin al Qur'an (Bina Baca al Quran). Kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan belajar mengajar dibawah koordinasi kelompok guru mata pelajaran agama.

**Muatan Lokal.** Salah satu kekhasan satuan pendidikan terletak pada pilihan muatan lokal.<sup>32</sup> MP, terkait dengan muatan lokal ini mengajarkan beberapa mata pelajaran dasar yang perlu dimiliki semua siswa, yaitu Bahasa Asing, sempoa, komputer dan aritmetika. Bahasa Asing diajarkan sejak dini, yaitu bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Ketrampilan Sempoa, yaitu cara hitung-hitungan yang biasa dipakai warga keturunan Tionghoa juga diajarkan sejak kelas satu. Demikian juga dengan komputer sudah diajarkan sejak anak masuk kelas I.

**Kegiatan Pengembangan Diri.** Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri di bawah bimbingan konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.

Kegiatan pengembangan diri, merupakan salah satu daya tarik satuan pendidikan. Ketika sebuah lembaga pendidikan memberikan alternatif kegiatan pengembangan diri yang variatif, maka masyarakat atau siswa cenderung meminatinya. Kegiatan pengembangan diri yang disiapkan oleh MP meliputi antara lain: a) Akademik, meliputi: Jurnalistik dan wartawan cilik, KPL, dokter kecil, pramuka, MIPA ceria, *English Club*, *Peer Mediation* (mediasi Teman Sebaya); b) Kesenian, meliputi beberapa kegiatan pilihan seperti: Membaca al Qur'an, kesenian marawis, Kaligrafi, marching Band dan Paskibra, Seni Tari, Seni lukis,

---

<sup>32</sup> Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi satuan pendidikan, yang materinya tidak menjadi bagian dari mata pelajaran lain. Substansi muatan lokal ditentukan Madrasah, tidak terbatas pada mata pelajaran seni-budaya dan keterampilan, tetapi juga mata pelajaran lainnya. Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga Madrasah harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Madrasah dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester, atau dua mata pelajaran muatan lokal dalam satu tahun.

kelompok vokal, organ; c) Olahraga, meliputi beberapa kegiatan pilihan seperti: Basket Ball, Futsal, Tenis Meja, Karate, Taekwondo, Volley Ball

### E. Membangun Daya Saing Madrasah

Identitas madrasah dipertaruhkan baik di tingkat persaingan antar satuan pendidikan, persaingan antar jenis lembaga pendidikan formal menurut negara, maupun dalam konteks pendidikan global. Karenanya proses kreasi terkait reproduksi identitas akan selalu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi madrasah. Bagaimana sebuah madrasah selain menjaga identitasnya sebagai lembaga pendidikan yang memberikan muatan pelajaran agama secara lebih, madrasah juga perlu memperjuangkan mutunya di bidang mata pelajaran umum agar dapat berkompetisi dengan lembaga pendidikan lainnya.

Seperti pernah dijelaskan sebelumnya, Madrasah Pembangunan mempunyai *core bussiness* untuk mengembangkan tiga gagasan utama, yaitu: pertama, Madrasah Pembangunan ingin mengedepankan aspek mutu dalam proses pembelajaran, baik mutu dalam makna luas maupun mutu dalam aspek khusus. Kedua, Madrasah Pembangunan ingin menjadikan agama sebagai basis kepribadian bagi semua peserta didiknya. Bagian ini akan dibahas pada bab berikutnya. Ketiga, Madrasah Pembangunan ingin memberikan nilai tambah ketrampilan bagi peserta didiknya di mulai dari kemampuan bahasa hingga pada ketrampilan-ketrampilan non akademik yang lain.

Tiga gagasan utama tersebut nampak dalam tiga istilah kunci yang menjadi slogan Madrasah Pembangunan, yaitu "*Basic science, Bahasa, dan Akhlakul Karimah*". Para aktor pendidikan di MP berpijak pada tiga gagasan tersebut dalam membangun image mengenai lembaga ini. Ketiga istilah itu menjadi ciri khas atau *trade mark* yang sengaja dibangun oleh para pelaku pendidikan di lembaga tersebut. Titik berat pembinaan dan pengembangan ini menjadi *trade mark* Madrasah Pembangunan UIN Jakarta dan menjadi landasan penyusunan program tahunan sehingga hasilnya akan dirasakan oleh peserta didik. Kenaikan grade kualitas itu nampaknya dimotivasi oleh tantangan yang dikembangkan

oleh MP. Madrasah Pembangunan memposisikan tantangan globalisasi sebagai sebuah kenyataan kebudayaan yang harus dihadapi oleh masyarakat madrasah.

Ketiga kata kunci "*basic science*, bahasa dan *akhlakul karimah*" merupakan tiga pilar pengembangan MP. Masing-masing aksis itu mewakili jawaban tiga hal yang dianggap memainkan peran penting dalam pendidikan, yaitu menjawab mengenai mutu, pendidikan ketrampilan dan pendidikan agama. Kata "*basic science*" merupakan jawaban terhadap kualitas mutu, "bahasa" merupakan jawaban terhadap nilai tambah ketrampilan (*life skills*) yang perlu dimiliki oleh peserta didik, dan "akhlakul Karimah" merupakan jawaban perlunya pendidikan agama dijadikan dasar dalam mengembangkan kepribadian peserta didik.

Mengejar unggul dalam mata pelajaran yang di UN kan saja sudah berat setengah mati, apalagi mau unggul dalam semua bidang baik itu akademik maupun non akademik, itu pikir saya dalam hati. Namun justru itulah yang ingin digagas oleh Madrasah Pembangunan. Untuk unggul di bidang mata pelajaran umum ini, MP mencanangkan *Basic science* sebagai satu komoditas yang ditawarkan. Untuk penguatan *basic science* itu, MP melengkapi fasilitas madrasah dengan laboratorium yang standar, pembelajaran dengan IT, guru yang berkualitas, konsorsium mata pelajaran umum dan bekerjasama dengan lembaga atau konsultan yang dipandang ahli dalam pengembangan mata pelajaran umum.

Sejauh ini Madrasah Pembangunan yang saya lihat berhasil melakukan semua itu. Maka madrasah ini segera mendapatkan kepercayaan yang lebih dari masyarakat. Sekalipun untuk masuk madrasah dengan biaya cukup, tinggi ternyata semua kelas selalu terpenuhi. Ke depan, justru dalam rangka meningkatkan mutu Madrasah Pembangunan akan melakukan pengurangan jumlah murid secara bertahap. Kalau dulu jumlah siswa rata-rata 40 anak, maka tahap demi tahap jumlah murid mulai dikurangi. Sampai nanti jumlah siswa perkelas menjadi ideal yaitu 30 anak per kelas.

Bagaimana kreasi Madrasah Pembangunan dalam membangun daya saing antar satuan pendidikan? Dari beberapa hal, Madrasah Pembangunan banyak menerima beberapa usaha standarisasi pendidikan yang dilakukan oleh negara,

namun di sisi lain Madrasah Pembangunan menetapkan terget-terget capaian tertentu dalam mengikuti standarisasi nasional yang ada. Dari amanat Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 yang menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Mensikapi beberapa standar tersebut, Madrasah Pembangunan mencoba menerjemahkannya dalam praktek dalam satuan pendidikan tersebut. Berikut ini akan dicermati beberapa inisiasi yang dilakukan Madrasah Pembangunan dalam usaha memenuhi standar mutu yang dikembangkan oleh negara melalui instrumen Standar Nasional Pendidikan (SNP).

**1. Standar Isi.**<sup>33</sup> Standar terkait dengan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. Pada Struktur Kurikulum, MP Ciputat mengembangkan substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun mulai kelas I sampai kelas VI, yang memuat 12 Mata Pelajaran ditambah Muatan Lokal dan Pengembangan Diri. Mata pelajaran dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok besar, yaitu: 1) Kelompok mata pelajaran Agama, yaitu: Aqidah Akhlak, Fiqh, Al Quran Hadits, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI); 2) Kelompok mata pelajaran Umum, yaitu: Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Ilmu pengetahuan sosial, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bimbingan Konseling (BK), dan Seni Budaya dan Keterampilan; 3) Kelompok mata pelajaran Bahasa, yaitu: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab; 4) Kelompok mata pelajaran MIPA, yaitu: Matematika, IPA, dan Sempoa.

Beberapa hal yang berbeda yang dilakukan Madrasah Pembangunan terkait dengan struktur kurikulum ini meliputi: 1) Dalam pengelompokan mata

---

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 5 tentang Standar Isi menyebutkan: (1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

pelajaran, kalau dalam PP No 19 tahun 2005 mata pelajaran dikelompokkan dalam 5 kelompok, sedangkan MP mengelompokkannya dalam 4 kelompok. Kelompok mata pelajaran estetika dimasukkan dalam kategori mata pelajaran umum;<sup>34</sup> 2) Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta (PLBJ), muatan lokal yang dibebankan pemerintah daerah, hanya diajarkan pada kelas VI (enam).

Kebijakan berbeda di atas didasari didasari beberapa pertimbangan, antara lain kedekatan sifat dan esensi mata pelajaran, efektifitas kerja sama gurukelompok mata pelajaran dan jumlah guru. Masing-masing kelompok mata pelajaran melahirkan satu konsorsium guru. Konsorsium mata pelajaran berfungsi menjadi forum musyawarah kelompok mata pelajaran, menyusun dan melaksanakan program kerja kelompok, dikoordinir oleh ketua dan sekretaris konsorsium.

**Pengaturan Beban Belajar.** Pengaturan jam belajar diatur sedemikian rupa, seperti: a) Beban belajar dilakukan dalam sistem paket sesuai dengan struktur kurikulum MI Pembangunan; b) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran dapat dilakukan secara fleksibel dengan jumlah beban belajar yang tetap. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Pemanfaatan jam pembelajaran tambahan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi, di samping dimanfaatkan untuk mata pelajaran lain yang dianggap penting dan tidak terdapat di dalam struktur kurikulum yang tercantum di dalam Standar Isi; c) Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk MI Pembangunan 0% - 40%, Pemanfaatan

---

<sup>34</sup> PP No. 19 tahun 2005 Pasal 6 ayat (1) menyebutkan Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas 5 kelompok mata pelajaran: a) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; b) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; c) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; d) kelompok mata pelajaran estetika; e) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi; d) Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik di sekolah setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktik di luar sekolah setara dengan satu jam tatap muka.

**Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).** Muatan kurikulum yang dikembangkan Madrasah Pembangunan meliputi: mata pelajaran wajib dan hidden curriculum. Mata pelajaran Wajib, meliputi: a) Pendidikan Agama Islam terdiri dari: Al Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam; b) Pendidikan Kewarganegaraan; c) Bahasa Indonesia; d) Bahasa Arab; e) Bahasa Inggris; f) Matematika; g) Ilmu Pengetahuan Alam; h) Ilmu Pengetahuan Sosial; i) Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan; j) Seni Budaya dan Ketrampilan

**Kalender Pendidikan.** Menyesuaikan konteks sosial masyarakat urban di Ibukota, MP menyusun kalender akademik yang sesuai dengan kultur masyarakat urban. MP menerapkan model pembelajaran lima hari aktif dalam seminggu, yaitu dari hari Senin hingga hari Jum'at. Hari Sabtu dan Minggu libur. Kebijakan ini diambil untuk menyesuaikan hari kerja masyarakat di ibukota Indonesia. Salah satu pertimbangan utama didasarkan pertimbangan ternyata banyak anak Jakarta yang sering izin di hari Sabtu karena mengikuti liburan orang tuanya. Ini salah satu bentuk adaptasi sekolah terhadap model aktivitas harian masyarakat di Ibukota yang rata-rata libur pada hari Sabtu dan Minggu. Satu sisi, sekolah yang hanya lima hari dan libur dua hari menjadi salah satu daya tarik MP dalam melayani masyarakat ibukota yang sibuk.<sup>35</sup>

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran. Kalender pendidikan

---

<sup>35</sup> Setiap hari kegiatan belajar mengajar berjalan dari jam 07.00 hingga 14.00 sore. Hanya hari Jum'at yang jam belajarnya tidak sampai jam 14.00, yaitu berakhir sebelum sholat jum'at. Ada perbedaan jam istirahat untuk tingkatan kelas-kelas tertentu. Kebijakan ini diambil nampaknya untuk mengatur lalu lintas anak selama masa istirahat. Istirahat dalam sehari dilakukan dua kali, yaitu sekitar jam 09.00 dan sekitar jam 12.00 siang. Untuk hari Senin ada sedikit perbedaan jam istirahat, yaitu untuk kelas I - II jam 09.15 - 09.35; untuk kelas III dan V sebutan Kegiatan di kelas akan berjalan dari jam 07.00 hingga jam istirahat, yaitu jam 09.15.

mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Setiap menjelang awal tahun pelajaran, Tim Penyusun Program MI Pembangunan menyusun kalender pendidikan untuk mengatur waktu kegiatan pembelajaran selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Pengaturan waktu belajar di madrasah mengacu kepada Standar Isi dan disesuaikan dengan kebutuhan, potensi dan karakteristik madrasah.

Beberapa aspek penting yang menjadi pertimbangan dalam menyusun kalender pendidikan adalah sebagai berikut: a) Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Permulaan tahun pelajaran telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. b) Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran. MI Pembangunan mengalokasikan lamanya minggu efektif belajar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. c) Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. d) Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal. Hari libur MI Pembangunan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, Pada kondisi tertentu MI Pembangunan menentukan waktu libur sesuai kebutuhan. e) Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. f) Libur jeda tengah semester, jeda antarsemester, libur akhir tahun pelajaran digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun.

**2. Standar Proses.**<sup>36</sup> Standar proses adalah standarisasi terkait perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, Madrasah Pembangunan menerapkan indikator ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator ditentukan 75%. MP berusaha menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. MP berusaha meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

Tabel 9. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)  
Mata Pelajaran di Madrasah Pembangunan

No.	Mata Pelajaran	KKM
1	Pendidikan Agama Islam	
	Qur'an dan Hadits	70
	Aqidah	70
	Fiqih	70
	SKI	60
2	PPKn	70
3	Bahasa Indonesia	65
4	Bahasa Arab	65
5	Bahasa Inggris	65
6	Matematika	60
7	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA Terpadu )	65
8	Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS Terpadu )	60
9	Seni Budaya	70
10	Pendidikan Jasmani, Olah raga dan Kesehatan	70
11	Muatan Lokal	
	a. Komputer	65
	b. Sempoa	65

Tabel di atas merupakan tabel nilai ketuntasan belajar minimal yang menjadi target pencapaian kompetensi (TPK) di MI Pembangunan yang berlaku saat ini. Untuk mengantisipasi tidak tercapainya Kriteria ketuntasan Minimal

<sup>36</sup>Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 19 ayat (3) tentang Standar Proses menyebutkan: Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

(KKM), maka siswa yang dirasa belum memenuhi harapan, diwajibkan mengikuti kegiatan remedial.

Remedial diwajibkan bagi siswa MP yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Pelaksanaannya disepakati bersama antara guru dan siswa. Adapun pengayaan dilakukan secara reguler khususnya bagi siswa kelas terakhir sebagai persiapan Ujian Sekolah/Ujian Nasional dan pengayaan non reguler untuk menghadapi acara perlombaan mata pelajaran baik di tingkat propinsi maupun tingkat nasional.

**3. Standar Kompetensi Lulusan.**<sup>37</sup> Dalam menaikkan atau meluluskan siswa, Madrasah Pembangunan Jakartamenetapkan ketentuan tertentu dan memutuskan permasalahan tersebut melalui forum pleno guru. Kriteria-kriteria untuk menaikkan dan meluluskan adalah sebagai berikut, yaitu: a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran; b) Memiliki akhlak yang baik; c) Mata pelajaran Agama yang harus tercapai Kriteria Ketuntasan Minimal (Aqidah Akhlak, Qur'an Hadits); d) Mata pelajaran yang tidak boleh Nilai dibawah 4, 25 (Matematika, IPA, Bahasa Indonesia); e) Mata Pelajaran yang tidak tercapai KKM maksimal 4 Pelajaran; f) Kehadiran di kelas mencapai minimal 85%

**4. Standar Tenaga Pendidik.**<sup>38</sup> Terkait dengan standar tenaga pendidik, Madrasah Pembangunan telah melakukan beberapa langkah untuk peningkatan kualifikasi tenaga pendidik,, menghindari terjadinya ketidaksesuaian antara latar pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampu (*missmacth*), meningkatkan jumlah guru bersertifikat. Dari total guru MP sebanyak 84 orang, 71 orang telah

---

<sup>37</sup>Peraturan Pemerintah No 19/2005 Pasal 72 Ayat (1) tentang standar kompetensi kelulusan satuan pendidikan menyebutkan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; c) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing; d) lulus Ujian Nasional.

<sup>38</sup>Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 29 ayat (2) tentang Standar Pendidik menyebutkan: (2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); b) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan c) sertifikat profesi guru untuk SD/MI

lulus S1, 12 orang lulus S2, dan hanya 1 guru yang belum lulus S1, yaitu guru olahraga. Dalam peningkatan kualifikasi guru, MP memberikan bantuan pendidikan (beasiswa bagi guru yang menempuh studi lanjut. Sampai saat ini, MP telah memberi beasiswa sebanyak 8 orang untuk menempuh studi S2. Dari 84 guru di MP, yang telah berhasil mendapatkan sertifikat guru sebanyak 49 orang (58 %).<sup>39</sup>

**5. Standar Sarana Prasarana.**<sup>40</sup> Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, dalam rangka memenuhi tuntutan standar sarana prasarana, berupaya untuk menyediakan fasilitas baik untuk keperluan pendidikan secara langsung maupun fasilitas-fasilitas pendukung, antara lain: Gedung yang permanen dengan halaman yang luas dan asri; Ruang belajar ber-AC; Laboratorium Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA); Laboratorium Komputer; Laboratorium Bahasa; *Over Head Projector* (OHP) di setiap kelas (tingkat Tsanawiyah); *Audio Visual*; Perpustakaan dengan jumlah koleksi buku lebih dari 9.000 judul; Masjid; Sarana futsal; Sarana basket; Sarana tenis meja; Sarana musik (alat dan *sound system*); Antar jemput; Lapangan parkir; Petugas keamanan (Satpam); Lokasi nyaman, aman dan strategis (di dalam kompleks)

**6. Standar Pengelolaan.**<sup>41</sup> Mensikapi beberapa poin standar pengelolaan, Madrasah Pembangunan telah melakukan beberapa langkah dalam beberapa aspek berikut: Kemandirian, madrasah pembangunan telah menegaskan diri menjadi madrasah swasta, ini artinya MP ingin menjadi madrasah yang mandiri secara pembiayaan; Kemitraan, MP banyak bekerjasama dengan lembaga-

<sup>39</sup> Wawancara dengan YS, Wakil Kepala Madrasah bagian kesiswaan, 8 Juni 2011

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Sarana Prasarana menyebutkan: (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 49 ayat (1) tentang Standar pengelolaan menyebutkan: Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas

lembaga profesional seperti lembaga kebahasaan dalam meningkatkan kemampuan bahasa baik guru maupun siswa; Partisipasi, MP membuka kemungkinan partisipasi masyarakat seluas mungkin; Keterbukaan, MP dalam hal keuangan membuka diri untuk diketahui oleh guru atau lembaga audit; akuntabilitas, setiap kegiatan yang memerlukan biaya tambahan dari orang tua siswa, MP selalu menginformasikan dengan membuat surat edaran kepada orang tua siswa.<sup>42</sup>

**7. Standar Pembiayaan.**<sup>43</sup> Terkait dengan standar pembiayaan ini, MP mengembangkan kebijakan bahwa ada tiga jenis biaya yang bersumber dari orang tua, yaitu uang pangkal (diminta ketika anak masuk madrasah); uang SPP (tiap bulan); uang kegiatan (per kegiatan tambahan tertentu seperti kegiatan study tour). Untuk peruntukannya, Uang pangkal disalurkan pada biaya investasi seperti pengembangan sarana prasarana; uang SPP diperuntukkan untuk biaya gaji guru dan operasional; uang kegiatan diperuntukkan untuk menunjang kegiatan tambahan untuk siswa (kembali ke siswa).<sup>44</sup>

**8. Standar Penilaian.**<sup>45</sup> Terkait dengan standar penilaian, MP telah melakukan ketiga jenis penilaian sesuai dengan PP No 19 tahun 2005, yang meliputi: penilaian hasil belajar oleh pendidik yang ditempuh dengan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester dan ulangan kenaikan kelas.

<sup>42</sup> Wawancara dengan YS, Wakil Kepala Madrasah bagian kesiswaan, 8 Juni 2011

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 49 ayat (1) tentang Standar pembiayaan menyebutkan: (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

<sup>44</sup> Dari uang SPP, 80 % diperuntukkan untuk gaji bulanan guru, 20 % untuk operasional pendidikan sehari-hari. Wawancara dengan YS, Wakil Kepala Madrasah bagian kesiswaan, 8 Juni 2011.

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 63 ayat (1) tentang Standar penilaian menyebutkan bahwa : Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: a) penilaian hasil belajar oleh pendidik; b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c) penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, MP melakukan penilaian tambahan untuk kelengkapan persyaratan kenaikan atau kelulusan. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah, MP berpartisipasi penuh dengan Ujian Negara yang dilakukan pemerintah.<sup>46</sup>

Dalam mewujudkan lembaga pendidikan yang berdaya saing, Madrasah Pembangunan tidak bebas dari berbagai benturan-benturan tertentu. Benturan-benturan langsung yang dirasakan MP dalam mewujudkan pendidikan berdaya saing tersebut muncul, misalnya dari luar (eksternal) seperti adanya suasana keleluasaan yang dibatasi dalam pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), ketika guru ingin maksimal berimprovisasi untuk menyusun soal ujian akhir sendiri, di sana ada suasana psikologis dari pembina tingkat daerah yang tidak sepenuhnya mendorong inisiatif tersebut. Kejadian ini terjadi misalnya ada kepentingan regulasi atau penyeragaman tertentu yang dilakukan oleh birokrasi pendidikan di tingkat lokal. Sejak 10 tahun belakangan, MP tidak membeli soal ujian dari dinas pendidikan setempat.

Benturan lain, muncul dengan lahirnya sekolah-sekolah baru yang hadir di sekitar lokasi itu dan menjadi pesaing baru bagi Madrasah Pembangunan. Di sekitar Ciputat muncul sekolah-sekolah baru yang berusaha mengejar standar nasional dan internasional, seperti munculnya Sekolah Karisma Bangsa yang disponsori oleh institusi dari Negara Turki; Lembaga Pendidikan *Al Fath* yang mencoba menggunakan bilingual dalam proses pembelajaran; Lembaga Pendidikan *Asy Syukro* dan lain. Namun sejauh ini, kehadiran sekolah-sekolah ini belum menurunkan peminat Madrasah Pembangunan secara berarti.

Dari kasus Madrasah Pembangunan, ada tiga hal yang bisa dijadikan *lesson learned* dalam mengembangkan mutu di madrasah madrasah. *Pertama*, komitmen

---

<sup>46</sup> Untuk penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, MP menerapkan syarat kemampuan membaca al Qur'an untuk siswa yang akan naik kelas IV (empat). Sedangkan untuk syarat kelulusan siswa pada kelas VI (enam), MP menyaratkan siswa harus telah mendapatkan sertifikat 'Sakinah' yaitu sertifikat kelulusan kemampuan ibadah praktik sehari-hari seperti wudhu, sholat, dzikir, baca al Qur'an dan doa. Wawancara dengan YS, Wakil Kepala Madrasah bagian kesiswaan, 8 Juni 2011.

tenaga pendidikan untuk memajukan madrasah; *kedua*, dukungan orang tua murid; *ketiga*, adanya terobosan yang dilakukan pihak sekolah dalam peningkatan mutu tersebut. Kenapa saya sebutkan tiga hal tersebut. Kalau saya menyebutkan bahwa komitmen tenaga pendidik dan dukungan orang tua, saya pikir semua madrasah telah mempunyai kedua hal tersebut. Hanya saja banyak madrasah yang kurang berani melakukan terobosan yang berarti dalam peningkatan mutu madrasah. Komitmen tenaga pendidik saja tidak cukup tanpa didukung oleh orang tua siswa. Kontribusi orang tua sangat berarti dalam mendukung kemajuan anak di rumah maupun peran orang tua dalam pengadaan sarana prasarana pendidikan.



## BAB V MADRASAH PEMBANGUNAN MENGHADAPI GLOBALISASI

*.... di satu sisi pendidikan secara ideal ditujukan untuk membentuk pribadi yang berpuncak pada kesempurnaan pikiran dan jiwa, di sisi lain tuntutan pasar menghendaki pendidikan diarahkan pada produksi pengetahuan instrumental dan penguasaan ketrampilan-ketrampilan khas pasar.  
(Kazamias, 2001)*

Bab ini berusaha mendeskripsikan bagaimana unsur *stake holder* Madrasah Pembangunan memahami globalisasi pendidikan dan apa yang mereka harapkan dari Madrasah Pembangunan dalam menghadapinya? Data dikumpulkan dengan cara membaca persepsi atau imajinasi yang berkembang diantara unsur subyek (*stake holder*) institusi pendidikan tersebut. Untuk menggali data ini secara mendalam dan saling melengkapi saya memilih beberapa orang yang saya anggap mewakili dari unsur-unsur Madrasah Pembangunan, seperti orang tua Siswa, guru Madrasah Pembangunan, Kepala Madrasah Pembangunan jenjang pendidikan Dasar, dan Pengurus yayasan Madrasah Pembangunan.

### **A. Awal Kesadaran: Globalisasi Sebuah Tantangan**

Bagaimana globalisasi dipahami orang tua murid di madrasah ? dan apa alasan orang tua memilih lembaga pendidikan untuk anaknya dalam menghadapi globalisasi itu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menggali jawaban melalui salah satu orang tua murid bernama ibu Hry (39 tahun).<sup>1</sup> Ibu ini saya pilih untuk menjadi informan utama didasarkan pertimbangan bahwa semua orang tua murid MP adalah dari latar belakang ekonomi menengah ke atas. Dalam konteks seperti itu saya memilih informan yang mampu berfikir obyektif. Memilih madrasah Pembangunan bukan karena ikatan emosional terhadap lembaga

---

<sup>1</sup> Dalam menangkap definisi masyarakat mengenai globalisasi hubungannya dengan pendidikan, saya mencoba merumuskannya dengan menggarisbawahi kata-kata kunci yang muncul dari pendapat orang tua murid. Saya menetapkan istilah pendidikan dan globalisasi sebagai awal pelacakan saya, yang saya tanyakan kepada salah seorang wali murid.

tersebut. Ibu ini kebetulan lulusan dari pendidikan strata dua (S2) di perguruan tinggi negeri. Dari hasil pembicaraan awal saya dengan ibu tersebut, saya tahu bahwa ibu ini menyekolahkan anaknya ke Madrasah Pembangunan sejak tahun 2005 dan saya tahu bagaimana ibu tadi memahami globalisasi pendidikan.

Untuk memperoleh jawaban oleh ibu ini, saya menggali data dengan cara mewawancarai dan sekaligus dalam beberapa kesempatan terlibat dalam kegiatan ibu ini terkait dengan sekolah anaknya, seperti ikut dalam mengantar anaknya ke madrasah di pagi hari, mengikuti kehadiran ibu ini ketika memenuhi panggilan dari madrasah untuk pengambilan raport di akhir semester, dan juga menemani ibu ini ketika menunggu jam pembelajaran anaknya.

Hari itu saya mempunyai janji dengan ibu Hry untuk menemuinya di rumahnya. Dia tinggal di sebuah Komplek Perumahan Pertiwi Indah di daerah Sawangan Depok.<sup>2</sup> Setelah berbasa-basi sedikit, dan Ibu Hry sudah mempersiapkan diri untuk saya wawancarai, maka dialog dimulai. Sesuai dengan tema penelitian, saya mulai dengan mencoba mendeskripsikan pemahamannya mengenai globalisasi, yang nantinya saya ingin mengetahui alasan obyektif mengapa dia memilih MP sebagai lembaga pendidikan untuk anaknya. Ketika saya bertanya tentang apa yang dia pahami tentang globalisasi, ibu Hry sejenak berpikir kemudian menjawab:

*“Globalisasi menurut saya adalah .... Merupakan suasana membesar-besarkan sesuatu yang kecil, globalisasi merupakan cara pandang atau cara berfikir tertentu. Dalam globalisasi dunia menjadi seperti desa yang kecil (small village), karena semua informasi dan gambaran bisa diakses orang ...”<sup>3</sup>*

Saya terhenyak dengan jawaban ibu ini. Kata-katanya begitu berisi dan memuat kata-kata yang perlu penjelasan lebih lanjut. Setelah saya catat, saya menemukan beberapa kata kunci pada jawaban tersebut, seperti kata “...membesar-besarkan yang kecil, cara pandang atau cara berfikir dan small village...” Dari penggalan

<sup>2</sup> Di Kompleks Pertiwi Indah ini terdapat kurang lebih 21 anak yang bersekolah di Madrasah Pembangunan.

<sup>3</sup> Wawancara dengan ibu Hry, seorang wali murid, 15 Nopember 2008

pendapat di atas, yang kemudian saya cari penjelasannya masing-masing kata maka saya mulai bisa menangkap apa yang dimaksud ibu tadi.

Beberapa kata kunci dari jawaban ibu tadi yang dapat digarisbawahi. “Membesar-besarkan sesuatu yang kecil,” saya perjelas pada kesempatan lain yaitu ketika ibu Hry menunggui anak selama jam pembelajaran di madrasah di kantin dekat madrasah. Ketika itu saya mencoba memperjelas persoalan, Ibu Hry ini menjelaskan, menurutnya dalam kultur globalisasi kekuatan informasi dan teknologi komunikasilah yang menjadi penentunya. Persoalan-persoalan yang tadinya kecil, dengan kekuatan informasi dan teknologi komunikasi, dengan mudah dapat menjadi sesuatu yang seakan besar. Dia mencontohkan misalnya sebuah kejadian penembakan siswa-siswa sekolah di Kanada, dulu sebelum teknologi informasi dan komunikasi belum secanggih saat ini peristiwa semacam itu hanya dianggap peristiwa lokal dan hanya masyarakat di daerah di mana peristiwa itu terjadi yang tahu. Namun saat ini, dengan adanya media televisi, koran dan internet peristiwa seperti itu dengan mudah dapat diketahui oleh masyarakat dunia.

Globalisasi juga bisa dipahami sebagai “cara pandang atau cara berfikir tertentu.” Menurutnya, orang bisa saja gelisah atau panik menghadapi apa yang disebut globalisasi. Tapi ada juga orang yang menghadapi globalisasi ini sambil lalu saja. Orang ini beranggapan bahwa kehidupan dari dulu yang begitu saja. Menurut pendapat ibu tadi, jadi orang bisa panik atau tidak itu ditentukan oleh cara pandang atau cara berfikirnya. Globalisasi dengan segala pengertiannya adalah sebuah paradigma atau rangkaian konsepsi berfikir. Orang yang menganggap globalisasi itu sebuah permasalahan yang serius, *complicated* dan sesuatu yang harus dihadapi, maka orang tersebut akan memandang penting globalisasi dengan segala implikasinya. Berbeda dengan orang yang menganggap globalisasi hanya sekedar eskalasi informasi, dia hanya menganggap bahwa peristiwanya kecil, lokal dan wajar-wajar saja.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> David Harvey berpendapat bahwa globalisasi merupakan lanjutan dari modernisasi dengan asumsi bahwa krisis ekonomi yang menyapu Inggris dan Eropa 1846-47 dikarenakan karena

“*Small village....* semua bisa diakses, ” menurut ibu Hry bahwa dalam globalisasi, dunia menjadi kecil seperti desa kecil, karena dunia menjadi kecil maka semua hal yang terjadi dapat dilihat, dilacak dan ditelusuri. Globalisasi menyebabkan banyak hal menjadi transparan, nilai-nilai menjadi relatif, sehingga terkadang melahirkan sikap-sikap yang permisif.<sup>5</sup>

Dari wawancara dengan ibu Hry ini, saya mempunyai kesimpulan bahwa orang tua murid sudah memahami bahwa: 1) globalisasi sebagai kekuatan yang ditentukan oleh media komunikasi dan informasi. Ini dinyatakan dalam ungkapan “membesar-besarkan sesuatu yang kecil.” Sesuatu yang kecil, karena peran media dapat menjadi sesuatu yang besar, demikian juga sebaliknya sesuatu yang besar kalau tidak ada media yang memberitakannya dapat menjadi sesuatu yang kecil atau bahkan tidak diketahui orang umum. 2) globalisasi sebagai perspektif cara pandang atau cara berfikir. Globalisasi bisa menjadi persoalan bagi orang yang memahaminya, namun globalisasi juga bisa tidak menjadi persoalan apa-apa bagi mereka yang tidak memahaminya. Globalisasi dapat seperti ideologi yang bisa diikuti atau ditolak sama sekali. 3) Globalisasi menjadi semua permasalahan menjadi transparan, nilai-nilai menjadi relatif dan lahirnya sikap yang cenderung permisif.

Bagaimana juga globalisasi dipahami oleh penyelenggara madrasah, untuk kebutuhan ini saya mencoba mencari keterangan tentang persepsi terhadap kata globalisasi terhadap aktor utama institusi Madrasah Pembangunan. Saya bertanya kepada kepala madrasah jenjang pendidikan dasar, Bapak Myd (40 tahun), mengenai globalisasi hubungannya dengan pendidikan. Kepala madrasah adalah

---

paradima pemikiran absolute relasi ruang dan waktu. Modernisasi merupakan tahap lanjut yang merupakan perubahan cara berfikir tentang ruang dan waktu secara gradual; sekaligus embrio globalisasi. Globalisasi, dengan merujuk post-modernisasi merupakan peningkatan kecepatan sirkulasi komoditi. (Beynon dan Dunkerley, 2000: 31-38)

<sup>5</sup> Roland Robertson yang memahami globalisasi sebagai proses berpandangan bahwa globalisasi dipengaruhi oleh dua proses, yaitu “universalisasi partikular ” dan “partikularisasi universal.” Secara obyektif, globalisasi dipengaruhi oleh ekonomi global dan teknologi telekomunikasi; Secara subyektif globalisasi menghasilkan identitas-identitas baru seperti etnisitas, multikultural, diaspora, dan ruang post-kolonial. (Beynon dan Dunkerley, 2000: 31-38)

orang yang paling mengetahui semua kebijakan yang dikembangkan di madrasah baik yang diinisiasi oleh pengelola harian madrasah maupun kebijakan yang dikeluarkan dari pengurus yayasan.

Ketika ditanya tentang persepsi tentang globalisasi, Myd secara spontan mengatakan bahwa dia mengaku tidak punya definisi yang rinci atau kesulitan menjelaskan istilah globalisasi, dia hanya menyebutkan:

*“.... globalisasi adalah dunia, sesuatu yang mendunia. ... memang makhluk yang bernama globalisasi itu sederhana untuk diucapkan, namun sulit setengah mati kalau didefinisikan. Terasakan, namun susah untuk dijelaskan...Kalimat itu seakan sudah begitu saja menenggelamkan bagi siapa saja yang menggagasnya....”<sup>6</sup>*

Satu pengertian saja yang dipahami dari ucapan itu bahwa globalisasi terkait dengan sesuatu yang mendunia. Apa saja yang mendunia dapat disebut globalisasi. Walaupun kata “mendunia” itu terasa masih absurd, namun itulah makna yang bisa diambil dari jawaban Kepala Madrasah ini. Mendunia merupakan gejala mendominasi, mempunyai cakupan keluasan serta tuntutan untuk menerjemahkan semua hal dalam konteks yang menyeluruh dan memiliki dimensi internasional.<sup>7</sup>

Pendapat dengan versi yang agak berbeda bersumber dari Direktur yayasan Syarif Hidayatullah, Bapak Sfy (45 tahun). Menurutnya, latar belakang

<sup>6</sup> Wawancara ini dilakukan terhadap Kepala MP, Myd (40 tahun)

<sup>7</sup> Arjun Appadurai (1996) menggambarkan globalisasi sebagai *imagined worlds*, atau “berbagai macam dunia yang terdiri dari imajinasi orang-orang dari kelompok-kelompok di seluruh dunia yang diletakan secara histories. Appadurai menyebut arus-arus dalam globalisasi dalam sebutan *scapes*. Ada teori Appadurai tentang lanskap yang sering disebut-sebut, yaitu 5 (lima) *landscape*: *Ethnoscapes*, *technoscapes*, *finanscapes*, *mediascapes*, *ideoscapes*. *Ethnoscapes* adalah kelompok atau aktor yang bergerak (turis, pengunjung, pekerja tamu) yang memainkan peran penting dalam pergeseran-pergeseran di dunia. Ini melibatkan gerakan actual dan fantasi-fantasi tentang pergerakan. *Technoscapes* adalah konfigurasi global dari teknologi dan fakta bahwa dampak teknologi kini bergerak dengan kecepatan tinggi melintas berbagai jenis batasan yang dulu ada. *Finanscapes* adalah eskalasi keuangan yang melibatkan pasar, bursa nasional dan spekulasi komoditas yang menggerakkan meganomis melalui batas-batas nasional dengan kecepatan tinggi. *Mediascapes* melibatkan distribusi kapabilitas elektronik untuk menghasilkan dan menyebarkan informasi (Koran, majalah, TV, studio pembuat film), ... imaji-imaji dunia yang diciptakan oleh media ini. *Ideoscapes* adalah serangkaian imaji yang mempunyai nuansa politik yang berkaitan dengan keberadaan Negara.

kesadaran tantangan globalisasi yang masuk dalam visi dan misi MP adalah adanya kenyataan bahwa Madrasah Pembangunan ternyata telah berperan global yaitu melayani dan memiliki siswa-siswi berkewarganegaraan asing, yaitu warga negara Malaysia dan Brunai Darussalam. Anak-anak tersebut berada di Indonesia dan masuk sekolah di Madrasah Pembangunan karena mengikuti orang tuanya menempuh studi pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta.

*“ ...Melihat kenyataan bahwa siswa Madrasah Pembangunan (MP) telah ada siswa dari warga negara asing, yaitu warga Malaysia dan Brunai.... maka boleh juga Madrasah Pembangunan mulai disebut lembaga pendidikan global.... karena barangkali sudah waktunya Madrasah Pembangunan menggagas lembaga pendidikan berwawasan global..... kurang lebih itulah latar belakang kata globalisasi muncul dalam visi dan misi...” (Sfy, Pengurus Yayasan Madrasah Pembangunan)*

Menurut ceritera Bapak Sfy, bermula dari kenyataan itu, maka mulailah sebagian guru MP mulai memasukkan istilah global dalam dokumen-dokumen Madrasah Pembangunan. Kata globalisasi mulai muncul dalam visi dan misi. Namun menurut pengakuan Sfy, saat itu semangat menggagas pendidikan global atau siap merespon globalisasi masih sebatas wacana dan belum mempunyai definisi operasional yang bisa dilakukan. Semangat globalisasi baru sebatas keinginan misalnya ingin membuat kelas internasional. Namun semangat tinggal semangat, karena ternyata untuk mewujudkan gagasan itu, Madrasah Pembangunan masih mempunyai kendala kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki masih terbatas.

Demikian beberapa definisi spontan orang di sekitar madrasah dalam memahami globalisasi. Globalisasi menurut mereka ada sebuah tantangan dunia pendidikan yang harus dihadapi sekaligus dicermati untuk dirumuskan model pendidikan yang tepat dan diupayakan sebuah strategi membekali anak didik dalam menghadapinya.

Kembali kepada Ibu Hry, Mengapa ia memilih Madrasah Pembangunan untuk menyekolahkan anaknya dalam menghadapi tantangan globalisasi yang ia pahami tadi ? Pada sebuah waktu, saya berkesempatan ikut naik mobil Hry yang

ingin mengantarkan anaknya ke madrasah. Ibu ini sekaligus pergi ke kantor, setiap pagi mengantarkan anaknya ke madrasah. Dari rumahnya, mobil berangkat jam 06.00 pagi dan diperkirakan sampai kantor sebelum jam 07.00. maklum jakarta, jam sekitar itu sudah mulai macet, karena banyak orang yang melakukan hal yang sama dengan ibu Hry.

Di perjalanan, saya menanyakan apa yang dipertimbangkan dalam memilih lembaga pendidikan dalam konteks globalisasi pendidikan. Saya mendapatkan sebuah jawaban yang mencengangkan dari ibu Hry, mungkin ini karena dari latar belakang pendidikan ibu tersebut, bahwa dalam menghadapi globalisasi:

*“ ...Gunakan **semangat kritis**, karena tidak semua yang global itu baik. Globalisasi menawarkan tantangan dan peluang, peluangnya membuat orang semakin **berfikir universal, pluralis dan multikultural** sehingga orang semakin menghargai perbedaan. Tantangannya banyak nilai negatif yang berkembang. Kalau tidak kritis kita akan terhempas. Dalam mensikapi globalisasi, kita perlu mempunyai **kearifan lokal, kearifan agama**. ... Pendidikan dalam konteks globalisasi **haruslah berkarakter** ...”<sup>8</sup>*

Sekali lagi, ibu ini memberikan jawaban yang mempunyai kata-kata kunci yang menarik dan perlu penjelasan tambahan. Seperti kata “perlu mempunyai ‘semangat kritis’, ‘berfikir universal, pluralis dan multikultural’, ‘kearifan lokal, kearifan agama’ dan ‘haruslah berkarakter.’” Sambil menyopir, ibu tadi menjawab kata-kata kunci yang saya ajukan untuk minta penjelasan. Pendidikan dalam konteks globalisasi perlu mempunyai ‘semangat kritis’. Menurut ibu tadi, semangat kritis diperlukan karena tidak semua yang global itu baik, maka perlu sikap kritis dalam menghadapinya. Globalisasi menawarkan tantangan dan peluang, peluangnya membuat orang semakin berfikir universal, pluralis dan multikultural sehingga orang semakin menghargai perbedaan. Tantangannya banyak nilai negatif yang berkembang. Kalau tidak kritis kita akan terhempas.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan ibu Hry, seorang wali murid, 15 Nopember 2008

Semangat kritis diperlukan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik (buruk).

Dalam menciptakan berfikir kritis, pendidikan dalam konteks globalisasi menurutnya harus menghasilkan orang yang mampu berfikir universal, pluralis dan multikultural. 'Berpikir universal', menurutnya adalah mampu berfikir substantif, menjangkau nilai-nilai dasar kemanusiaan, sehingga mengetahui mana nilai yang berlaku partikular, mana nilai yang berlaku universal. Pijakan universal diperlukan agar orang tidak terjebak pada anggapan-anggapan partikular. Berfikir universal akan mengarahkan orang untuk mencari titik-titik temu dari berbagai pendapat atau pandangan. 'Berpikir pluralis' menurutnya adalah pandangan bahwa di sana (dunia) terdapat berbagai pandangan, kelompok. Berfikir pluralis beranggapan bahwa kita harus mengakui adanya berbagai pandangan atau kelompok itu untuk hidup bersama-sama. Kita tidak boleh menganggap bahwa kitalah yang paling benar atau kitalah yang paling berhak hidup sementara yang lain dianggap salah dan tidak berhak hidup. 'Berpikir multikultural' menurutnya hampir sama dengan berfikir pluralis, bedanya multikultural menekankan bahwa di sana banyak kultur atau budaya.

Pendidikan dalam konteks globalisasi juga harus mampu melahirkan orang yang mampu berkearifan lokal, dan berkearifan agama. 'berkearifan lokal' dimaksudkan bahwa ditengah keragaman pandangan mengenai banyak hal, seseorang haruslah mampu menempatkan diri sesuai dengan perspektif lokalitas yang ada. Karena memang lawan dari globalisasi adalah glokalisasi, yaitu sebuah penguatan nilai-nilai lokal. Maka dalam konteks glokalisasi ini kearifan lokal diperlukan. "berkearifan agama' artinya bahwa dalam pendidikan menghadapi globalisasi dimensi ketuhanan tetap diperlukan dalam mensikapi realitas.

Pendidikan dalam konteks globalisasi harus melahirkan peserta didik yang 'berkarakter', artinya anak didik hendaknya diarahkan untuk menemukan jati dirinya dan mempunyai sikap hidup dan pandangan hidup yang jelas dalam menghadapi globalisasi ini. Syarat ini adalah mutlak mengingat dalam globalisasi

siapa yang tidak bisa memilih dan memilah justru akan menjadi korban dari pada budaya global yang dilahirkan oleh globalisasi.

Kemudian pertanyaan saya berlanjut, kenapa ibu Hry menyekolahkan anaknya ke MP. Pertanyaan ini mencoba menggali motivasi ibu ini memilih MP untuk menyekolahkan anaknya. Menurut ibu Hry, kenapa dia memilih MP untuk sekolah anaknya, karena;

*“ .... MP menawarkan pendidikan dengan pendekatan kombinasi antara agama dan umum. Selain itu MP sejauh ini sudah teruji diminati oleh masyarakat. Dan satu lagi menyekolahkan anak di MP adalah prestige tersendiri...”* Jawaban Ibu Hry (wali murid siswa MP)<sup>9</sup>

Ada tiga hal yang menarik dari jawaban ibu Hry ini. Menurutnya, MP mempunyai tiga hal: pendekatan pembelajaran (agama dan umum), sudah teruji, prestige. ‘Pendekatan Pembelajaran: Agama dan Umum’, salah satu yang menjadi karakteristik dan daya tarik MP adalah madrasah yang menekankan pembelajaran agama dan umum secara seimbang. Sekalipun ada arahan dari kurikulum nasional bahwa dengan dipersamakannya madrasah dengan sekolah umum, namun MP tetap memberikan pelajaran agama dan pelajaran umum dengan porsi yang seimbang. Bahkan dalam beberapa hal pembelajaran agama dikembangkan dan ditambahkan dengan model *hidden* kurikulum. Setiap hari sebelum pelajaran dimulai sekitar 10-15 menit dilakukan kegiatan-kegiatan keagamaan kecil seperti hafalan doa-doa, hafalan surat-surat pendek dari al Qur’an, dan wasiat-wasiat agama.

‘Sudah Teruji’ menurutnya adalah MP telah berjalan sedemikian lama dari 1974 hingga sekarang, sekitar 38 tahun. Sepanjang sejarah itu, MP telah berhasil membuktikan diri menjadi pilihan masyarakat. Sampai saat ini, MP konon untuk tingkat dasarnya mempunyai kelas sebanyak 50 kelas. Fakta ini membuktikan bahwa MP telah teruji oleh pasar.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan ibu Hry, seorang wali murid, 15 Nopember 2008

'Prestige' menjadi alasan lain kenapa orang tua menyekolahkan anaknya di MP. Ketika ditanya orang: "anaknya disekolahkan di mana?", maka dengan bangga ibu tadi akan menjawab di MP. Menyekolahkan anak di MP menjadi prestige tersendiri, menurut ibu tadi, karena MP dianggap sekolah favorit, dengan segmen pasar orang tua kelas ekonomi menengah ke atas.

Selain pendapat ibu Hry tadi, berdasarkan dokumen yang saya temui, saya melihat bahwa lembaga MP telah melakukan sesuatu dalam mengembangkan pendidikan untuk menatap globalisasi. Hal itu diperkuat dengan adanya fakta dalam dokumen bahwa Madrasah Pembangunan telah menyusun visi dan misi perencanaan pengembangan madrasah di mana disebutkan berkali-kali istilah globalisasi.<sup>10</sup> Pertanyaannya, sejak kapan istilah globalisasi muncul dalam dokumen resmi Madrasah Pembangunan? Menurut Sfy, visi misi itu disusun sekitar tahun 1995, yaitu ketika menyadari bahwa tanpa sengaja Madrasah Pembangunan telah menjadi pendidikan global dengan kehadiran siswa-siswi dari mancanegara.

Proses penyusunan visi dan misi Madrasah Pembangunan lahir dari perumusan yang dilakukan oleh para guru secara terbatas, yang kemudian diusulkan ke pengurus yayasan untuk minta persetujuan. Barangkali karena pada tahun 1990-an, istilah globalisasi mulai dianggap sebagai sesuatu yang istimewa, keren dan mendunia, maka tanpa kejelasan konsep operasional, redaksi visi dan misi itupun disetujui dengan mudah.

---

<sup>10</sup> Visi Madrasah Pembangunan, Ciputat adalah: *"Menjadikan Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah terdepan dalam pembinaan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan dengan mengapresiasi potensi-potensi anak serta perkembangan era globalisasi."* Selanjutnya visi itu diterjemahkan dalam misi: 1) melahirkan lulusan yang kompetitif; 2) menyediakan kurikulum yang apresiatif terhadap kecenderungan globalisasi; 3) tenaga pendidikan yang berkemampuan komunikasi global.

## **B. Persoalan-persoalan Yang Dihadapi Madrasah Dalam Konteks Globalisasi Pendidikan**

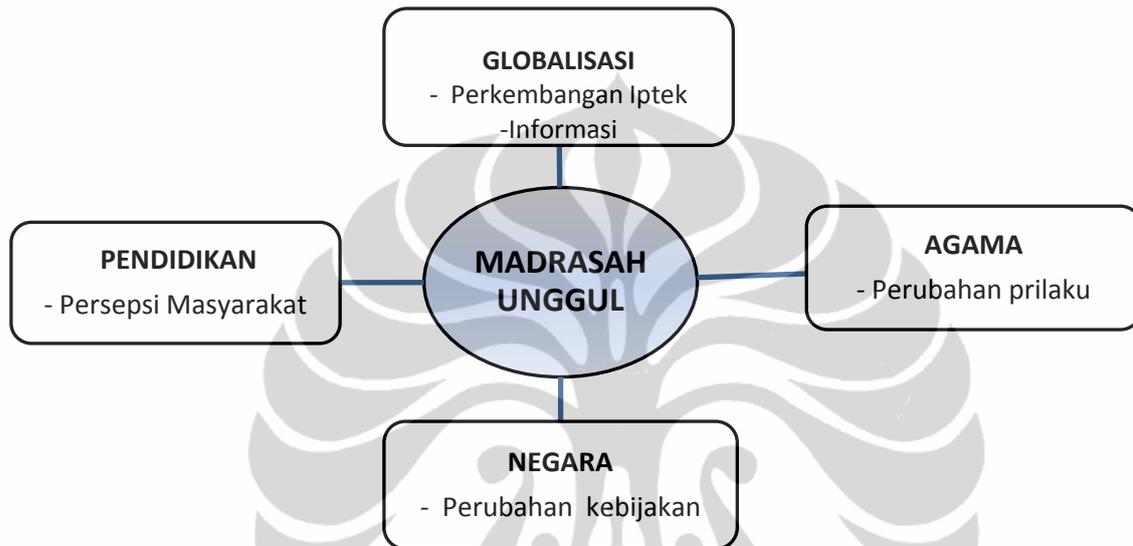
Dalam perjalanan waktu selanjutnya, penulis menemukan sebuah hasil pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Madrasah Pembangunan ke depan menghadapi globalisasi. Menurut dokumen itu, Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan sebagai unit penyelenggara pendidikan, harus memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan. Perkembangan dan tantangan itu misalnya menyangkut: 1) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) Globalisasi yang memungkinkan sangat cepatnya arus perubahan dan mobilitas antar dan lintas sektor serta tempat; 3) Era informasi; 4) Pengaruh globalisasi terhadap perubahan perilaku dan moral manusia; 5) Berubahnya kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan (Kurikulum MI Pembangunan UIN Jakarta, 2007). Data ini menunjukkan bahwa pengelola Madrasah Pembangunan telah menyadari beberapa permasalahan krusial lembaga pendidikan saat ini, khususnya terkait dengan globalisasi pendidikan.

Dibaca dari kerangka analisis penelitian ini, beberapa permasalahan yang dihadapi Madrasah Pembangunan di atas dapat dipetakan sebagai berikut: perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), informasi sebagai kekuatan utama yang mendorong globalisasi (termasuk bahasan globalisasi); perubahan perilaku dan moral masuk pada wilayah agama (termasuk bahasan agama); cepatnya perubahan dan mobilitas dapat dikaitkan dengan perubahan kebijakan negara (termasuk bahasan negara); dan berubahnya kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan (termasuk bahasan pendidikan). Lebih jelas lihat skema.

**Globalisasi.** Disadari bahwa faktor utama globalisasi dalam perspsi orang tua siswa dan pelaku pendidikan Madrasah Pembangunan adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan informasi. Perkembangan tehnologi informasi telah sangat menentukan. Madrasah Pembangunan menyadari bahwa media informasi dan komunikasi memainkan peranan penting dalam mensukseskan pendidikan, yaitu dalam tehnologi pembelajaran dan

pengembangan image lembaga pendidikan. Membangun 'image' dalam konteks globalisasi informasi merupakan salah satu kunci sukses menyelenggarakan lembaga pendidikan.

**Skema 4**  
**Peta Persoalan Yang Dihadapi Madrasah Pembangunan**  
**Dalam Konteks Globalisasi**



Wawancara dengan orang tua siswa didapatkan kesimpulan bahwa : 1) globalisasi merupakan kekuatan yang ditentukan oleh media komunikasi dan informasi. Ini dinyatakan dalam ungkapan “membesar-besarkan sesuatu yang kecil.” Sesuatu yang kecil, karena peran media dapat menjadi sesuatu yang besar, demikian juga sebaliknya sesuatu yang besar kalau tidak ada media yang memberitakannya dapat menjadi sesuatu yang kecil atau bahkan tidak diketahui orang umum. 2) globalisasi merupakan perspektif cara pandang atau cara berfikir. Globalisasi bisa menjadi persoalan bagi orang yang memahaminya, namun globalisasi juga bisa tidak menjadi persoalan apa-apa bagi mereka yang tidak memahaminya. Globalisasi dapat seperti ideologi yang bisa diikuti atau ditolak sama sekali. 3) Globalisasi membuat semua permasalahan menjadi transparan, nilai-nilai menjadi relatif dan lahirnya sikap yang cenderung permisif.

**Agama.** Mensikapi perubahan perilaku masyarakat terkait dengan globalisasi, madrasah sangat berkepentingan terhadap pembentukan watak, kepribadian peserta didik. Pasca berhasilnya integrasi madrasah secara penuh dalam sistem pendidikan nasional yang berpuncak pada lahirnya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 yang mengakui posisi sama antara madrasah dan sekolah, menurut peneliti, ada dua permasalahan yang utama yang masih dihadapi oleh para praktisi madrasah. *Pertama*, masih adanya praktek bias diskriminasi yang dihasilkan dari interpretasi birokrasi pendidikan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah yang terimplementasi dari beberapa perlakuan berbeda yang dilakukan oleh pemerintah dalam mensikapi lembaga sekolah dengan lembaga madrasah.<sup>11</sup> *Kedua*, kalau memang madrasah dan sekolah sudah dianggap sama sebagai pendidikan formal, kenapa lembaga ini oleh komunitas pendukungnya masih tetap diberi label 'madrasah'? Apa yang menjadi karakteristik madrasah, sehingga harus dipertahankan dengan nama dan identitas tersebut?. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang memunculkan semangat di kalangan praktisi madrasah untuk memperjelas kembali ciri atau karakteristik lembaga madrasah.

Madrasah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai lembaga pendidikan yang memberikan porsi yang lebih besar dalam pembelajaran agama bila dibandingkan dengan sekolah umum.<sup>12</sup> Artinya, sebagian masyarakat memilih menyekolahkan anak ke madrasah, dan tidak ke sekolah umum, menurut mereka karena didorong agar anak mereka mendapatkan pelajaran agama lebih banyak. Menurut mereka, kalau madrasah tidak lagi bisa memberikan porsi yang cukup dalam pembelajaran agama, maka tidak ada alasan lagi mereka untuk memilih

---

<sup>11</sup> Dapat dicontohkan seperti edaran Menteri Dalam Negeri yang berimplikasi bahwa madrasah adalah instansi vertikal yang tidak berhak mendapatkan pembiayaan dari pemerintah daerah. Interpretasi semacam itu nampaknya diikuti oleh banyak daerah dalam perlakuannya terhadap madrasah.

<sup>12</sup> Penting untuk diperhatikan bahwa ciri lain pendidikan madrasah adalah pembinaan jiwa agama dan akhlak anak didik. Inilah yang menjadi identitas sebenarnya dari pendidikan madrasah yang perlu diperhatikan oleh para pengelola dan guru lembaga pendidikan Islam itu. Pendidikan dan pengajaran dalam madrasah harus diarahkan kepada pembinaan keyakinan agama, sehingga hidupnya selalu berpedoman kepada ajaran Islam. Lihat Zakiah Daradjat dalam "*Pengantar*" buku Maksud, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. vii.

madrasah. Ini adalah kesimpulan dari jawaban dari salah satu wali murid dari MP yang memilih madrasah ini karena lembaga ini menggabungkan pembelajaran agama dan umum sekaligus.

Pertimbangan adanya pembelajaran agama yang memadai menjadi ciri khas utama keberadaan madrasah. Kebijakan memberi bobot lebih pada pembelajaran agama sengaja dikembangkan oleh praktisi madrasah merupakan implementasi dari kesadaran nilai-nilai keagamaan mereka. Sentuhan keagamaan yang lebih inilah yang menurut hemat peneliti yang menjadi karakteristik khas yang dimiliki madrasah. MP sadar betul tentang tuntutan itu. Maka dalam kasus menghadapi realitas perubahan sosial dan dampak globalisasi, MP selalu menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengembangkan kebijakan apapun. Pertimbangan untuk selalu mengambil keputusan yang lebih aman dikedepankan daripada mengadaptasi sedemikian rupa sebuah warna kemajuan. Namun, disamping itu lembaga ini juga sadar bahwa tantangan mengadaptasi kemajuan adalah suatu keharusan untuk dijalani. Dalam mengadaptasi warna kemajuan, madrasah juga mewaspadaikan dan mensikapi semua perkembangan yang terjadi. Fenomena ini nampak dalam kejadian berikut ini.

*Pada suatu waktu, saat itu baru masa awal pembelajaran semester ganjil, yaitu di bulan Januari, tiba-tiba di Madrasah Pembangunan dikejutkan dengan adanya surat pemberitahuan dari Kepala Madrasah yang ditujukan untuk semua wali murid. Isi surat itu adalah pemberitahuan kepada orang tua siswa bahwa madrasah membatasi penggunaan handphone oleh siswa di Sekolah. Bagi siapa saja yang membekali siswa dengan alat komunikasi handphone harus memberitahukan dan seijin dari pada sekolah. Bagi orang tua yang belum membekali siswa dengan HP menganggap himbauan itu angin lalu. Menurut mereka memang belum waktunya anak mereka dibekali HP. Selain karena barang itu harus dibeli dengan uang, si anak juga dianggap belum waktunya dibawain HP. Terutama dari faktor keamanan. Bisa jadi dengan membawa HP mengundang perhatian orang untuk berbuat jahat kepada anak, misalnya dengan merebut HP, atau lebih ngeri lagi menculik si anak dan menjadikan HP tersebut sebagai alat untuk meminta tebusan kepada orang tua si anak.*

*Bagi orang tua yang telah membekali anak dengan HP dibuat sedikit panik. Bagi mereka HP sangat penting yaitu untuk mengetahui posisi di mana dan bagaimana anak mereka berada. Selain itu juga HP dipergunakan untuk kepentingan antar*

*jemput si siswa, karena antara yang mengantar sekolah di waktu pagi dengan yang menjemput di siang hari orangnya berbeda. Maka ramailah para orang tua itu pergi ke sekolah untuk mengurus surat izin agar si anak bisa membawa HP. Jumlah orang tuayang mengurus surat izin ternyata tidak lebih dari separoh jumlah siswa. Barangkali memang masih lebih banyak orang tua yang menganggap HP bukan dunia yang pas bagi usia anak mereka.*

*Usut punya usut kebijakan perizinan bagi siswa dalam membawa HP itu muncul akibat laporan salah satu orang tua murid bahwa anak mereka ketahuan menggunakan HP untuk mengakses gambar-gambar yang belum pantas bagi si anak. Sebut saja gambar-gambar porno. Si anak memang membawa HP dari jenis yang canggih yang bisa untuk memvisualkan gambar bergerak, dan lebih payah lagi bisa untuk mengakses internet. Si anak diketahui sepulang sekolah banyak mengurung diri di kamar beserta salah satu temannya. Suatu saat ketahuan bahwa mereka sedang menikmati gambar-gambar tersebut. Kaget campur geram, akhirnya si orang tua melaporkan apa yang dilakukan anaknya ituke madrasah.*

*Pihak madrasah mengambil kebijakan segera. Penggunaan HP oleh anak didik perlu diperketat lagi. Bagi siswa atau orang tua yang ingin membekali siswa dengan HP harus minta izin sekolah. HP yang digunakan pun dibatasi spek nya, yaitu hanya dari jenis CDMA seperti Fleksi dan Esia. HP juga yang tidak bisa untuk mengakses gambar bergerak atau internet. Kebijakan ini terpaksa dilakukan menurut pihak sekolah karena belakangan banyak terjadi sms adegan senonoh yang sengaja disebar luaskan di kalangan pelajar.*

Gambaran di atas merupakan sekelumit cerita, bagaimana globalisasi telah memberi kemudahan akses informasi sedemikian rupa sehingga gambaran perilaku seksual orang dewasa sudah dapat direkam dan dijadikan gambar bergerak dan bisa disebarluaskan kepada publik. Sebuah tontonan yang dipandang belum pas untuk anak-anak. Walaupun di sana ada perdebatan apakah pornografi sebuah hak yang setiap orang berhak tahu dan mempunyai keingintahuan tentang hal itu atau pornografi adalah sesuatu yang tidak boleh disebarluaskan. Dalam menghadapi kasus ini, pihak madrasah pembangunan mengambil kebijakan mengawasi dan membatasi penggunaan HP oleh Siswa dengan alasan dampak negatifnya lebih besar dari pada manfaatnya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Mengkaji sikap keberagamaan dalam konteks globlisasi, dalam wacana para ahli dalam studi agama, ada yang bersikap pesimis dan ada juga yang bersikap optimis. Satu pandangan yang melihat secara pesimis bahwa peran agama akan tergantikan dengan tatanan baru yang lain, satu pandangan lagi melihat peran agama tetap ada hanya saja dalam bentuk dan bahasa yang baru. Pandangan pesimis salah satunya dikemukakan oleh Anthony Wallace (1966: 264-265). Masa depan agama yang evolusioner adalah kehilangan. Percaya kepada makhluk-makhluk dan kekuatan supernatural yang mempengaruhi alam tanpa mematuhi hukum alam akan luntur dan

**Negara.** Dengan semakin menguatnya dominasi negara dalam menegakkan sistem pendidikan nasional, madrasah --sebagai sebuah entitas kelembagaan di satu sisi dan di sisi lain merupakan bagian dari sub sistem pendidikan nasional-- mencoba dalam membangun posisinya di depan negara di satu sisi mereproduksi identitasnya dan di sisi lain menyesuaikan diri dan berintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Ada beberapa persoalan yang tersisa yang harus diselesaikan, khususnya harus diselesaikan oleh pihak internal masyarakat madrasah.

Di kalangan praktisi madrasah terdapat polarisasi pandangan dalam dua kutub, pertama beranggapan modernisasi madrasah sebagai kooptasi pemerintah atas otoritas masyarakat mengelola madrasah, dan ujung-ujungnya tidak saja merugikan madrasah bahkan justru menghilangkan sama sekali kepentingan umat Islam. Kedua, anggapan bahwa madrasah justru harus terus 'dimodernisasi' agar tetap *survive* dan mampu menjalin komunikasi secara cerdas dengan tuntutan masa depan. Caranya, madrasah didesain secara terstruktur dengan tidak hanya berkutat pada mata pelajaran agama *an sich*, tetapi juga mendalami matapelajaran umum dengan baik. Pendidikan madrasah masih diyakini memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantages*) karena diyakini mampu mengantarkan siswa pada ranah yang lebih komprehensif, meliputi aspek intelektual, moral spiritual dan keahlian ilmu modern sekaligus.

Dunia madrasah sering mengalami ketimpangan dalam berbagai hal terkait perkembangan madrasah, mulai dari perlakuan pemerintah yang dianggap diskriminatif hingga kekhawatiran hilangnya kekhasan madrasah yang mengemban misi *tafaqquh fid-din*. Persoalan yang terakhir ini dapat dipahami

---

hanya menjadi memori sejarah yang menarik. Benar bahwa peristiwa ini tidak mungkin terjadi dalam generasi berikut; prosesnya mungkin sekali akan berlangsung ratusan tahun, dan mungkin saja kalau tetap ada individu-individu, atau malah kelompok-kelompok pemujaan kecil, yang merespons terhadap halusinasi, kesurupan dan obsesi dengan suatu interpretasi supernatural. Tetapi sebagai unsur kebudayaan (*cultural traits*) percaya kepada kekuasaan-kekuasaan supernatural ditakdirkan untuk lenyap dari seluruh dunia, sebagai akibat dari meningkatnya adekuensi dan difusi pengetahuan ilmiah dan realisasi oleh keyakinan sekuler bahwa kepercayaan supernatural tidak diperlukan untuk penggunaan ritual yang efektif. Pertanyaan tentang apakah penyelesaian demikian itu baik atau jelek bagi kemanusiaan adalah tidak relevan dengan prediksi, prosesnya tidak terelakkan.

mengingat keinginan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah juga dibarengi oleh kegigihan mereka untuk tetap menjaga agar madrasah ini mutu pendidikan agamanya tetap baik.<sup>14</sup>

Kebutuhan praktisi madrasah terhadap kekhasan madrasah pun masih tinggi. Praktisi madrasah menilai bahwa sebagai pendidikan berbasis masyarakat, isi pendidikan di madrasah idealnya adalah nilai kultural yang telah hidup dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Karena itu, kurikulum madrasah harus mengakomodir secara memadai materi ilmu-ilmu agama sebagai penjabaran dari visi, misi, dan tujuan diselenggarakannya madrasah. Hubungan pemerintah dan masyarakat harus padu padan dalam mengembangkan madrasah ini tanpa merugikan salah satu pihak, independensi masyarakat harus dihargai dengan pemerintah terus membantu pengembangannya tanpa harus menegerikan madrasah terkecuali karena alasan khusus dan mendesak, misalnya di daerah terpencil, daerah perbatasan dan pulau yang miskin akses.

Dengan pengakuan kesetaraan madrasah melalui UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan harapan masyarakat yang tinggi terhadap madrasah agar mempertahankan karakter dasarnya, dunia madrasah memiliki dua agenda besar, yaitu: pertama madrasah dituntut untuk meningkatkan mutu dalam rangka berkompetisi dengan satuan pendidikan sederajat dalam hal kualitas pembelajaran dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan. Ini merupakan konsekwensi langsung madrasah yang menyatu dalam sistem pendidikan nasional; dan Kedua, bagaimana madrasah mempertahankan identitas dengan menjaga tradisi lembaga pendidikan Islam yang mengembangkan pendidikan dalam konteks nilai-nilai keagamaan sebagai identitas institusi. Peran ini juga penting, selain madrasah berkembang sesuai dengan sejarahnya, peran madrasah

---

<sup>14</sup> Hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tahun 2007, tentang posisi madrasah dalam pandangan masyarakat, menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respons yang sangat tinggi terhadap pentingnya jati diri madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Masyarakat berkeinginan pengembangan madrasah tidak dilepaskan dari aspek kesejarahan madrasah itu sendiri. .

dalam perspektif kebangsaan turut berkontribusi dalam penguatan nilai-nilai moral sebagian warga negara.

Permasalahan lain ditimbulkan oleh negara yang berdampak pada madrasah adalah kebijakan desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan bagi dunia madrasah dirasakan dampaknya sebagai bentuk marginalisasi madrasah. Abdul Aziz (2005) menyatakan ketika pengelolaan pendidikan didesentralisasikan dan dikelola dengan anggaran APBD, secara umum dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan desentralisasi pendidikan sebagaimana dimaksudkan oleh UU No. 22 tahun 1999 masih menyisakan banyak persoalan, terutama koordinasi antara pusat dengan daerah. Dalam catatan hasil pembahasan sidang tahunan MPR RI 2001 disebutkan bahwa "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai kewenangan bidang pendidikan, belum terrealisasi sebagaimana mestinya sehingga pemerintah daerah belum merasa bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan di daerah." Lima tahun setelah sidang tersebut berlalu, tentu telah terjadi banyak perubahan dalam hal koordinasi ini. Akan tetapi dalam konteks madrasah, komplikasi persoalan koordinasi sangat menentukan sikap pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah.

Sejauh ini, umumnya pemerintah daerah belum mau sepenuhnya membantu membiayai madrasah. Ini sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh para guru di lingkungan madrasah, padahal mereka sama-sama pelaksana pendidikan formal. Apalagi terjadi di beberapa daerah, pemerintah setempat memberikan tambahan uang kesejahteraan pada guru-guru di lingkungan diknas, sementara guru-guru di lingkungan Kementerian Agama tidak mendapatkan bantuan kesejahteraan sama sekali.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Padahal dalam UU No. 20 tahun 2003, terdapat hak dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Pasal 10 "Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; Pasal 11 ayat (1) "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi"; ayat

**Pendidikan.** Persaingan antar satuan pendidikan merupakan satu persoalan Madrasah Pembangunan dalam membangun dirinya menuju lembaga pendidikan yang berdaya saing. Pilihan jenis pendidikan pada 'madrasah' menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan lembaga pendidikan madrasah mempunyai daya saing dibandingkan dengan sekolah lain. Pada kasus MP, dapat dinyatakan bahwa madrasah ini berusaha merintis lembaga pendidikan bermutu, dan ternyata madrasah ini berhasil mewujudkan daya saing lembaga yang bisa diperbandingkan dengan berbagai jenis lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, seperti sekolah umum dan sekolah umum Islam yang belakangan hadir dan menjadi kompetitor bagi madrasah.

Peta kekuatan persaingan antar satuan pendidikan, di sekitar MP ada beberapa lembaga pendidikan sederajat yang di satu sisi bisa merupakan mitra sekaligus di sisi lain adalah kompetitor. Peta persaingan Madrasah Pembangunan dengan satuan atau jenis pendidikan yang lain dapat dipetakan sebagai berikut a) kompetisi antara MP dengan satuan pendidikan madrasah yang lain; b) kompetisi MP dengan satuan sekolah umum yang sederajat; c) kompetisi MP dengan satuan sekolah umum Islam yang sederajat seperti sekolah dasar Muhammadiyah, Sekolah Dasar Islam Terpadu dan sekolah dasar Islam yang bernaung pada yayasan lokal tertentu.

Kompetisi pertama, adalah kompetisi MP dengan sesama madrasah lain. Kontestasi ini terasa ketika MP, merasa harus berhadapan dengan kekuatan jaringan madrasah yang berada di bawah pembinaan Kemenag kota Jakarta Selatan. Pada kasus seperti pembuatan modul pembelajaran, MP berusaha berkreasi secara mandiri, di mana inisiatif ini menimbulkan ketidakbersamaan dengan madrasah-madrasah di sekitarnya. Madrasah-madrasah di sekitar

---

(2); "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun"; Pasal 46 ayat (1) "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat" ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

menggunakan modul pembelajaran yang seragam yang dikoordinasikan oleh Kemenag Kota Jakarta Selatan. Keadaan ini sekaligus menjadi tantangan terdekat bagi MP untuk membuktikan diri bahwa institusi ini unggul dibandingkan dengan madrasah yang lain yang memang dalam koordinasi masing-masing kemenag kab/kota setempat. Sikap kemandirian MP ini sering terasa seperti sikap yang tidak seirama dengan sikap *mainstream* jaringan madrasah.

Seperti diakui oleh Kepala MP tingkat ibtidaiyah, faktor yang menjadi ancaman atau kekuatan yang tidak mendukung bagi usaha pencapaian tujuan pendidikan bagi MP yang dirasakan adalah: Pertama, birokrasi pendidikan di tingkat lokal (baca: pemerintah daerah) yang kadang-kadang belum kondusif bagi lahirnya lembaga pendidikan yang mandiri. Pemerintah daerah dalam beberapa hal kadang masih terkesan memosisikan eksistensi lembaga sebagai pemegang otoritas tunggal dalam kebijakan kependidikan di wilayahnya. Cara-cara seperti bahwa soal ujian harus dikoordinasikan dan diedarkan oleh pemerintah daerah, dan kebijakan-kebijakan seperti itu membuat suasana tergantung yang dirasakan oleh satuan pendidikan.<sup>16</sup>

Kompetisi kedua, kompetisi MP dengan sekolah umum sederajat seperti sekolah dasar (SD). Jenis kompetisi ini dialami tidak hanya oleh MP saja, tetapi hampir oleh semua madrasah di manapun berada. Di berbagai tempat itu, madrasah harus bersaing dengan sekolah dasar untuk menarik perhatian masyarakat sehingga nantinya mereka menyekolahkan anak mereka ke kedua institusi tersebut. Madrasah diuntungkan apabila tingkat keberagaman masyarakat di suatu lokasi itu tinggi. MP membangun image kepada masyarakat bahwa institusi ini melakukan pembelajaran agama lebih banyak bila dibandingkan dengan sekolah umum.

Kompetisi ketiga, kompetisi MP dengan sekolah umum Islam. Gerakan imajinasi itu bisa dibaca dalam konteks kompetisi MP terhadap lembaga pendidikan formal sederajat seperti sekolah umum dan sekolah berlatar belakang

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Myd, Kepala MP tingkat Ibtidaiyah pada tanggal 3 Maret 2009

agama seperti sekolah Islam, Sekolah Kristen, Sekolah Katholik. Kalau melihat peta posisi MP dalam kacamata sosial, maka di sana dapat dipetakan beberapa faktor yang menghadang sekaligus menjadi ancaman tersendiri bagi keberadaan MP.

### **C. Strategi Madrasah Pembangunan Menghadapi Globalisasi**

Dalam menatap globalisasi, strategi apa yang dilakukan Madrasah Pembangunan dalam mengembangkan lembaga pendidikan ini? Untuk mendapatkan data ini, selain membaca dari dokumen-dokumen yang ada, saya juga berusaha menemui pihak yayasan Madrasah Pembangunan. Saya berhasil menemui Direktur Yayasan dan menjadikannya sebagai informan utama dalam mengetahui strategi Madrasah Pembangunan menghadapi globalisasi. Direktur itu mempunyai nama, Sfy (45 Tahun), seorang pengurus utama Yayasan Madrasah Pembangunan. Dia telah mengajar dan mengabdikan di MP sejak tahun 1986. Sebagai pegawai negeri, dia sempat diangkat dari guru madrasah tersebut menjadi dosen pendidikan di Fakultas Kependidikan (Tarbiyah) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2000. Karena lamanya pengabdian di Madrasah Pembangunan dan mengetahui banyak tentang Madrasah, pada tahun 2010 dia diangkat menjadi Ketua Yayasan Madrasah Pembangunan.

Penyusunan visi dan misi dilakukan oleh tim kecil yang terdiri dari guru-guru Madrasah Pembangunan. Draft visi dan misi selanjutnya diusulkan ke pihak yayasan. Dari pengakuan Sfy, visi dan misi pendidikan yang menyebutkan kata globalisasi itu tidak mendapatkan kesulitan yang berarti dalam pengesahannya. Baik pihak guru-guru dan pengurus yayasan, masing-masing menyadari bahwa sudah waktunya MP mengagas pendidikan global. Kultur pendidikan di MP yang merupakan lembaga pendidikan di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta membantu memahamkan perlunya pendidikan bertaraf global, atau paling tidak mereka tidak terlalu berkeberatan menggunakan istilah globalisasi dalam rancangan visi dan misi Madrasah Pembangunan.

Maka pada tahun 1996, muncullah rumusan visi dan misi Madrasah Pembangunan sebagaimana kita lihat dokumen dari madrasah tersebut hingga saat ini. Visi madrasah Pembangunan adalah: *“Menjadikan Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah terdepan dalam pembinaan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan dengan mengapresiasi potensi-potensi anak serta perkembangan era globalisasi.”* Dari redaksi visi ini menunjukkan, bahwa realitas globalisasi sudah menjadi dasar kesadaran bagi para aktor MP dalam mengembangkan pendidikan.

**Misi.** Dari visi tersebut, MP memperjelas visi dengan merumuskan misi. Sekaligus rumusan misi itu merupakan rincian jawaban: bagaimana institusi madrasah merespon pandangan dan harapan masyarakat terhadap pendidikan dalam konteks globalisasi.<sup>17</sup> Dalam naskah resmi *Buku Panduan Madrasah* disebutkan bahwa madrasah ini dalam konteks globalisasi merumuskan misi: 1) melahirkan lulusan yang kompetitif; 2) menyediakan kurikulum yang apresiatif terhadap kecenderungan globalisasi; 3) tenaga pendidikan yang berkemampuan komunikasi global.

Misi pertama MP dalam menghadapi globalisasi adalah melahirkan lulusan yang kompetitif. Lulusan kompetitif ini dijelaskan lebih rinci meliputi anak didik yang mempunyai keunggulan komparatif, memiliki keseimbangan kekuatan jasmani dan rohani, memiliki kemandirian dan kemampuan bekerja dalam *teamwork*. Butir-butir ini dapat dilihat dari butir 1, 2, dan 3.

*Tujuan Madrasah Pembangunan: 1) Melahirkan lulusan yang beriman dan bertaqwa dengan kemampuan kompetitif serta memiliki keunggulan-keunggulan komparatif; 2)...; 3)...; 4)...; 5) Mewujudkan siswa yang memiliki keseimbangan antara kekuatan jasmani dan kekuatan rohani serta kepekaan sosial; 6) Mewujudkan siswa yang mandiri dan mampu melakukan teamwork melalui berbagai aktifitas belajar intra maupun ekstra kurikuler.*

---

<sup>17</sup> Mastuhu (2003) menyatakan bahwa permasalahan pendidikan dalam konteks globalisasi adalah mampukah praktisi pendidikan menciptakan dan mengembangkan sistem pendidikan yang menghasilkan lulusan-lulusan yang ‘mampu memilih’ tanpa kehilangan peluang dan jati dirinya? Lihat Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*. Yogyakarta: Safiria Insania Pers. 2003, h. 10.

Misi kedua MP dalam menghadapi globalisasi adalah menyediakan kurikulum yang apresiatif terhadap kecenderungan globalisasi. MP UIN Jakarta, dalam rangka menghasilkan anak didik yang sesuai dengan tujuan, selalu berusaha berbenah diri dengan melakukan perubahan dan perombakan kurikulum guna memenuhi tuntutan perkembangan zaman sebagai konsekuensi dari trade mark MP. Menghadapi globalisasi, apa yang dilakukan MP ? Ketika pertanyaan itu saya tanyakan kepada pimpinan MP, dia menjelaskan bahwa MP menawarkan model pendidikan yang membangun basis keunggulan pada basic sains, bahasa, akhlakul karimah. Tiga basis ini sekaligus menjadi trade mark yang menjadi dagangan MP sekaligus menjadi motto madrasah: *“Basic Science, Bahasa, dan Akhlakul Karimah.”*

Misi ketiga MP menatap globalisasi adalah menyediakan tenaga pendidik yang mempunyai kemampuan komunikasi global. Menurut keterangan Kepala Madrasah, dalam menghadapi globalisasi, lembaga pendidikan hendaknya mempersiapkan guru sedemikian rupa supaya faham apa yang harus dilakukan dalam menyiapkan anak didik di era global. Bapak Myd, Kepala Madrasah Pembangunan jenjang Ibtidaiyah (dasar) menyebutkan:

*... para guru harus memahami **paradigma mengajar** yang dibutuhkan, tersedianya sarana prasarana yang memadai, dan manajemen....<sup>18</sup>*

Ada tiga komponen, menurut kepala sekolah ini dalam mempersiapkan madrasah yang dipimpinnya menghadapi globalisasi, yaitu: *pertama*, paradigma mengajar guru; *kedua*, tersedianya sarana prasarana; *ketiga*, manajemen.

Paradigma mengajar menurut Myd, adalah bagaimana para guru memahami persoalan yang terjadi, bagaimana para guru mengetahui kebutuhan standar perkembangan dunia pendidikan ... yakni tidak hanya dunia pendidikan di Indonesia... melainkan juga di tingkat dunia, para guru juga memahami isu-isu

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Myd pada 5 Pebruari 2009

atau wacana-wacana baru mengenai pendidikan seperti apa itu revolusi pendidikan?, apa itu *quantum teaching?*, apa itu *quantum learning?*, dan sebagainya. Dengan terbangunnya atau sadarnya para guru terhadap tantangan dan tema-tema pendidikan di tingkat dunia, maka secara otomatis para guru akan memacu diri untuk paham dan berkreasi dalam pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan.

Selain paradigma mengajar yang sesuai dengan kebutuhan dalam konteks globalisasi, lembaga pendidikan juga harus di dukung sarana prasarana yang memadai. Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk sebuah lembaga pendidikan dalam konteks globalisasi menurut bapak ini tadi adalah ketersediaan laboratorium yang standar, tersedianya teknologi informasi atau IT yang memadai, juga didukung oleh prasarana kebahasaan yang mencukupi.<sup>19</sup>

Managemen, untuk memenuhi lembaga pendidikan yang syarat untuk memenuhi dunia global adalah manegemen pendidikan sedemikian rupa. Kepala Madrasah menyebutkan *Total Quality Management (TQM)* merupakan model managemen yang perlu dikembangkan dalam menghadapi globalisasi. TQM karangan Sallis merupakan buku yang dirujuk untuk kepentingan itu. Salah satu target capain di bidang managemen adalah tahun 2009 MP akan berusaha untuk mengejar sertifikasi standar ISO 9000.

Selain itu, sebagai lembaga pendidikan Islam, MP juga mengembangkan motto *more than just islamic school* (Lebih dari sekolah Islam). Motto ini ditujukan untuk menentukan arah pengembangan MP yang ingin lebih bila dibandingkan dengan sekolah Islam yang lain yang ada. Motto itu mengandung makna, MP ingin kompetitif melebihi prestasi yang dicapai oleh sekolah Islam yang lain.

Dari kecenderungan utama adaptasi MP dengan globalisasi pendidikan, saya mempunyai penilaian bahwa warna respon lembaga ini terhadap globalisasi adalah tipe atau model transformasi global, yaitu mencoba menghadapi globalisasi pendidikan dengan melakukan berbagai penyesuaian agar supaya

---

<sup>19</sup> "Sekarang ini, *alhamdulillah* ada kurang 25 guru yang mulai menggunakan laptop sebagai sarana pembelajaran. Model pembelajaran mulai dikembangkan dengan model pembelajaran yang berbasis multimedia." Wawancara dengan Myd , 4 Februari 2009

lembaga tetap eksis dan dapat melayani kebutuhan atau kecenderungan globalisasi pendidikan.<sup>20</sup>

**Tujuan.** Termasuk model yang manakah globalisasi pada institusi MP ? Bagi institusi MP, kesadaran bahwa realitas globalisasi adalah suatu tantangan yang harus dihadapi oleh institusi ini nampaknya sudah disadari betul oleh para aktor di lingkungan MP ini. Hal ini nampak dalam naskah-naskah yang disosialisasikan pihak madrasah kepada para siswa. Satu contoh, kata seperti 'globalisasi', 'global' sudah muncul dalam redaksi tujuan MP seperti yang nampak dalam kutipan berikut:

Tujuan Madrasah Pembangunan selengkapnya adalah: 1) Terciptanya pendidikan yang dapat melahirkan lulusan beriman dan bertaqwa dengan kemampuan kompetitif serta memiliki keunggulan-keunggulan komparatif; 2) Terwujudnya kurikulum yang memiliki kekuatan pada pembinaan keislaman, sains dan teknologi serta apresiatif terhadap kecenderungan **globalisasi** dengan tetap berpijak pada kepribadian Indonesia dan kemampuan potensi anak; 3) Tersedianya tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi ideal baik dalam aspek keilmuan, skill keguruan, maupun kemampuan komunikasi **global**; 4) Tersedianya sarana sumber belajar yang dapat memberi kesempatan pada siswa untuk dapat belajar seluas-luasnya, sehingga sekolah benar-benar berfungsi sebagai *Center for Learning*; 5) Terwujudnya siswa yang memiliki keseimbangan antara kekuatan jasmani dan rohani serta kepekaan sosial; 6) Terwujudnya siswa yang mandiri dan mampu melakukan team work melalui berbagai aktifitas belajar intra maupun ekstra kurikuler. (Cetak tebal oleh Peneliti).

Redaksi seperti "...melahirkan lulusan... dengan kemampuan kompetitif"; "...kurikulum yang ... apresiatif terhadap kecenderungan globalisasi;" "...tenaga pendidik yang memiliki... kemampuan komunikasi global" sudah muncul dan menjiwai daripada tujuan madrasah ini. Redaksi-redaksi ini memunculkan kata kata seperti 'kompetisi,' 'apresiasi' atau sensitifitas,

<sup>20</sup> David Held dan Anthony McGrew (2003) menyebutkan berbagai bentuk atau model kecenderungan dalam globalisasi. Mereka menyebut ada 6 (enam) model di mana masing-masing memiliki perbedaan prinsip-prinsip etikanya, mempertanyakan siapa yang akan memerintah, hal-hal apa saja yang merupakan kunci perubahan, bentuk yang diinginkan dalam globalisasi, dan cara-cara transformasi politik yang diinginkan. Keenam model itu adalah: 1) neo-liberal; 2) internasionalisme liberal; 3) pembaharu institusional; 4) transformasi global; 5) proteksionis; dan 6) radikal.

'komunikasi' yang sering disebut dalam diskusi-diskusi bertemakan budaya global.

*Branding: Membangun Image, Memperbarui Semangat Kompetisi.* Selain beberapa inisiasi yang dilakukan Madrasah Pembangunan terkait dengan isi (*content*) mengembangkan lembaga pendidikan yang bervisi dan siap menghadapi globalisasi pendidikan, Madrasah Pembangunan menyadari bahwa media informasi dan komunikasi memainkan peranan penting dalam mensukseskan pendidikan. Membangun 'image' dalam konteks globalisasi informasi merupakan salah satu kunci sukses menyelenggarakan lembaga pendidikan.

*"Image adalah bagaimana Anda dilihat dan dipersepsikan;  
identitas adalah siapa diri Anda. "*  
William Golden, Majalah Print, 1959

Mengutip pandangan William Golden (1959) di atas, saya mencoba menelusuri akibat dari teknologi informasi dan komunikasi yang berimplikasi pada perlunya pembangunan 'image' dalam merebut konsumen yang dilakukan oleh Madrasah Pembangunan.<sup>21</sup> Untuk mengungkap permasalahan dimaksud, pertanyaan yang bisa dikemukakan adalah bagaimana usaha Madrasah Pembangunan dalam mencoba membangun image (*image building*) dalam rangka menarik perhatian masyarakat. Bagaimana Madrasah Pembangunan melancarkan strategi untuk membawa madrasah ini mampu berkembang dan berhasil menjadi salah satu madrasah favorit yang eksis di tengah masyarakat urban ibukota Indonesia, Jakarta.

Berbagai istilah atau teks berkembang di sekitar keberadaan madrasah. Berbagai istilah atau teks itu dicoba dimaknai baik dengan makna lama (terkait

---

<sup>21</sup> Kenneth E Boulding (1969) menyatakan teks-makna-image merupakan tiga hal yang saling terkait dalam memahami sebuah fenomena. Relasi antara teks-makna-image itu seakan membuat struktur bangunan imajiner sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah performa bangunan makna tertentu yang itu menjadi gambaran atau image mengenai suatu obyek.

sejarah) atau makna yang dicoba diperbarui (dalam rangka *image building*). Makna lama digunakan untuk menjaga nilai yang tersimpan dalam sejarahnya, sedang makna baru dipergunakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan alam fikir masyarakat saat ini.

Selain persoalan relasi makna, proses komunikasi juga memegang peran penting dalam pembangunan image. Proses komunikasi dapat digambarkan sebagai penyampaian pesan-pesan dari seseorang atau pihak tertentu kepada orang lain secara berhasil. Pentingnya suatu pesan yang ter-komunikasikan terletak pada perubahan yang dihasilkannya dalam imaji. <sup>22</sup> Semakin kuat pesan yang terkomunikasikan akan semakin kuat pula perubahan yang dihasilkan imaji. Proses komunikasi itu sendiri bukan semata-mata berarti proses penyampaian informasi saja, melainkan proses interaksi pengetahuan dan kebenaran antara pihak pertama dan kedua atau ketiga. Di sini peran dan fungsi bahasa menjadi penting. Komunikasi tanpa bahasa adalah sesuatu yang mustahil, dengan pengertian bahwa bahasa tersebut tidak selalu berbentuk bahasa verbal, melainkan bisa berupa bahasa tubuh, bahasa gambar, bahasa imajerial, -yaitu yang membawa serta imaji dalam setiap pengertiannya, atau bahasa imajinatif, - yaitu yang menunjukkan daya imajinasi subyeknya

Dari penelitian ini saya mencatat beberapa langkah Madrasah Pembangunan dalam membangun image yang dikomunikasikan melalui media informasi atau menciptakan kesan tertentu terkait dengan suasana madrasah. Beberapa langkah yang saling mendukung dalam menciptakan image tentang madrasah pembangunan itu diantaranya: visualisasi aktivitas madrasah melalui media informasi, pembangunan sarana prasarana pendidikan yang megah, kesan pendidikan bahasa asing diajarkan sejak dini, kurikulum muatan lokal yang strategis, kegiatan ekstra kurikuler yang variatif.

---

<sup>22</sup> Boulding, Kenneth E. *The Image*, The university of Michigan press, 1969

**Visualisasi melalui Media Informasi.** Untuk mendapatkan data bagaimana MP membangun image, saya mulai dengan melakukan wawancara terhadap seorang guru yang sudah lama ( $\pm$  33 tahun) mengajar dan mengabdikan di MP. Orang itu adalah seorang ibu guru, bernama Ibu Mtq, yang telah mengajar di madrasah tersebut sejak tahun 1976. Ibu itu bercerita tentang persepsi dia terhadap MP, tempat dia mengabdikan ini. Menurutnya:

*... MP sejak awal didirikan ditujukan untuk menjadi sekolah yang bermutu. Didirikan oleh masyarakat kompleks perumahan dosen UIN Syarif Hidayatullah yang kebanyakan adalah para dosen di perguruan tinggi tersebut. Sambutan terhadap kehadiran madrasah datang tidak hanya dari masyarakat yang tinggal di dalam kompleks. Dari luar kompleks pun banyak masyarakat yang memasukkan anaknya ke madrasah. MP sejak awal, mengingat statusnya yang swasta, menetapkan biaya yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa sekolah di sekelilingnya. Keberatan tentang biaya justru datang dari masyarakat dalam kompleks. Namun setelah dijelaskan maksudnya, keberatan itu pun sirna. Sementara masyarakat luar kompleks yang menyekolahkan ke madrasah tersebut justru kebanyakan dari para pegawai atau pengusaha swasta. Kebanyakan pegawai negeri di luar kompleks menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri baik sekolah dasar atau madrasah negeri.*

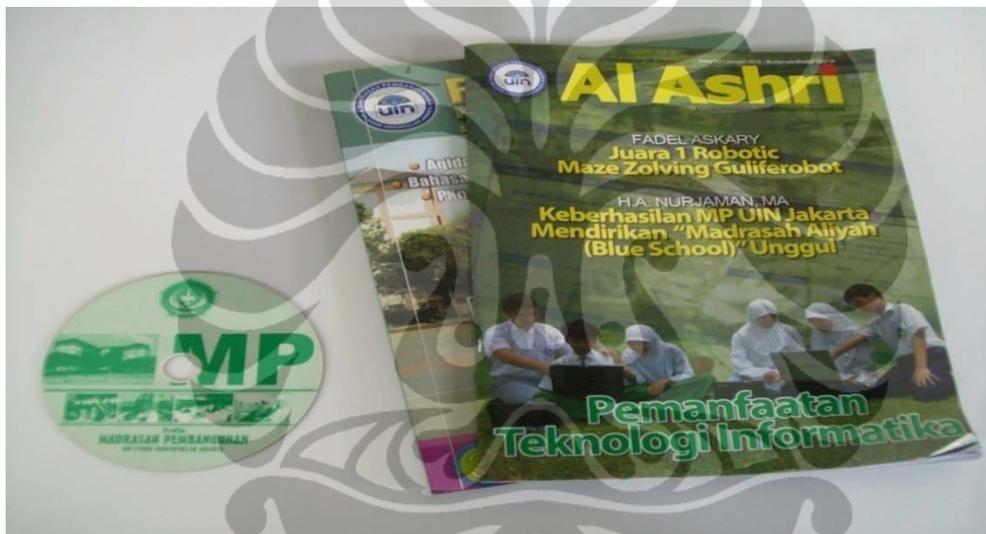
*Murid MP mulai melonjak banyak ketika MP sering tampil di Televisi. Melalui acara menyanyi atau cerdas cermat, MP mulai dikenal oleh masyarakat luas. Sejak itu murid-murid mulai berdatangan. Biaya yang sedikit mahal tidak lagi menjadi soal bagi para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke MP (Ibu Mtq, 2007).<sup>23</sup>*

Dari cerita ini, saya menggaris bawahi beberapa poin penting. Pertama, bahwa madrasah ini sejak awal memang telah digagas menjadi sekolah yang bermutu (mempunyai mutu yang lebih). Keinginan ini terkait dengan keberadaan madrasah ini yang berada di lingkungan kompleks perumahan dosen (dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta). Kedua, untuk meraih dan membiayai mutu yang diinginkan, madrasah ini mengambil kebijakan menetapkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya sekolah di sekitarnya. Ini nampaknya terkait juga dengan kebijakan kenapa madrasah ini memilih berstatus swasta, tidak mau dijadikan madrasah negeri, karena dengan status swasta sebuah lembaga bisa

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Mtq, guru senior di MP. Wawancara dilakukan pada tanggal 2007

menetapkan biaya sekaligus mengukur tingkat kepantasan di tengah masyarakat. Ketiga, perkembangan madrasah ini banyak didukung oleh peran masyarakat yang justru berasal dari kalangan pegawai swasta, di mulai masyarakat sekitar di luar komplek perumahan hingga masyarakat yang jauh dari lokasi. Keempat, madrasah ini semakin meningkat jumlah peminatnya ketika madrasah ini mulai melakukan usaha promosi atau membangun image melalui pemunculan kegiatan siswa madrasah melalui layar televisi. Poin keempat menjadi bukti bahwa visualisasi MP melalui media televisi diakui mendongkrak jumlah siswa yang masuk ke lembaga pendidikan tersebut.



Gambar 10. CD dan Majalah AI Ashri, Media Ekspose Madrasah Pembangunan

Media selain tv adalah melalui VCD dan majalah sekolah. Saya mengenal pertama kali MP dan merasakan kehebatan dari Madrasah ini justru melalui tayangan *Video Cassete Display* (VCD) tentang profil lembaga ini. Dalam VCD itu, MP digambarkan sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang modern, sebuah lembaga pendidikan Islam alternatif yang dilengkapi sarana prasarana yang relatif lengkap dan berkarakter. Saya merasa usaha visualisasi melalui VCD ini merupakan pintu masuk menarik perhatian bagi siapa saja yang menontonnya. Kombinasi visualisasi aktivitas pelajar, gagasan-gagasan para

pelakunya serta lagu-lagu heroik sebagai *soundtrack*-nya akan membuat kesan tersendiri bagi yang melihat VCD tersebut.

Dalam VCD dan buku-buku mengenai profil MP berkali-kali disebutkan kata atau teks kunci seperti kata globalisasi, *brand*, bermutu, basic sains, bahasa, akhlakul karimah dan sebagainya. Berangkat dari kata-kata kunci tersebut sampailah saya pada kesimpulan sementara, dalam kasus madrasah (secara umum) atau MP (secara khusus) ada relasi menarik antara teks atau peristilahan, pemaknaan atau usaha interpretasi, dan pembentukan image.

**Sarana Pendidikan yang Megah.** Kesan menarik juga muncul ketika kita berkesempatan mendatangi lokasi dengan melihat Gedung MP. Gedung madrasah dibangun dengan kesan bangunan yang layaknya kampus perguruan tinggi, gedung bertingkat, lokasi yang cukup luas. Penampilan lembaga pendidikan seperti itu rasanya memang diperlukan dalam menarik perhatian masyarakat perkotaan. Kemegahan gedung memberikan gengsi tersendiri bagi siapa saja yang menjadi bagian di dalamnya. Bagi orang tua akan bangga kalau mampu menyekolahkan anaknya ke lembaga tertentu yang memiliki gedung yang megah, demikian juga anak merasa bangga menjadi bagian dari lembaga tersebut. Demikian juga kesan itu dapat diperoleh dari bangunan MP.

Ketika saya menyaksikan fenomena MP dengan kemegahan gedung-gedungnya dan segala kelengkapan yang melingkupinya, saya sempat berfikir: konstruksi makna seperti apa yang berperan menjadi tulang punggung (*backbone*) madrasah ini mempunyai daya tarik sedemikian rupa? Aspek manajemen, atau faktor sejarah, atau juga faktor kebetulan saja madrasah ini bisa besar seperti ini? Sambil membuka catatan-catatan lepas saya mengenai madrasah dan beberapa catatan telah saya coba susun sistematika sedemikian rupa, saya mencoba terus berfikir untuk menemukan kemungkinan konstruksi makna yang mungkin terdapat dalam persoalan MP ini.



Gambar 11. Sarana Gedung Madrasah Pembangunan yang Megah

**Pembelajaran Bahasa Asing Sejak Dini.** Salah satu usaha penguatan kinerja dan image Madrasah Pembangunan adalah pemberian pembelajaran bahasa asing sejak dini. Ada dua bahasa asing yang diajarkan di sana, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Untuk mengenalkan bahasa asing sejak dini, Madrasah Pembangunan mengajarkan bahasa asing seawal mungkin. Dulu pelajaran ini diberikan di kelas III madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD), sekarang telah diajarkan bahkan di kelas I.

Penguasaan bahasa asing merupakan salah satu usaha pembangunan image lebih terhadap Madrasah Pembangunan ini. Penguasaan bahasa yang dimaksud adalah pengenalan bahasa asing sejak dini, yakni bahasa Arab dan bahasa Inggris. Di Madrasah Pembangunan, mulai kelas satu anak sudah diajari kedua bahasa asing tersebut. Walaupun ketika saya tanyakan kepada pimpinan madrasah Ibtidaiyah MP, nampaknya awalnya bahasa menjadi andalan MP bukan karena wacana pendidikan *life skills*. Madrasah Pembangunan memang ingin membekali siswa sejak dini dengan kemampuan bahasa asing.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Kemampuan berbahasa menjadi *core buisness* ketiga, selain penguasaan sains dan pembentukan akhlak siswa, yang ditawarkan MP terhadap peserta didik. Sebagaimana dalam motto madrasah "Basic Sains, Bahasa dan Akhlakul Karimah."

Pengembangan bahasa di Madrasah Pembangunan mempunyai keuntungan ganda. Pertama, pengembangan bahasa sebagai usaha peningkatan ketrampilan hidup (*life skills*) bagi siswa; Kedua, pengembangan bahasa pada sebuah institusi sebagai *image building* untuk mengangkat citra lembaga Madrasah. Globalisasi mensyaratkan penguasaan bahasa yang mampu mengakses komunikasi seluas mungkin. Saat ini bahasa Inggris diakui sebagai bahasa yang mempunyai jangkauan paling luas dan karenanya orang sangat diuntungkan dengan memiliki ketrampilan berbahasa yang satu ini.

Saya melihat dari pengembangan bahasa yang dilakukan oleh guru di Madrasah Pembangunan nampak belum menetapkan target kompetensi tertentu misalnya lulus MI anak sudah bisa membaca dan memahami teks berbahasa Inggris. Barangkali dalam kurikulum sebenarnya sudah disusun daftar kompetensi tertentu dalam pembelajaran bahasa, hanya saja dalam pembelajaran bahasa belum mengejar target tertentu yang distingtif dengan lembaga pendidikan lain. Nilai beda dalam pengembangan bahasa pada peserta didik terletak pada bahasa asing seperti Inggris dan Arab telah diajarkan di Madrasah Pembangunan sejak dini, yaitu sejak kelas I (satu) madrasah ibtidaiyah. Sementara di tempat lain pengajaran bahasa asing Inggris diajarkan di kelas IV (empat).

Manfaat lain dari pengembangan bahasa adalah pembentukan image (*image building*) yang itu penting dalam kultur komunikasi. Image dibutuhkan dalam rangka menjaga opini atau pemberitaan mengenai madrasah di masyarakat. Apabila proses kreatif pembentukan image ini melemah atau mati, maka akan matilah segala asumsi positif yang menempel pada sebuah institusi. Madrasah Pembangunan menggunakan kekuatan bahasa ini untuk mendongkrak citra maju dan responsifnya terhadap dunia global. Sebagai program unggulan, pilihan bahasa menjadi salah satu citra positif Madrasah Pembangunan menjadi relevan dalam konteks ini.

Konsep pendidikan *life skills* di Indonesia konon dikembangkan oleh Menteri Pendidikan Nasional zaman menterinya A Malik Fadjar. Konsep ini

walaupun bukan barang baru, dimungkinkan merupakan 'jalan keluar' untuk memulai membenahi lingkaran setan yang melilit pendidikan kita selama ini. Namun, berhasil atau tidaknya dalam memecahkan permasalahan pendidikan sangat tergantung pada tingkat pemahaman terhadap konsep life skills serta bagaimana menjabarkannya secara konsisten dan holistik ke dalam program-program pembangunan pendidikan baik di pusat maupun daerah.

Kemampuan bahasa merupakan kecakapan minimal pertama yang harus menjadi muatan pendidikan yang berorientasi pada kecakapan untuk hidup (*Life Skills*). Selengkapnya pendidikan yang berorientasi pada kecakapan untuk hidup (*Life Skills*) hendaknya memuat upaya untuk mengembangkan kemampuan minimal sebagai berikut: a) Kemampuan membaca dan menulis secara fungsional baik dalam bahasa Indonesia maupun salah satu bahasa asing (Inggris, Arab, Mandarin, dsb.); b) Kemampuan merumuskan dan memecahkan masalah yang diproses melalui pembelajaran berfikir ilmiah, eksploratif, 'discovery' dan 'inventory'; c) Kemampuan menghitung dengan atau tanpa bantuan teknologi, untuk mendukung kedua kemampuan tersebut di atas; d) Kemampuan memanfaatkan teknologi dalam aneka ragam lapangan kehidupan seperti teknologi pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, kerumahtanggaan, kesehatan, komunikasi-informasi, transportasi, manufaktur dan industri, perdagangan, kesenian, pertunjukan, olah raga, jasa, dsb; e) Kemampuan mengolah sumber daya alam, sosial, budaya dan lingkungan untuk dapat hidup mandiri; f) Kemampuan bekerja dalam tim yang merupakan tuntutan ekonomi saat ini baik dalam sektor informal maupun formal; g) Kemampuan untuk terus menerus menjadi manusia belajar sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; h) Kemampuan untuk mengintegrasikan dengan sosio-religius bangsa berlandaskan nilai-nilai Pancasila. <sup>25</sup>

**Kegiatan Eskul (Ekstra Kurikuler) Yang Bervariasi.** Dari daftar program kegiatan eskul yang ditawarkan melalui selebaran yang harus diisi oleh siswa,

---

<sup>25</sup> Lihat Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills Education*) Sebagai Arah Pendidikan Nasional, [http://pakguruonline.pendidikan.net/life\\_skill\\_1.html](http://pakguruonline.pendidikan.net/life_skill_1.html), dikutip, 21 jan 2009

saya membaca banyak sekali kegiatan yang disediakan di Madrasah Pembangunan Ciputat. Kegiatan-kegiatan itu meliputi: dokter kecil, pramuka, karate, seni lukis, seni tari, seni musik, *marching band*, jurnalistik (reporter al ashri) kelompok peduli lingkungan (KPL), Regu Inti Andalan (REGINTA), sepakbola/futsal, bola basket, renang, tennis meja hingga seni membaca al Qur'an.

Melihat kegiatan eskul yang bervariasi, saya menjadi paham bahwa variasi ekstrakurikuler yang banyak menjadi salah satu kekuatan MP dalam menarik dukungan masyarakat. Saya teringat gagasan bagaimana sebuah madrasah model di Kalimantan Barat yang waktu itu mencoba menggenjot promosi dan mencari perhatian masyarakat, melalui kegiatan *marching band*. Dengan adanya grup *marching band* maka dengan otomatis madrasah itu berkesempatan mempertontonkan kebolehan grup sewaktu latihan atau pentas pada event-event tahunan seperti perayaan kemerdekaan RI atau *event* lainnya. Penampilan grup *marching band* menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk lebih mengenal lembaga pendidikan yang memiliki grup *marching band* itu. Dan ternyata benar, madrasah tersebut mulai dikenal dan diminati oleh calon peserta siswa di wilayah itu.

**Perubahan logo untuk *branding*.** Secara kebetulan saya diberi kesempatan oleh pak Sfy untuk mengikuti satu peristiwa penting yang terjadi dalam lingkungan MP, yaitu perubahan logo lembaga pendidikan. Logo MP, yang karena merupakan bagian keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta maka logo MP sama dengan logo UIN syarif Hidayatullah. Logo MP yang semula bermotifkan bangunan segi lima menjadi logo yang bermotifkan bola dunia. Ini merupakan salah satu bentuk simbolisasi semangat mendunia dari keluarga besar UIN Syarif Hidayatullah.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Mengikuti jejak UIN Syarif Hidayatullah yang merubah logo kampus, MP yang secara sosiologis berada di kawasan serta masuk dalam keluarga UIN turut mengganti logo lembaga pendidikan ini.

Pada hari itu Kamis malam, 21 Agustus 2008 tepat pukul 19.30 WIB dihadiri sekitar 200-an tamu undangan, ada acara *launching* logo. Malam itu suasana Auditorium Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terasa sakral menanti saat-saat bersejarah peresmian logo baru. Sebuah angan penuh harapan tersirat dari setiap tamu undangan dan seluruh keluarga besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta demi ke-eksistensi-an dan kemajuan intelektual bangsa Indonesia khususnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di awal acara, iringan musik Jazz dari Dwickly Darmawan beserta istri Ita Purnama Sari dan kelompok Paduan Suara Mahasiswa (PSM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta turut menambah meriah acara malam itu.

Hadir tamu special, Hermawan Kartajaya, yang juga selaku wali amanat Universitas Indonesia (UI) dan Komite Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI). Dalam pidatonya ahli marketing handal Indonesia ini menyampaikan pesan dan harapannya demi kemajuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beliau mengatakan "*Bahwasannya dalam menuju sebuah pencapaian baru seperti yang dilakukan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan terciptakan oleh peluncuran logo baru, setidaknya harus memiliki Position Differentiation Branding (PDB) yang tepat*". Di saat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memutuskan untuk merubah logonya, di saat itu pula harus dengan mantap berucap "*we have to be a new player!!!*".

*"UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ibarat sebuah company yang mempunyai kompetitor dan customer, dimana penguasaan teknologi informasi merupakan hal yang wajib dimiliki guna menyambut semakin ketatnya kompetisi di era global dan dapat beradaptasi pada mainstream pendidikan tinggi dunia. Secara marketing rebranding yang dilakukan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah benar, tinggal bagaimana seluruh civitas academica mengadakan perubahan menuju tujuan bersama yang mulia"* (Hermawan Kartajaya, 2008)

Sebuah perubahan ini merupakan langkah nyata telah dilakukan oleh keluarga besar lembaga pendidikan di bawah bendera UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, secara serius senada dengan keinginan bersama untuk menjadikan komunitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai *World Class University* (WCU) Ini berarti MP yang merupakan bagian dengan keluarga besar UIN syarif

Hidayatullah turut dalam pembangunan visi tersebut. Gagasan untuk merubah logo baru bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di dasarkan pada beberapa pertimbangan.<sup>27</sup>

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, saya mendapatkan argumen dilakukannya perubahan logo. Menurut Sfy, logo baru tentunya tidak bisa lepas dari tiga nilai dasar sekaligus menjadi motto UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yakni *Knowledge* (Pengetahuan), *Piety* (Kesalehan), dan *Integrity* (Integritas), kemudian di singkat KPI. Pada dasarnya, logo baru itu terdiri dari 4 (empat) unsur utama, yaitu: bola dunia, garis edar electron, kitab/buku, garis putih pada kata-kata UIN. Masing-masing mewakili makna:

Gambar 12  
Perubahan Logo MP



<sup>27</sup> Beberapa pertimbangan perubahan logo di keluarga UIN Syarif Hidayatullah adalah: 1) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang sangat ekstensif; dinamika, masalah, tantangan, dan tuntunan kehidupan masyarakat dunia yang semakin terbuka; 2). Kompetisi yang semakin kuat dan keras, khususnya antar lembaga perguruan tinggi di dalam dan luar negeri; 3) Analisa para ahli logo yang menyebutkan perlunya keunikan logo bagi IAIN/ UIN Syarif Hidayatullah berbeda dengan logo-logo lainnya dengan sentuhan-sentuhan baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, budaya; dan berdasarkan dinamika, tantangan, dan tuntunan kehidupan yang semakin kompleks; 4) Rapat Senat lengkap UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menyetujui perubahan logo lama dan membuat sebuah logo baru yang menggambarkan Keislaman, Keilmuan, Keindonesiaan dan Globalisme. Rapat Senat juga mengamanatkan kepada rektor untuk menyusun langkah/program perubahan logo. "Logo baru, harapan baru" dalam <http://www.pmi-komfeis.or.id/berita/akademia/105-launching-logo-baru-uin-syarif-hidayatullah-jakarta.html>

*Bola Dunia*, warna biru bola dunia melambangkan wawasan universal UIN Jakarta dan juga misi agama Islam sebagai *rahmatan lil' alamin*. Bola dunia merupakan simbol yang mewakili beberapa makna seperti 1. gambaran wawasan global UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 2. Menggambarkan misi Islam sebagai rahmat bagi semesta (*Rahmatan li al-alamin*) yang juga diemban oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 3. Menggambarkan kubah masjid

*Garis Edar Elektron* (partikel atom) berwarna emas menggambarkan keilmuan dan dinamika serta keajegan hukum alam (*sunnatullah*) yang diperintahkan Allah untuk selalu dibaca dan diteliti demi kesejahteraan umat manusia. Partikel itu juga dapat dilihat sebagai bunga lotus atau sidrah (*sidrah al-muntaha*), yakni lambang cita-cita setiap mukmin untuk menggapai pengetahuan kebenaran tertinggi (*ma'rifah al-haq*). Partikel dan garis electron ini merupakan simbol yang mewakili beberapa makna seperti 1. Menggambarkan ilmu pengetahuan yang secara terus menerus harus digali, diriset, dikembangkan; 2. menggambarkan perubahan dan dinamika kehidupan yang harus senantiasa ditanggapi atau direspon oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 3. Menggambarkan keajegan hukum alam (*Sunnatullah*) yang diperintahkan Allah SWT untuk selalu dibaca dan diteliti untuk kesejahteraan umat manusia.

*Kitab*, merupakan simbol yang mewakili beberapa makna seperti 1) Menggambarkan himpunan petunjuk kehidupan dan moral serta sumber inspirasi dan kaidah hukum yang tertulis di dalam Kitab Suci al-Qur'an dan al-Hadist yang harus ditaati bagi pengembangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 2) Menggambarkan himpunan ilmu pengetahuan yang tertulis di dalam berbagai literatur yang harus terus digali dan dikembangkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

*Garis Putih pada kata-kata UIN*, merupakan simbol yang mewakili beberapa makna seperti 1. Menggambarkan sebuah tali pengikat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai universitas yang kuat, yang istiqamah, yang teguh berpendirian dan senantiasa mengedepankan intelektual dan moral; 2. Menggambarkan Sirat al-Mustaqim. *Warna Biru*, Melambangkan kedalaman ilmu, kedamaian dan kepulauan Nusantara yang berada di antara dua lautan besar, sebuah wilayah mempertemukan berbagai peradaban dunia. *Warna Kuning*, Melambangkan cita-

cita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menuju tahun-tahun keemasan, kecemerlangan, *Baldatun Toyibatun wa robbun Ghofur*.



Gambar 13: Logo Bola Dunia UIN (Logo Yang Juga Digunakan Madrasah Pembangunan) Diabadikan pada Atap Sebuah Halte Bus

Meninjau dari makna filosofi dalam logo baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tampaknya lengkap sudah sejumlah angan dan harapan seluruh civitas academica untuk benar-benar menjadikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai *World Class University* (WCU) dengan tetap memiliki ciri khasnya yaitu; Keislaman, Keilmuan, Keindonesiaan, dan Globalisasi.<sup>28</sup> Semangat ini pula yang secara langsung atau tidak langsung berimbas pada para pelaku pendidikan di MP.

Saya menyimpulkan bahwa proses pembangunan image yang dilakukan MP bentuknya sangat variatif dan satu sama lain berjaln berkelindan sehingga menghasilkan hasil yang saling melengkapi. Selain melalui aktifitas yang disengaja secara khusus seperti melalui peningkatan frekwensi kemunculan aktifitas madrasah ini melalui siaran televisi di masa awal perkembangan madrasah, pembentukan image yang positif terjadi secara akumulai dari berbagai inovasi pembelajaran serta penciptaan lingkungan pendidikan, seperti

<sup>28</sup> "Logo baru, harapan baru" dalam <http://www.pmi-komfeis.or.id/berita/akademia/105-launching-logo-baru-uin-syarif-hidayatullah-jakarta.html>

pembelajaran bahasa asing sejak dini, pembangunan gedung yang megah serta mengadakan berbagai aktifitas ekstra yang mendukung suasana lembaga pendidikan yang memberi peluang berbagai bakat dan minat siswa.

### **C. Akomodasi Nilai Baru: Pendidikan Multikultural**

Salah satu respon penting dunia pendidikan menghadapi globalisasi adalah perlunya pendidikan multikultural. Lembaga pendidikan dianggap siap dalam konteks globalisasi kalau lembaga itu mempunyai mekanisme merespon nilai-nilai baru yang berkembang seiring dengan globalisasi, seperti pendidikan multikultural, demokrasi, kesetaraan gender, pendidikan tanpa kekerasan. Di sini akan digambarkan bagaimana Madrasah Pembangunan mengakomodasi salah satu tema dimaksud, yaitu pendidikan multikultural.

Tidaklah mudah memahami pengembangan pendidikan multikultural di madrasah. Kesulitan itu dirasakan, mengingat siswa-siswa madrasah relatif homogen dari sisi latarbelakang keagamaan siswa. Kemungkinan perbedaan terjadi pada asal-usul orang tua yang berasal dari berbagai daerah, suku di Indonesia. Namun, karena orang tua sudah bermigrasi ke Jakarta, maka anak-anak dilahirkan dan dibesarkan dalam budaya yang campuran. Artinya tanpa keberadaan pendidikan multikultural, mereka sudah dibesarkan dalam kondisi yang berbeda. Namun demikian pendidikan multikultural tetap dipandang perlu diajarkan di madrasah dengan warna tertentu.

Untuk menggali pengembangan pendidikan multikultural di Madrasah Pembangunan, saya beruntung dipertemukan dan dihadapkan pada seorang guru, bernama YS (42 tahun) yang dipercaya mengembangkan pendidikan multikultural di madrasah ini. Dia adalah seorang guru sekaligus wakil kepala madrasah. Peran YS ini memegang peran yang penting seperti distribusi peran antar sesama pengelola harian madrasah, seorang yang mengajar mata pelajaran tertentu, juga YS ini adalah guru yang paling mengerti tentang kebijakan pengembangan wawasan multikultural di madrasah Pembangunan.

Saya berkesempatan untuk mewawancarai YS di meja kerjanya di Madrasah Pembangunan. Menurut YS, pendidikan multikultural diarahkan untuk memahami dan menghargai perbedaan.

*“ ... pendidikan multikulturalisme di MP lebih ditujukan untuk memahami perlunya menghargai perbedaan. Perbedaan dalam konteks MP tidak fokus dengan latar belakang agama, mengingat siswa MP semuanya beragama Islam. Pemahaman multikulturalisme lebih diarahkan pada pembentukan sikap menghargai perbedaan berdasarkan kesukuan dan adat-istiadat....” (YS, 2010).*

Sejak kapan pendidikan multikultural digagas di madrasah ini? Menurut Ys, Pendidikan multikultural mulai digagas di Madrasah Pembangunan sejak tahun 2005, yaitu sejak adanya tawaran dari Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat (PKPM) Universitas Katholik Atmaja Jakarta. Pusat kajian Universitas Atma Jaya Jakarta mencoba bekerjasama dengan 8 (delapan) sekolah di Jakarta merumuskan pendidikan multikultural di sekolah. Madrasah Pembangunan ditunjuk mewakili lembaga pendidikan berlatar belakang komunitas Muslim.<sup>29</sup>

Tawaran dari Universitas Atma Jaya Jakarta itu direspon secara positif oleh Madrasah Pembangunan. Sebagai bentuk tanggapan positif tersebut, Pimpinan Madrasah Pembangunan menunjuk Pak YS untuk mewakili Madrasah pembangunan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PKPM Atma Jaya Jakarta. Dari beberapa kali pertemuan dan usaha percobaan pengembangan pendidikan multikultural di masing-masing sekolah/madrasah maka dihasilkan buku-buku modul tentang pengembangan model pendidikan multikultural untuk anak usia sekolah yang terdiri dari dua buku: panduan untuk guru dan panduan untuk anak. Buku ini diterbitkan oleh PKPM Unika Atma Jaya Jakarta bekerjasama dengan *The Embassy of the United States of America* (terbit November, 2006).<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Kedelapan sekolah itu adalah SDN Sunter Agung 03 Pagi (Jakarta Utara), SDN Lebak Bulus 06 (Jakarta Selatan), SDN Kelapadua Wetan 01 (Jakarta Timur), SD Andreas (Sekolah Katolik, Jakarta Barat), SDN Kenari 07 (Jakarta Pusat), SD PSKD (Sekolah Protestan, Depok), MI Pembangunan Jakarta (Sekolah Islam, Ciputat), dan SD Ananda (Sekolah Budha, Bekasi)

<sup>30</sup> Dalam buku itu dirumuskan 7 (tujuh) nilai multikulturalisme yang perlu dikembangkan, yaitu: toleransi, solidaritas, empati, musyawarah, egaliter, pengungkapan diri, keadilan. Di samping

Dalam pengalaman MP berikutnya, pendidikan multikultural sebagaimana diakui oleh YS, dianggap penting dalam konteks pengembangan budi pekerti dalam konteks kenegaraan. Ketika mata pelajaran Pendidikan Kewargaan (PKn) dirasakan kurang mengembangkan budi pekerti, maka pendidikan multikultural dirasakan perlu diajarkan kepada siswa. Berikutnya MP mencoba mengembangkan pendidikan multikultural melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegeraan (PKn).

Menurut YS, (42 tahun):

*"... pendidikan multikultural menjadi penting ketika mata pelajaran Pendidikan Kewarganegeraan (PKn) mulai kehilangan aspek pengembangan budi pekerti siswa. PKn cenderung tidak berbeda dengan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Pelajaran ini hanya menekankan aspek kognitif, seberapa jauh siswa mengetahui deskripsi tentang Negara. Pendidikan multikulturalisme hadir mengisi ruang kosong itu..."*(Guru YS, 2010)

Implementasi pendidikan multikultural di Madrasah Pembangunan sendiri diwujudkan pada tahun 2006 melalui beberapa langkah kegiatan pendahuluan seperti penyusunan Rencana Pengembangan Pembelajaran (RPP) yang bernuansa pendidikan multikultural dan pengembangan nilai-nilai multikultural di semua mata pelajaran yang mungkin dan bisa dimasuki penanaman nilai-nilai multikultural, seperti mata pelajaran IPS, akhlak (baca: etika).

Dalam Rencana Pengembangan Pembelajaran (RPP) bernuansa pendidikan multikultural dikembangkan standar kompetensi yang ingin dicapai adalah Kemampuan siswa memahami fakta, konsep dan generalisasi tentang sistem sosial dan budaya dan menerapkannya untuk menghargai keanekaragaman sosial budaya dalam masyarakat multikultur.

Pada sebuah kesempatan, saya diajak Bapak YS untuk menyaksikan pembelajaran Pendidikan Kewarganegeraan (PKn) pada kelas V. Pelajaran PKn pada kelas itu diajarkan oleh seorang ibu guru, bernama B. Saya diberi

---

nilai-nilai positif tersebut, buku ini juga menyebutkan 7 (tujuh) nilai-nilai yang perlu dihindari dalam konteks pendidikan multikultural, yaitu: apatis, stigma, prasangka, stereotip, diskriminasi, otoriter dan egoism.

kesempatan untuk duduk di belakang para siswa. Setelah ibu guru B menyebutkan tema pembelajaran PKn hari itu adalah “Keragaman Suku Bangsa dan Budaya,” ibu guru B itu melemparkan pertanyaan kepada anak-anak:

*“Coba anak-anak...sebutkan asal suku orang tua kalian....? tanya guru dengan nada tinggi*

*“Padang...”, “Betawi...”, “Sunda...”, “Jawa...”* anak-anak mencoba menjawab satu persatu. Sebagian siswa yang lain nampak masih bertanya-tanya orang tua mereka termasuk berasal dari suku mana.

*“Masih ada yang lain ....?”* sambung bu guru

*“Bugis bu...”* seru seorang anak agak belakangan

*“Bagus-bagus....”* Kata bu guru dan siap-siap mulai menjelaskan maksud dari pertanyaan itu diajukan.

Ibu guru mulai menjelaskan bahwa dengan kemampuan anak-anak menyebutkan suku bangsa yang ternyata beraneka ragam, hal itu menunjukkan negara Indonesia ini ternyata terdiri dari banyak suku bangsa. Ibu guru itu juga menjelaskan bahwa masing-masing suku itu ternyata mempunyai budaya sendiri. Dijelaskan masing-masing budaya itu terkadang ada kesamaan, dan ada juga perbedaan. Untuk menyebut nama barang saja dari berbagai daerah mempunyai sebutan yang kadang berbeda.

Dalam konteks seperti itu, ibu guru B menjelaskan bahwa kita perlu mengenal keragaman suku dan budaya di Indonesia, mampu menghargai dan tidak melakukan diskriminasi. Ada indikator nilai-nilai multikultural yang ingin ditekankan dalam pembelajaran PKn ini. Nilai-nilai positif yang perlu dikembangkan belajar dari keragaman suku dan budaya, seperti: pengungkapan diri; tidak buruk sangka, sikap saling menghargai; dan sikap tidak membedakan. Di samping itu, nilai-nilai yang perlu dihindari dari adanya keragaman suku dan budaya itu seperti mudah berprasangka dan sikap diskriminasi. Ibu guru menjelaskan target pembelajaran yang ingin dia capai dari pembelajaran ini, yang konon sudah dia tungkan dalam Rencana Pengembangan Pembelajaran.

Pak Sy menambahkan, selain melalui pembelajaran kurikuler, pendidikan multikultural juga disemaikan dalam kegiatan ekstra kurikuler seperti kegiatan

untuk mengalami dunia sehari-hari yang berbeda, yaitu dengan adanya jambore ekstra kurikuler.

Sfy, Pengurus Yayasan Madrasah Pembangunan, menjelaskan bahwa penanaman sikap multikultural juga dilakukan di luar kelas :

*Untuk menanamkan sikap seperti itu, Madrasah Pembangunan mencoba membuat beberapa kegiatan yang mendukung, seperti jambore kegiatan ekstra kurikuler dengan menginap di rumah penduduk sebuah tempat yang ditunjuk menjadi lokasi jambore. Dengan tinggal di rumah warga, para siswa dituntut untuk bisa menerima kenyataan berbeda bila dibandingkan tinggal di rumah orang tuanya. Beberapa kegiatan lain yang mendukung tumbuhnya pemahaman multikultural yang dilakukan MP adalah seperti mengikuti lomba antar satuan pendidikan yang diadakan oleh sekolah non Islam, MP mengundang sekolah lain, termasuk sekolah Kristen, Katholik untuk mengadakan lomba dengan mengambil lokasi di MP. Mengundang guru-guru non muslim untuk mengisi kegiatan atau mata pelajaran tertentu di Madrasah." (Sfy, 2011)*

Bagaimana akomodasi MP terhadap nilai-nilai pendidikan multikultural ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, berikut ditelusuri penerjemahan visi dan misi madrasah ini dalam pengembangan pendidikan multikultural yang diajarkan melalui mata pelajaran tertentu, dalam hal ini mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Implementasi pendidikan multikultural di MP ini dapat dilihat dari bentuk silabus dan rencana pengembangan belajar (RPP) mata pelajaran tersebut.

**Silabus.** Silabus Pendidikan multikultural yang paling dekat secara materi pembelajaran adalah pendidikan kewarganegaraan (PKn). Karena itu pendidikan Kewargaan disusun berbasiskan pendidikan multikultural dengan standar kompetensi sebagai berikut: a) Menerapkan hidup rukun dalam perbedaan; b) Memahami dan menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah; c) Memahami kewajiban sebagai warga dalam keluarga dan sekolah; d) Memahami hidup tertib dan gotong royong; e) Menampilkan sikap cinta lingkungan dan demokratis; f) Menampilkan perilaku jujur, disiplin, senang bekerja dan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan nilai-nilai pancasila; g) Memahami sistem pemerintahan, baik pada tingkat daerah maupun pusat; h) Memahami makna

keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dengan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, kebiasaan, adat istiadat, kebiasaan, dan menghargai keputusan bersama; i) Memahami dan menghargai makna nilai-nilai kejuangan bangsa; j) Memahami hubungan Indonesia dengan negara tetangga dan politik luar negeri.

**Rencana Pengembangan Pembelajaran (RPP).** Dari beberapa Rencana Pengembangan Pembelajaran (RPP) yang berhasil saya amati, pendidikan multikulturalisme yang muncul dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di madrasah sudah mengenalkan perbedaan dan keragaman suku-suku yang ada di Indonesia, mengenalkan perlunya hidup gotong royong, mengenalkan perilaku-prilaku baik di tengah perbedaan, mengenal sistem pemerintahan yang berlaku, dan mengenalkan nilai-nilai kejuangan. Salah satu RPP terkait dengan pengenalan perbedaan dan keragaman suku-suku dan budaya di Indonesia dapat dilihat dalam lampiran.

Dari praktek pembelajaran pendidikan multikultural di Madrasah Pembangunan, saya memperoleh gambaran bahwa pendidikan multikultural itu sudah dikemas dalam konsep pengembangan budi pekerti. MP menyusun nilai-nilai utama budi pekerti, yang oleh YS disebut *core values*. Dari salah satu contoh Rencana Pengembangan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang menekankan pengenalan terhadap suku-suku yang ada di Indonesia. Dalam RPP ini ingin dikembangkan nilai-nilai multikultural seperti keberanian pengungkapan identitas diri/identitas kesukuan, tidak mudah berprasangka jelek (*prejudice*), mengembangkan sikap saling menghargai dan tidak membedakan. Mata pelajaran ini juga ingin mengajarkan perlu menghindari sikap mudah berprasangka dan sikap diskriminasi/membedakan-bedakan.

Lebih lanjut, pengembangan pendidikan multikultural di Madrasah Pembangunan pada tahun 2010 dirumuskan dalam bentuk penyusunan *core values* (nilai inti). *core values* disusun berjumlah dua belas, sesuai dengan jumlah bulan

dalam setahun. Tiap bulan diajarkan satu *core values* sebagai usaha penekanan terhadap masing-masing nilai pendidikan multikultural, dengan cara dimasukkan pada semua mata pelajaran yang mungkin menjadi media menajaman nilai-nilai dimaksud. Adapun kedua belas *core values* itu meliputi: menjadi pendengar yang baik, percaya diri, kesetaraan, kasih sayang, empati, keadilan, nasionalisme, kerjasama, toleransi, prasangka baik, saling percaya dan tanggung jawab.

Tabel 10  
Core Values Pengembangan Budi Pekerti  
Dalam Satu Tahun Di Madrasah Pembangunan

Bulan	Fokus Core Values Dalam Pembelajaran
Bulan ke 1	Pendengar Yang Baik
Bulan ke 2	Percaya Diri,
Bulan ke 3	Kesetaraan,
Bulan ke 4	Kasih Sayang
Bulan ke 5	Empati,
Bulan ke 6	Keadilan
Bulan ke 7	Nasionalisme
Bulan ke 8	Kerjasama
Bulan ke 9	Toleransi
Bulan ke 10	Prasangka Baik
Bulan ke 11	Saling Percaya
Bulan ke 12	Tanggung Jawab

Untuk mengawal pengembangan pendidikan multikultural ini, Pak YS dipercaya untuk memimpin tim yang diberi nama Tim *habitual curriculum* sebagai usaha untuk mencari metode yang paling pas dalam pengembangan nilai-nilai multikultural pada berbagai mata pelajaran. Sejauh ini, pengembangan pendidikan multikultural, menurut YS lancar dan tidak ada penolakan sama sekali dari semua unsur atau bagian dari keluarga Madrasah Pembangunan.

#### D. Menggagas Lembaga Pendidikan Standar Internasional

Salah satu fenomena globalisasi ditandai dengan adanya standarisasi jasa layanan secara internasional, termasuk dalam hal ini manajemen jasa pendidikan. Saat ini berdasarkan bacaan saya, ternyata telah ada berbagai bentuk standarisasi manajemen pelayanan yang diakui secara internasional seperti BS5750 (standar

Inggris) dan *International Standard Organization (ISO) 9000*.<sup>31</sup> Model standarisasi BS5750 dipublikasikan pertama kali pada tahun 1979 dengan nama *quality system*. Pada mulanya ia adalah sistem yang diterapkan menteri pertahanan dan NATO, yang dikenal sebagai AQAP (*Allied Quality Assurance Procedures*) yang menjadi kebutuhan organisasi ini dalam posisi mereka sebagai agen-agen belanja mereka. Keberadaan standar-standar ini merupakan usaha mendapatkan mutu dengan melibatkan pihak ketiga. Dengan demikian diharapkan obyektifitas dapat terjaga.<sup>32</sup>

Terhadap adanya gejala standarisasi internasional manajemen lembaga pendidikan ini, Madrasah Pembangunan tak luput dari pengaruh itu. Beberapa gagasan pembelajaran yang sifatnya internasional pernah digagas di Madrasah Pembangunan. Beberapa gagasan itu seperti gagasan membuat kelas internasional, ikhtiar dapat mengikuti dan memenangi olimpiade sains, ikut dalam standarisasi manajemen pendidikan melalui ISO 9000, cita-cita menjadikan Madrasah Pembangunan sebagai Madrasah Bertaraf Internasional (MBI).

Dalam menggali data terkait kecenderungan dalam menggagas pendidikan global, informan yang banyak memberikan data adalah pengurus yayasan madrasah pembangunan, yaitu Bapak Sfy (45 tahun). Bapak Sfy ini dipercaya menjadi Direktur yayasan dengan sistem seleksi yang berkualitas. Sewaktu penelitian ini dilakukan, di Madrasah Pembangunan sedang dilaksanakan seleksi untuk memilih calon direktur yang baru yang akan menggantikan direktur yang lama telah menjabat selama dua periode berturut-turut. Direktur di yayasan ini mempunyai wewenang yang strategis yaitu untuk mengembangkan yayasan Madrasah Pembangunan ke depan. Proses pemilihan dimulai dari tim seleksi terdiri dari tujuh belas orang yang mewakili dari berbagai unsur seperti tenaga pendidik, orang tua siswa, jenjang lembaga pendidikan dan sebagainya.

---

<sup>31</sup>Masih ada standard-standard lain di luar BS 5750 dan ISO 9000, seperti Q90 (standard Amerika), Q-101 (Standard Ford).

<sup>32</sup>Jaminan mutu dari pihak pertama dilakukan oleh organisasi produsen. Jaminan seperti ini masih terasa sepihak, belum tentu konsumen merasakan hal yang sama. Pihak kedua, dimaksudkan bahwa standard mutu ditentukan oleh konsumen. Sedang disebut pihak ketiga, ketika jaminan mutu di tentukan standardnya oleh pihak di luar produsen dan konsumen.

Fenomena pemilihan calon direktur menunjukkan budaya yang baru bagi dunia madrasah. Kebanyakan madrasah di berbagai tempat pengurus yayasan diduduki oleh anggota keluarga yang mendirikan yayasan. Terkadang proses regenerasi berjalan turun-temurun. Dari kakek ke anak, kemudian ke cucu. Ada juga yayasan yang sekedar formalitas sebagai payung hukum dari institusi pendidikan.

Sebagaimana sudah diungkapkan Sfy, bahwa kesadaran awal Madrasah Pembangunan menjadi lembaga pendidikan global dimulai melihat kenyataan bahwa siswa Madrasah Pembangunan (MP) telah ada siswa dari warga negara asing, yaitu warga Malaysia dan Brunai. Maka sejak itu Madrasah Pembangunan mulai menggagas lembaga pendidikan global.

Gagasan pendidikan global, di mulai dari gagasan menghadirkan kelas internasional, gagasan ini pernah dijajaki kemungkinannya. Dalam kelas ini nantinya pembelajaran akan dilakukan dengan menggunakan beberapa bahasa pengantar seperti Inggris dan Indonesia. Hanya saja sampai penelitian ini dilakukan, gagasan ini belum dapat diwujudkan. Namun menurut pak Sfy, kemungkinan ini akan selalu dibaca untuk dikembangkan di kemudian hari. Beberapa langkah penjajakan pernah dilakukan misalnya gagasan kelas yang dikelola berbasis bahasa Inggris, kurikulum yang digunakan menggunakan kurikulum standar Cambridge, melakukan orientasi kepada guru-guru tentang model pembelajaran kelas internasional. Namun sejauh ini usaha itu belum berhasil diwujudkan, beberapa alasan klasik muncul misalnya madrasah masih kekurangan guru yang mampu menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pembelajaran.

Gagasan kelas internasional yang lain, yaitu keinginan agar Madrasah Pembangunan mengikuti berkompetisi dalam olimpiade sains. Salah satu indikator keberhasilan dalam kompetisi penguasaan sains, sekaligus menjadi ukuran sebuah lembaga pendidikan telah bermutu adalah kesertaan siswa di sekolah tertentu dalam mengikuti olimpiade sains. Olimpiade sains yang memperlombakan matematika dan IPA menjadi ajang bagi sesama lembaga

pendidikan untuk menunjukkan tingkat capaian dalam pembelajaran dua mata pelajaran tersebut. Madrasah Pembangunan tidak mau ketinggalan untuk unjuk gigi dalam kompetisi itu. Dalam berbagai *event*, Madrasah Pembangunan telah mengikuti olimpiade sains dan berhasil menjadi salah satu juara sekalipun masih pada tingkat provinsi DKI Jakarta.



Gambar 14 . Nomor Sertifikat ISO 9001: 2008 Madrasah Pembangunan

Usaha lain, memperbaiki mutu Madrasah Pembangunan adalah usaha memperbaiki manajemen pendidikan dengan mendapatkan sertifikasi standar internasional yaitu ISO 9000. Pada aspek manajemen, Madrasah Pembangunan melakukan segala cara untuk memenuhi syarat pendidikan global. Untuk menuju ke sana, konsep pengembangan manajemen yang dirujuk oleh Madrasah Pembangunan adalah konsep *Total Quality Management* (TQM). TQM buah karangan Sallis merupakan buku yang dirujuk untuk kepentingan itu. Salah satu target capaian di bidang manajemen adalah tahun 2009 MP berusaha untuk mengejar sertifikasi standar ISO 9000.

Pengembangan manajemen saat penelitian ini dilakukan adalah berkonsentrasi pada terwujudnya MSN (Madrasah Standar Nasional), satu tahap sebelum menjadi Madrasah Bertaraf Internasional (MBI). Madrasah Ibtidaiyah MP telah ditunjuk oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta sebagai

salah satu madrasah untuk mengejar perwujudan program madrasah Standar Nasional bersama dua MI negeri yang lain di wilayah Jakarta, yaitu MIN Petukangan, Pesanggrahan Jakarta Selatan dan MIN Cipayung Jakarta Timur. Obsesi berikutnya, setelah menjadi Madrasah Standar Nasional (MSN), MP ingin mengikuti program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

Sesuai yang diisyaratkan dalam UU 20/2003 pasal 50 ayat (3) menyatakan bahwa: “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.” Madrasah Pembangunan berinisiatif untuk menjadi salah satu madrasah yang disebut berstandar internasional tersebut.



Gambar 15. Logo-logo Sertifikasi Yang Berhasil Diraih Madrasah Pembangunan

Hal itu menunjukkan adanya internasionalisasi peran-peran institusi yang disponsori oleh Negara, walaupun untuk ke sana beberapa intitusi harus memenuhi standar dulu secara nasional yang dipersyaratkan. Dalam kasus madrasah, usaha internasionalisasi ini Kementerian Agama merintis usaha pendirian madrasah berstandar internasional dengan cara melibatkan pemerintah daerah yang mau berpartisipasi mewujudkan keinginan itu. Pada tahun 2009 ini telah dipersiapkan 10 lokasi se Indonesia untuk mewujudkan keinginan itu. Di luar itu usaha akan dilakukan dengan menunggu permintaan dari daerah-daerah yang berminat, di sisi lain akan memberdayakan beberapa madrasah yang dulu

pernah dijadikan madrasah model untuk di *up-grade* menjadi madrasah bertaraf internasional.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Saat penelitian ini dilakukan, kementerian agama berencana untuk membangun 12 madrasah bertaraf internasional. Diantara keduabelas tempat itu meliputi Dumai (Provinsi Riau), Batam (Provinsi Kepulauan Riau), Padang (Provinsi Sumatera Barat), Musi (Provinsi Sumatera Selatan), Jawa Barat, Pekalongan (Jawa tengah), Lombok Timur (Provinsi Nusa Tenggara Barat), Maluku, Maros (Provinsi Sulawesi Selatan), Kalimantan Timur. Koran *Seputar Indonesia*, 8 Januari 2010

## BAB VI KONSTRUKSI IDENTITAS MADRASAH

*... identity as being composed of markers such as religion, 'race', language and simply feeling that one belongs to one group rather than another. ... to this must be added the sense of place ..."*  
(Grant, 1996).

Manuel Castells (2000) menyatakan satu Implikasi dari menguatnya globalisasi akan memunculkan kekuatan lain dari kesadaran manusia untuk menemukan kembali 'self' atau identitas mereka. Keinginan untuk membuktikan bahwa institusi pendidikan dengan label 'madrasah' mampu menjadi lembaga pendidikan yang bermutu di balik gambaran suram mengenai citra madrasah yang serba terbelakang adalah sebuah fenomena penguatan identitas. Beberapa kreasi identitas pada Madrasah Pembangunan, obyek studi ini, sebagaimana akan dipaparkan dalam bab ini menunjukkan bahwa di Madrasah Pembangunan telah berlangsung proses sosial yang merupakan bagian dari bentuk politik identitas madrasah. Mengkaji lembaga pendidikan madrasah dalam kacamata politik identitas tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tema politik pendidikan.<sup>1</sup>

Castells menyebutkan bahwa penguatan identitas banyak dilakukan oleh kekuatan sosial yang lemah sebagai bentuk usaha mencari pembeda dari (*differ*

---

<sup>1</sup> Wacana politik dan pendidikan melibatkan tokoh-tokoh seperti Archer (1985), Roger Dale (1989), Kimbrough (1964). Archer mengenalkan konsep politik kependidikan (*educational politics*), yang agak berbeda dengan yang dimaksud politik pendidikan (*politics of education*). Jika politik pendidikan membicarakan aspek-aspek politik dari pendidikan, politik kependidikan merupakan upaya-upaya (sadar dan terorganisasi) untuk mempengaruhi imput, proses dan output pendidikan. Politik kependidikan terimplementasi dalam tiga jenis negosiasi, yaitu: pertama, negosiasi inisiasi internal, negosiasi ini melibatkan pengenalan perubahan dari dalam sistem oleh personal pendidikan, mungkin dalam kaitan dengan peserta didik. Kedua, negosiasi transaksi eksternal. Transaksi ini meliputi hubungan antara kelompok penekan internal dengan kelompok penekan eksternal. Ketiga, negosiasi manipulasi politik, negosiasi ini berkaitan dengan kebijakan publik dalam bidang pendidikan. <sup>1</sup>Sementara Kimbrough (1964) setuju dengan istilah politik pendidikan. Menurutnya, politik pendidikan adalah proses pembuatan keputusan-keputusan penting dan mendasar dalam bidang pendidikan di tingkat lokal maupun nasional.

from) dan bentuk perlawanan (*oppose to*) dari kekuatan dominan. Dari pernyataan Castells, nampak ada dua bentuk usaha dalam melakukan resistensi yaitu mencari pembeda dan mengambil sikap perlawanan dari kekuatan dominan yang ada. Pada kasus Madrasah di Indonesia, benarkah proses resistensi identitas selalu dalam bentuk mencari pembeda dan mengambil sikap perlawanan?

Thomas Barfield (1977: 143-145) menyebutkan bahwa kajian tentang politik identitas dalam konteks globalisasi dapat mengambil bentuk salah satu diantara atau irisan dari campuran tiga konteks wilayah kultur, yaitu identitas konteks kultur lokal,<sup>2</sup> konteks kultur nasional,<sup>3</sup> dan konteks kultur internasional. <sup>4</sup> Pertanyaan yang bisa diajukan: Bagaimana politik identitas berproses di lembaga pendidikan madrasah? Pertanyaan ini muncul, tidak saja datang dari dalam lingkungan masyarakat madrasah, tetapi juga menjawab pertanyaan dari luar madrasah yang ingin mengetahui distingsi institusi madrasah yang bisa membedakannya dengan institusi 'sekolah'. <sup>5</sup>

<sup>2</sup> Identitas dalam konteks kultur lokal, merupakan praktek-praktek sekelompok orang yang mencoba mempertahankan simbol-simbol identitas kultur lokal di tengah arus modernisasi dalam lingkup Negara dan globalisasi dalam konteks pasar, seperti tulisan Anna Tsing (1993) tentang masyarakat Meratus dan Yekti Maunati (2004) yang mencoba mengkaji identitas masyarakat Dayak di Kalimantan.

<sup>3</sup> Identitas dalam konteks kultur nasional, yaitu keinginan untuk merumuskan nilai-nilai identitas baru dalam skala Negara atau pemerintah daerah sebagai tangan panjang Negara dalam rangka membangun identitas bersama warga bangsa/daerah di tengah beragamnya kultur lokal dan masuknya kultur internasional, seperti tulisannya Ninuk Kleden (2006) tentang politik pemerintah daerah provinsi dalam merumuskan identitas budaya daerah.

<sup>4</sup> Identitas dalam konteks kultur internasional, adalah praktek-praktek penegasan identitas trans nasional atau lintas negara yang berupaya memperjelas karakternya di tengah arus globalisasi. Seperti Appadurai (1996) yang menggambarkan globalisasi sebagai *imagined worlds*, atau "berbagai macam duniayang terdiri dari imajinasi orang-orang dari kelompok-kelompok di seluruh dunia yang diletakan secara historis. Appadurai menyebut arus-arus dalam globalisasi dalam sebutan *scapes: Ethnoscapes, technoscapes, finanscapes, mediascapes, ideoscapes*.

<sup>5</sup> Dalam pembentukan identitas, proses pendidikan pada sebuah institusi juga dipengaruhi oleh seting lembaga pendidikan tertentu. Thomas Barfield menyebutkan seting pendidikan itu bisa terkait dengan hubungan institusi pendidikan dengan institusi-institusi lain. Thomas Barfield mencontohkan bentuk keterkaitan institusi pendidikan dengan institusi lain itu seperti intitusi pendidikan dengan agama seperti yang terjadi pada masa-masa sebelum modern, keterkaitan

Diskusi tentang politik identitas terkait lembaga pendidikan madrasah di Indonesia, menurut peneliti, banyak diwarnai oleh tema diskusi identitas yang berhubungan dengan tema keagamaan dan keindonesiaan.<sup>6</sup> Bagaimana isu keagamaan dan keindonesiaan mewarnai konstruksi identitas madrasah di Indonesia.

### A. Madrasah dan Konstruksi Identitas

Madrasah di Indonesia sejak diterbitkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 telah menjadi lembaga pendidikan formal yang sama statusnya dengan sekolah umum. Namun begitu, tidak serta merta label 'madrasah' ditinggalkan begitu saja. Ternyata masyarakat pendukungnya masih tetap mempertahankan penggunaan nama 'madrasah' sebagai nama jenis lembaga pendidikan mereka. Simbol 'madrasah' ketika nama itu dipertahankan berarti mempunyai makna khusus.<sup>7</sup> Faktor sejarah menjadi salah satu alasannya. Sejarah madrasah lekat dengan sejarah perkembangan sebuah agama, dalam hal ini agama Islam, dan kesan awal yang terbangun mengenai madrasah adalah lembaga ini lebih banyak dipahami sebagai tempat-tempat mempelajari agama. Fenomena institusi 'madrasah' ini merupakan fenomena simbolis dan mengandung proses konstruksi identitas tertentu.<sup>8</sup>

---

institusi pendidikan dengan institusi ekonomi, keterkaitan institusi pendidikan dengan institusi militer (Thomas Barfield, 1977: 143-145).

<sup>6</sup>Atho' Mudzhar (2003) menyebutkan beberapa bentuk utama proses pembentukan identitas yang mewarnai diskusi identitas dalam konteks Indonesia, yaitu: 1) identitas terkait dengan pengelompokan primordial, seperti suku dan ras; 2) identitas terkait dengan keagamaan (terutama terjadi pada agama mayoritas, dalam hal ini Islam); 3) identitas terkait dengan kebangkitan nasionalisme.

<sup>7</sup>Kata 'madrasah' berasal dari bahasa Arab yang artinya 'sekolah'. Ini menunjukkan bahwa dari asal bahasa sebenarnya arti madrasah dengan sekolah itu adalah sama, yaitu sama-sama tempat belajar/sekolah.

<sup>8</sup>Sampai sekarang, masih banyak masyarakat Indonesia yang memahami madrasah hanya sebagai sekolah agama.

Sekalipun penggunaan kata 'madrasah' dalam istilah perundangan dan sebutan madrasah yang hidup di masyarakat masih ada sedikit tumpang tindih, namun simbol madrasah tetap dominan menjadi warna dari kelompok jenis pendidikan tertentu di Indonesia. Istilah Madrasah dalam UU dialamatkan kepada madrasah pelaksana pendidikan formal, sementara di masyarakat 'madrasah' selain difahami sebagai pendidikan formal, masih ada masyarakat yang menggunakannya untuk menyebut 'madrasah diniyah.'<sup>9</sup> Kehadiran UU Sisdiknas No. 20/2003 telah menegaskan bahwa kata madrasah hanya dikhususkan kepada lembaga pendidikan formal yang sama kedudukannya dan dengan jenjang pendidikan yang selama ini dikenal sebagai sekolah.<sup>10</sup> Keberadaan madrasah di Indonesia telah mengalami proses panjang, yaitu sejak zaman kolonial di mana belum ada pendidikan formal di kepulauan nusantara, hingga saat ini di mana pendidikan madrasah telah diakui sebagai lembaga pendidikan formal di Indonesia.<sup>11</sup>

Saat ini gambaran madrasah di Indonesia ini masih dipenuhi stereotipe-stereotipe tertentu yang kadang memposisikan madrasah sebagai lembaga pendidikan marginal. Beberapa stereotipe itu seperti madrasah dianggap sebagai

<sup>9</sup> Melalui PP No. 55 tahun 2007 akhirnya ditegaskan bahwa madrasah diniyah diganti sebutannya menjadi 'pendidikan diniyah' untuk membedakan dengan 'madrasah'. Pendidikan diniyah dikhususkan untuk lembaga pendidikan keagamaan yang bisa diselenggarakan secara formal, non formal, dan/atau informal. Lembaga pendidikan ini dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak. Untuk yang berjenjang terdiri dari pendidikan *diniyah awaliyah* (tingkat dasar), pendidikan *diniyah wustho* (tingkat menengah) dan pendidikan *diniyah 'ulya* (tingkat tinggi).

<sup>10</sup> UU Sisdiknas No. 20/2003 Pasal 17 ayat (2) berbunyi 7: "Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat." Dan Pasal 18 ayat 3 berbunyi: "Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat."

<sup>11</sup> M Sirozi (2005) terinspirasi oleh bukunya Foulcoult, *Power and Knowledge* menyebutkan berbagai persoalan pendidikan yang terdapat di Negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, tidak mungkin dapat dipahami jika hanya dilihat dari perspektif pembelajaran semata, tetapi perlu juga dilihat dari perspektif sosial dan politik. Untuk melihat proses konstruksi identitas di madrasah, di sana ada peran politik yang mempengaruhinya.

pendidikan kelas dua, tertinggal. Ada anggapan, madrasah menjadi tertinggal karena terlalu banyak jam dipakai untuk mengajarkan pendidikan agama sehingga mata pelajaran umum agak tertinggal. Madrasah juga sering digambarkan sebagai lembaga pendidikan yang muridnya lebih banyak perempuan, lembaga pendidikan yang hanya kuat di daerah pedesaan, lembaga pendidikan yang didukung oleh masyarakat kelas ekonomi bawah.

Adanya beberapa stereotipe mengenai madrasah itu nampaknya hadir selain karena bentuk awal madrasah itu sendiri yang memang awalnya muncul dari kreatifitas masyarakat dengan sumber daya dukung yang terbatas, stereotipe juga lahir karena produk sejarah yang panjang yang tidak menguntungkan atau bahkan sebuah kesengajaan untuk memarginalkan madrasah seperti yang terjadi pada zaman kolonial dan masa awal kemerdekaan. Pada zaman kolonial madrasah dianggap sebagai lembaga pendidikan partikelir yang liar dan perlu diawasi, demikian juga pada zaman awal kemerdekaan RI madrasah dianggap sebagai lembaga pendidikan di masyarakat yang sudah berjalan dan Negara yang hanya mengambil posisi membiarkan atau tidak membina secara langsung lembaga pendidikan ini.<sup>12</sup>

Akibat dari beberapa stereotipe dan bentuk perlakuan oleh pemerintah baik kolonial dan pemerintah Indonesia setelah merdeka, hingga saat ini masyarakat madrasah masih mengalami beberapa perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif dari sebagian elemen negara. Salah satu bentuk diskriminatif yang mencolok dan masih terasa hingga hingga saat ini adalah adanya pemberlakuan yang tidak sama antara sekolah umum dengan lembaga madrasah yang dipertontonkan oleh pemerintah daerah. Contoh paling nyata adalah kesejahteraan guru-guru madrasah di banyak daerah kalah jauh bila dibandingkan dengan guru-guru

---

<sup>12</sup>Abdurahman Saleh (2004) berpandangan cikal bakal lembaga pendidikan di Indonesia yang diciptakan oleh masyarakat Indonesia sendiri justru adalah lembaga pendidikan madrasah. Berbeda dengan sekolah yang pada tahap awal diperkenalkan oleh pemerintah kolonial.

sekolah umum. Masih banyak pemerintah daerah yang memberlakukan secara berbeda antara madrasah dengan sekolah. Padahal dalam UU madrasah sudah dianggap sederajat atau dalam posisi yang sama dengan sekolah umum, namun dalam praktek di lapangan perlakuan yang tidak adil itu masih sangat dirasakan.

13

Dalam konteks latar belakang politik pendidikan seperti itu, Madrasah Pembangunan di Ciputat Tangerang Selatan mencoba bangkit dan melawan semua stereotipe itu dan ingin menjadi madrasah yang bermutu dan berhasil eksis di daerah perkotaan. Keinginan itu ternyata berhasil diwujudkan oleh MP Ciputat Tangerang Selatan. MP merupakan salah satu madrasah swasta yang berhasil di Ibukota RI, Jakarta saat ini memiliki jumlah siswa untuk tingkat dasar (tingkat SD) saja mencapai lebih dari 1.700 siswa. Lembaga ini juga berhasil menggaet siswa dari kelas sosial ekonomi menengah di perkotaan.<sup>14</sup>

Pasca berhasilnya integrasi madrasah secara penuh dalam sistem pendidikan nasional yang berpuncak pada lahirnya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 yang mengakui posisi sama antara madrasah dan sekolah sebagai sekolah umum, menurut saya proses kreasi identitas madrasah masih terus berjalan seiring dengan tantangan yang masih dihadapi oleh madrasah baik eksternal maupun internal madrasah. Ada dua permasalahan yang dihadapi oleh para praktisi madrasah dari eksternal dan internal. *Pertama*, dari sisi eksternal, madrasah masih mendapatkan bias diskriminasi yang dihasilkan dari interpretasi birokrasi yang terimplementasi dari beberapa perlakuan birokrasi pendidikan yang ada di

---

<sup>13</sup>Salah satu usaha untuk membuat perlakuan yang sama antara sekolah umum dengan madrasah memang telah mulai diupayakan seperti adanya Bantuan Operasional Siswa (BOS) yaitu pemberian unit cost pendidikan untuk setiap siswa dalam jumlah yang sama. Namun pemberian BOS saja belum cukup karena dalam penyelenggaraan pendidikan masih banyak persoalan yang perlu perhatian lebih.

<sup>14</sup>karena untuk menjadi siswa di madrasah tersebut orang tua harus membayar uang masuk dengan jumlah 10 juta.

pemerintah yang dirasakan oleh praktisi madrasah. <sup>15</sup> *Kedua*, dari sisi internal, kalau memang madrasah dan sekolah sudah dianggap sama sebagai pendidikan umum, kenapa lembaga ini tetap bernama madrasah? Apa yang menjadi karakteristik madrasah, sehingga harus bertahan dengan nama atau identitas tersebut. Kedua situasi inilah, menurut saya, yang memunculkan semangat di kalangan praktisi madrasah untuk memperjelas kembali ciri atau karakteristik atau kesadaran identitas di lingkungan madrasah. <sup>16</sup>

Dari bacaan tentang teori identitas, saya melihat bahwa politik identitas yang dikembangkan di madrasah adalah *constructed*, yang dipengaruhi oleh faktor sejarah dan sosial. Belajar dari kasus Madrasah Pembangunan, saya melihat proses kreasi identitas itu dipicu beberapa hal berikut: 1) konsekwensi memilih nama jenis lembaga pendidikan 'madrasah' sebagai arena pengabdian dalam dunia pendidikan; 2) tantangan untuk membuktikan bahwa 'madrasah' mampu bersaing; 3) kebutuhan untuk memperkuat kekhasan madrasah, melalui nilai lebih dalam pembelajaran agama.

**'Madrasah' sebagai sebuah pilihan.** Pemicu pertama politik identitas madrasah adalah terkait dengan pilihan label 'madrasah' sebagai jenis lembaga pendidikan. Pada awal pendirian MP pernah terjadi gagasan yang tarik menarik dalam menetapkan jenis lembaga pendidikan ini antara gagasan menggunakan nama 'madrasah' atau menggunakan nama 'sekolah' dengan diberi label Islam

---

<sup>15</sup>Dapat dicontohkan seperti edaran Menteri Dalam Negeri yang berimplikasi bahwa madrasah adalah instansi vertical yang tidak berhak mendapatkan pembiayaan dari pemerintah daerah. Sayangnya interpretasi semacam itu diikuti oleh banyak daerah dalam perlakuannya terhadap madrasah.

<sup>16</sup>Manuel Castells (2000) menyebutkan dalam menghadapi globalisasi terdapat beberapa sumber konstruksi identitas diantaranya: Negara, agama dan konsumsi. Negara berkepentingan untuk membentuk kesatuan identitas kebangsaan bagi warganya, agama berkepentingan untuk menjalankan fungsinya sebagai alternative jalan keselamatan bagi umat manusia, dan konsumsi berkepentingan untuk mengikat konsumen terhadap sebuah produk tertentu.

(Sekolah Islam). Alasan yang melatarbelakangi, bila bernama madrasah maka pembinaan akan berada di bawah koordinasi Kementerian Agama; sedangkan kalau menjadi sekolah dasar Islam maka pembinaan dan pendanaan pendidikan akan berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Nasional. Keuntungan berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, menurut asumsi awal sementara mereka, selain mendapatkan pembinaan yang lebih intens bila dibandingkan dengan bila di bawah Kementerian Agama, juga kemungkinan mendapatkan bantuan pembiayaan lebih besar. Namun prakteknya, gagasan itu ternyata tidak mendapatkan persetujuan sebagian besar panitia pendiri Madrasah Pembangunan, sehingga akhirnya nama lembaga yang dipilih tetap menggunakan identitas madrasah. Para pendiri sekolah ini lebih memilih nama madrasah sebagai usaha pembuktian identitas bahwa madrasah juga bisa maju. Apalagi mengingat kebanyakan para pendiri adalah pegawai negeri di Kementerian Agama. Dalam prinsip mereka, mereka akan bangun sekolah bermutu tapi dengan tetap berbentuk madrasah.

Pilihan jenis lembaga pendidikan antara jenis pendidikan 'madrasah' atau jenis pendidikan 'sekolah' merupakan satu persoalan dalam menentukan identitas lembaga. Merujuk kutipan Grant (1996) : *... identity as being composed of markers such as religion, 'race', language and simply feeling that one belongs to one group rather than another. ... to this must be added the sense of place ...*"perasaan seseorang pada sekelompok orang dari pada kelompok lain merupakan suatu persoalan identitas. Mengelompokkan lembaga pendidikan kepada jenis lembaga bernama madrasah dibandingkan lembaga pendidikan dengan nama 'sekolah' juga merupakan persoalan identitas.

Madrasah di Indonesia adalah sebuah fenomena identitas lembaga pendidikan yang berdiri dengan latar belakang keagamaan di satu sisi dan realitas Negara serta kemodernan di sisi yang lain. Terkait dengan latar belakang

keagamaan, madrasah berkembang seiring perkembangan sejarah Islam di Indonesia. Sekalipun secara istilah nama madrasah diambil dari bahasa Timur Tengah (Bahasa Arab) yang berarti 'sekolah', madrasah menyandang kewajiban sejarah sebagai lembaga pendidikan yang memberikan porsi pembelajaran agama dengan porsi yang lebih bila dibandingkan dengan 'sekolah'. Terkait dengan realitas Negara, madrasah dihadapkan dengan sistem pendidikan nasional di mana madrasah sebagai bagian dari sistem itu harus menyesuaikan dengan sistem dimaksud. Dari sisi bentuk pendidikan, lembaga madrasah di Indonesia dituntut mempunyai nuansa khas tertentu yang merupakan produk dialogis antara sejarah pendidikan Islam, dengan masyarakat Indonesia, dengan kebudayaan lokal serta sistem pendidikan yang dibangun di Negara ini serta perubahan yang lebih luas seperti globalisasi pendidikan.

**Tantangan madrasah untuk berdaya saing.** Sebagai implikasi dari pilihan pertama, memilih jenis pendidikan madrasah, maka menjadi pemicu penguatan identitas berikutnya di madrasah adalah keinginan mewujudkan lembaga pendidikan madrasah mempunyai daya saing dibandingkan dengan sekolah lain. Pada kasus MP, dapat dinyatakan bahwa madrasah ini berusaha merintis lembaga pendidikan bermutu, dan ternyata madrasah ini berhasil mewujudkan daya saing lembaga yang bisa diperbandingkan dengan berbagai jenis lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, seperti sekolah umum dan sekolah umum yang berlatar belakang agama tertentu.<sup>17</sup> MP di Ciputat Tangerang merupakan lembaga pendidikan yang menerapkan tujuan pendidikan yang mengarah pada terbentuk

---

<sup>17</sup>Dalam konteks ini, menurut penulis, madrasah telah merupakan sebuah realitas kebudayaan tersendiri. Meminjam pengertian yang dikembangkan Clifford Geertz, realitas madrasah adalah sebuah realitas kebudayaan atau simbol yang mempunyai bangunan sistemik sebagai kebudayaan keagamaan.

individu atau lulusan yang diharapkan<sup>18</sup> dan terciptanya lembaga yang memadai bagi terciptanya *center of learning*.<sup>19</sup> Kedua tujuan itu dikemas dalam motto yang menjadi spirit lembaga pendidikan ini, yakni "*basic science, bahasa dan akhlakul Karimah.*"

MP merupakan sebuah fenomena yaitu suatu madrasah yang berhasil eksis dan diminati dalam masyarakat urban di perkotaan. MP berhasil keluar dari stereotip madrasah yang sering digambarkan sebagai lembaga pendidikan kelas dua, madrasah yang hanya didukung oleh kelompok sosial kelas ekonomi bawah. Pada kasus MP, madrasah ini berhasil menjadi pilihan masyarakat menengah kota, dibuktikan dari masyarakat pendukungnya yang berasal dari kelompok sosial ekonomi tertentu (*segmented*), yaitu mereka yang tidak terbebani untuk membayar uang pendidikan di atas 10 juta pada awal anak mereka masuk ke madrasah itu.

Keberhasilan MP berhasil meningkatkan daya tarik madrasah. Dampak dari daya tarik MP adalah mampu menarik minat para orang tua dari sekitar 1721 siswa, Jumlah yang fantastik. Dari paparan di bab-bab sebelumnya, disebutkan bahwa sistem pendidikan yang dikembangkan MP adalah khas dan menarik, yaitu dengan mengandalkan tiga fokus pengembangan basic sains, bahasa dan akhlakul karimah. Di samping itu, MP dalam sejarah yang panjang dari waktu lembaga ini

---

<sup>18</sup> Tujuan Madrasah Pembangunan yang mengarah pada pembentukan individu: 1) Melahirkan lulusan yang beriman dan bertaqwa dengan kemampuan kompetitif serta memiliki keunggulan-keunggulan komparatif; 2) Mewujudkan siswa yang memiliki keseimbangan antara kekuatan jasmani dan kekuatan rohani serta kepekaan sosial; 3) Mewujudkan siswa yang mandiri dan mampu melakukan teamwork melalui berbagai aktifitas belajar intra maupun ekstra kurikuler.

<sup>19</sup> Tujuan Madrasah Pembangunan yang mengarah pada kelembagaan, terdapat 3 butir, yaitu: 1) Terwujudnya kurikulum yang memiliki kekuatan pada pembinaan keislaman, sains dan teknologi serta apresiatif terhadap kecenderungan globalisasi dengan tetap berpijak pada kepribadian Indonesia dan kemampuan potensi anak (tadinya butir 2 dari tujuan pendidikan MP); 2) Tersedianya tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi ideal baik dalam aspek keilmuan, skill keguruan, maupun kemampuan komunikasi global (tadinya butir 3 dari tujuan pendidikan MP); 3) Tersedianya sarana sumber belajar yang dapat memberi kesempatan pada siswa untuk dapat belajar seluas-luasnya, sehingga sekolah benar-benar berfungsi sebagai Center for Learning (tadinya butir ke 4 dari tujuan pendidikan MP).

berdiri hingga saat ini terbukti dapat melewati dan memanfaatkan setiap peluang dan ancaman kekuatan di sekitar MP.

Mengapa masyarakat memilih MP di Ciputat Tangerang sebagai pilihan untuk menyekolahkan anak mereka? Pertanyaan ini akan mengantarkan pada respon masyarakat dalam menyikapi image yang di bangun oleh para aktor MP. Menyadari pentingnya pembangunan image (*image building*) dalam merebut pasar, MP melakukan berbagai terobosan untuk membangun image baik mengenai lembaga madrasah. Pembangunan image MP dalam bacaan saya berjalan secara akumulatif dari berbagai langkah yang dilakukan. Pembangunan image itu dimulai sejak awal berdirinya MP melalui seringnya madrasah ini berusaha tampil di media televisi. Tampilan anak-anak MP di TV memberikan daya tarik bagi para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sana. Pembangunan image juga dilakukan dengan penguatan bahasa asing seperti Inggris dan Arab sejak dini. Dari usaha ini memberikan gambaran bahwa MP selangkah lebih maju dibandingkan sekolah pada umumnya. Pembangunan image juga terbangun melalui banyaknya variasi kegiatan ekstrakurikuler yang ditawarkan kepada siswa. Banyaknya alternative kegiatan ekstra kurikuler ini menciptakan suasana bahwa berbagai bakat dan minat siswa tersalurkan di madrasah ini.

Keberhasilan MP dalam membuat inovasi kegiatan telah mendongkrak proses pembentukan image (*image building*). Keberhasilan proses pembangunan image menyebabkan berdampak pada menguatnya MP dalam berkontestasi dengan satuan pendidikan yang sederajat di sekitarnya.

Proses pembangunan image di MP berjalan terus dengan berbagai terobosan yang sifatnya menginternasional (mengglobal) seperti partisipasi madrasah ini dalam pemenuhan standar ISO 9000, salah satu institusi standarisasi yang diakui secara internasional. Selain itu, pernah juga MP menggagas adanya kelas internasional. Namun sampai penelitian ini dilakukan keinginan

menciptakan kelas internasional ini belum bisa diwujudkan. Gagasan yang saat ini sedang berjalan di MP sebagaimana arahan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 adalah menggagas pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk menjadi Madrasah berstandar nasional, yang kemudian nantinya diteruskan menjadi madrasah yang bertaraf internasional (MBI).

Ada beberapa faktor kekuatan dan juga faktor-faktor yang mengancam kehadiran MP ini. MP berusaha mengolah keadaan untuk *survive* melewati semua bentuk kontestasi kekuatan yang ada. Menurut salah satu pimpinan dari lingkungan MP:

.... kekuatan MP sehingga menjadi sekolah besar didukung oleh adanya: 1) siswa yang banyak; 2) orang tua yang beragam; 3) guru yang terseleksi secara ketat; dan 4) sarana prasarana yang lengkap dan memadai. Ini terwujud karena proses yang saling mengkait yang diperkirakan karena besarnya dukungan masyarakat atau orang tua siswa....<sup>20</sup>

Di samping itu, faktor eksternal yang menjadi faktor pendukung MP menjadi sekolah yang diminati, seperti diakui oleh Kepala madrasah adalah pertama, tempat yang strategis secara geografis yaitu berada pada lokasi perbatasan tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Lokasinya sendiri bernama Ciputat yang masuk secara administratif di wilayah Tangerang. Kedua, faktor lingkungan di mana MP berada di dekat atau bahkan menjadi proyek tidak langsung dari pengembangan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Kebutuhan mempertahankan kekhasan madrasah.** Kontruksi identitas ketiga, kenapa politik identitas menguat di madrasah? Madrasah selain perlu

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Myd, Kepala MI Madrasah Pembangunan, tanggal 15 Januari 2009

didongkrak kualitasnya, madrasah juga mempunyai pekerjaan rumah sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai kekhasan di bidang pembelajaran agama. Untuk menyelenggarakan pembelajaran agama sesuai dengan karakter madrasah dan mempunyai aktualitas dengan kehidupan modern, Pada kasus MP, pembelajaran agama dikembangkan dengan pendekatan yang lebih bervariasi, seperti penambahan jam pelajaran agama, pengembangan sistem yang disebut *hidden curriculum*, pembelajaran agama di luar jam kelas, atau pendidikan keagamaan dalam kegiatan khusus. Pendekatan kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) ini diwujudkan dalam bentuk membuat alokasi waktu sebelum pembelajaran dimulai setiap harinya dengan aktivitas kecil keagamaan seperti baca kitab suci, hafalan do'a, nasehat kecil dan sebagainya. Pendekatan lain adalah pembelajaran agama yang diberikan di luar jam kelas, kegiatan periodik seperti perayaan hari besar agama.

Dalam rangka mempertahankan kekhasan keagamaan, madrasah dihadapkan kebutuhan mengembangkan warna keagamaan yang selaras dengan kehidupan modern. Untuk menjawab kebutuhan ini, MP mengembangkan sistem pembelajaran agama yang lebih menekankan pada pembentukan sikap perilaku daripada penguasaan dari materi pelajaran agama. Untuk itu sistem pendidikan MP dikembangkan kearah terbentuknya lembaga pendidikan yang memadukan antara visi dan nilai keilmuan, keislaman dan keindonesiaan. Dalam rangka itu MP mengangkat motto pengembangan lembaga ke arah pembangunan 'pendidikan yang lebih' dibandingkan dengan madrasah lainnya dalam slogan *more than just islamic school*.

Globalisasi di satu sisi menunjukkan bukan saja semakin ketatnya persaingan kemampuan diri baik individu maupun institusi, tetapi juga semakin terbuka pintu-pintu yang mengarah pada perusakan moral. Madrasah sebagai lembaga pendidikan telah menjadi alternatif yang memiliki peranan penting

dalam pembentukan watak, kepribadian peserta didik. Penguatan nilai-nilai keagamaan tidak berarti anti dengan perubahan yang terjadi. Warna pendidikan keagamaan yang ditawarkan MP adalah warna pemahaman Islam yang toleran, demokratis dan inklusif.

## **B. Arena Kontestasi Madrasah**

Membaca proses kontruksi identitas madrasah di Indonesia, saya melihat paling tidak ada tiga arena *bargaining* antara institusi madrasah dengan negara. Ketiga tema itu adalah tema pembiayaan, tema mutu, dan tema identitas.<sup>21</sup> Tema pembiayaan telah mendorong lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat berusaha berintegrasi dengan sistem yang dibangun oleh Negara, termasuk madrasah. Sebaliknya Negara juga berusaha untuk menyatukan semua jenis pendidikan masyarakat berada dalam sistem yang dibangunnya. Pada tema mutu, Negara mencoba mengontrol kualitas mutu pendidikan melalui perumusan standar mutu dan mengukur capaian indikator kelulusan siswa melalui penerapan Ujian Akhir Nasional (UAN) bagi lembaga pendidikan. Madrasah sebagai bagian dari jenis dan jenjang pendidikan tersebut juga mencoba mengikuti apa yang telah digariskan oleh Negara, yaitu mengikuti standar yang ditetapkan dan mengikuti ujian Negara sekalipun untuk yang ujian ini Negara mengutamakan pelajaran-pelajaran umum seperti matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Madrasah selain mencoba beradaptasi dengan sistem nasional yang dikembangkan, lembaga ini juga berusaha agar pendidikan agama tetap eksis dan menjadi ciri utama madrasah. Pada tema identitas, Negara berkepentingan untuk mengembangkan nilai-nilai kebangsaan melalui penanaman nilai-nilai yang kadang sekuler seperti penanaman nilai demokrasi

---

<sup>21</sup>Tiga tema, yaitu pembiayaan, mutu dan jati diri ini nantinya saya jadikan sebagai unsur-unsur utama kontruksi politik identitas.

dan multicultural, madrasah dalam beberapa sisi menerima nilai-nilai kebangsaan, namun di sisi lain juga madrasah mencoba menjaga tradisinya sebagai lembaga yang menjadikan pelajaran agama sebagai muatan identitasnya.

Belajar dari kasus Madrasah Pembangunan dalam menghadapi ketiga tema (pembiayaan, mutu, dan identitas), secara meluas madrasah di Indonesia mempunyai respon terhadap persoalan tersebut dengan gradasi yang bervariasi. Gradasi ini terjadi tergantung dari tingkat mengambil posisi (*positioning*) suatu madrasah dalam peta pendidikan di Indonesia. Ada madrasah yang tetap memilih berstatus swasta, ada madrasah negeri, dan madrasah swasta yang berharap suatu saat dinegerikan.

Tabel 11  
Perbandingan Beberapa Respon Madrasah  
Terhadap Kebijakan Negara

Aspek	Madrasah Pembangunan	Madrasah Swasta Lain	Madrasah Negeri
Posisi terhadap Negara	Tetap ingin berstatus swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian tetap ingin swasta,</li> <li>• Sebagian ingin dinegerikan</li> </ul>	Negeri
Pembiayaan	Menerima BOS dan memungut SPP tambahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima BOS, membebaskan SPP</li> <li>• Menerima BOS, memungut SPP tambahan</li> </ul>	Untuk tingkat dasar, menerima BOS, tidak diperkenankan memungut SPP tambahan
Mengikuti Ujian Negara	Mengikuti UN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti UN</li> </ul>	Mengikuti UN
Pengembangan kekhasan Madrasah (Pembelajaran agama)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambah jam pelajaran agama</li> <li>• Mengembangkan hidden curikulum untuk peningkatan keagamaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran agama rata-rata 4 jam, sesuai arahan Dep. Agama</li> <li>• Pembelajaran agama lebih dari 4 jam</li> </ul>	Pelajaran agama 4 jam /minggu

Dalam mengatasi tiga ranah isu yang menjadi medan atau arena terkait dengan penguatan politik identitas di madrasah, yaitu isu terkait dengan sumber pembiayaan, isu terkait dengan pertarungan mutu yang ingin di bangun di madrasah, dan isu karakter kekhasan lembaga pendidikan (madrasah), berikut deskripsi kreasi identitas dalam konteks nasional yang dilakukan oleh Madrasah Pembangunan Ciputat Tangerang.

**Tema sumber pembiayaan.** Terkait dengan permasalahan pembiayaan pendidikan, kebijakan negara yang mengembangkan desentralisasi pendidikan dengan menyerahkan pembinaan sekolah ke pemerintah daerah telah menyebabkan polarisasi atau pengkutuban antara sekolah dengan madrasah. Dampak yang paling kelihatan adalah adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antara guru sekolah dengan guru madrasah. Kebijakan ini masih mengesankan menciptakan suasana diskrimatif perlakuan pemerintah daerah terhadap sekolah dengan madrasah. Guru-guru sekolah mendapatkan kesejahteraan tambahan dari pemerintah daerah, sedangkan guru madrasah tidak mendapatkan bantuan kesejahteraan. Di satu sisi, UU Sisdiknas No. 20/2003 menyiratkan semua kegiatan penyelenggaraan pendidikan dituntut melakukan desentralisasi, tetapi di sisi lain UU Pemerintahan Daerah No. 22/1999 menyuratkan bahwa bidang agama tidak termasuk bidang yang didesentralisasikan (instansi vertikal).<sup>22</sup> Hal ini berakibat bahwa pemerintah daerah tidak mau memberi bantuan pembiayaan dalam bentuk apapun kepada instansi yang dianggap vertical seperti madrasah di Kementerian Agama.

Interpretasi pemerintah daerah seperti itu tentu saja tidak bisa diterima oleh kalangan praktisi madrasah. Para praktisi madrasah merasa bahwa mereka sama-sama menyelenggarakan pendidikan formal, mendidik putra-putri bangsa, dan

---

<sup>22</sup> UU No. 22 tahun 1999 Pasal 7 ayat (1) berisi: "Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama...."

menyelenggarakan ujian nasional yang sama dengan sekolah umum. Karena itu perlakuan yang membedakan madrasah dengan sekolah umum dirasa tidak adil (diskriminatif) oleh para praktisi madrasah, apalagi di madrasah mayoritas justru lembaga swasta. Kesan itu nampak dalam pernyataan seperti berikut, sebuah pendapat yang diberikan oleh salah satu pimpinan Kementerian Agama.

*Kebanyakan madrasah adalah swasta... bagaimana bisa lembaga swasta disebut sebagai instansi vertical, karena lembaga itu membiayai sendiri operasional pendidikannya. Sebutan instansi vertical itu bisa dibenarkan kalau terkait dengan lembaga madrasah yang berstatus negeri, namun kalau sebutan instansi vertical digeneralisasi ke semua madrasah, termasuk madrasah swasta ...itu tidak masuk akal. Madrasah swasta tidak mempunyai anggaran rutin yang diberikan oleh Negara.*<sup>23</sup>

Menghadapi kebijakan pemerintah terkait pembiayaan yang bernuansa diskriminatif ini, Madrasah Pembangunan tidak begitu mempersoalkan. Madrasah Pembangunan berhasil menerapkan formula di mana untuk menjadi sekolah bermutu sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sekalipun, Madrasah Pembangunan menarik biaya dari siswa lebih tinggi dibandingkan sekolah sederajat di sekitarnya ternyata jumlah kebutuhan siswa selalu dapat dipenuhi oleh madrasah ini. Strategi dengan menaikkan iuran murid ini pernah menjadi catatan kritik, seolah Madrasah Pembangunan hanya membidik golongan social ekonomi menengah ke atas. Namun kritik itu dibantah oleh salah seorang guru, dengan mengatakan:

*Madrasah Pembangunan sebenarnya tidak membidik calon siswa dari masyarakat ekonomi kelas menengah ke atas, hanya saja ketika ditawarkan prasyarat untuk*

---

<sup>23</sup> Pendapat salah satu pimpinan, Kepala Badan Litbang dan Diklat Dep Agama RI, pada sebuah seminar hasil penelitian di Badan Litbang dan Diklat Dep Agama RI, 7 Oktober 2009

*mengikuti proses pendidikan dengan jumlah tertentu, ternyata masyarakat mampu memenuhinya, dan semua kelas terpenuhi ...*<sup>24</sup>

Namun untuk madrasah yang lain, tidaklah demikian. Terutama setelah adanya kebijakan nasional pemberian Bantuan Operasional Siswa (BOS) bagi semua siswa-siswa usia wajib belajar pendidikan dasar (Wajardikdas) di Indonesia. Program ini diperuntukkan untuk siswa jenjang SD/MI dan SMP/MTs dan di sana tidak ada perbedaan antara murid sekolah dengan murid madrasah. Bagi madrasah negeri, maka tidak diizinkan lagi madrasah menarik biaya pendidikan; sedangkan pada madrasah swasta terjadi variasi penarikan biaya belajar siswa. Ada madrasah yang menerima BOS dan tidak lagi memungut SPP dari siswa, ada madrasah yang menerima BOS dan memungut biaya tambahan, bahkan ada yang ekstrim menolak BOS. Contoh madrasah yang menolak BOS adalah Madrasah Matholih di Kajen Pati.

Pada kasus Madrasah Pembangunan, madrasah ini tidak menutup kemungkinan mendapatkan sumber pembiayaan yang tetap dari negara. Karena itu madrasah ini berusaha melakukan penyesuaian dengan sistem pendidikan nasional dan telah berproses demikian panjang. Proses adaptasi itu terjadi pada penyesuaian sebuah institusi, termasuk institusi pendidikan, dari berbagai sisi terhadap situasi dan kondisi yang melingkupinya. Implikasi dari penyesuaian ini Madrasah Pembangunan mendapatkan aliran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dihitung berdasarkan jumlah siswa setiap tahunnya.

Analisa secara makro, untuk dunia madrasah di Indonesia, di sana terjadi proses adaptasi baik di wilayah makna-makna maupun perilaku sebuah institusi. Madrasah yang semula adalah lembaga pendidikan keagamaan yang dominant mengajarkan pendidikan agama, dalam hal ini agama Islam, saat ini telah menjadi

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan YS, Wakil Kepala Madrasah Pembangunan, tanggal 25 Januari 2008

madrasah formal yang sama kedudukannya dengan sekolah umum dengan materi pembelajaran yang hamper sama dengan sekolah umum. Hanya saja madrasah dalam adaptasinya masih memberikan materi pelajaran agama sedikit lebih banyak dibandingkan dengan sekolah umum.<sup>25</sup>

Sejauh ini, pelaksana pendidikan formal tingkat dasar dan menengah di Indonesia diselenggarakan oleh dua jenis lembaga pendidikan yaitu sekolah dan madrasah. Adanya dua jenis lembaga pendidikan ini berimplikasi pada manajemen pengelolaan pendidikan oleh Negara dalam dua Kementerian yaitu Kementerian pendidikan nasional dan Kementerian Agama. Sekolah dibina langsung oleh Kementerian Pendidikan Nasional, sedangkan madrasah dibawah pembinaan Kementerian Agama. Keberadaan madrasah di Kementerian Agama merupakan proses panjang dalam sejarah politik pendidikan di Indonesia.

Ada anggapan bahwa madrasah dipandang belum bisa bersaing dengan sekolah umum, belakangan berdasarkan analisa meluas dari berbagai sumber yang peneliti baca, ada pihak-pihak yang merekomendasikan opsi perlunya madrasah melakukan reposisi, yaitu madrasah perlu positioning tentang keberadaanya sehingga menjadi lembaga pendidikan yang mampu bersaing. Terhadap gagasan reposisi ini, stake holder madrasah terbelah paling tidak dalam dua kelompok besar pemikiran: Pertama, pendidikan madrasah sebaiknya diserahkan dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional; Kedua, pembinaan madrasah tetap dilakukan oleh Kementerian Agama tetapi harus ditata ulang.

---

<sup>25</sup> Qasim Zaman (2007) menyebutkan bahwa perkembangan madrasah dari pendidikan tradisional ke pendidikan modern banyak dipengaruhi oleh kehadiran Negara dalam institusi pendidikan Islam. Implikasi dari modernisasi madrasah ini adalah terjadinya pergeseran otoritas atas madrasah dari ulama ke Negara. Hal ini berdampak pada terbelahnya sikap ulama yang selama ini menjadi pemegang otoritas madrasah. Satu sisi sikap ulama yang pragmatis dan pro dengan gagasan modern, satu sisi kadang menyisakan ulama yang reaktif menggunakan madrasah sebagai basis pengembangan radikalisme (Qasim Zaman, 2007: 86-106).

Kelompok pertama, menyatakan bahwa pendidikan sebaiknya dikelola dalam satu atap, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional. Selain untuk sinergi juga untuk efisiensi. Seorang guru besar di salah satu IAIN berpandangan, Pendidikan agama Islam dari tingkat madrasah hingga universitas sebaiknya diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional. "Pendidikan agama Islam saat ini mengalami kegamangan sehingga tak bisa berkembang. Satu kaki di bawah Kementerian Agama, kaki yang lain di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. "Kegamangan itu tak lepas dari sejarah awal mula Kementerian Agama yang mengelola pendidikan Islam sebagai benteng proteksi ideologi di awal kemerdekaan. Berlanjut pada Orde Baru yang menitikberatkan pendidikan agama yang berorientasi ke pendidikan umum yang justru tak mampu membuat peserta didik berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>26</sup>

Kelompok kedua, berpandangan bahwa menyerahkan madrasah hingga Perguruan Tinggi Agama ke Kementerian Pendidikan Nasional adalah sesuatu yang tidak gampang, rumit atau memang sebaiknya jangan bermimpi disatukan. Karena ada semangat politik pendidikan yang berbeda. Di Diknas, semua lembaga pendidikan mayoritas adalah sekolah negeri dan milik pemerintah, sedangkan pada madrasah sebaliknya sebagian besar adalah swasta, milik masyarakat. Ada pendapat yang mengatakan: menata ulang madrasah yang lebih efisien lebih baik dari pada sekedar gagasan menggabungkannya dengan diknas.<sup>27</sup>

Kelompok yang sepakat madrasah sebaiknya dikelola oleh diknas didukung oleh sebagian masyarakat atau kelompok Islam yang tidak terwakili atau terakomodasi dalam birokrasi Kementerian Agama, juga termasuk yang sepakat pada penggabungan madrasah ke diknas adalah para Islam modernis yang berpandangan bahwa sistem pendidikan nasional telah bertujuan sama dengan

---

<sup>26</sup> Pendidikan Agama Islam dalam Kemunduran, (Suara Merdeka, 10 Januari 2005)

<sup>27</sup> Mastuhu, Pendidikan Agama Islam Indonesia Sebagai Subsistem Pendidikan Nasional, *Jurnal Edukasia*, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Dep. Agama RI, edisi 1 tahun 2006

tujuan pendidikan Islam yaitu melahirkan manusia yang beriman dan bertaqwa di samping sebagai manusia berilmu.<sup>28</sup>

Di lingkup organisasi politik, massa pendukung partai yang jelas-jelas berdasarkan Islam juga tidak memilih madrasah sebagai model pendidikan Islam seperti yang dilakukan oleh barisan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang lebih memilih mengembangkan model pendidikan Islam Terpadu (TKIT, SDIT, SMPIT) yang pembinaannya berada di bawah pembinaan Diknas.

Sementara, pihak-pihak yang berpendapat bahwa madrasah tidak perlu digabungkan ke Kementerian Pendidikan Nasional, dan lebih baik Kementerian Agama melakukan penataan diri dalam mengelola madrasah, meliputi: Pertama, para pemangku kepentingan di Kementerian Agama yang sangat bisa dipahami bahwa mereka tidak akan serta merta melepaskan salah satu bidang garapnya, yaitu madrasah; Kedua, masyarakat Islam konservatif (kebalikan dari kelompok kritis) yang lebih rela madrasah dikelola oleh Kementerian Agama daripada oleh Kementerian Pendidikan Nasional; Ketiga, dari organisasi sosial politik Islam lama seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai ini yang paling kuat menolak penggabungan madrasah ke Kementerian Pendidikan Nasional.

Dalam kasus Madrasah Pembangunan, madrasah ini sekalipun menerima alokasi pembiayaan dari negara, namun madrasah ini mencoba menggali sumber pembiayaan di luar negara. Madrasah Pembangunan berhasil membuktikan diri menjadi lembaga pendidikan yang berhasil dan berhasil menggaet konsumen dari

---

<sup>28</sup> Adalah Abdurahman Wahid ketika menjadi Presiden RI pernah memberikan sinyal bahwa masalah agama dan keagamaan sebaiknya diserahkan kepada masyarakat, negara sebatas memberikan pelayanan dan bantuan. Pemikiran ini secara tidak langsung mengkritisi Dep. Agama yang terlalu banyak mengurus bidang-bidang keagamaan, termasuk didalamnya pendidikan agama dan keagamaan. Ini pula yang kemudian memunculkan kesimpulan bahwa Gus Dur sepakat dengan gagasan pendidikan satu atap, yaitu dibawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional.

masyarakat kelas menengah secara ekonomi. Kenyataan ini menggeser pemikiran lama di mana selama ini seakan madrasah hanya di dukung oleh masyarakat ekonomi menengah bawah, telah tergantikan dengan hadirnya masyarakat kelas menengah kota sebagai pendukungnya. Fenomena ini merupakan energi baru yang turut mewarnai dalam kontestasi madrasah dengan jenis lembaga pendidikan yang lain.

**Tema Mutu.** Pada tema kontrol kualitas mutu oleh Negara, Madrasah Pembangunan tidak berkeberatan dengan semua inisiasi yang dilakukan oleh Negara. Hanya saja perlu dicatat bahwa persoalan mutu tidaklah tergantung sepenuhnya pada indikator-indikator yang ditentukan oleh Negara. Negara hanya mengambil salah satu bagian dari usaha mengontrol mutu, selain Negara ada penentu lain dalam menentukan mutu, yaitu kekuatan pasar dan kepuasan orang tua. Untuk dua yang terakhir ini, tingkat mutu sangat ditentukan oleh kreatifitas dari satuan pendidikan.

Ada anggapan bahwa penyebab madrasah secara umum berada di kelas dua bila dibandingkan dengan sekolah umum, atau madrasah dianggap tidak mampu bersaing dengan sekolah umum adalah karena di madrasah terlalu banyak materi pelajaran. Ada pelajaran umum Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, PKN sebagaimana sekolah umum, di tambah dengan banyak pelajaran agama seperti aqidah akhlaq, ibadah syariah, qur'an hadits, bahasa Arab. Keadaan ini bukan tidak disadari oleh para pelaku di madrasah.

Gambaran berikut, merupakan bentuk resistensi madrasah menghadapi tuntutan atau permintaan untuk mengurangi mata pelajaran. Madrasah memang mengikuti sebagian tuntutan regulasi itu yaitu mengurangi jumlah pelajaran agama, namun di sisi lain madrasah berusaha tetap memberikan porsi lebih pelajaran agama bila dibandingkan dengan sekolah umum. Sebagian pelaku di madrasah, berdasarkan pada pengalaman madrasah tertentu seperti Madrasah

Amanatul Ummah di Surabaya, Madrasah Roudhatul Ulum di Pati Jawa Tengah, belakangan mulai mempunyai keyakinan bahwa untuk menjadikan madrasah yang diminati justru bukan karena madrasah yang bersangkutan mengurangi jumlah mata pelajaran. Mereka bahkan memperbanyak jumlah jam pelajaran agama. Menurut mereka, tidaklah benar menjadi sekolah bermutu harus mengurangi jam pelajaran di sekolah.<sup>29</sup>

Menjadi lembaga pendidikan bermutu menjadi obsesi semua madrasah. Mengejar madrasah bermutu adalah sebuah perjuangan (*jihad*) tersendiri bagi praktisi madrasah, apalagi mutu yang diakui oleh masyarakat. Mutu bisa direncanakan oleh pihak madrasah, namun belum tentu mutu yang digagas madrasah sesuai dengan mutu yang diinginkan masyarakat. Bagi praktisi madrasah, perjuangan mengejar mutu seperti harus melampaui dua pulau karang, yaitu melawan marginalisasi madrasah yang sudah ada sejak zaman kolonial, di sisi lain harus menggenjot kualitas madrasah dengan keterbatasan sumber daya.

Sejarah marginalisasi madrasah telah ada sejak zaman kolonial. Pada zaman kolonial, pendidikan madrasah dianggap pendidikan partikelir atau sekolahan liar. Di zaman setelah kemerdekaan, tepatnya pada zaman orde lama madrasah masih dianggap belum sederajat dengan sekolah umum. Pada zaman orde baru, madrasah sudah diusahakan mendapat persamaan status dengan sekolah umum, namun belum mendapat bantuan pendidikan yang jelas dari pemerintah. Bantuan yang ada sifatnya masih bantuan lepas, bukan bantuan tetap. Pada zaman reformasi, madrasah sudah dianggap sekolah umum, namun madrasah belum mendapatkan perhatian yang memuaskan dari pemerintah daerah.

---

<sup>29</sup>Pada kasus Madrasah Pembangunan yang terjadi justru lebih memperkuat tesis tersebut. Madrasah Pembangunan melakukan penambahan jam pelajaran. Mata Pelajaran yang ditambah jumlah jam pelajarannya tidak hanya pada mata pelajaran agama, mata pelajaran umumpun mendapatkan penambahan jam lebih banyak bila dibandingkan sekolah umum lainnya.

Pada kasus Madrasah Pembangunan, saya mencatat ada tiga konsep yang berkembang dalam menjadikan lembaga pendidikan ini dapat disebut bermutu. Ketiga konsepsi itu adalah: *pertama*, lembaga pendidikan dianggap bermutu bila masyarakat pengguna merasa puas dengan proses pembelajaran. Perasaan puas masyarakat terhadap madrasah adalah karena di lembaga pendidikan tersebut materi umum dan materi agama diajarkan secara berimbang. Artinya lembaga pendidikan yang hanya dominan aspek pelajaran umumnya, atau sebaliknya hanya dominant mengajarkan pelajaran agama, dianggap belum lengkap dan sempurna untuk menjadi lembaga pendidikan bagi anak. Tidak cukup sampai di sana, lembaga pendidikan yang sudah mengajarkan pelajaran umum dan agama secara seimbang namun tidak memberikan nilai kompetitif juga belum bisa dianggap bermutu. Jadi gabungan dari ketiga hal (materi umum, agama dan kompetitif) menjadi nilai pokok untuk menyebut sekolah bermutu. *Kedua*, lembaga pendidikan dianggap bermutu kalau lembaga pendidikan tersebut mempunyai nilai kompetitif dalam bidang akademik dan non akademik. *Ketiga*, konsepsi dalam arti khusus yaitu lembaga pendidikan dianggap bermutu bila hasil pelajaran-pelajaran yang dianggap pokok atau utama seperti mata pelajaran yang di ujian negarakan (di UN kan) seperti Matematika, IPA dan Bahasa Inggris rata-rata siswa mendapatkan nilai yang bagus.

Dari ketiga konsepsi, Madrasah Pembangunan mencoba melayani semua konsepsi itu. Mengejar unggul dalam mata pelajaran yang di UN kan saja sudah berat setengah mati, apalagi mau unggul dalam semua bidang baik itu akademik maupun non akademik. Namun justru itulah yang ingin digagas oleh Madrasah Pembangunan. Untuk unggul di bidang mata pelajaran umum ini, MP mencanangkan Basic sains sebagai satu komoditas yang ditawarkan. Untuk penguatan basic sains itu, MP melengkapi fasilitas madrasah dengan laboratorium yang standar, pembelajaran dengan IT, guru yang berkualitas, konsorsium mata

pelajaran umum dan bekerjasama dengan lembaga atau konsultan yang dipandang ahli dalam pengembangan mata pelajaran umum.

Sejauh ini Madrasah Pembangunan yang saya lihat berhasil melakukan semua itu.<sup>30</sup> Maka madrasah ini segera mendapatkan kepercayaan yang lebih dari masyarakat. Sekalipun untuk masuk madrasah, orang tua harus mengeluarkan biaya cukup tinggi, namun ternyata semua kelas yang disediakan selalu terpenuhi. Kebijakan madrasah ini ke depan, dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di kelas justru akan melakukan pengurangan jumlah murid secara bertahap. Kalau dulu jumlah siswa rata-rata 40 anak, maka tahap demi tahap jumlah murid mulai dikurangi. Sampai nanti jumlah siswa per rombel (rombongan belajar) menjadi ideal yaitu 28 anak per rombel.

**Tema Kekhasan.** Pada arena ini, madrasah berkecenderungan mengembangkan warna khas dengan memberikan bobot pelajaran agama yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah umum. Implikasi penguatan ini telah memberikan warna yang menurut peneliti cukup signifikan sehingga kita bisa membaca adanya tiga varian lembaga pendidikan di Indonesia terkait dengan kecenderungan keagamaan dilihat dari sisi pengelolanya.

Ketiga varian itu meliputi 1) sekolah umum, yaitu sekolah yang tidak menonjolkan identitas keagamaan tertentu. Sekolah ini disponsori oleh Negara dan mempunyai jumlah pendidikan yang paling banyak di negeri ini; 2) sekolah umum berlatar belakang agama, yaitu sekolah yang kebanyakan adalah swasta yang mengembangkan identitas keagamaan tertentu pada siswa seperti sekolah-

---

<sup>30</sup> Indikator mutu yang dipergunakan oleh Madrasah Pembangunan adalah: 1) Apabila kurikulum yang dikembangkan MP teruji, yaitu melahirkan output yang cerdas dan religius; 2) Output yang dihasilkan mempunyai keunggulan yang signifikan, artinya adanya distingsi antara alumni MP bila dibandingkan dengan sekolah lain; 3) Masyarakat melihat hasil yang nyata (Hasil Wawancara dengan Kepala Madrasah, 28 Januari 2008)

sekolah yang didirikan oleh yayasan keagamaan yang terjadi pada komunitas Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Di Lingkungan Islam ada ormas seperti Muhammadiyah dan belakangan muncul sekolah Islam terpadu yang banyak disponsori oleh aktifis Partai Keadilan Sejahtera; 3) Madrasah, yaitu lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh masyarakat dan Negara (Kementerian Agama).

Implikasi dari ketiga varian itu dapat dibaca dalam gejala-gejala yang dimunculkan atau lahir dari sikap para siswa alumninya. Pada siswa sekolah umum, karena tidak ada penekanan identitas keagamaan, maka para alumninya cenderung terbuka, kadang permisif, Pada siswa sekolah umum berlatar belakang agama, para alumninya cenderung mempunyai tingkat religiositas tertentu seperti adanya penguatan identitas baik di tingkat ideologis maupun dalam dataran simbolik. Dalam beberapa hal bahkan berkembang pada pembentukan identitas yang formalis. Pada siswa madrasah, mereka memang dibiasakan dalam kondisi religiositas tertentu. Namun karena pembinaan melekat dari Negara, dalam hal ini Kementerian Agama, maka sikap verbalis ini cenderung berwarna keagamaan yang moderat.

Beberapa bentuk diskriminasi baik dalam bentuk kebijakan negara maupun opini yang terbangun mengenai madrasah, menjadi perjuangan tersendiri bagi para pelaku madrasah untuk menjadikan lembaga ini untuk berdaya saing. Dari ribuan madrasah, hanya sebagian kecil madrasah yang berhasil melakukan reposisi dengan merumuskan dan meraih mutu secara mandiri. Madrasah Pembangunan salah satu lembaga pendidikan yang berhasil melampaui prasyarat itu. Kebanyakan madrasah, dari bacaan peneliti, umumnya masih berjalan sebatas kemampuan. Belum mampu berdiri tegak dengan visi dan misi yang mandiri. Deskripsi madrasah secara umum yang belum mandiri itu terjadi karena kebanyakan madrasah didukung oleh masyarakat dari kelas ekonomi menengah

ke bawah. Persoalan terobosan peningkatan mutu dan persoalan pendanaan menjadi masalah yang serius bagi kebanyakan madrasah. Dukungan orang tua tidak mencukupi untuk menghasilkan terobosan yang maju.

Ada beberapa stereotipe yang membayangi madrasah untuk berdaya saing. Pertama, Stereotipe bahwa nama madrasah sering diidentikkan sebagai pendidikan pinggiran (partikelir) yang merupakan warisan zaman kolonial sehingga tidak perlu didukung dana secara tetap oleh negara; Kedua, stereotipe bahwa madrasah hanyalah lembaga yang hanya mengajarkan pendidikan agama sehingga untuk menjalankan pendidikan formal, madrasah dianggap tidak mampu bersaing dengan sekolah umum; Ketiga, stereotipe bahwa madrasah adalah hanya milik Kementerian Agama yang dianggap sebagai lembaga vertikal sehingga tidak perlu dibantu oleh pemerintah daerah. Ketiga bentuk stereotipe ini menjadi kendala yang menguras energi tersendiri untuk membuktikan madrasah mampu menjadi lembaga pendidikan yang bermutu.

Dalam sejarah panjang madrasah, bagaimana madrasah telah menunjukkan mempunyai nyawa yang demikian ulet untuk hidup dan berdiri ingin sejajar dengan sekolah umum. Di zaman kolonial, madrasah dipandang sebagai sekolah partikelir. Di zaman kemerdekaan atau orde lama, madrasah diperlakukan sebagai sekolah masyarakat yang diakui keberadaannya tetapi tidak mendapat fasilitas pembiayaan negara yang memadai. Di zaman orde Baru, madrasah hanya sebagaianya difasilitasi dan perbantuananya hanya bersifat paket bantuan, bukan dana rutin. Di zaman reformasi, madrasah diberbagai daerah masih diberlakukan secara diskriminatif karena dianggap sebagai lembaga vertikal yang tidak diotonomikan dan sekali lagi masih dianggap sebagai lembaga pendidikan agama.

Sulit dibayangkan kalau sebuah madrasah yang selalu dipresepsikan sebagai sekolah nomor dua dengan segala keterbatasannya akan bisa bersaing dalam ilmu-ilmu umum dibandingkan dengan sekolah umum yang kebanyakan

adalah sekolah yang dibiayai negara. Namun justru stereotipe ini dijadikan pemacu bagi Madrasah Pembangunan. Madrasah Pembangunan menjadikan penguasaan ilmu umum atau basic sains sebagai salah satu unggulan yang ingin diwujudkan.

Keberadaan Negara yang telah menjadi identitas tertentu bagi suatu bangsa mempunyai kepentingan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan melalui lembaga pendidikan. Demikian juga perkembangan teknologi dan informasi sebagai pembentuk dasar globalisasi telah menyebarkan nilai-nilai tertentu yang kuat sekali pengaruhnya pada lembaga pendidikan. Mengutip pendapat Foucault di atas, "*Where there is power, there is resistance*" di mana di sana ada kekuatan dominan, di sana selalu ada kekuatan yang bertahan (resistensi). Bagaimana strategi madrasah dalam berresistensi dalam konteks pendidikan nasional?

Tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pasal 3 berbunyi: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Sebagaimana telah disebutkan bahwa setiap proses kontruksi identitas, di sana terjadi proses kontestasi. Kontestasi identitas dalam konteks nasional, yaitu keinginan untuk merumuskan nilai-nilai identitas tertentu dalam konteks Negara. Sebagai contoh, Ninuk Kleden (2006) menggambarkan politik pemerintah beberapa daerah provinsi di Indonesia yang mencoba merumuskan identitas budaya daerah di tengah kebudayaan nasional. Pemerintah daerah selain sebagai

tangan panjang Negara dalam rangka membangun identitas bersama warga bangsa, sebagian pemerintah daerah juga melakukan reidentifikasi identitas daerah di tengah beragamnya kultur lokal dan masuknya kultur internasional.

Saya melihat proses yang sama terjadi juga di Madrasah Pembangunan. Di satu sisi Madrasah Pembangunan menerima penyatuan sistem pendidikan dalam sistem pendidikan nasional, di sisi lain madrasah juga mempertahankan identitas sebagai lembaga pendidikan yang bernama 'madrasah'. Dan mengajarkan pembelajaran agama dalam jumlah yang lebih. Konsekwensinya, di satu sisi karena madrasah berada dalam sistem pendidikan nasional maka madrasah juga dituntut memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan dituntut untuk berkompetisi dengan jenis lembaga pendidikan sekolah, di sisi lain madrasah mempunyai semangat kesejarahan sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan agama dalam porsi tertentu harus berkerja lebih kreatif untuk mempertahankan identitas yang dimilikinya.

### **C. Pilihan Politik Madrasah Pembangunan**

Dalam sejarah, sistem pendidikan madrasah pada awalnya berada di luar sistem Negara, kemudian secara bertahap berintegrasi dengan sistem pendidikan yang dibangun oleh Negara (Sisdiknas). Puncak integrasi itu terjadi ketika keluarnya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 di mana madrasah mempunyai kedudukan yang sama persis dengan sekolah, yakni sama-sama sebagai sekolah formal.<sup>31</sup> Seiring dengan proses integrasi madrasah terhadap sistem pendidikan

---

<sup>31</sup> UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Pasal 17 ayat (2) berisi: "Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat;" Pasal 18 ayat (3) berisi: "Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat."

nasional, banyak madrasah yang mulai dinegerikan. Madrasah yang dianggap memadai untuk dinegerikan segera diusulkan untuk menjadi negeri.<sup>32</sup>

Di tengah banyak madrasah yang menginginkan dinegerikan, Madrasah Pembangunan justru mengambil posisi atau sikap politik tetap menjadi madrasah swasta. Pilihan menjadi lembaga pendidikan dengan status swasta nampaknya disengaja sejak awal oleh para pelaku MP. Kutipan berikut ini mengisyaratkan bahwa menjadi lembaga pendidikan yang berstatus swasta adalah pilihan para pelaku lembaga pendidikan ini. Konsekwensinya, maka untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu maka lembaga pendidikan ini sejak awal menerapkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan lembaga pendidikan sederajat di sekitarnya.

*Madrasah Pembangunan sejak awal didirikan untuk menjadi sekolah yang bermutu. Didirikan oleh masyarakat kompleks perumahan dosen UIN Syarif Hidayatullah yang kebanyakan adalah para dosen di perguruan tinggi tersebut. Sambutan terhadap kehadiran madrasah datang tidak hanya dari masyarakat yang tinggal di dalam kompleks. Dari luar kompleks pun banyak masyarakat yang memasukkan anaknya ke madrasah. Madrasah Pembangunan sejak awal, mengingat statusnya yang swasta, menetapkan biaya yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa sekolah di sekelilingnya. Keberatan tentang biaya justru datang dari masyarakat dalam kompleks. Namun setelah dijelaskan maksudnya, keberatan itupun sirna. Sementara masyarakat luar kompleks yang menyekolahkan ke madrasah tersebut justru kebanyakan dari para pegawai atau pengusaha swasta. Kebanyakan pegawai negeri di luar kompleks menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri baik sekolah dasar atau madrasah negeri.<sup>33</sup>*

Dari cerita di atas, ada beberapa poin bisa digarisbawahi terkait dengan kebijakan MP mengembangkan lembaga pendidikan yang mandiri dan mampu berkontestasi dalam konteks globalisasi. Pertama, bahwa madrasah ini sejak awal

<sup>32</sup>Momentum penegerian madrasah dimulai dari madrasah yang diserahkan kepada negara, antara lain penyerahan 205 buah SRI (Sekolah Rakyat Islam) dari masyarakat Aceh tahun 1946; penyerahan 19 SRI dari Residen Lampung (1948); 1 buah Madrasah Mambaul Ulum Surakarta, warisan Kesunanan (1956).

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ibu Mtq, guru senior di MP. Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Nopember 2007

memang telah digagas untuk menjadi sekolah yang lebih bermutu. Keinginan ini terkait dengan keberadaan madrasah ini yang berada di lingkungan perumahan orang terdidik, yaitu di lingkungan perumahan para dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kedua, untuk meraih mutu yang diinginkan, madrasah ini menetapkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya sekolah di sekitarnya. Ini nampaknya terkait juga dengan kebijakan kenapa madrasah ini memilih berstatus swasta, tidak mau dijadikan madrasah negeri. Ketiga, perkembangan madrasah ini banyak didukung oleh peran masyarakat yang justru berasal dari kalangan pegawai swasta, di mulai masyarakat sekitar di luar kompleks Perumahan hingga masyarakat secara lebih luas.

Ketika sebagian madrasah berlomba mengusulkan diri menjadi madrasah negeri, MP justru mengambil langkah sebaliknya, yaitu memilih menjadi madrasah berstatus swasta. Hingga saat ini MP memilih untuk tetap menjadi madrasah dengan status swasta, dan tidak mau dinegerikan. Ini bukan berarti MP tidak bersinggungan dengan kebijakan langsung dari Negara.<sup>34</sup> Untuk alasan kemandirian, status kelembagaan yang swasta dianggap lebih strategis dan menantang bila dibandingkan kalau lembaga ini menjadi negeri. Karena dengan begitu, para pengelola bisa memasang target sekaligus berimprovisasi dalam pencapaian target. Walau begitu, MP tidak menolak bila diberi bantuan guru dengan status negeri.

*... Madrasah Pembangunan sejak awal didirikan untuk menjadi sekolah yang bermutu. .... Madrasah Pembangunan sejak awal, mengingat statusnya yang swasta, menetapkan biaya yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa sekolah di sekelilingnya. Keberatan tentang biaya justru datang dari masyarakat dalam kompleks. Namun setelah dijelaskan maksudnya, keberatan itupun sirna. ...<sup>35</sup>*

<sup>34</sup> Pada tahun 1978, sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Depag RI, Nomor: Kep/D/03/1978, MP dinyatakan sebagai Madrasah Pilot Proyek Percontohan.

<sup>35</sup> Penjelasan Ibu Muttaqinati, Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Nopember 2007

Bagaimana MP mengagas lembaga pendidikan. Ini dapat dilihat dari orientasi dan tujuan MP.<sup>36</sup> Dilihat dari tujuan pengembangan pendidikan yang dilakukan di MP berorientasi kepada dua focus utama, yaitu pengembangan sistem pendidikan dan optimalisasi lulusan/siswa. Khusus dalam pengembangan kelembagaan, MP ingin menjadikan lembaga ini sebagai *Center of Learning*. Orientasi ini nampak dalam butir 2, 3, dan 4 dari tujuan utama pendidikan di MP. Ketiga butir tersebut adalah:

*“Tujuan Madrasah Pembangunan: 1) .... ; 2) Terwujudnya kurikulum yang memiliki kekuatan pada pembinaan keislaman, sains dan teknologi serta apresiatif terhadap kecenderungan globalisasi dengan tetap berpijak pada kepribadian Indonesia dan kemampuan potensi anak; 3) Tersedianya tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi ideal baik dalam aspek keilmuan, skill keguruan, maupun kemampuan komunikasi global; 4) Tersedianya sarana sumber belajar yang dapat memberi kesempatan pada siswa untuk dapat belajar seluas-luasnya, sehingga sekolah benar-benar berfungsi sebagai Center for Learning; .... . (Buku Panduan Madrasah Pembangunan).*

Dalam pengembangan sistem pendidikan, MP berkeinginan membangun sistem pendidikan yang akomodatif bagi suksesnya pembelajaran melalui terwujudnya kurikulum yang memiliki kekuatan pada pembinaan keislaman, sains dan teknologi serta apresiatif terhadap kecenderungan globalisasi dengan

---

<sup>36</sup> Tujuan MP selengkapnya berbunyi: 1) Terciptanya pendidikan yang dapat melahirkan lulusan beriman dan bertaqwa dengan kemampuan kompetitif serta memiliki keunggulan-keunggulan komparatif; 2) Terwujudnya kurikulum yang memiliki kekuatan pada pembinaan keislaman, sains dan teknologi serta apresiatif terhadap kecenderungan globalisasi dengan tetap berpijak pada kepribadian Indonesia dan kemampuan potensi anak; 3) Tersedianya tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi ideal baik dalam aspek keilmuan, skill keguruan, maupun kemampuan komunikasi global; 4) Tersedianya sarana sumber belajar yang dapat memberi kesempatan pada siswa untuk dapat belajar seluas-luasnya, sehingga sekolah benar-benar berfungsi sebagai *Center for Learning*; 5) Terwujudnya siswa yang memiliki keseimbangan antara kekuatan jasmani dan rohani serta kepekaan social; 6) Terwujudnya siswa yang mandiri dan mampu melakukan *team work* melalui berbagai aktifitas belajar intra maupun ekstra kurikuler (Buku Panduan MP).

tetap berpijak pada kepribadian Indonesia dan kemampuan potensi anak; Tersedianya tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi ideal baik dalam aspek keilmuan, skill keguruan, maupun kemampuan komunikasi global; Tersedianya sarana sumber belajar yang dapat memberi kesempatan pada siswa untuk dapat belajar seluas-luasnya, sehingga sekolah benar-benar berfungsi sebagai *Center for Learning*. Gagasan pengembangan lembaga ini diturunkan dalam redaksi visi<sup>37</sup> dan misi madrasah.<sup>38</sup>

Bagaimana MP merespon penguatan sistem pendidikan nasional dan kebijakan desentralisasi pendidikan? Sebuah pertanyaan yang penting dijawab sebagai bagian dalam melihat posisi lebih lanjut madrasah ini dalam konteks globalisasi. Malik Fajar (2005: 239-240) dalam perumusan kebijakan negara terkait madrasah dalam era globalisasi menyaratkan tiga hal: *Pertama*, kebijakan itu pada dasarnya harus memberi ruang tumbuh yang wajar bagi aspirasi utama umat (Islam); *Kedua*, kebijakan itu memperjelas dan memperkokoh keberadaan madrasah sebagai ajang membina warga Negara yang cerdas, berpengetahuan,

---

<sup>37</sup>Visi Madrasah Pembangunan adalah *Menjadikan Madrasah Pembangunan UIN Jakarta sebagai Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah yang unggul dan terkemuka dalam pembinaan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan dengan mengapresiasi potensi-potensi anak serta perkembangan era globalisasi dan perkembangan zaman.*

<sup>38</sup>Misi Madrasah Pembangunan adalah: 1) Menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang akan melahirkan lulusan yang beriman dan bertaqwa serta memiliki kemampuan kompetitif dan keunggulan komparatif; 2) Melakukan pembinaan kesehatan fisik sehingga terbentuk keseimbangan antara kekuatan keilmuan dengan perkembangan jasmani siswa serta dapat melahirkan lulusan yang cerdas, kuat dan sehat; 3) Senantiasa melakukan inovasi kurikulum dengan aksentuasi pada pembinaan keislaman, sains dan teknologi serta apresiatif terhadap kecenderungan globalisasi dengan tetap berpijak pada kepribadian Indonesia; 4) Senantiasa melakukan pembinaan terhadap tenaga pendidik sebagai tenaga profesional yang menguasai aspek keilmuan, keterampilan mengajar (*skill teaching*), kepribadian pedagogis serta komunikasi global yang dijiwai akhlak mulia; 5) Senantiasa melakukan pembinaan terhadap tenaga kependidikan yang profesional yang menguasai bidang ilmu yang mendukung tugasnya, etos kerja yang tinggi, serta kepribadian yang Islami; 6) Mengupayakan tersedianya sarana prasarana dan fasilitas belajar mengajar yang dapat memberikan kesempatan kepada para siswa untuk dapat mengikuti kegiatan belajar seluas-luasnya, sehingga madrasah benar-benar berfungsi sebagai *Center for Learning*; 7) Melakukan pembinaan kemandirian dan team work melalui berbagai aktifitas belajar baik intra maupun ekstrakurikuler.

berkepribadian, serta produktif sederajat dengan sistem sekolah; *Ketiga*, kebijakan itu bisa menjadikan madrasah memenuhi tuntutan-tuntutan masa depan.

Pada kasus MP yang menjadi kasus penelitian ini, merujuk pemikiran Burbures dan Torres<sup>39</sup> saya melihat ada hal penting yang terjadi, khususnya pada poin kebijakan populer pendidikan yang diambil. Dalam menetapkan kebijakan, ada dua hal yang penting yang patut dicermati dari MP: masalah pilihan kebijakan dan apa yang terjadi terhadap lembaga ini pasca kebijakan Negara yang mengembangkan kebijakan desentralisasi pendidikan. Dalam masalah pilihan kebijakan, saya melihat MP lebih memilih menjadi lembaga pendidikan berstatus swasta, yang tidak mau dinegerikan. Sedangkan, mensikapi tema desentralisasi sebagai konsekwensi hadirnya UU No. 22/1999 di mana semua lembaga pendidikan madrasah harus menanggung resiko dianggap sebagai instansi vertikal sehingga tidak mendapat bantuan pembiayaan dari pemerintah daerah, MP relatif tidak berpengaruh, karena memang sejak awal madrasah ini sudah memilih tetap menjadi lembaga swasta dan mengembangkan tradisi kemandirian lembaga pendidikan.

#### **D. Bentuk-bentuk Kreasi Identitas di Madrasah**

Implikasi dari adanya beberapa pemicu (*trigger*) proses kreasi identitas sebagaimana disebutkan di atas, peneliti mencermati adanya beberapa proses penguatan/kontruksi identitas yang terjadi di Madrasah Pembangunan Ciputat

---

<sup>39</sup> Burbures dan Torres (2000) menyatakan beberapa hal penting tentang pendidikan dalam konteks globalisasi yang membutuhkan analisa lebih mendalam, yang nantinya berguna untuk melihat fenomena jenis atau lembaga pendidikan berhadapan dengan negara. Menurutnya, ada beberapa trend pendidikan dalam konteks globalisasi, yaitu meliputi: 1) beberapa kebijakan populer seperti privatisasi, pilihan, dan desentralisasi sistem pendidikan yang menjadi arah pembentukan pendidikan dan pencapaian riset berbasiskan organisasi rasional dan teori manajemen; 2) peran organisasi pendidikan baik nasional maupun internasional, termasuk organisasi guru, organisasi orang tua dan gerakan sosial; 3) beasiswa berdasarkan kelompok, kelas, negara (terkait tema misalnya multikulturalisme, permasalahan identitas, teori kritik, feminisme, poskolonialisme, komunitas diaspora dan gerakan sosial baru (Burbures dan Torres, 2000: p. 18)

Tangerang Selatan. Beberapa konstruksi identitas di madrasah ini mengambil bentuk: *pertama*, Madrasah Pembangunan menggagas menjadi lembaga pendidikan yang berbeda (distingtif) bila dibandingkan dengan sekolah umum; *Kedua*, Madrasah Pembangunan ingin mempunyai nilai lebih bila dibandingkan madrasah lainnya; *Ketiga*, Madrasah Pembangunan mengafirmasi beberapa tuntutan ketentuan negara (seperti Standar Nasional Pendidikan/SNP) sebagai usaha meningkatkan legitimasi identitas madrasah.

### **1. Menggagas Lembaga Pendidikan Yang Berbeda**

Pembentukan identitas yang pertama adalah proses pengembangan 'madrasah' sebagai sebuah identitas lembaga pendidikan yang berbeda. Pada kasus MP, ada cerita menarik mengapa lembaga ini lebih memilih jenis pendidikan bernama 'madrasah.'

*Pada awal pendirian Madrasah Pembangunan pernah ada gagasan yang tarik menarik dalam menetapkan jenis lembaga pendidikan ini antara gagasan menggunakan nama 'madrasah' atau menggunakan nama 'sekolah' dengan diberi label Islam (Sekolah Islam). Dengan asumsi bila bernama madrasah maka pembinaan akan berada di bawah koordinasi Kementerian Agama; sedangkan kalau menjadi sekolah dasar Islam maka pembinaan dan pendanaan pendidikan akan berada di bawah koordinasi Depdiknas. Keuntungan berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, menurut asumsi awal sementara mereka, selain mendapatkan pembinaan yang lebih intens bila dibandingkan dengan bila di bawah Kementerian Agama, juga kemungkinan mendapatkan bantuan pembiayaan lebih besar. Namun di akhir keputusan, gagasan memilih nama 'sekolah Islam' ternyata tidak mendapatkan persetujuan sebagian besar panitia pendiri, sehingga akhirnya nama lembaga yang dipilih adalah menggunakan nama madrasah. Para pendiri lembaga ini lebih memilih nama madrasah justru sebagai usaha untuk pembuktian identitas bahwa madrasah juga bisa maju. Pilihan itu juga didasarkan karena kebanyakan para pendiri adalah pegawai negeri di Kementerian Agama. Dalam prinsip mereka, mereka akan bangun sekolah bermutu tapi dengan tetap berbentuk madrasah.*

Cerita itu menunjukkan bahwa label 'madrasah' untuk sebuah lembaga pendidikan merupakan sebuah pilihan dan mewakili semangat tertentu. Nama madrasah menantang mereka untuk membuktikan bahwa lembaga pendidikan bernama madrasah layak menjadi jenis pendidikan yang eksis dan bisa bersaing. Para pendiri MP berusaha untuk membuktikan bahwa madrasah mampu untuk itu.

Merujuk kutipan di atas, perasaan seseorang pada sekelompok orang dari pada kelompok lainnya merupakan suatu persoalan identitas. Mengelompokkan lembaga pendidikan kepada jenis lembaga bernama madrasah dibandingkan lembaga pendidikan dengan nama 'sekolah' juga merupakan persoalan identitas. Di samping faktor identitas bermain, implikasi identitas untuk menjadikan lembaga pendidikan ini bermutu menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga madrasah ini.

Madrasah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai lembaga pendidikan yang memberikan porsi yang lebih besar dalam pembelajaran agama bila dibandingkan dengan sekolah umum.<sup>40</sup> Artinya, sebagian masyarakat memilih menyekolahkan anak ke madrasah, dan tidak ke sekolah umum, menurut mereka karena didorong agar anak mereka mendapatkan pelajaran agama lebih banyak. Menurut mereka, kalau madrasah tidak lagi bisa memberikan porsi yang cukup dalam pembelajaran agama, maka tidak ada alasan lagi mereka untuk memilih madrasah. Ini adalah kesimpulan dari jawaban dari salah satu wali murid dari MP yang memilih madrasah ini karena lembaga ini menggabungkan pembelajaran agama dan umum sekaligus.

---

<sup>40</sup> Penting untuk diperhatikan bahwa ciri lain pendidikan madrasah adalah pembinaan jiwa agama dan akhlak anak didik. Inilah yang menjadi identitas sebenarnya dari pendidikan madrasah yang perlu diperhatikan oleh para pengelola dan guru lembaga pendidikan Islam itu. Pendidikan dan pengajaran dalam madrasah harus diarahkan kepada pembinaan keyakinan agama, sehingga hidupnya selalu berpedoman kepada ajaran Islam. Lihat Zakiah Daradjat dalam "Pengantar" buku Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. vii.

Orang tua beranggapan bahwa pendidikan madrasah menawarkan pembelajaran dengan kombinasi mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran yang berimbang antara pelajaran umum dan pelajaran agama merupakan satu keunggulan yang ditawarkan madrasah. Kebijakan memberi bobot lebih pada pembelajaran agama dibandingkan porsi pelajaran agama di sekolah umum sengaja dikembangkan oleh praktisi Madrasah Pembangunan.

MP sadar betul tentang tuntutan itu. Maka dalam kasus menghadapi realitas perubahan sosial dan dampak globalisasi, MP selalu menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengembangkan kebijakan apapun. Pertimbangan untuk selalu mengambil keputusan yang lebih aman dikedepankan daripada mengadaptasi sedemikian rupa sebuah warna kemajuan. Namun, disamping itu lembaga ini juga sadar bahwa tantangan mengadaptasi kemajuan adalah suatu keharusan untuk dijalani. Dalam mengadaptasi warna kemajuan, madrasah juga mewaspadaikan dan mensikapi semua perkembangan yang terjadi.

Salah satu ciri khas madrasah adalah sebagai lembaga pendidikan yang memberikan perhatian lebih terhadap pembelajaran agama. Sejarah madrasah menunjukkan bahwa lembaga ini merupakan turunan atau modifikasi dari lembaga pendidikan keagamaan (pesantren) yang membawa muatan identitas, yaitu bahwa madrasah mempunyai warna khusus dibandingkan dengan sekolah umum lainnya dengan muatan pelajaran agamanya. Banyak masyarakat tertarik terhadap madrasah justru karena di sana ada pelajaran agama dalam porsi yang lebih. Kalau ciri khas ini diabaikan, barangkali madrasah justru akan ditinggalkan orang.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Abdurahman Saleh (2004) melihat dari tujuan para pendiri madrasah di Indonesia pada masa-masa awal madrasah, lembaga ini didirikan untuk paling tidak dua tujuan: (1) mengantisipasi nilai-

Dalam versi Negara, pendidikan agama dibutuhkan dalam rangka membentuk manusia yang beriman dan bertakwa serta akhlak mulia. Dalam PP No. 55/2007 disebutkan pendidikan agama, pasal 2 disebutkan: (1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kerukunan hubungan antar umat beragama. (2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang mengimbangi penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.<sup>42</sup>

## 2. Menggagas Nilai Lebih Madrasah

*Dalam sebuah spanduk dipasang di pintu gerbang masuk halaman MP di Ciputat terdapat slogan yang cukup atraktif. Spanduk itu berbunyi **More than Just Islamic School**. Slogan ini merupakan motto sekolah ini, yang artinya "lebih dari sekedar sekolah Islam." Tulisan ini mengundang perhatian tersendiri, khususnya bagi saya, karena dalam motto itu terdapat dua pertanyaan serius. Pertama, apa yang dimaksud dengan Islamic School?; dan Kedua, apa juga yang dimaksud dengan konsep 'more' atau lebih dari sekedar sekolah Islam. Dua hal ini menjadi awal dari elaborasi saya mengenai pendidikan di madrasah, sekaligus dalam konteks yang beririsan mengetahui apa yang dimau oleh komunitas lembaga ini. Di sana disebutkan bahwa MP ingin lebih dari sekolah Islam. Apa yang di maksud "lebih dari sekedar sekolah Islam".*

---

nilai negative dari pendidikan sekuler yang berasal dari Barat; (2) dalam rangka memodernisir lembaga pendidikan agama yang ada di masyarakat, seperti pesantren dan madrasah diniyah.

<sup>42</sup> Dalam konteks pendidikan agama ada dua istilah yang hampir mirip, yaitu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. *Pendidikan agama* adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan membentuk sikap peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; sedangkan *Pendidikan keagamaan* adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Ketika Saya bertanya kepada Kepala Madrasah Pembangunan tingkat Ibtidaiyah:

*"Apa yang dimaksud 'sekolah Islam' dalam motto itu,"tanyaku.*

*"...yang dimaksud sekolah Islam, ya madrasah..."jawab Bapak Kepala Madrasah*

*"... kemudian, apa yang dimaksud 'lebih dari sekedar sekolah Islam. . ?"saya bertanya lagi*

*"...artinya Madrasah Pembangunan menginginkan menjadi lembaga pendidikan yang lebih bila dibandingkan dengan kebanyakan madrasah yang ada..."sambungnyanya.*

MP ingin memberikan warna/karakter yang lebih bila dibandingkan dengan madrasah yang lain. Dari gambaran di atas, dapat dijelaskan bahwa Motto *more than just islamic school* dimaksudkan agar MP ini mempunyai nilai lebih dan lebih berprestasi bila dibandingkan dengan sekolah Islam (baca: madrasah) lainnya. Motto tersebut dianggap strategis dalam mengembangkan MP menjadi lembaga pendidikan yang kompetitif dan siap menghadapi persaingan global. Globalisasi secara faktual menunjukkan bukan saja semakin ketatnya persaingan kemampuan diri perorangan, tetapi juga secara nilai globalisasi berpeluang membuka pintu-pintu yang mengarah pada perusakan nilai-nilai moral. Madrasah sebagai lembaga pendidikan diyakini oleh para aktor didalamnya dapat menjadi alternatif yang memiliki peranan penting dalam pembentukan watak, kepribadian, dan kualitas bangsa di masa yang akan datang.

Salah satu yang membedakan MP dengan madrasah lain adalah MP mengembangkan model pembelajaran agama yang lebih fungsional. Artinya pihak madrasah tidak hanya menjejali peserta didik dengan berbagai ilmu agama, tetapi pihak MP berkepentingan dengan lahirnya sikap keberagamaan yang bisa lebih dilihat, dihayati dan dirasakan. Gambaran keinginan tersebut diwujudkan dalam pengembangan kemampuan siswa membaca al Qur'an, siswa yang mau

menjalankan sholat lima waktu, siswa yang peduli terhadap orang lain terutama bagi mereka (siswa) yang tidak mampu dengan memberikan bantuan kepada mereka.

Untuk melahirkan sikap keberagamaan seperti itu, pihak MP dengan segala cara untuk mewujudkannya. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam penanaman nilai adalah melalui penerapan kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*). *Hidden curriculum* ini diwujudkan dalam bentuk alokasi waktu sebelum pembelajaran dimulai dengan aktivitas kecil keagamaan seperti baca kitab suci, hafalan do'a, nasehat kecil dan sebagainya. Sebagaimana gambaran dapat dilihat dari cerita berikut:

*Pagi itu, setelah jam menunjuk angka 07. 00, bel di Madrasah Pembangunan berbunyi. Semua murid berdiri berbaris di depan pintu kelas. Setelah disiapkan oleh salah seorang siswa, maka satu-persatu murid menyalami guru yang telah berdiri di depan pintu kelas. Secara rapi satu-persatu murid masuk kelas dan duduk di bangku masing-masing. Halaman Madrasah Pembangunan yang tadinya hiruk pikuk berlarian anak-anak ke sana kemari tiba-tiba berubah menjadi sepi, semua anak yang jumlahnya mencapai lebih dari satu ribu itu telah masuk ke kelas masing-masing. Kegiatan pembelajaran dilakukan di masing-masing kelas. Pada tahap awal pembelajaran, sekitar 10-15 menit, di semua kelas diberikan kegiatan pembelajaran agama tertentu secara singkat. Lain hari lain pula yang diajarkan. Hari itu anak-anak di suruh membaca doa-doa tertentu. Setelah itu baru kegiatan pembelajaran hari itu secara umum di mulai.*

Setiap hari secara rutin diberikan aktivitas kecil keagamaan. Kegiatan dipimpin oleh guru pada jam mata pelajaran pertama di pagi hari. Kegiatan dikontrol dengan buku monitoring yang ditulis oleh guru yang bersangkutan. Kegiatan dapat dilakukan secara bersama seperti membaca doa tertentu, bisa juga dalam bentuk perseorangan murid. Guru menunjuk salah satu murid untuk melakukan aktivitas keagamaan seperti membaca ayat tertentu dari al Qur'an.

Hari berikutnya hafalan surat-surat pendek dari kitab suci al Qur'an. Hari berikutnya pembelajaran agama diberikan dalam bentuk nasehat kecil keagamaan.

Beberapa usaha dalam penguatan pendidikan agama dalam rangka mewujudkan misi menjadi Madrasah Pembangunan mempunyai nilai lebih bila dibandingkan dengan madrasah lainnya adalah pendekatan *hidden curriculum*, dan metode pembelajaran agama yang melibatkan orang tua siswa, yaitu pemberian buku monitoring ibadah. Pembelajaran agama di MP merupakan usaha mengembangkan misi pembentukan akhlakul karimah (akhlak mulia). Misi akhlakul karimah menjadi landasan MP dalam memberikan pelajaran agama di sekolah.

### ***3. Mencari Legitimasi Baru Untuk Penguatan Identitas.***

Madrasah selain nama jenis lembaga ini membawa muatan yang syarat dengan identitas terkait dengan sejarah, madrasah dalam konstruksi identitas juga melakukan mencari legitimasi identitas, yaitu dengan mencoba bertaruh di wilayah-wilayah terbuka seperti dalam hal mengembangkan pendidikan standar. Salah satu tuntutan negara untuk menjadi lembaga pendidikan yang standar, lembaga pendidikan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dikeluarkan oleh negara. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 mengatur SNP ini. Madrasah Pembangunan mencoba memenuhi semua prasyarat yang ditentukan dalam standar itu.

Terhadap regulasi mutu yang diatur oleh Negara, MP mengambil sikap menerima dengan ketentuan itu. Namun dalam rangka memenuhi harapan orang tua dan pasar, MP melakukan usaha yang ekstra untuk menjadikan lembaga ini bermutu. Dalam manajemen pengembangan mutu, MP mengembangkan motto "Basic Science, Bahasa, dan Akhlakul Karimah," yang dimaksudkan sebagai konsentrasi pengembangan, yaitu mutu, pendidikan agama dan penguasaan

bahasa. Pada masing-masing poin pengembangan, MP menghadapi persoalannya sendiri-sendiri.

Khusus pada aspek pengembangan mutu, MP harus melawan setiap stereotipe dan diskriminasi yang ada. Stereotipe yang dimaksud adalah anggapan umum yang menganggap madrasah sebagai lembaga pendidikan kelas dua, dan lembaga pendidikan yang tidak kompetitif. Diskriminasi madrasah yang dimaksud adalah sikap perlakuan yang tidak sama yang diterima lembaga pendidikan madrasah bila dibandingkan dengan sekolah umum. Dalam situasi seperti ini MP berusaha bangkit untuk melawan itu semua, dan berusaha membuktikan bahwa MP dapat eksis dan kompetitif. Usaha itu berhasil dengan terjaringnya siswa setiap tahun 8 kelas dengan jumlah siswa masing-masing kelas kurang lebih 38-40 siswa.

Dalam rangka mengembangkan mutu dalam perspektif pasar, madrasah melalui motto pengembangan bahasa, mencoba membekali siswa dengan berbagai ketrampilan tambahan yang dimulai dengan ketrampilan berbahasa. Bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan sejak dini. Selain bahasa, banyak ketrampilan yang diajarkan di madrasah ini seperti computer, perhitungan rempoa.

Sementara pada kebanyakan madrasah lain, umumnya mengikuti regulasi-regulasi dan standar-standar yang disusun oleh pemerintah, sebagian melakukan inovasi tambahan, dan sebagian lain dan ini mayoritas tidak disertai dengan inovasi tertentu (miskin kreasi). Ada anggapan banyak pihak, semakin standar-standar pendidikan itu dipenuhi semakin bermutulah lembaga pendidikan. Sayangnya banyak pihak yang cenderung ingin memenuhi standar-standar yang ada, tetapi kurang fokus pada rasa puas masyarakat sebagai konsumen pendidikan.

Keberhasilan MP yang diminati masyarakat perkotaan, menurut saya adalah salah satu keberhasilan lembaga pendidikan ini dalam mempertaruhkan identitas dan mutu. Kultur perkotaan yang mulai cair, memudarnya peran kontrol masyarakat terhadap perkembangan anak menyebabkan banyak orang tua di kota was-was dengan perkembangan kepribadian anak. Para orang tua tidak memungkiri bahwa jam mereka habis untuk bekerja dan bersaing untuk hidup layak di kota. Dalam konteks demikian, maka lembaga pendidikan yang mengajarkan pelajaran agama dalam porsi yang cukup menarik perhatian masyarakat menengah perkotaan. Madrasah menjadi salah satu pilihan jawaban permasalahan tersebut. Namun memilih madrasah yang mengajarkan materi agama dalam porsi yang banyak saja tidak cukup, masyarakat perkotaan juga mempertimbangkan aspek mutu lembaga pendidikan. Artinya madrasah yang bermutu adalah lembaga pendidikan yang diminati.

#### **E. Inovasi Pembelajaran Agama: Mempertahankan Identitas Madrasah**

Pembelajaran agama, menjadi salah satu *core business* MP. Pembelajaran agama sebagai karakter dasar madrasah, di MP dikembangkan dalam model pembelajaran agama yang lebih fungsional. Artinya pihak madrasah tidak hanya menjejali peserta didik dengan berbagai ilmu agama, tetapi pihak MP berkepentingan dengan lahirnya sikap keberagamaan yang bisa dilihat, dihayati dan dirasakan. Gambaran keinginan tersebut diwujudkan dalam pengembangan kemampuan siswa membaca al Qur'an, siswa yang mau menjalankan sholat lima waktu, siswa yang peduli terhadap orang lain terutama bagi mereka (siswa) yang tidak mampu dengan memberikan bantuan kepada mereka.

Kalau kita melihat materi pelajaran di madrasah, di sana diajarkan beberapa mata pelajaran seperti al Quran-Hadits, Aqidah-Akhlak, Fiqh dan Sejarah Islam. Untuk materi pelajaran agama di kelas, dari keseluruhan jam pelajaran, setelah

madrasah disamakan dengan sekolah umum jumlah jamnya menjadi 4 jam pelajaran. MP untuk pelajaran agama memberikan tambahan yaitu dari keseluruhanjam yaitu 36 jam untuk kelas I dan II, pelajaran agama diberikan sebanyak 8 jam pelajaran. Sedangkan untuk kelas III sampai dengan kelas VI dari total jam pelajaran sebanyak 40 jam, pelajaran agama sebanyak 9 jam.<sup>43</sup>

Pendidikan agama juga diberikan dalam bentuk pendekatan *hidden curriculum*, yaitu dengan cara selama 10-15 menit pada awal mata pelajaran pertama setiap hari, siswa diminta hafalan doa-doa, surat-surat al Quran yang pendek, pembacaan surat-surat al Qur'an yang panjang maksimal 5 ayat dan *tausiah* akhlak. Selain itu, MP juga membawakan buku monitoring ibadah sebagai pendukung pembelajaran agama. Buku ini mempunyai fungsi untuk pembiasaan sholat lima waktu untuk siswa, bacaan al Qur'an, sholat Tarawih pada bulanpuasa ramadhan, Kegiatan mengikuti ceramah keagamaan singkat (Kultum). Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dikemas dalam kegiatan keagamaan yang sesuai dengan tema momentum PHBI yang diperingati.<sup>44</sup>

Secara umum dapat disebutkan MP telah melakukan beberapa usaha dalam penguatan pendidikan agama dalam rangka mewujudkan misi menjadi madrasah yang lebih dari madrasah lainnya. Pendidikan agama di MP ditempuh dengan berbagai cara, yaitu: 1) pemberian materi pelajaran agama, 2) pendekatan *hidden curriculum*, 3) pemberian buku monitoring ibadah, dan 4) kegiatan khusus terkait dengan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Pembelajaran agama di MP merupakan usaha mengembangkan misi pembentukan akhlakul karimah (akhlak

---

<sup>43</sup> Kalau Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merekomendasikan untuk kelas I dan II di tingkat sekolah dasar sebanyak 29-32 jam, MP mengembangkannya menjadi 34 jam. Sedangkan untuk kelas III - VI BNSP menetapkan 34 jam, MP mengembangkannya menjadi 40 jam pelajaran.

<sup>44</sup> Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan ini adalah kemampuan membaca al Qur'an. Untuk itu di luar jam pelajaran, untuk kelas II - VI bagi mereka yang dianggap lambat dalam membaca al Qur'an diwajibkan mengikuti kegiatanles membaca al Qur'an.

mulia). Misi akhlakul karimah menjadi landasan MP dalam memberikan pelajaran agama di sekolah.

*Nilai lebih yang ingin diberikan MP adalah kurikulum yang diperbarui, dalam pembelajaran setiap pelajaran dimunculkan warna dan spirit keagamaan (Islam), dan outputnya lebih mengedepankan sikap keberagamaan dari pada berhenti pada penguasaan teori-teori ilmu agama saja. (Myd, 2009)*

Satu warna khas lagi yang ingin diberikan MP kepada peserta adalah dalam warna keberagamaan. Warna keberagamaan yang dimaksud di sini adalah warna keberagamaan yang lebih pada warna 'agama yang dihayati' dari pada pembelajaran agama yang berorientasi pada praktek dan pengamalan ritus-ritus bernuansa agama semata. Diakui oleh pihak sekolah, bahwa pembelajaran sub-sub materi agama tertentu justru dikurangi untuk menekankan pembelajaran agama di aspek lain. Seperti nampak dalam pengakuan berikut ini:

... dulu dalam pelajaran al Qur'an ditekankan pada usaha agar murid mengetahui ilmu *makhorijal huruf*, yaitu ilmu yang mempelajari tempat keluarnya huruf-huruf arab sehingga anak bisa fasih dalam membaca al Qur'an. Sekarang pelajaran itu dihilangkan dengan alasan bahwa yang lebih diutamakan adalah anak bisa membaca al Qur'an dan mau membiasakannya. Anak tidak merasa bertele-tele hanya untuk bisa membaca al Qur'an. Harapannya dengan beban yang ringan mereka berani membaca al Qur'an dan membiasakannya di rumah....<sup>45</sup>

Inovasi pembelajaran dilakukan untuk lebih memberikan kesan bahwa belajar agama adalah bukan sesuatu hal yang memberatkan, namun sesuatu yang mudah dan menyenangkan. Keberhasilan MP membuat inovasi pembelajaran merupakan satu hal yang mampu menggaet masyarakat perkotaan yang cenderung praktis. Namun di sisi lain, beberapa inovasi pembelajaran agama yang

<sup>45</sup>Wawancara dengan Myd, Kepala MP tingkat Ibtidaiyah, tanggal 15 Januari 2009

dilakukan MP dikritik oleh beberapa pemerhati pendidikan. Adapun penilaian sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa pembelajaran agama di MP justru mulai menurun. Pelajaran agama tidak lagi sebagaimana diharapkan para orang tua dulu. Ini diakui sebagian orang, bahwa beberapa orang tua yang dulu menyekolahkan anaknya ke MP, sebagian tidak lagi memilih MP dan berpindah ke madrasah lain yang menurut mereka lebih menjanjikan dalam pelajaran agamanya.

Menghadapi realitas itu, pihak MP mempunyai jawaban bahwa mereka sekarang dalam memberikan pelajaran agama lebih mengutamakan lahirnya sikap keberagamaan pada anak daripada hanya sekedar mengenalkan teori-teori ilmu agama. Bagi pihak madrasah, seperti dinyatakan oleh Kepala Madrasah, penghayatan keagamaan lebih penting dalam menghadapkan anak pada tantangan budaya ke depan."... *output pembelajaran agama yang diinginkan adalah anak mampu dan menghayati keberagamaan, anak yang bisa membaca al Qur'an dan mentradisikannya, anak bisa sholat dan mentradisikannya, sikap religiusitas siswa dapat dirasakan oleh wali siswa.* (Myd, 2009)<sup>46</sup>

Selain pembelajaran agama yang lebih dihayati, warna tertentu yang ingin ditekankan adalah kemauan siswa untuk mengamalkan atau mentradisikannya. Usaha ini dilakukan dengan cara setiap siswa madrasah diberikan buku monitoring ibadah. Buku ini digunakan untuk mencatat aktivitas keagamaan siswa selama di luar madrasah. Seperti aktivitas sholat lima waktu, membaca membaca kitab suci, aktivitas puasa, aktivitas mengikuti pelajaran agama dan sebagainya.

Termasuk salah satu nilai keberagamaan yang ingin ditanamkan adalah nilai kepedulian sosial.<sup>47</sup> MP mempunyai beberapa program untuk itu misalnya setiap

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Myd, Kepala MI Pembangunan, tanggal 15 Januari 2009

<sup>47</sup> Menurut Denis Lawton dan Robert Cowen (2001) yang telah membuat periodisasi sejarah kecenderungan pendidikan. Menyadari dampak dari teknologi informasi yang telah melahirkan

hari anak dipersilahkan untuk memasukan tabungan amal. Uang yang terkumpul nantinya akan disalurkan pada pemberian bantuan pendidikan bagi mereka yang tidak mampu. Kegiatan ini sangat membantu anak-anak di sekitar madrasah yang tidak mampu, karena biaya pendidikannya dibantu oleh bantuan pendidikan oleh anak-anak MP. Penerima bantuan ini tidak saja anak-anak yang tidak mampu yang bersekolah di Madrasah Pembangunan, tetapi juga anak-anak yang tidak mampu yang bersekolah di luar Madrasah Pembangunan. Pemberian bantuan nantinya diserahkan secara simbolis oleh perwakilan anak-anak MP terhadap anak-anak penerima bantuan pada salah satu kegiatan upacara sekolah. <sup>48</sup>

**Surat Dari Seorang Murid Madrasah Pembangunan  
Untuk Solidaritas Palestina**

15 Jan 2009

Ass....

*Pa.... saya ingin memberikan suatu permintaan kepada Bapak...*

*Bapak tahukan apa yang terjadi di Gaza, Palestina sekarang?*

*Nyawa-nyawa orang-orang di sana berjatuh dan yang paling banyak adalah anak-anak seumuran saya!*

*Saya ingin .... Tragedi itu berakhir! Memang saya tidak bisa melakukan apa-apa selain do'a*

*Dan mungkin kekuatan do'a saya tidak cukup...!*

*Jadi permintaan saya adalah bapak, guru2, dan semua murid MP UIN bersama-sama berkumpul dan berdo'a supaya nyawa mereka yang sudah tiada di terima Allah swt. Dan selamatkan mereka yang masih ada di dunia ini dan berdo'a supaya tragedi ini cepat berakhir.*

Wass....

Salah satu Murid MI

Kelas 6

fenomena globalisasi, maka lembaga pendidikan dalam konteks ini lebih dituntut untuk mengembangkan nilai-nilai baru yang lebih humanis seperti munculnya kesadaran baru untuk mengembangkan moral bersama seperti 'inklusivitas', 'pluralisme', 'multikulturalisme, dan 'kesamaan kesempatan.'

<sup>48</sup> Ada dua hal yang dihasilkan dari kegiatan itu. Selain melahirkan sikap dermawan, juga kegiatan tersebut mengangkat prestise MP di depan sekolah yang lain. Wawancara dengan Myd, Kepala Madrasah, pada 15 Januari 2009

Sikap peduli terhadap sesama itu penting dalam melahirkan sikap keberagamaan siswa. Kadang-kadang dari pendidikan semacam itu melahirkan sikap-sikap yang tidak terduga seperti kejadian berikut. Pagi itu saya disodori oleh Kepala Madrasah sebuah surat yang tidak terduga datangnya. Inisiatif seorang siswa yang mengajak warga MP untuk mendoakan sebagian warga dunia yang menderita di Gaza Palestina. Bunyi surat itu seperti tergambar di atas.

Dari beberapa praktek pembelajaran agama di Madrasah Pembangunan, lembaga ini ingin menciptakan bahwa agama menjadi modal penting dalam membangun karakter siswa menghadapi globalisasi. Untuk memahami nilai agama sebagai materi pelajaran yang penting dalam menghadapi globalisasi, MP melakukan beberapa inovasi penting dalam praktek pendidikan seperti mengembangkan pembelajaran agama melalui penambahan jam pelajaran agama, pengembangan pembelajaran melalui *hidden curriculum*, yaitu pengembangan sikap keberagamaan dengan mengembangkan kurikulum tersembunyi dengan mensiasati waktu pembelajaran yang ada, termasuk penekanan nilai agama melalui pengembangan nilai inti (*core values*) sebagai dasar pendidikan karakter.

#### **E. Implikasi Identitas Madrasah dalam Peta Pendidikan di Indonesia**

Dengan melihat realitas madrasah, peneliti berkesimpulan bahwa kehadiran dan keberadaan madrasah dengan identitasnya telah memberi warna corak atau jenis lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Keberadaan lembaga pendidikan madrasah di Indonesia dengan kekhasan (identitas)-nya, mendorong peneliti untuk membuat tipologi corak pendidikan formal yang ada di tanah air terkait dengan warna pendidikan keagamaannya. Warna keagamaan di sini ditentukan dengan tingkat frekwensi atau volume pembelajaran agama dan warna keagamaan yang mungkin dihasilkan.

Peneliti berkesimpulan resistensi madrasah dengan identitasnya yang bertahan kekhasan dalam pembelajaran agama telah melahirkan adanya kontestasi antar tiga jenis lembaga pendidikan, yaitu Madrasah, Sekolah Umum, dan Sekolah Umum Islam. *Pertama*, Madrasah adalah lembaga pendidikan yang memberikan porsi lebih dalam pembelajaran agama bila dibandingkan dengan sekolah umum. Bila di sekolah umum pelajaran agama diberikan 2 jam, maka di madrasah pelajaran agama dialokasikan dengan jumlah jam yang lebih dan materi pelajaran agama yang lebih banyak. Materi agama dibagi dalam empat mata pelajaran, yaitu al Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Ibadah Syariah dan Sejarah Islam. *Kedua*, Sekolah Umum adalah sekolah formal umum yang memberikan porsi pelajaran agama sesuai yang distandarkan oleh Negara, yaitu 2 jam dalam seminggu dengan materi agama yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan penerimaan siswa dengan plafon waktu yang ada. Sebutan ini sekolah pada umumnya (SD, SMP dan SMA). *Ketiga*, sekolah umum Islam adalah sekolah umum yang karena berlatar belakang kelompok keagamaan tertentu seperti sekolah Muhammadiyah, Sekolah Islam Terpadu, lembaga-lembaga pendidikan jenis ini memberikan porsi keagamaan lebih dari sekolah umum (biasa) dan selanjutnya materi pembelajaran agama disesuaikan dengan kelompok keagamaan yang menggagas lembaga pendidikan tertentu.<sup>49</sup>

Nama jenis lembaga pendidikan yang bernama 'madrasah' yang berdiri berdampingan dengan 'sekolah' sebagai institusi yang sama-sama pelaksana pendidikan formal di Indonesia. Muncul pertanyaan, apa yang membedakan madrasah dengan sekolah?. Dari penelitian ini tergambar bahwa kehadiran madrasah dengan identitas yang dimilikinya telah memperkaya jenis-jenis

---

<sup>49</sup> Sekolah Umum Islam adalah sebutan untuk sekolah umum (SD, SMP dan SMA) yang didirikan oleh kelompok keagamaan tertentu seperti Muhammadiyah, NU, Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT)

lembaga pendidikan dalam peta pendidikan di Indonesia. Salah satu karakter madrasah seperti yang telah dibahas adalah perhatian madrasah yang lebih terhadap materi pembelajaran agama. Dibandingkan dengan sekolah umum, jam pelajaran pendidikan agama di madrasah bisa dipastikan lebih banyak dibandingkan dengan sekolah umum.

Tabel 12  
Peta Jenis Lembaga Pendidikan  
Berdasarkan Corak Pembelajaran Agama

Aspek	Madrasah	Sekolah Umum	Sekolah Umum Islam
Jam Pelajaran Agama/minggu	8 jam/minggu	2 jam/minggu	2 jam/minggu
Jumlah Mata Pelajaran	4	1	1
Nama Pelajaran Pendidikan Agama	1. Al Qur'an Hadits 2. Aqidah Akhlak 3. Ibadah Syariah 4. Sejarah Islam	Pendidikan Agama Islam (PAI)	Pendidikan Agama Islam (PAI)
Pelajaran Pendukung	Bahasa Arab Membaca al Quran	Tergantung kemauan dan ketersediaan guru PAI	Materi Keagamaan sesuai dengan kepentingan dan paham ormas keagamaan (Seperti Muhammadiyah, Ke NU an)

Di lain pihak, ada juga pihak-pihak tertentu dari masyarakat yang mengatasnamakan komunitas muslim dari masyarakat Indonesia yang belum puas dengan keberadaan madrasah dan berinisiatif untuk mendirikan sekolah umum dengan memberi muatan lebih pada materi agama sehingga sering dikategorikan sebagai sekolah umum Islam. Fenomena keberadaan Sekolah Muhammadiyah, Sekolah-sekolah yang tergabung dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT). Bila masing-masing mengembangkan pembelajaran agama dengan

karakter, ideologi dan warna keagamaan masing-masing kelompok keagamaan, dengan tingkat intensitas pembelajaran agama yang berbeda, maka bisa diprediksikan bahwa masing-masing jenis pendidikan ini berpeluang mempunyai corak pendidikan yang mungkin berbeda.

Catatan saya mengamati beberapa lembaga pendidikan dengan latar belakang ideologi keagamaan tertentu seperti sekolah Muhammadiyah, Sekolah Islam Terpadu, Sekolah NU mempunyai tekanan yang berbeda dalam mengajarkan agama. Pada sekolah Islam terpadu mengajarkan pendidikan agama secara lebih ketat seperti anak-anak perempuan sejak kecil sudah diajarkan menggunakan busana jilbab yang dihukumi wajib. Sedangkan di sekolah Muhammadiyah cenderung mengajarkan agama secara lebih longgar di mana busana jilbab tidak diwajibkan di sekolah, sekalipun untuk penggunaannya dianjurkan.

Demikian juga perbedaan jenis lembaga pendidikan juga memberikan pengaruh terhadap pemberian materi pelajaran agama. Dalam rangka analisa meluas, saya sempat mengkonfirmasi asumsi ini dengan Madrasah Asih Putera di Cimahi Jawa Barat. Madrasah ini sebelumnya adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), namun dalam perjalanannya merubah jenis pendidikan menjadi madrasah. Sewaktu menjadi SDIT, pelajaran agama cenderung doctrinal. Materi agama cenderung seragam. Namun, ketika lembaga pendidikan ini menjadi madrasah, pelajaran agama lebih longgar, namun lebih bervariasi. Kecenderungan pendidikan agama pada madrasah cenderung variatif dan moderat.<sup>50</sup>

Banyaknya pembelajaran agama di madrasah memunculkan anggapan sebagian orang bahwa madrasah menjadi tidak mampu bersaing dengan sekolah umum, karena pelajaran agama terlalu banyak. Karena pelajaran agama banyak,

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Ddg, Guru Madrasah Asih Putera Cimahi Jawa Barat, pada 5 Maret 2010

maka diduga memori anak terbatas untuk menguasai ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum sekaligus. Pemikiran seperti ini barangkali juga banyak menjangkiti sebagian masyarakat yang kemudian mereka lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah umum daripada sekolah di madrasah. Asumsi ini bisa jadi benar, namun bisa jadi juga salah. MP mencoba membuktikan bahwa asumsi itu tidak benar. Madrasah menyusun strategi tersendiri dalam menanamkan nilai-nilai keberagaman pada siswanya. Ketika minat masyarakat urban meningkat untuk menyekolahkan anaknya ke madrasah dengan harapan mendapatkan pendidikan agama yang cukup, maka selain madrasah menjalankan amanat orang tua tersebut, MP juga menggenjot kualitas pada pelajaran-pelajaran non agama.

Kekuatan-kekuatan lain di sekitar yang menjadi rival Madrasah dalam mengembangkan pendidikan atau pembelajaran agama adalah kehadiran sekolah-sekolah umum Islam seperti Sekolah Muhammadiyah, Sekolah Islam Terpadu, dan sekolah-sekolah yang didirikan oleh yayasan-yayasan Islam. Untuk MP sendiri, di sekitarnya saat ini banyak hadir sekolah-sekolah umum Islam itu yang sama-sama menjaring anak-anak usia sekolah di daerah Ciputat. Mereka berkompetisi dengan masing-masing inovasi untuk menjadi pilihan sekolah bagi anak-anak usia sekolah dasar.<sup>51</sup>

Model pendidikan agama di madrasah melahirkan warna keagamaan tertentu pada siswa. Warna keagamaan yang dimaksud adalah pemahaman agama dengan tingkat intensitas tertentu, dan memiliki warna kebangsaan. Intensitas keagamaan merupakan implikasi dari ciri khas madrasah yang memang mengajarkan pelajaran agama dalam porsi lebih, sedang warna kebangsaan muncul karena kurikulum disusun oleh bagian dari Negara dalam hal ini Kementerian

---

<sup>51</sup>Lembaga pendidikan Asy Syukro di Pamulang ( $\pm$  5 Km dari MP), Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Hikmah di Gaplek ( $\pm$ 3 Km), Sekolah Islam al Fath di Cireundeu Pondok Cabe (+ 5 Km), Sekolah Islam Muhammadiyah Setia Budi Pamulang ( $\pm$  5 Km). Masing-masing mengatasnamakan lembaga pendidikan Islam, dan berusaha menjadi lembaga pendidikan alternative di wilayah itu.

Agama. Warna keagamaan seperti itulah yang melahirkan siswa yang berkepribadian tertentu seperti jarang atau hampir tidak terjadi perkelahan antar pelajar terjadi di madrasah, di samping itu warna keagamaan yang radikal/ekstrim jarang terjadi di madrasah.

Tabel 13.  
Perbandingan Jenis Lembaga Pendidikan  
Dari Sisi Penyelenggaraan dan Warna Paham Keagamaan

Aspek	Sekolah Umum	Sekolah Umum Islam	Madrasah
Pembina	Depdiknas/Negara	Swasta	Mayoritas oleh swasta, Sedikit oleh Negara
Penyelenggara	Pegawai Negeri Yayasan Swasta	Ormas Keagamaan seperti: Muhammadiyah, NU, Persis, Kelompok berafiliasi keagamaan tertentu (Seperti Jaringan Sekolah Islam Terpadu/JSIT)	91,5 % swasta 8,5 % Negara
Kecenderungan Warna ideology/ Keagamaan	Sekuler/tidak berafiliasi ke identitas keagamaan	Bervariasi dari warna keagamaan yang toleran s/d puritan	Religius Toleran (kurikulum disusun oleh Kementerian Agama)

Warna keagamaan yang dihasilkan dari madrasah ini, menurut penulis bisa diperbandingkan dengan jenis pendidikan formal yang lain.<sup>52</sup> Untuk kepentingan analisis ini, saya mengelompokkan jenis pendidikan di Indonesia dalam tiga kelompok, yaitu: (1) Sekolah Umum yang dikelola oleh Depdiknas; (2) Madrasah

<sup>52</sup>Secara makro, pendidikan di Indonesia dilaksanakan oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional yang membina Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi Umum. Sedangkan Kementerian Agama membina Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Perguruan Tinggi Agama Negeri seperti Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

yang dikelola oleh Kementerian Agama dan Swasta; (3) Sekolah Umum Islam yang kebanyakan dikelola swasta di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa selain Negara, penyelenggara pendidikan di Indonesia juga dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat secara mandiri. Lebih luas di masyarakat, terdapat banyak kelompok masyarakat dengan berbagai latar belakang yang terlibat dalam dunia pendidikan seperti kelompok masyarakat dengan basis ideologis tertentu contohnya Taman Siswa dari kelompok nasionalis; kelompok masyarakat dengan basis keagamaan seperti sekolah Islam, sekolah Katholik, sekolah Kristen; dapat juga kelompok masyarakat keagamaan yang telah membentuk organisasi keagamaan tertentu seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Jaringan Sekolah Islam terpadu (JSIT). Kelompok-kelompok itu berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan formal seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan ada yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Eksistensi madrasah, sekolah umum dan sekolah umum Islam ini dalam praktek pendidikan di masyarakat telah melahirkan tiga warna output (lulusan), walaupun penyimpulan ini tidak mutlak dan perlu penelitian lebih lanjut. Dari perspektif kecenderungan warna keagamaan lulusan, peneliti memetakan ada tiga potensi, yaitu: Pertama, sekolah umum adalah sekolah yang mayoritas diselenggarakan oleh Negara dan sebagian kecil dilaksanakan oleh masyarakat yang lebih cenderung netral dari warna keagamaan tertentu. Karena netral ada potensi warna keagamaan yang cenderung sekular, atau bahkan liberal. Kedua, sekolah umum berlatar belakang agama tertentu adalah sekolah umum yang diselenggarakan oleh yayasan-yayasan swasta dari komunitas agama seperti Islam, termasuk juga lembaga pendidikan yang disponsori oleh penganut Katholik, Kristen, Hindu dan Buddha. Output keagamaan dari lembaga

pendidikan jenis ini membentang dari kemungkinan warna moderat hingga ke warna puritan. Hal ini sangat ditentukan oleh warna yang diberikan kelompok keagamaan yang menjadi penggagasnya. *Ketiga*, madrasah adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan mayoritas oleh masyarakat dan sebagian kecil diselenggarakan oleh negara, menurut peneliti, madrasah cenderung mengajarkan paham moderat karena selain madrasah didirikan dari berbagai latar belakang kelompok keagamaan dalam umat Islam, juga karena kurikulum madrasah dibina oleh Kementerian Agama.



## BAB VII

### GLOBALISASI PENDIDIKAN: SEBUAH PELUANG

*"Where there is power, there is resistance"*

(Foucault dalam *The History of sexuality*, 1978: 95-96).

Satu kekuatan yang paling berpengaruh dalam globalisasi adalah teknologi informasi.<sup>1</sup> Semakin canggih dan bervariasinya teknologi informasi, masyarakat semakin dibanjiri oleh beragamnya informasi yang memberikan banyak pilihan terhadap barang atau jasa. Disadari bahwa globalisasi membawa implikasi serius tertentu pada dunia pendidikan, seperti terbukanya akses informasi selebar-lebarnya kepada siswa. Globalisasi informasi melahirkan pengaruh-pengaruh dan nilai-nilai yang tidak semuanya sejalan dan positif dengan pengembangan kepribadian siswa. Namun dibalik kemungkinan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan, kajian ini menunjukkan bahwa globalisasi pendidikan dapat juga dijadikan sebagai sebuah peluang untuk menguatkan satuan pendidikan. Bagaimana globalisasi pendidikan dapat ditangkap sebagai salah satu peluang untuk mengembangkan satuan pendidikan bernama madrasah?

Dalam mencoba menangkap globalisasi sebagai sebuah peluang, Madrasah Pembangunan mencoba melakukan reproduksi identitas 'madrasah' yang dilanjutkan dengan beberapa usaha pembentukan image (*image building*) terhadap lembaga madrasah. Ternyata usaha ini tidak sia-sia atau berhasil menjadikan Madrasah Pembangunan keluar dari gambaran madrasah yang

---

<sup>1</sup> Castells (2000) menyebutkan globalisasi muncul sebagai jaringan yang merupakan perpaduan antara relasi sosial dan teknologi informasi. Implikasi dari menguatnya globalisasi akan memunculkan kekuatan lain dari kesadaran manusia untuk menemukan kembali 'self' atau identitas mereka.

serba terbats, bahkan sampai saat ini Madrasah Pembangunan dipercaya dan diminati masyarakat di Jakarta dan sekitarnya dan berhasil menjadi madrasah unggulan.

### **A. Gagasan Madrasah Unggul**

Saat ini gambaran atau citra madrasah di Indonesia ini masih dipenuhi stereotipe-stereotipe tertentu yang kadang memposisikan madrasah sebagai lembaga pendidikan marginal dari sistem pendidikan nasional yang ada. Stereotipe seperti madrasah dianggap sebagai pendidikan kelas dua. Madrasah dianggap lembaga pendidikan yang tertinggal karena terlalu banyak mengajarkan pendidikan agama sehingga mata pelajaran umum agak tertinggal. Madrasah digambarkan sebagai lembaga pendidikan yang muridnya lebih banyak perempuan, lembaga pendidikan yang hanya kuat di daerah pedesaan, lembaga pendidikan yang didukung oleh masyarakat kelas ekonomi bawah.

Adanya beberapa stereotipe mengenai madrasah itu nampaknya hadir selain karena bentuk awal madrasah itu sendiri yang memang sejak awalnya muncul dari tradisi pendidikan Islam, stereotipe itu juga lahir karena produk sejarah yang panjang yang tidak menguntungkan atau bahkan sebuah kesengajaan untuk memarginalkan madrasah seperti yang terjadi pada zaman kolonial dan masa awal kemerdekaan. Pada zaman kolonial madrasah dianggap sebagai lembaga pendidikan partikelir yang liar dan perlu diawasi, sementara pada zaman awal kemerdekaan RI madrasah dianggap sebagai lembaga pendidikan di masyarakat yang sudah berjalan dan Negara mengambil posisi membiarkan atau tidak membina secara langsung lembaga pendidikan ini.<sup>2</sup>

Akibat dari beberapa stereotipe dan bentuk perlakuan oleh pemerintah baik kolonial dan pemerintah Indonesia setelah merdeka, hingga saat ini

---

<sup>2</sup> Abdurahman Saleh (2004) berpandangan cikal bakal lembaga pendidikan di Indonesia yang diciptakan oleh masyarakat Indonesia sendiri justru adalah lembaga pendidikan madrasah. Berbeda dengan sekolah yang pada tahap awal diperkenalkan oleh pemerintah kolonial.

masyarakat madrasah masih mengalami beberapa perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif. Bentuk diskriminatif yang mencolok dan masih terasa hingga hingga saat ini adalah adanya pemberlakuan yang tidak sama antara sekolah umum dengan lembaga madrasah yang dipertontonkan oleh pemerintah daerah. Masih banyak pemerintah daerah yang memberlakukan secara berbeda antara madrasah dengan sekolah. Padahal sebenarnya dalam UU No. 20 Tahun 2003 madrasah sudah dianggap sederajat atau dalam posisi yang sama dengan sekolah umum, namun dalam praktek di lapangan perlakuan yang tidak adil itu masih sangat dirasakan. Contoh paling nyata adalah kesejahteraan guru-guru madrasah di banyak daerah kalah jauh bila dibandingkan dengan guru-guru sekolah umum.<sup>3</sup>

Berangkat dari latar belakang kondisi madrasah secara umum yang demikian, saat ini muncul beberapa madrasah unggul di perkotaan yang mampu menjangkau masyarakat kelas ekonomi menengah. Salah satunya adalah Madrasah Pembangunan di Ciputat Tangerang yang mencoba bangkit dan melawan semua stereotipe itu dengan mempertegas identitasnya, yaitu dengan mencoba tetap menggunakan kata madrasah sebagai jenis pendidikan dan membuktikan diri menjadi lembaga pendidikan yang bermutu dan berdaya saing (unggul). Keinginan itu ternyata berhasil diwujudkan oleh Madrasah Pembangunan Ciputat Tangerang Selatan. Saat ini Madrasah Pembangunan merupakan salah satu madrasah swasta yang berhasil di Ibukota RI, Jakarta dengan jumlah siswa untuk tingkat dasar (tingkat SD) saja mencapai lebih dari 1.700 siswa. Lembaga ini juga berhasil menggaet siswa dari kelas ekonomi

---

<sup>3</sup> Salah satu usaha untuk membuat perlakuan yang sama antara sekolah umum dengan madrasah memang telah mulai diupayakan seperti adanya Bantuan Operasional Siswa (BOS) yaitu pemberian unit cost pendidikan untuk setiap siswa dalam jumlah yang sama. Namun pemberian BOS saja belum cukup karena dalam penyelenggaraan pendidikan masih banyak persoalan yang perlu perhatian lebih.

masyarakat menengah, karena untuk menjadi siswa di madrasah tersebut orang tua harus membayar uang masuk dengan jumlah 10 juta. <sup>4</sup>

## **B. Madrasah dan Identitas**

Salah satu penggerak munculnya madrasah unggul adalah kesadaran identitas dari praktisi madrasah. Madrasah di Indonesia adalah sebuah fenomena identitas lembaga pendidikan yang semula berdiri dengan latar belakang sejarah pendidikan keagamaan di satu sisi dan realitas pendidikan modern yang disponsori negara di sisi yang lain. Terkait dengan latar belakang pendidikan keagamaan, madrasah berkembang seiring perkembangan sejarah Islam di Indonesia. Sekalipun secara istilah nama madrasah diambil dari bahasa Timur Tengah (Bahasa Arab) yang berarti 'sekolah', madrasah memikul kewajiban sejarah sebagai lembaga pendidikan yang memberikan porsi pembelajaran agama dengan porsi yang lebih bila dibandingkan dengan 'sekolah'. Terkait dengan realitas pendidikan modern yang disponsori Negara, madrasah dihadapkan dengan sistem pendidikan nasional di mana madrasah sebagai bagian dari sistem itu harus menyesuaikan dengan sistem dimaksud. Dari sisi bentuknya, lembaga madrasah di Indonesia mempunyai nuansa khas yang merupakan produk dialogis antara sejarah pendidikan Islam, kultur masyarakat Indonesia, kebudayaan loka, sistem pendidikan nasional dan berikutnya terhadap globalisasi pendidikan.

Dengan diakuinya madrasah sebagai bagian sistem pendidikan nasional melalui Undang-undang No. 20 tahun 2003, maka madrasah di Indonesia telah

---

<sup>4</sup> Sebagai catatan, menurut peneliti kesuksesan Madrasah Pembangunan menjadi lembaga pendidikan yang diunggulkan dan diminati masyarakat ini bisa terjadi justru karena semangat perlawanan terhadap semua bentuk stereotipe dan diskriminasi yang tidak menguntungkan dunia madrasah. Kajian semangat resistensi ini menjadi menarik, tidak hanya bagaimana madrasah harus melakukan reposisi dalam konteks masyarakat dan pemerintahan Indonesia, tetapi juga karena madrasah ini juga mencoba melakukan resistensi tingkat tertentu dalam perspektif globalisasi.

menjadi lembaga pendidikan yang berdiri sejajar dengan sekolah, sama-sama menjalankan fungsi sebagai lembaga pendidikan formal. Madrasah telah menjadi sekolah umum, sekalipun praktiknya tetap bertahan menggunakan nama madrasah sebagai identitas jenis lembaga pendidikan. Simbol 'madrasah' ketika nama itu dipertahankan berarti mempunyai makna tersendiri.<sup>5</sup> Sejarah madrasah yang lekat dengan sejarah perkembangan sebuah agama dalam hal ini agama Islam dan kesan awal yang terbangun mengenai madrasah lebih banyak dipahami sebagai tempat-tempat mempelajari agama, merupakan fenomena simbolis dan mengandung proses konstruksi identitas tertentu.<sup>6</sup>

Sebagai simbol identitas, sebutan 'madrasah' walaupun terkadang masih terkesan tumpang tindih dipahami masyarakat yaitu antara istilah perundangan di Indonesia dan sebutan madrasah yang hidup di masyarakat. Istilah Madrasah dalam UU sisdiknas No. 20 tahun 2003 dialamatkan kepada madrasah pelaksana pendidikan formal, sementara di masyarakat selain memahami madrasah sebagai pendidikan formal, masih ada yang mencampuradukkan dengan sebutan 'madrasah diniyah.'<sup>7</sup> Tumpang tindik itu akhirnya teratasi dengan kehadiran UU Sisdiknas No. 20/2003 yang menegaskan bahwa kata madrasah hanya dikhususkan kepada lembaga pendidikan formal yang sama kedudukannya dan dengan jenjang pendidikan yang selama ini dikenal sebagai sekolah. Madrasah Ibtidaiyah (MI) sederajat dengan Sekolah Dasar (SD),

---

<sup>5</sup> Kata 'madrasah' berasal dari bahasa Arab yang artinya 'sekolah'. Ini menunjukkan bahwa dari asal bahasa sebenarnya arti madrasah dengan sekolah itu adalah sama, yaitu sama-sama tempat belajar/sekolah.

<sup>6</sup> Sampai sekarang, masih banyak masyarakat Indonesia yang memahami madrasah hanya sebagai sekolah agama.

<sup>7</sup> Melalui PP No. 55 tahun 2007 akhirnya ditegaskan bahwa madrasah diniyah diganti sebutannya menjadi 'pendidikan diniyah' untuk membedakan dengan 'madrasah'. Pendidikan diniyah dikhususkan untuk lembaga pendidikan keagamaan yang bisa diselenggarakan secara formal, non formal, dan/atau informal. Lembaga pendidikan ini dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak. Untuk yang berjenjang terdiri dari pendidikan *diniyah awaliyah* (tingkat dasar), pendidikan *diniyah wustho* (tingkat menengah) dan pendidikan *diniyah 'ulya* (tingkat tinggi).

Madrasah Tsanawiyah (MTs) sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Aliyah (MA) sederajat dengan Sekolah Menengah Umum (SMU).<sup>8</sup>

Keberadaan madrasah di Indonesia telah mengalami proses panjang, yaitu sejak zaman kolonial di mana belum ada pendidikan formal di kepulauan nusantara, karena belum merdeka, kecuali jenis pendidikan yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial, hingga saat ini di mana pendidikan madrasah telah diakui sebagai lembaga pendidikan formal di Indonesia yang tetap diperbolehkan menggunakan nama 'madrasah' berdampingan dengan sekolah umum. Penggunaan nama 'madrasah' sebagai nama jenis lembaga pendidikan menunjukkan bahwa lembaga ini mempunyai karakteristik tertentu dan dinamika tertentu berdasarkan setting yang dimiliki lembaga ini.

Sekalipun madrasah dalam konteks nasional telah berproses dan beradaptasi dalam Sistem Pendidikan Nasional RI dan telah menjadi lembaga pendidikan umum, persoalan identitas nampaknya menjadi warna tersendiri dari lembaga pendidikan madrasah. Pasca berhasilnya integrasi madrasah secara penuh dalam sistem pendidikan nasional yang berpuncak pada lahirnya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 yang mengakui posisi sama antara madrasah dan sekolah sebagai sekolah umum, menurut peneliti ada dua permasalahan yang dihadapi oleh para praktisi madrasah dari eksternal dan internal. *Pertama*, dari sisi eksternal, madrasah masih mendapatkan bias diskriminasi yang dihasilkan dari interpretasi birokrasi yang terimplementasi dari beberapa perlakuan yang

---

<sup>8</sup> UU Sisdiknas No. 20/2003 Pasal 17 ayat (2) berbunyi 7: "Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat." Dan Pasal 18 ayat 3 berbunyi: " Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat."

dirasakan oleh praktisi madrasah.<sup>9</sup> *Kedua*, dari sisi internal, kalau memang madrasah dan sekolah sudah dianggap sama sebagai pendidikan umum, kenapa lembaga ini tetap bernama madrasah? Apa yang menjadi karakteristik madrasah, sehingga harus bertahan dengan nama atau identitas tersebut. Kedua situasi inilah, menurut saya, yang memunculkan semangat di kalangan praktisi madrasah untuk memperjelas kembali ciri atau karakteristik lembaga ini. Kedua titik inilah yang memunculkan kembali kesadaran identitas di lingkungan madrasah.<sup>10</sup>

Menemukan kembali identitas dalam konteks globalisasi menjadi persoalan penting dan strategis bagi institusi pendidikan. Institusi pendidikan seperti madrasah mau tidak mau harus menghadapi dampak dari kemajuan teknologi informasi dan relasi sosial sebagai bagian dari proses globalisasi. Dalam proses konstruksi identitas, madrasah berada diantara dua pilihan yaitu mencoba melakukan reposisi dengan lebih menegaskan kembali sikap semula institusi sebagai lembaga pendidikan agama atau berkompromi dengan berbagai cara dalam melanjutkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang diakui dan diterima masyarakat modern.

Dari perspektif teori identitas, saya melihat bahwa penguatan identitas di madrasah adalah proses yang dikonstruksi (*constructed*) yang dipengaruhi oleh faktor sejarah dan sosial. Pada kasus Madrasah Pembangunan, Saya menyimpulkan adanya beberapa bentuk pemicu penguatan identitas di madrasah, yaitu diantaranya: 1) memilih jenis lembaga pendidikan 'madrasah'

---

<sup>9</sup> Dapat dicontohkan seperti edaran Menteri Dalam Negeri yang berimplikasi bahwa madrasah adalah instansi vertikal yang tidak berhak mendapatkan pembiayaan dari pemerintah daerah. Sayangnya interpretasi semacam itu diikuti oleh banyak daerah dalam perlakuannya terhadap madrasah.

<sup>10</sup> Manuel Castells (2000) menyebutkan dalam menghadapi globalisasi terdapat beberapa sumber konstruksi identitas diantaranya: Negara, agama dan konsumsi. Negara berkepentingan untuk membentuk kesatuan identitas kebangsaan bagi warganya, agama berkepentingan untuk menjalankan fungsinya sebagai alternative jalan keselamatan bagi umat manusia, dan konsumsi berkepentingan untuk mengikat konsumen terhadap sebuah produk tertentu.

sebagai arena pengabdian dalam dunia pendidikan; 2) implikasi pilihan jenis pendidikan bernama 'madrasah', Madrasah Pembangunan berusaha melakukan berbagai cara untuk menguatkan karakter kelembagaan untuk menjadikan lembaga pendidikan ini bermutu; 3) perlu tetap dipertahankan dan dikembangkannya pembelajaran agama yang merupakan ciri khas lembaga pendidikan madrasah dengan pendekatan yang lebih bervariasi, seperti penerapan *hidden curriculum*, ekstrakurikuler; 4) perlunya pengembangan warna keagamaan yang lebih menekankan pada pembentukan sikap perilaku keberagaman daripada sekedar hanya penguasaan secara hapalan materi-materi agama.

Globalisasi pendidikan, selain semakin mudahnya akses informasi bagi dunia pendidikan, namun di sisi lain globalisasi pendidikan juga memicu semakin ketatnya persaingan antar institusi, demikian juga persaingan antar individu. Globalisasi informasi yang mempengaruhi dunia pendidikan juga melapangkan kemungkinan pengaruh-pengaruh negatif bagi masyarakat pendidikan. Madrasah sebagai lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk watak, kepribadian peserta didik dalam konteks globalisasi pendidikan. Penguatan nilai-nilai keagamaan dalam porsi lebih yang sering dituduh sebagai penyebab tidak kompetitifnya madrasah tidak berarti madrasah anti dengan perubahan yang terjadi dan tidak bisa bersaing. Madrasah Pembangunan, obyek kajian ini membuktikan hal itu. Di samping itu, madrasah ternyata menyumbangkan pengembangan warna pendidikan keagamaan yang toleran, demokratis dan inklusif.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal yang diakui undang-undang tidak bisa lepas dari politik dan kepentingan-kepentingan yang mewarnainya. Kajian ini membuktikan bahwa lembaga pendidikan bernama 'madrasah' ini selain oleh pelaku pendidikan di dalamnya label 'madrasah'

dijadikan sebagai amanat kesejarahan, ternyata para pendukung pendidikan jenis ini menjadi 'madrasah' sebagai simbol politik identitas.

### C. Kontestasi Lembaga Pendidikan Madrasah

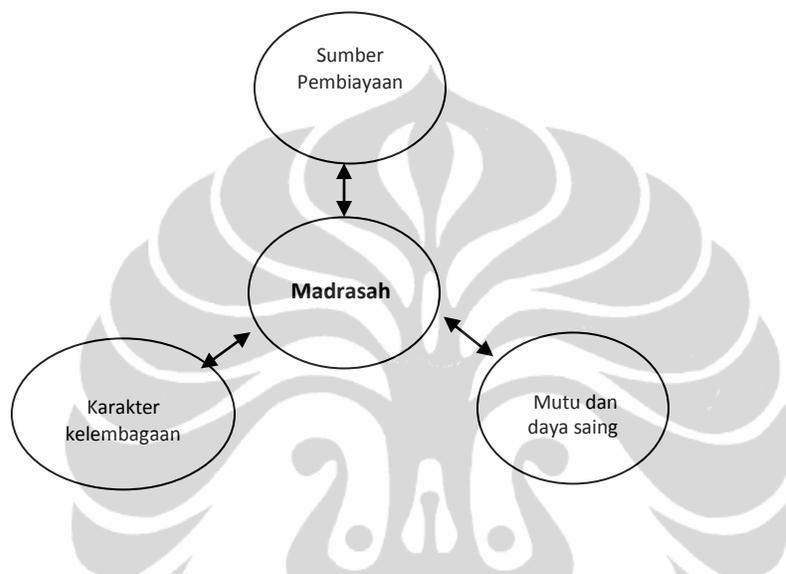
Menguatnya identitas madrasah berimplikasi pada terjadinya kontestasi madrasah dengan jenis pendidikan lain. Merujuk teori Bourdieu (1984) dengan teori kompetisinya yang berpandangan bahwa praktik sosial itu merupakan titik pergumulan antara habitus dan berbagai jenis modal yang terjadi pada arena atau ranah (field) tertentu, sehingga terjadilah kompetisi antar para aktor. Para pelaku lembaga pendidikan madrasah, ketika memilih 'madrasah' sebagai jenis lembaga ternyata mempunyai tanggungjawab tertentu. Label madrasah ternyata membawa implikasi para pendukungnya untuk bergulat, bertahan atau bahkan berusaha memenangkan dalam kompetisi. Dari kepentingan-kepentingan yang ada di belakang simbol madrasah, madrasah mewakili komunitas tertentu, madrasah juga merupakan jenis lembaga pendidikan yang mempunyai keanggotaan dalam jumlah besar, madrasah juga melibatkan kepentingan sebuah kementerian Negara, madrasah juga harus membuktikan mampu menjadi lembaga pendidikan yang berdaya saing (kompetitif) dengan lembaga pendidikan formal lainnya..

Ada dua kekuatan utama sekitar madrasah yang menjadi faktor berpengaruh terhadap madrasah dalam menguatkan identitasnya. Kedua kekuatan itu adalah persaingan antar satuan pendidikan (sesama madrasah) dan jenis lembaga pendidikan (madrasah, sekolah, dan sekolah umum Islam); dan menguatnya dominasi negara dalam dunia pendidikan.

Dari kepentingan anatar kekuatan yang tarik-menarik, peneliti menemukan ada tiga isu utama yang saya sebut sebagai arena kontestasi identitas pada madrasah, yaitu : pertama, isu sumber pembiayaan pendidikan; kedua, isu pertarungan kualitas lembaga pendidikan melalui kontrol mutu

pendidikan, dan ketiga, isu pengembangan kekhasan institusi. Tiga isu/arena ini menentukan warna lembaga pendidikan madrasah dalam usahanya menguatkan identitas .

Gambar 14.  
Peta Arena Kontestasi Identitas Madrasah



**Sumber Pembiayaan.** Dalam masalah sumber pembiayaan, menghadapi hegemoni negara dalam sistem pendidikan, Madrasah Pembangunan mengambil sikap memilih menjadi lembaga pendidikan swasta, yang itu berarti sumber pembiayaan lembaga ini tidak tergantung sepenuhnya pada Negara. Hampir semua pembiayaan pendidikan ditanggung sepenuhnya secara swadaya dari orang tua murid. Karena Madrasah Pembangunan dari awal memang diniatkan untuk menjadi lembaga pendidikan yang bermutu, maka biaya pendidikan pun otomatis lebih tinggi dari orang tua murid. Sejauh ini usaha mengejar mutu dengan mengandalkan biaya pendidikan orang tua pada Madrasah Pembangunan menunjukkan indikasi berhasil. Mensikapi bantuan pendidikan dari Negara, Madrasah Pembangunan tidak anti uang seperti itu tanpa harus bergantung sepenuhnya. Contoh bantuan negara adalah penerimaan uang Bantuan Operasional Siswa (BOS). Menurut pengakuan Myd

(Kepala Madrasah), sejauh ini kontribusi negara melalui BOS hanya mengkover 4,5 % dari seluruh kebutuhan pembiayaan Madrasah Pembangunan. Selebihnya mengandalkan dari kontribusi orang tua melalui uang pangkal dan SPP siswa.

Sementara itu madrasah lain pada umumnya, terkait dengan sumber pembiayaan pendidikan terdapat beberapa sikap: ada yang besikap sama dengan yang diambil Madrasah Pembangunan, ada yang berusaha menjadi madrasah negeri agar mendapatkan bantuan pembiayaan rutin dari negara, namun ada juga yang menolak sama sekali bantuan pendidikan dari negara. Dalam kasus pemberian Bantuan Operasional Siswa (BOS), misalnya, terdapat beberapa sikap dari lembaga pendidikan madrasah dengan segala konsekwensinya. Bagi madrasah negeri, setelah menerima BOS maka tidak diizinkan lagi madrasah menarik biaya pendidikan; sedangkan pada madrasah swasta terjadi variasi penarikan biaya belajar siswa. Ada madrasah yang menerima BOS dan tidak lagi memungut SPP dari siswa, ada madrasah yang menerima BOS dan memungut biaya tambahan.

Demikian juga dengan jenis lembaga pendidikan yang lain. Sekolah, secara faktual lebih banyak yang berstatus negeri (di atas 90 %), ini berarti sekolah lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari negara. Di sisi lain, hadirnya sekolah umum Islam yang lebih mendekati kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih banyak dimotivasi oleh kemungkinan pembinaan dan pembiayaan yang lebih intensip daripada misalnya di bawah pembinaan Kementerian Agama. Ini menunjukkan bahwa di arena sumber pembiayaan, baik sekolah maupun sekolah umum Islam lebih berkepentingan pada bantuan negara.

**Mutu Pendidikan.**<sup>11</sup> Terhadap regulasi mutu yang diatur oleh Negara, Madrasah Pembangunan mengambil sikap menerima dengan ketentuan itu. Namun dalam rangka memenuhi harapan orang tua dan pasar, Madrasah Pembangunan melakukan usaha yang ekstra untuk menjadikan lembaga ini bermutu. Dalam manajemen pengembangan mutu, Madrasah Pembangunan mengembangkan motto “Basic Science, Bahasa, dan Akhlakul Karimah,” yang dimaksudkan sebagai konsentrasi pengembangan, yaitu mutu, pendidikan agama dan penguasaan bahasa. Pada masing-masing poin pengembangan, Madrasah Pembangunan menghadapi persoalannya sendiri-sendiri. Khusus pada aspek pengembangan mutu, Madrasah Pembangunan harus melawan setiap stereotip dan diskriminasi sikap yang terjadi.<sup>12</sup> Dalam situasi seperti ini Madrasah Pembangunan berusaha bangkit untuk melawan itu semua, dan berusaha membuktikan bahwa Madrasah Pembangunan dapat eksis dan kompetitif. Usaha itu berhasil dengan terjaringnya siswa setiap tahun 8 kelas dengan jumlah siswa masing-masing kelas kurang lebih 38-40 siswa.

Dalam rangka mengembangkan mutu dalam perspektif pasar, madrasah melalui motto pengembangan bahasa, mencoba membekali siswa dengan berbagai ketrampilan tambahan yang dimulai dengan ketrampilan berbahasa. Bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan sejak dini. Selain

---

<sup>11</sup> Dari kajian ini, saya mencermati adanya beberapa persepsi mengenai pendidikan dianggap bermutu, kalau dirumuskan ada tiga perpektif: 1) bermutu menurut orang tua murid dalam hal ini orang tua murid merasa puas. Kepuasan ini terkait dengan kelengkapan materi ajar di sekolah, pada kasus madrasah biasanya dikaitkan karena madrasah mengajarkan materi ajar antara pelajara umum dan agama secara berimbang; 2) bermutu menurut pemenuhan standar-standar tertentu yang biasanya diorganisir oleh birokrasi negara seperti pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan mekanisme kontrol hasil Ujian Akhir Nasional (UAN); 3) bermutu menurut pasar yang ditandai dengan tingkat keterserapaan alumni lembaga pendidikan di pasar kerja maupun fungsi-fungsi lain di masyarakat.

<sup>12</sup> Stereotipe yang dimaksud adalah anggapan umum yang menganggap madrasah sebagai lembaga pendidikan kelas dua, dan lembaga pendidikan yang tidak kompetitif. Diskriminasi madrasah yang dimaksud adalah sikap perlakuan yang tidak sama yang diterima lembaga pendidikan madrasah bila dibandingkan dengan sekolah umum.

bahasa, banyak ketrampilan yang diajarkan di madrasah ini seperti computer, perhitungan rempoa.

Sementara pada kebanyakan madrasah lain, umumnya sedang mengikuti regulasi-regulasi dan strandar-standar yang disusun oleh pemerintah yang sebagian melakukan inovasi tambahan, dan sebagian lain dan ini mayoritas tidak disertai dengan inovasi tertentu (miskin kreasi). Ada anggapan banyak pihak, semakin standar-standar pendidikan itu dipenuhi semakin bermutulah lembaga pendidikan. Sayangnya banyak pihak yang cenderung ingin memenuhi standar-standar yang ada, tetapi kurang fokus pada rasa puas masyarakat sebagai konsumen pendidikan.

Tabel 14  
Konstruksi Identitas dan Strategi Madrasah

Pendorong konstruksi Identitas	Arena Kontestasi	Strategi Madr konteks negara	Strategi Madr Konteks Global
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Madrasah' sebagai sebuah pilihan</li> <li>• Kebutuhan : Madrasah berdaya Saing</li> <li>• Kebutuhan: Mempertahankan Kekhasan Madrasah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Pembiayaan</li> <li>• Kontrol Mutu</li> <li>• Pendidikan moral/agama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Pembiayaan               <ul style="list-style-type: none"> <li>- berintergasi sistem Pend Nasional</li> <li>- pembiayaan mandiri</li> </ul> </li> <li>• Kontrol Mutu:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melayani rasa puas masyarakat</li> <li>- Unggul akademis-non akademis</li> </ul> </li> <li>• Pendidikan Agama               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempertahankan kekhasan madrasah</li> <li>- Merekonstruksi Pembelajaran agama</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Pembiayaan               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan Mandiri</li> <li>- Mengikuti mekanisme pasar</li> </ul> </li> <li>• Kontrol Mutu:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti standar internasional ISO 9000</li> <li>- Unggul akademis-non akademis</li> </ul> </li> <li>• Pendidikan Agama               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempertahankan kekhasan madrasah</li> </ul> </li> </ul>

**Kekhasan Satuan Pendidikan.** Terkait dengan pengembangan kekhasan satuan pendidikan, Madrasah Pembangunan memberikan penguatan pendidikan agama dengan porsi tertentu yang membedakan dengan jenis pendidikan yang lain. Madrasah Pembangunan dalam menghadapi masyarakat yang semakin maju mengembangkan pengajaran dan pembelajaran agama dengan tehnik yang lebih bervariasi. Pembelajaran agama dilakukan lebih ditujukan pada pembentukan sikap prilaku siswa daripada penguasaan dari materi pelajaran agama.

Pada aspek pengembangan pendidikan agama dalam konteks globalisasi, Madrasah Pembangunan harus menghadapi dua hal sekaligus yaitu membanjirnya nilai-nilai baru sebagai implikasi perkembangan teknologi informasi di satu sisi, di sisi lain Madrasah Pembangunan juga harus berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain yang menawarkan pendidikan yang menggabungkan pelajaran umum dengan pelajaran agama. Kasus ini terjadi pada sekolahsekolah umum yang berlatar belakang yayasan atau organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan sekolah-sekolah yang tergabung dalam JSIT.

Warna khas keagamaan yang diajarkan di madrasah bisa jadi merupakan model serta bila dipetakan secara lebih luas mempunyai peta aliran keagamaan yang distingtif bila dibandingkan hasil pembelajaran agama di jenis pendidikan yang lain. Saya mencoba memetakan kecenderungan warna keagamaan yang dihasilkan antar jenis pendidikan formal, yaitu: madrasah, sekolah umum dan sekolah umum Islam (seperti Muhammadiyah dan Jaringan Sekolah Islam Terpadu/JSIT). Saya mengindikasikan bahwa pembelajaran agama di madrasah cenderung konsisten, toleran dan *citizenship*, sementara pembelajaran agama dan kultur yang dikembangkan pada lembaga pendidikan sekolah berpeluang untuk menghasilkan anak didik yang lebih longgar bahkan lebih jauh tidak menutup kemungkinan sekuler; sedangkan pembelajaran agama pada sekolah umum

Islam dan kultur yang dikembangkan di dalamnya berkecenderungan menghasilkan anak didik yang berperilaku yang membentang antara longgar hingga ke warna keagamaan yang puritan.

Sejarah madrasah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan agama Islam di Indonesia. Melihat fenomena madrasah dalam konteks globalisasi tidak bisa dilepaskan dari fenomena keagamaan dalam menghadapi konteks yang sama.<sup>13</sup> Merujuk pada teori yang disebutkan Castells, kasus madrasah menurut saya merupakan suatu kontruksi identitas yang salah satunya bersumber pada agama, ini nampak pada kebijakan khusus pembelajaran agama di madrasah.

#### **D. Madrasah Menghadapi Globalisasi**

Dalam positioning madrasah dalam konteks globalisasi, tantangan yang dihadapi Madrasah Pembangunan dapat dipetakan sebagai berikut: 1) globalisasi informasi; 2) agama ; 3) negara; 4) dunia Pendidikan. Keempat permasalahan tersebut, masing-masing telah disikapi oleh Madrasah Pembangunan.

Menghadapi globalisasi informasi, Madrasah Pembangunan menyadari bahwa media informasi dan komunikasi memainkan peranan penting dalam mensukseskan pendidikan, yaitu dalam tehnologi pembelajaran dan pengembangan image lembaga pendidikan. Membangun 'image' dalam konteks globalisasi informasi merupakan salah satu kunci sukses menyelenggarakan lembaga pendidikan.

---

<sup>13</sup> Ada dua pandangan dalam melihat nasib agama dalam menghadapi perubahan zaman baik karena tantangan modernisasi maupun globalisasi. Satu pandangan yang melihat secara pesimis bahwa peran agama akan tergantikan dengan tatanan baru yang lain, satu pandangan lagi melihat peran agama tetap ada hanya saja dalam bentuk dan bahasa yang baru.

Di bidang Agama, mensikapi perubahan perilaku masyarakat terkait dengan globalisasi, Madrasah Pembangunan sangat berkepentingan terhadap pembentuk watak, kepribadian peserta didik. Pertimbangan adanya pembelajaran agama yang memadai menjadi ciri khas utama keberadaan madrasah. Kebijakan memberi bobot lebih pada pembelajaran agama sengaja dikembangkan oleh praktisi madrasah merupakan implementasi dari kesadaran nilai-nilai keagamaan mereka. Sentuhan keagamaan yang lebih inilah yang menurut hemat peneliti yang menjadi karakteristik khas yang dimiliki madrasah. MP sadar betul tentang tuntutan itu. Maka dalam kasus menghadapi realitas perubahan sosial dan dampak globalisasi, MP selalu menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengembangkan kebijakan apapun. Pertimbangan untuk selalu mengambil keputusan yang lebih aman dikedepankan daripada mengadaptasi sedemikian rupa sebuah warna kemajuan. Namun, disamping itu lembaga ini juga sadar bahwa tantangan mengadaptasi kemajuan adalah suatu keharusan untuk dijalani. Dalam mengadaptasi warna kemajuan, madrasah juga mewaspadaikan dan mensikapi semua perkembangan yang terjadi.

Alasan para orang tua yang memilih madrasah untuk menyekolahkan anaknya adalah karena madrasah memberikan pelajaran secara berimbang antara mata pelajaran umum dengan mata pelajaran agama. Fakta ini tidak hanya terjadi di madrasah pembangunan, tetapi juga pada madrasah pada umumnya. Para orang tua merasa nyaman apabila anak mereka selain mendapatkan pelajaran umum juga mendapatkan pembekalan agama. Pelajaran agama dipandang penting dalam mempersiapkan anak menghadapi realitas globalisasi. Selain faktor pelajaran agama, daya tarik yang menyebabkan orang tua menyekolahkan anak mereka ke Madrasah Pembangunan adalah karena Madrasah Pembangunan sudah teruji di pasar, yaitu peminatnya dari kelas

ekonomi menengah ke atas. Bagi sebagian orang tua, menyekolahkan anaknya ke Madrasah Pembangunan adalah prestige tersendiri.

Pembelajaran agama dalam porsi lebih dibandingkan dengan sekolah umum menjadi kekhasan utama madrasah. Madrasah Pembangunan Ciputat menyadari betul tantangan sekaligus peran yang harus dimainkan oleh madrasah baik dalam konteks Negara atau tantangan globalisasi yang lebih luas. Beberapa usaha dilakukan Madrasah Pembangunan untuk menjaga identitas utama madrasah, seperti menambah jam pelajaran agama di kelas, melakukan pendidikan agama melalui *hidden curriculum*, memberikan jam tambahan untuk pembelajaran agama di luar kelas, dan melakukan berbagai kegiatan keagamaan yang lain seperti Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) dan penggalangan dana amal secara rutin.

Terkait dengan Negara, dengan semakin menguatnya dominasi negara dalam menegakkan sistem pendidikan nasional, madrasah --sebagai sebuah entitas kelembagaan di satu sisi dan di sisi lain merupakan bagian dari sub sistem pendidikan nasional-- mencoba dalam membangun posisinya di depan negara di satu sisi mereproduksi identitasnya dan di sisi lain menyesuaikan diri dan berintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Dengan pengakuan kesetaraan madrasah melalui UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan harapan masyarakat yang tinggi terhadap madrasah agar mempertahankan karakter dasarnya, dunia madrasah memiliki dua agenda besar, yaitu: pertama madrasah dituntut untuk meningkatkan mutu dalam rangka berkompetisi dengan satuan pendidikan sederajat dalam hal kualitas pembelajaran dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan. Ini merupakan konsekwensi langsung madrasah yang menyatu dalam sistem pendidikan nasional; dan Kedua, bagaimana madrasah mempertahankan identitas dengan menjaga tradisi lembaga pendidikan Islam yang mengembangkan pendidikan dalam konteks nilai-nilai keagamaan sebagai identitas institusi. Peran ini juga penting, selain madrasah berkembang sesuai

dengan sejarahnya, peran madrasah dalam perspektif kebangsaan turut berkontribusi dalam penguatan nilai-nilai moral sebagian warga negara.

Permasalahan lain ditimbulkan oleh negara yang berdampak pada madrasah adalah kebijakan desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan bagi dunia madrasah dirasakan dampaknya sebagai bentuk marginalisasi madrasah. Sejauh ini, umumnya pemerintah daerah belum mau sepenuhnya membantu membiayai madrasah. Ini sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh para guru di lingkungan madrasah, padahal mereka sama-sama pelaksana pendidikan formal. Apalagi terjadi di beberapa daerah, pemerintah setempat memberikan tambahan uang kesejahteraan pada guru-guru di lingkungan diknas, sementara guru-guru di lingkungan Kementerian Agama tidak mendapatkan bantuan kesejahteraan sama sekali.

Madrasah Pembangunan dalam menghadapi globalisasi pendidikan mengambil posisi menguatkan kemandirian dalam pembiayaan pendidikan. Dalam konteks pasar global, Madrasah Pembangunan mencoba membangun kinerja dan image pendidikan sedemikian rupa melalui penguatan pembelajaran mata pelajaran dan diversifikasi pengembangan image untuk menarik minat masyarakat urban membeli layanan pendidikan Madrasah Pembangunan. Madrasah Pembangunan berhasil menarik minat masyarakat dari kelas sosial menengah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan indikator kemampuan orang tua dalam memenuhi prasyarat untuk menjadi siswa Madrasah Pembangunan yang harus membayar uang gedung sebesar Rp. 13 juta (tahun 2011).

Di dunia Pendidikan sendiri, persaingan antar satuan pendidikan merupakan satu persoalan Madrasah Pembangunan dalam membangun dirinya menuju lembaga pendidikan yang berdaya saing. Pilihan jenis pendidikan pada 'madrasah' menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan lembaga pendidikan madrasah mempunyai daya saing dibandingkan dengan sekolah lain. Pada kasus MP, dapat dinyatakan bahwa madrasah ini berusaha merintis lembaga pendidikan bermutu, dan ternyata madrasah ini berhasil mewujudkan daya saing lembaga yang bisa diperbandingkan dengan berbagai jenis lembaga

pendidikan yang ada di Indonesia, seperti sekolah umum dan sekolah umum Islam yang belakangan hadir dan menjadi kompetitor bagi madrasah.

Kajian ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi globalisasi pendidikan dibutuhkan lembaga pendidikan yang berkarakter. Menghadapi tuntutan atau keinginan masyarakat terhadap kehadiran lembaga pendidikan yang berkarakter, Madrasah Pembangunan mencoba melakukan berbagai bentuk usaha peningkatan mutu: Pertama, peningkatan pembelajaran ilmu-ilmu eksakta sedemikian rupa seperti matematika, IPA dan Bahasa Inggris sebagai usaha pertarungan madrasah berkompetisi dengan lembaga pendidikan sekolah. Dalam mengejar mutu, Madrasah Pembangunan mencoba membuat konsorsium mata pelajaran dan menggunakan jasa konsultan dalam peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya ilmu-ilmu eksakta matematika dan IPA. Kedua, madrasah mengakomodasi penilaian-penilaian standar internasional seperti memenuhi standar ISO 9000.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Madrasah Pembangunan selain mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan globalisasi di dunia pendidikan, ternyata madrasah ini juga menggunakan suasana globalisasi ini sebagai peluang untuk menunjukkan identitas madrasah. Dalam konteks global, ternyata belajar dari kasus Madrasah Pembangunan, madrasah dapat lebih leluasa untuk menunjukkan diri sebagai lembaga pendidikan yang bisa menjadi alternatif pilihan masyarakat. Karena dalam konteks global madrasah bisa menunjukkan identitasnya, bisa berjualan dengan program khasnya yaitu pembelajaran agama yang lebih. Demikian juga dalam bertaruh dengan kualitas atau mutu pendidikan.

Untuk menghadapi globalisasi, Madrasah Pembangunan secara garis besar melakukan dua hal: pertama, madrasah ini membangun kinerja (sistem kerja) pendidikan untuk menyiapkan peserta didik siap menghadapi globalisasi; kedua, madrasah ini juga melakukan upaya pembangunan image (*building*

*image*) menghadapi bangunan-bangunan image yang berkontestasi yang saling memperebutkan opini dalam menggambarkan citra lembaga pendidikan madrasah. Usaha pembangunan kinerja yang dilakukan madrasah pembangunan berdasar pada tiga fokus, yaitu pengembangan basic sains, pengembangan akhlakul karimah, dan pengembangan bahasa. Usaha pembangunan image dilakukan melalui beberapa cara seperti penggunaan media elektronik seperti tampil dalam acara tv, pembangunan gedung yang megah, kelengkapan kegiatan pendukung.

Terkait dengan peta-peta konsep di atas, penelitian ini melihat bahwa Madrasah Pembangunan berhasil membuktikan diri menjadi lembaga pendidikan yang divalorikan tidak hanya oleh di lingkungan lembaga pendidikan madrasah, tetapi juga lembaga pendidikan lain seperti sekolah umum di sekitar Madrasah Pembangunan. Madrasah Pembangunan tidak hanya divalorikan di lingkup lokal, Jakarta Selatan, tetapi juga dalam penilaian saya divalorikan secara nasional.

#### **E. Kilas Balik Teoritis**

Setelah laporan penelitian dipaparkan panjang lebar dari bab I hingga bab VII, merujuk kembali ke konteks teoritis sebagaimana dipaparkan pada bab I, maka berdasarkan kajian pada fenomena Madrasah Pembangunan dalam konteks globalisasi pendidikan sebagai kilas balik teoritisnya dapat dideskripsikan secara singkat sebagai berikut ini.

Merujuk Burawoy (2000) yang menyebutkan adanya tiga hal yang menjadi titik fokus kajian antropologi dalam konteks globalisasi, yaitu kekuatan-kekuatan, koneksi-koneksi, dan imajinasi-imaginasinya. Kekuatan-kekuatan, koneksi-koneksi, dan imajinasi-imaginasinya menjadi tiga komponen yang esensial dalam mengkaji lembaga pendidikan dalam konteks globalisasi. Tiga hal ini akan menjadi fokus masing-masing kasus dalam analisa global tertentu yang

ditentukan oleh pengalaman globalisasi tertentu: manakala orang mengalami globalisasi sebagai sesuatu kekuatan luar maka dia akan melakukan resistensi atau akomodasi; apakah orang berpartisipasi dalam kreasi dan reproduksi koneksi-koneksi yang lintas dunia, apakah imajinasi orang bergerak dan atau berkontestasi dalam dimensi global (Burawoy et al., 2000: 5)

Dalam memetakan kekuatan-kekuatan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam konteks globalisasi, Madrasah Pembangunan berhasil merumuskan berbagai tantangan pendidikan yang harus dihadapi baik itu dalam dataran ideasional (ide) maupun dalam dataran praktis. Dalam dataran ideasional, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan meliputi: 1) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) Globalisasi yang memungkinkan sangat cepatnya arus perubahan dan mobilitas antar dan lintas sektor serta tempat; 3) Era informasi; 4) Pagaruh globalisasi terhadap perubahan perilaku dan moral manusia; 5) Berubahnya kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan (Kurikulum MI Pembangunan UIN Jakarta, 2007)

Dalam dataran praktis, kekuatan-kekuatan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan madrasah meliputi : 1) menguatnya dominasi sekolah umum sebagai parameter pendidikan yang dianggap berhasil; 2) menguatnya hegemoni Negara dalam dunia pendidikan; 3) meningkatnya persaingan antar satuan pendidikan baik itu madrasah versus sekolah maupun madrasah versus madrasah.

Menghadapi kekuatan-kekuatan di atas, Madrasah Pembangunan mencoba melakukan akomodasi tertentu sekalipun tren besaarnya termasuk dalam kategori madrasah melakukan resistensi. Madrasah Pembangunan dalam beberapa hal mencoba bersikap realistis dengan merespon tuntutan baru terkait dengan tantangan yang dihadapi, namun tetap bersikap selektif. Beberapa prasyarat terkait dengan kemajuan teknologi dasar informasi seperti komputer dikenalkan sejak dini, namun beberapa akses informasi seperti internet dan HP

dikenalkan dan digunakan dalam porsi terbatas dengan kriteria-kriteria yang ditentukan.

Imaginasi-imaginasi yang berkembang diantara subyek Madrasah Madrasah, seperti orang tua siswa dan guru menunjukkan bahwa mereka telah menyadari adanya tantangan globalisasi pendidikan yang dihadapi. Globalisasi bagi mereka dipahami sebagai suatu arena yang terbuka yang bersifat mendunia atau internasional yang memungkinkan nilai baik dan buruk berkompetisi. Arena itu terjadi akibat dari berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Karena kekuatan teknologi informasi dan komunikasi, maka sesuatu yang kecil bisa dibesar-besarkan, dunia bisa menjadi suatu kampung yang kecil (*small village*) yang berakibat semua yang berada pada kampung kecil itu bisa diakses. Globalisasi ini menurut mereka telah menjadi cara pandang atau cara berfikir banyak orang yang mempengaruhi sikap mereka sebagai konsekwensi dari cara berfikir seperti itu.

Menurut mereka sikap yang dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi globalisasi adalah: 1) menggunakan semangat kritis dan selektif dalam memilih lembaga pendidikan untuk anak. Pendidikan dalam konteks globalisasi menawarkan peluang dan tantangan sekaligus. Peluang globalisasi adalah membuat sasaran lembaga pendidikan, yaitu orang tua dan siswa semakin berfikir terbuka, universal, pluralis dan multicultural. Kondisi berdampak pada sebagian masyarakat yang semakin menghargai perbedaan. Sedangkan tantangan yang muncul dari globalisasi adalah berkembangnya nilai-nilai negative yang kadang harus disikapi dengan sikap ekstra hati-hati oleh masyarakat. Dalam budaya globalisasi, seseorang yang tidak kritis akan mudah terhempas. 2) Dalam mensikapi globalisasi, masyarakat perlu memberdayakan sifat-sifat kearifan lokal, termasuk kearifan yang bersumber pada agama. 3) Pendidikan dalam konteks globalisasi haruslah berkarakter.

Fakta ini menunjukkan bahwa imajinasi-imajinasi di kalangan subyek Madrasah Pembangunan menunjukkan indikasi bergerak. Bahkan lebih jauh, pergerakan imajinasi di kalangan subyek Madrasah Pembangunan dari deskripsi yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya melalui indikator-indikator pengembangan image (*image building*) Madrasah Pembangunan menunjukkan bahwa lembaga tersebut berkontestasi dalam merebutkan pasar pendidikan. Kontestasi dalam bentuk praktis adalah persaingan antar satuan pendidikan; sedangkan kontestasi secara ide adalah dalam pengembangan konsep-konsep pembelajaran serta prinsip-prinsip yang dibangun dalam sistem pendidikan.

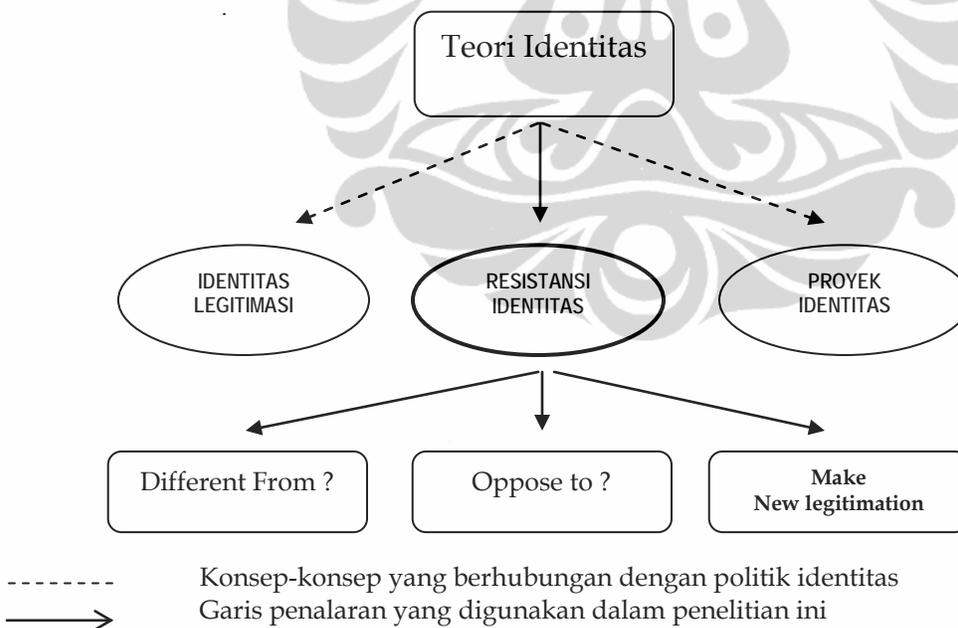
Fenomena Madrasah Pembangunan ini bila dibandingkan dengan madrasah-madrasah lain, khususnya madrasah-madrasah yang mencoba mengagas mutu dan daya saing di kota lain seperti Madrasah Asih Putera di Cimahi Jawa Barat, Madrasah Amantul Ummah di Surabaya menunjukkan bahwa Madrasah Pembangunan cukup kreatif dalam mengembangkan mutu serta daya saing dan pembelajaran moral (agama). Dalam pengembangan mutu, Madrasah Pembangunan mencoba membentuk konsorsium-konsorsium kelompok mata pelajaran; sedangkan dalam pembelajaran agama Madrasah ini mencoba mengembangkannya melalui tehnik kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*). Tehnik-tehnik tersebut sepengetahuan peneliti belum banyak dikembangkan pada madrasah lain.

Apa yang dilakukan oleh Madrasah Pembangunan dalam konteks globalisasi pendidikan di atas, menunjukkan bahwa Madrasah Pembangunan telah ikut berperan dalam pengembangan politik identitas, yaitu politik identitas madrasah. Ini seiring dengan teori Castells (2000) yang menyebutkan implikasi dari menguatnya globalisasi adalah munculnya kekuatan lain dari kesadaran manusia untuk menemukan kembali 'self' atau identitas mereka. Dalam proses konstruksi identitas baik terjadi pada individu atau kolektifitas (termasuk

institusi), tahap awal secara umum yang terjadi adalah proses penyesuaian dengan sesuatu yang di luar diri atau institusi. Penyesuaian itu dapat berbentuk penerimaan terhadap sesuatu yang datang dari luar ataupun suatu reaksi penyesuaian dalam bentuk menolak sesuatu yang datang dari luar.

Dari teori Castells (2010: 8) yang menyebutkan ada tiga teori tentang identitas, yaitu pencarian legitimasi identitas (*legitimizing identity*), resistansi identitas (*resistance identity*), proyek identitas (*project identity*), dari kasus Madrasah Pembangunan, dalam bacaan peneliti madrasah tersebut masuk kategori resistansi identitas. Resistansi identitas, menurut Castells adalah penguatan identitas yang dilakukan oleh kekuatan sosial yang lemah sebagai bentuk usaha mencari pembeda dari (*differ from*) dan bentuk perlawanan (*oppose to*) dari kekuatan dominan.

**Skema 5**  
**Kilas Balik Teoritik Konstruksi Identitas Madrasah**



Dari kajian yang peneliti lakukan terhadap kasus Madrasah Pembangunan, dan ini barangkali kalau boleh dikatakan kontribusi teoritik dari kajian ini, resistansi identitas tidak selalu berhenti pada usaha mencari pembeda dari (*differ from*) dan bentuk perlawanan (*oppose to*) dari kekuatan dominan. Namun, dalam proses kontruksi resistensi identitas pada kasus Madrasah Pembangunan terjadi proses pencarian legitimasi-legitimasi baru dalam penguatan identitas. Ini ditandai dengan usaha serius yang dilakukan Madrasah Pembangunan dalam memenuhi Standar Pendidikan Nasional (SNP) dan juga usaha serius madrasah tersebut dalam mengejar standarisasi manajemen internasional ISO: 9000.

Usaha mencari legitimasi-legitimasi baru dalam politik resistensi identitas pada madrasah menunjukkan bahwa proses penguatan legitimasi identitas tidak hanya dilakukan oleh kekuatan dominan terhadap yang lemah, melainkan juga bisa terjadi sebaliknya, yaitu kekuatan yang lemah (dalam hal ini madrasah) mencari legitimasi identitas melalui akomodasi-akomodasi beberapa aspek dari kekuatan dominan seperti regulasi yang dilakukan negara dan pasar yang menghendaki output pendidikan yang berketrampilan khas pasar sebagai dampak globalisasi. Namun ujung dari akomodasi-akomodasi ini tidak lain, justru untuk penguatan identitas institusi di antara kekuatan dominan yang melingkupinya.

## BAB VIII KESIMPULAN

Institusi Madrasah di Indonesia, dalam perspektif terminologi Giddens, merupakan institusi sosial yang berpusat pada tatanan simbolik. Giddens memandang institusi sosial sebagai kumpulan praktik sosial dan mengelompokkannya dalam empat macam institusi: tatanan simbolik, institusi politik, institusi ekonomi dan institusi hukum (Giddens, 1989: 300). Fenomena madrasah menurut peneliti merupakan sebuah realitas yang dimulai dari realitas tatanan simbolik dengan penekanan utama pada penggunaan terminologi 'madrasah' sebagai identitas lembaga pendidikan yang kemudian mempunyai implikasi yang kompleks baik di wilayah sosial maupun di wilayah politik, khususnya dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Madrasah di Indonesia telah memiliki sejarah yang panjang, namun saat ini madrasah sering dikesankan sebagai lembaga pendidikan kelas dua di belakang sekolah umum. Kondisi itu disebabkan selain kemungkinan faktor intrnal di lingkungan madrasah itu sendiri, namun juga berdasarkan kajian ini disebabkan oleh marginalisasi negara terhadap lembaga tersebut. Fakta jumlah madrasah cukup besar yaitu kurang lebih 40.000 ribu, dan mayoritas (91,5 %) adalah lembaga pendidikan swasta memperjelas deskripsi ketertinggalan jenis lembaga pendidikan ini. Konteks yang demikian ini menjadi tantangan tersendiri bagi madrasah yang ingin mengembangkan diri menjadi madrasah yang unggul, menjadi lembaga pendidikan yang diminati, tidak kalah dengan sekolah umum, apalagi menjadi madrasah yang siap menghadapi globalisasi terkait dengan dunia pendidikan.

Dari konteks seperti itu, ternyata masih banyak anggota masyarakat yang lebih memilih madrasah untuk menyekolahkan anak mereka. Ini menunjukkan bahwa madrasah masih memiliki masyarakat pendukung. Diantara madrasah

yang jumlahnya puluhan ribu, belakangan ternyata ada beberapa madrasah yang berhasil keluar dari gambaran lembaga pendidikan yang serba terbelakang. Salah satunya adalah Madrasah Pembangunan yang berlokasi di Ciputat Tangerang Selatan. Sekalipun madrasah ini berstatus swasta, namun madrasah ini bisa tampil menjadi madrasah unggulan yang tidak kalah dengan sekolah umum, dan berhasil menarik minat masyarakat kelas ekonomi menengah perkotaan di Jakarta dan sekitarnya.

Dari rumusan permasalahan penelitian yang ingin mengetahui jawaban mengapa dan bagaimana Madrasah Pembangunan dapat keluar dari gambaran umum tentang madrasah yang serba tertinggal dan menjadi madrasah yang diunggulkan di perkotaan, terjawablah beberapa pertanyaan rinci : 1) Bagaimana identitas dikonstruksi oleh para pendukung lembaga pendidikan Madrasah Pembangunan?; 2) bagaimana lembaga pendidikan Madrasah Pembangunan mengambil posisi (*positioning*) diantara kepentingan-kepentingan dan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi proses pendidikan?; dan 3) strategi apa saja yang dilakukan penyelenggara Madrasah Pembangunan dalam mensikapi tantangan global dan menjadikan lembaga ini berdaya saing?

Mengapa pelaku Madrasah Pembangunan mampu mengeluarkan kesan institusi keluar dari gambaran umum madrasah yang tertinggal dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain yang sederajat? Penelitian ini menemukan bahwa label 'madrasah' ternyata menjadi tantangan tersendiri dan tantangan awal bagi para pelaku satuan pendidikan ini untuk membuktikan bahwa lembaga 'madrasah' mampu berkualitas. Melalui kesadaran identitas, dibalik label madrasah, mereka diawal pendirian lembaga sengaja memilih label 'madrasah' untuk usaha pendidikannya. Dalam kreasi berikutnya, ternyata praktisi Madrasah Pembangunan mampu menjadikan lembaga pendidikan ini berhasil dan diminati. Madrasah Pembangunan sekalipun lembaga

pendidikan swasta, mampu membuktikan diri menjadi lembaga pendidikan yang bermutu dan berdaya saing.

Dalam konteks globalisasi, orang tua siswa berpendapat dalam menghadapinya diperlukan semangat kritis dan selektif dalam memilih bentuk pendidikan untuk anak. Globalisasi pendidikan menawarkan peluang dan tantangan sekaligus. Globalisasi pendidikan memberi peluang masyarakat pendidikan berfikir semakin terbuka, universal, pluralis dan multikultural. Masyarakat yang semakin menghargai perbedaan. Globalisasi pendidikan juga memberikan tantangan yang harus dicermati masyarakat pendidikan terkait dengan media informasi yang cepat dan terbuka sehingga lembaga pendidikan harus bisa menjadi filter nilai di tengah berkembangnya nilai-nilai hidup yang kontra produktif dengan dunia pendidikan. Masyarakat juga perlu selektif dalam memilih sekolah yang berkarakter dalam menghadapi budaya global yang salah satunya misalnya mengajarkan sifat-sifat kearifan lokal, termasuk kearifan yang bersumber pada agama.

Dalam konteks seperti itu, madrasah menjadi pilihan sebagian anggota masyarakat dalam menyekolahkan anak mereka. Madrasah diyakini mampu memberikan pandangan hidup bagi peserta didiknya melalui pembelajaran nilai-nilai agama dalam porsi yang lebih bila dibandingkan dengan sekolah umum. Madrasah dipercaya mampu mengembangkan identitas peserta didik.

Bagaimana kesadaran identitas dikembangkan di madrasah. Menghadapi nilai-nilai yang kompleks yang berkembang dalam konteks globalisasi, Madrasah Pembangunan melakukan inovasi pengembangan pembelajaran agama dengan lebih mengedepankan terbentuknya sikap religiositas (keberagamaan) daripada pembelajaran agama yang ritualistik. Yaitu mengembangkan agama yang dipraktikkan daripada sekedar agama yang diilmui. Model keberagamaan yang mengutamakan penghayatan seperti ini

diyakini Madrasah Pembangunan mampu menatap globalisasi tanpa kehilangan optimisme. Model keberagaman yang dikembangkan madrasah Pembangunan dan madrasah lainnya di Indonesia dalam bacaan saya relative toleran dan seirama dengan warna kewargaan (*citizenship*). Ini ditengarai oleh di satu sisi peran Negara, dalam hal ini Kementerian Agama sebagai lembaga pembina madrasah, yang terus menerus melakukan penyempurnaan kurikulum yang dikembangkan madrasah; di sisi lain adalah budaya dan kreatifitas pelaku madrasah dalam mengembangkan warna keagamaan yang khas. Globalisasi di satu sisi menunjukkan bukan saja semakin ketatnya persaingan kemampuan diri baik individu maupun institusi, tetapi juga semakin terbuka pintu-pintu yang mengarah pada perusakan moral. Madrasah sebagai lembaga pendidikan telah menjadi alternatif yang memiliki peranan penting dalam pembentuk watak, kepribadian peserta didik. Penguatan nilai-nilai keagamaan tidak berarti anti dengan perubahan yang terjadi. Warna pendidikan keagamaan yang ditawarkan Madrasah Pembangunan adalah warna pemahaman Islam yang toleran, demokratis dan inklusif.

Identitas madrasah adalah suatu yang *constructed*. Proses konstruksi identitas lembaga pendidikan madrasah di Indonesia sangat diwarnai dengan kekuatan-kekuatan dan kepentingan di sekitar madrasah. Salah satunya yang kekuatan dominan yang sangat mewarnai adalah perkembangan kebijakan pendidikan dari Negara. Negara mengambil sikap mengakomodasi lembaga pendidikan madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Proses akomodasi Negara terhadap pendidikan madrasah berjalan alot dan terjadi tarik menarik kepentingan antara pemilik madrasah dengan sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Negara. Kekuatan yang lain adalah kompetitor antara satuan satuan pendidikan, tidak hanya antar sesama madrasah, namun juga jenis lembaga pendidikan lain semisal sekolah dan sekolah yang berlatar belakang keagamaan (sekolah Umum Islam).

*Positioning madrasah.* Dari sisi konstruksi identitas, peneliti melihat paling tidak ada 3 arena yang mewarnai konstruksi identitas madrasah, yaitu: pertama, masalah sumber pembiayaan pendidikan; kedua, masalah pengembangan mutu, dan ketiga, masalah pengembangan kekhasan madrasah. Konstruksi identitas dalam tiga arena ini menentukan warna lembaga pendidikan madrasah dalam berkontestasi baik dalam lingkup nasional maupun internasional (global).

**Sumber pembiayaan.** Dalam masalah ini, kalau kebanyakan madrasah berusaha atau mengusulkan diri menjadi madrasah negeri agar dibiayai oleh negara, Madrasah Pembangunan justru mengambil sikap tetap menjadi lembaga pendidikan swasta, yang itu berarti sumber pembiayaan lembaga ini tidak ingin tergantung pada pembiayaan yang berasal dari Negara. Hal ini berimplikasi bahwa pembiayaan pendidikan ditanggung sepenuhnya secara swadaya dari orang tua murid. Pilihan ini memang diniatkan dari awal bahwa untuk menjadi lembaga pendidikan yang bermutu, maka biaya pendidikan pun otomatis, bisa tidak bisa harus meminta pembiayaan lebih tinggi dari orang tua murid. Sejauh ini usaha mengejar mutu dengan mengandalkan pembiayaan dari orang tua itu menunjukkan indikator berhasil. Merespon bantuan pembiayaan pendidikan dari Negara, seperti Bantuan Operasional Siswa (BOS), Madrasah Pembangunan menerima uang seperti itu tanpa harus kehilangan sikap kemandirian madrasah.

**Pertaruhan mutu.** Ada beberapa pandangan masyarakat mengenai konsep lembaga pendidikan disebut bermutu. Beberapa diantaranya: 1) bermutu menurut orang tua murid dalam hal ini orang tua murid merasa puas; 2) bermutu menurut konsepsi yang diatur oleh negara yaitu melalui standardisasi komponen-komponen pendidikan melalui pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan mekanisme kontrol hasil Ujian Akhir Nasional (UAN); 3) bermutu menurut pasar yang ditandai dengan tingkat keterserapan alumni lembaga pendidikan di pasar kerja maupun fungsi-fungsi lain di masyarakat.

Terhadap regulasi mutu yang diatur oleh Negara, beberapa madrasah mengambil sikap menerima dengan ketentuan itu. Namun dalam rangka memenuhi harapan orang tua dan pasar, beberapa madrasah melakukan usaha yang ekstra untuk menjadikan lembaga ini bermutu. Pada masing-masing poin pengembangan, beberapa madrasah menghadapi persoalannya sendiri-sendiri. Khusus pada aspek pengembangan mutu, Madrasah harus melawan setiap stereotip dan diskriminasi sikap yang terjadi. Stereotipe yang dimaksud adalah anggapan umum yang menganggap madrasah sebagai lembaga pendidikan kelas dua, dan lembaga pendidikan yang tidak kompetitif. Diskriminasi madrasah yang dimaksud adalah sikap perlakuan yang tidak sama yang diterima lembaga pendidikan madrasah bila dibandingkan dengan sekolah umum. Dalam situasi seperti ini madrasah berusaha bangkit untuk melawan itu semua, dan berusaha membuktikan bahwa madrasah dapat eksis dan kompetitif.

Dalam rangka mengembangkan mutu dalam perspektif pasar, beberapa madrasah berusaha mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pasar. Berbagai ketrampilan tambahan yang dimulai dengan ketrampilan berbahasa, computer, dan kegiatan ekstra kurikuler penunjang lainnya diberikan. Hal ini untuk memberikan bekal kepada siswa dalam menghadapi kehidupan nyata.

**Kekhasan Satuan Pendidikan.** Karakteristik utama madrasah yang membedakan dengan pendidikan umum yang lain adalah dari aspek pembelajaran agama. Madrasah memberikan porsi pembelajaran agama yang lebih bila dibandingkan dengan sekolah umum. Beberapa madrasah dalam menghadapi masyarakat yang semakin maju mengajarkan pembelajaran agama dengan tehnik yang lebih bervariasi dan pembelajaran agama dilakukan lebih ditujukan pada pembentukan sikap prilaku siswa daripada penguasaan dari materi pelajaran agama.

*Strategi Madrasah.* Dalam menghadapi globalisasi pendidikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Madrasah Pembangunan melakukan dua hal: pertama, madrasah ini membangun kinerja (sistem kerja) pendidikan untuk menyiapkan peserta didik siap menghadapi globalisasi; kedua, madrasah ini juga melakukan upaya pembangunan image (*building image*) menghadapi bangunan-bangunan image yang berkontestasi yang saling memperebutkan opini dalam merebut minat masyarakat untuk memilih jenis lembaga pendidikan. Seiring dengan dua langkah usaha tersebut, Madrasah Pembangunan berusaha meningkatkan manajemen dengan standar internasional dengan usaha memenuhi ISO 9000.

Dalam pengembangan kinerja, Madrasah Pembangunan mencoba memfokuskan pada tiga hal, yaitu pengembangan basic sains, pengembangan akhlakul karimah, dan pengembangan bahasa. Kurikulum yang dikembangkan adalah kurikulum yang apresiatif terhadap kecenderungan globalisasi. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dan berkemampuan komunikasi global. Puncak pengembangan kinerja pendidikan di Madrasah Pembangunan adalah dengan usaha yang serius dalam memenuhi standarisasi internasional melalui ISO 9000. Dari usaha ini, madrasah Pembangunan suatu saat mampu menjadi lembaga pendidikan yang berkelas internasional.

Dalam pembangunan image (*image building*), Madrasah Pembangunan melakukan beberapa cara/strategi seperti visualisasi madrasah melalui beberapa media informasi, pembangunan sarana pendidikan yang megah, kelengkapan sarana dan prasarana yang lengkap sebagai fasilitas pendukung pembelajaran. pembelajaran bahasa asing sejak dini, pemberian muatan lokal yang strategis, dan penyediaan kegiatan ekstra kurikuler yang bervariasi.

Apa yang dilakukan oleh Madrasah Pembangunan dalam konteks globalisasi pendidikan di atas, menunjukkan bahwa Madrasah Pembangunan telah ikut berperan dalam pengembangan politik identitas, yaitu politik identitas

madrasah. Ini seiring dengan teori Castells (2000) yang menyebutkan implikasi dari menguatnya globalisasi adalah munculnya kekuatan lain dari kesadaran manusia untuk menemukan kembali 'self' atau identitas mereka. Dalam proses konstruksi identitas baik terjadi pada individu atau kolektifitas (termasuk institusi) dalam menghadapi kondisi yang berubah, salah satunya adalah disebabkan globalisasi, tahap yang secara umum pasti terjadi adalah proses penyesuaian dengan sesuatu yang di luar diri atau institusi. Penyesuaian itu dapat berbentuk penerimaan terhadap sesuatu yang datang dari luar ataupun sesuatu reaksi penyesuaian dalam bentuk menolak sesuatu yang datang dari luar.

Simpulan besar dari penelitian ini, dalam menghadapi globalisasi lembaga pendidikan madrasah ini melakukan resistensi identitas tingkat tertentu. Hanya saja resistensi identitas tidak berhenti seperti yang di teorikan oleh Castells pada usaha mencari pembeda dari (*differ from*) dan bentuk perlawanan (*oppose to*) dari kekuatan dominan saja. Namun, dalam proses konstruksi resistensi identitas pada kasus Madrasah Pembangunan terjadi juga proses pencarian legitimasi-legitimasi baru dalam penguatan identitas. Ini ditandai dengan usaha Madrasah Pembangunan dalam memenuhi Standar Pendidikan Nasional (SNP) dan juga usaha serius madrasah tersebut dalam mengejar standarisasi manajemen internasional ISO: 9000.

Usaha mencari legitimasi-legitimasi baru dalam politik resistensi identitas pada madrasah menunjukkan bahwa proses penguatan legitimasi identitas tidak hanya dilakukan oleh kekuatan dominan terhadap yang lemah, melainkan juga bisa terjadi sebaliknya, yaitu kekuatan yang lemah (dalam hal ini madrasah) mencari legitimasi identitas melalui akomodasi-akomodasi beberapa aspek dari kekuatan dominan seperti regulasi yang dilakukan negara dan pasar yang menghendaki output pendidikan yang berketrampilan khas pasar sebagai dampak globalisasi. Namun ujung dari akomodasi-akomodasi ini tidak lain,

justru untuk penguatan identitas institusi di antara kekuatan dominan yang melingkupinya.



## Lampiran 1

### Daftar Pustaka

- Appadurai, Arjun  
1996 *Modernity at Large: Cultural Dimension of Globalization*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Appel, George N.,  
1985 "Biaya Perubahan Sosial" dalam *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*, Penyunting: Michael R. Dove, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Ardhia, Hedi  
2004 "Siapa yang Sepantasnya Mengelola Madrasah." *Pikiran Rakyat*, 24 Agustus 2004
- Aronowitz & Henry Giroux,  
1985 *Education Under Siege*. Massachusetts: Bergin & Garvey Publisher, Inc.
- Aziz, Abdul  
2005 "Kesetaraan Status dan Masalah Mutu Lulusan Madrasah." *Edukasi*. Volume 3, Nomor 1, Januari-Maret
- Azra, Azyumardi  
2000 *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.  
2004 "Membandingkan Madrasah". *Republika*. 18 Nopember 2004  
2005 "Pendidikan Pesantren dan Tantangan Perubahan" (Makalah). PPIM.  
2008 "Kebangkitan Nasional Milenium II" dalam *Republika*, 15 Mei 2008.
- Barfield, Thomas,  
1977 *The Dictionary of Anthropology*. Oxford: Blackwell Publisher Inc.
- Beynon, John and Daviis Dunkerley,  
2000 *Globalization: The Reader*, London: The Athlon Press.
- Bohannan, Paul and Mark Glazer,  
1988 *High Points in Anthropology*, New York: McGraw-Hill
- Borofsky, Robert,  
1994 *Assesing Cultural Anthropology*, McGraw-Hill
- Burawoy, Michael, et al.,  
2000 *Global Ethnography: Forces, Connections and Imaginations in a Postmodern World*, California: University of California Press.

- Burbules, Nicholas C. and Carlos Alberto Torres  
2000 *Globalization and Education: Critical Perspective*. New York: Routledge
- Castells, Manuel  
2000 "Globalization and Identity in the Network Society: A Rejoinder to Calhoun, Lyon, and Touraine" in *The Information Age: Economy, Society, culture*
- Cresell, J. W.  
1994 *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Thousands Oaks, California: Sage Publication.
- Dahrman dan Mahfudh Djunaidi  
2002 "Berlaku Adil terhadap Madrasah." *Suara Merdeka*, 12 Nopember 2002
- Daradjat, Zakiah  
1999 "Pengantar" buku Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Daun, Holger,  
*Educational Restructuring in the Context of Globalization and National Policy*, New York: Routledge.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln,  
*The Landscape of Qualitatif Research: Theories and Issues*. London: Sage Publications.
- Derrida, J.,  
1984 *Of Grammatology* (diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Spivak, G. C.) Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press.
- Djamas, Nurhayati  
2005 "Posisi Madrasah di Tengah Perubahan Sistem Pendidikan Islam." *Edukasi*. Volume 3, Nomor 1, Januari-Maret
- Djunaidi, Mahfudh  
2005 "Empat Hambatan KBK di Madrasah." *Suara Merdeka*, 7 Maret 2005
- Fajar, Malik  
2005 *Holistika Pemikiran Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Fata, Ahmad Khoirul  
2006 "Anak Tiri itu Bernama Madrasah." *Republika*, 28 Februari 2006
- Firdaus  
2005 "Arah Kebijakan Pendidikan di Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum." Dalam *Analisis Berita Pendidikan: Kumpulan Hasil Analisis*. Jakarta: Bagian Data dan Informasi Pendidikan, Kementerian Agama RI.

\_\_\_\_\_, "Pengembangan dan peningkatan Mutu Guru di Lingkungan Direktorat Kelembagaan Agama Islam." Dalam *Analisis Berita Pendidikan: Kumpulan Hasil Analisis*. Jakarta: Bagian Data dan Informasi Pendidikan, Kementerian Agama RI.

Fortes.

1938 *Social and Psychological Aspects of Education in Taleland*. dalam *Africa*, XI - 4 (Suplemen).

Fox, Ricard G. and Barbara J. King,

2002 *Anthropology Beyond Culture*, Oxford.

Freire, Paulo,

1981 *Educational for Critical Consciousness*. New York: Continuum

Geertz, Clifford

1973 *The Interpretation of Culture*, New York: Basic Books, Inc.

Giddens, Anthony

2000 *Runaway World: How Globalization Is Reshaping our lives*. New York: Routledge.

Goodlad, John,

1984 *A Place Called School*, New York: McGraw-Hill Book Company.

Green, Thomas F.,

1971 "Citizenship or Certification" dalam *Anthropological Perspectives on Education* (edit by Murray Wax et al. ), New York, Basic Books, Inc, Publisher

Gunaryo, Achmad

2001 "Madrasah di Era Otonomi Daerah." *Suara Merdeka*, 10 September 2001

Fauzi, Zen

2004 "Mempersoalkan Eksistensi Madrasah." *Suara Merdeka*, 8 Maret 2004

Hammersley, Martyn

1990 *Etnografi Ruang Kelas*, (penterjemah: Warsono), Philadelphia: Open University Press.

Hansen, Judith Friedman.

1979 *Sociocultural Perspectives on Human Learning*. Indiana: Prentice-Hall, Inc.

Harris, Marvin,

1975 *Culture, People, Nature*, New York: Harper International Edition.

Hartono, Yudi

2004 "Strategi Pemberdayaan Madrasah." *Suara Merdeka*, 5 Januari 2004

Hefner, Robert W. and Muhammad Qasim Zaman,

2007 *Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education*. Princeton: Princeton University Press.

Held, David & Anthony McGrew.

2003 *Globalization/Anti-globalization*. Polity Press. Cambridge

Hendra, Faisal

2007 *Kemampuan Berbahasa Arab Siswa Madrasah Aliyah*. Jakarta: Gaung Persada Press

Horton, Donald,

1971 "The Interplay of Forces in the Development of a Small School System" dalam *Anthropological Perspectives on Education* (edit by Murray Wax et al.), New York: Basic Books, Inc, Publisher.

Inkeles, Alex and Davis H. Smith

1974 *Becoming Modern: individual Change in Six Developing Countries*, London : Heinemann

Isaacs, Harold R.,

1993 *Pemujaan terhadap Kelompok Etnis: Identitas Kelompok dan Perubahan Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Karni, Asrori S.,

2010 *Etos Studi Kaum Santri: Wajah Baru Pendidikan Islam*. Bandung: Mizan.

Kazamias, Andreas M.

2001 "Globalization and Educational Cultures in Late Modernity: the Agamemnon Syndrome" dalam buku *Values, Culture and education*, oleh Jo Cairns dkk., World Yearbook of Education.

Keesing, Roger M.,

1974 "Theories of Culture," *Annual Reviews of Anthropology*.

Kellner, Douglas,

2002 "Theorizing Globalization", *Sociological Theory*, No. 20

Kuntowijoyo,

1991 "Muslim Kelas Menengah Indonesia 1910-1950: Sebuah Pencarian Identitas" dalam *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan.

Lauder, Hugh et al.

2006 *Education, Globalization & Social Change*. Oxford: Oxford university Press.

Lawton, Denis dan Robert Cowen.

2001 "Values, Culture and Education: an Overview" dalam buku *Values, Culture and Education*, USA: Stylus Publishing Inc.

Mahmudin

2002 "Siapa Bilang Madrasah Marjinal." *Suara Merdeka*, 29 April 2002

Maksum,

1999 *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,

Malik, Jamal (editor)

2008 *Madrasah in South Asia: Teaching Terror?.* London and New York: Routledge

Marcus, George

1998 *Ethnography Throught Thick and Thin*, Prencenton, NJ: Pricenton University Press.

Mastuhu,

2003 *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*. Yogyakarta: Safiria Insania Pers.

Maunati, Yekti

2004 *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, Yogyakarta: LKiS.

Menon, M. Govin Kumar

2007 "Globalization and Education: An Overview" in Sorondo (ed.) *Globalization and Education*. Berlin: de Gruyter.

McGuire, Meredith B.,

1981 *Religion: The Social Context*, California: Wadsworth Publishing Company

Mudzhar, Atho'

2003 *Identity, Religion, Ethnicity, Democracy, and Citizenship*. Jakarta: Religious, Research and Development, and Training.

Mulkhan, Abdul Munir

2001 "Dilema Madrasah di Antara Dua Dunia". *Kompas*, 23 Nopember 2001

Murtadho

2006, *Beberapa Model Penyelenggaraan Madrasah*, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Depag RI

Musahadi

2002 "Nasib Madrasah dan Diskriminasi Pendidikan." *Suara Merdeka*, 29 April 2002

An-Nahidl, Nunu Ahmad, dkk.

2007 *Posisi Madrasah dalam Pandang Masyarakat*, Gaung Persada Press

Nanji, Azim,

2003 *Peta Studi Islam: Orientalisme dan Arah Baru Kajian Islam di Barat*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

Ninuk Kleden

2006 "Tanda Budaya Provinsi dan Politik Identitas" dalam *Wacana Politik & Budaya di Masa Transisi*, Jakarta: LIPI Press.

Nurudin, dkk.

2007 *Ujian Nasional di Madrasah: Persepsi dan Aspirasi Masyarakat*. Jakarta: Gaung Persada Press.

Pelto, P. J. dan Gretel H. Pelto

1978 *Anthropological Research*. Cambridge: Cambridge University Press.

Prihadiyoko, Imam

2001 "Pendidikan Madrasah dan Hancurnya Sebuah Otoritas Masyarakat " *KOMPAS*, 20 September 2001

Rahman, Fazlur.

1965 *Islamic Methodology in History*. Karachi: Central Institute of Islamic Research.

Rais, Rahmat

2009 *Modal Sosial sebagai Strategi Pengembangan Madrasah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman,

2007 *Teori Sosiologi Modern* (terjemah), Jakarta: Kencana.

Rohendi

2005 "Pesantren Moral dan Revitalisasi Madrasah." *Pikiran Rakyat*, 20 September 2005

Saefuddin, Achmad Fedyani.

2005 *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Kencana.

Safa, Helen Ickhen,

1971 "Education, Modernization, and the The Proses of National Integration, " dalam *Anthropological Perspectives on Education* (edit by Murray Wax et al.). New York: Basic Books, Inc,

Saifudin, Muhammad

2004 "Menyoal Kompetensi Kepala Madrasah." *Suara Merdeka*, 12 April 2004

Sallis, Edward

2006 *Total Quality Management in Education (Manajemen Mutu Pendidikan)*, terjemah oleh Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi, Yogyakarta: Ircisod

Sanderson, Stephen K.,

2003 "Sistem Pendidikan dalam Perspektif Sosiologis" dalam buku *Makro Sosiologi* (terj. ), Jakarta: Rajawali Press.

Santosa, Budi

2005 "Keterbatasan Multimedia di Madrasah." *Suara Merdeka*, 5 Maret 2005

Shaleh, Abdul Rachman,

2000 *Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Jakarta: PT Gemawindu Pancaperkasa.

2004 *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sirozi,

2005 *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Smith, Louis M.

1990 "Pendahuluan Yang Kritis: Ke Mana Arah Etnografi Ruang Kelas" dalam buku *Classroom Ethnography: Empirical and Methodological Essays*, Open University Press, Philadelphia

Sping, Joel H.,

1989 *American Education: An Introduction to Social and Political Aspect* (4<sup>th</sup> edition), Newyork: Longman.

Suparlan, Parsudi

2001 "Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Antropologi" dalam buku *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, Jakarta: Yayasan Nuansa Cendekia.

Supiana

2007 *Sistem Pendidikan Madrasah Unggulan* (Disertasi), Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Suprayogo, Imam

2005 "Madrasah dan Masalah Jati Diri Pendidikan Islam", *Edukasi*. Volume 3, Nomor 1, Januari-Maret

Supriyanto

2002 "Dekonsentrasi Madrasah." *Kompas*, 11 Nopember 2002

Supriyoko

2004 "Masa Depan Madrasah di Indonesia." *Media Indonesia*, 12 Agustus 2004

Syalabi, Ahmad

1987 *at Tarbiyah al-Islamiyah, Nuzumuha, Falsafatuha, Tarikhuha*. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Mashriyah.

Tsing, Anna Lowenhaupt

1993 *Di Bawah Bayang-bayang Ratu Intan*, (terjemahan : AF Saefudin), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

- Tilaar, HAR.,  
1999 *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung: Rosda Karya.
- 2007 “Konsep dan Aplikasi Pendidikan Nasional Bagi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.” Dalam Seminar Nasional di Universitas Negeri Jakarta.
- Yakin, Ainul,  
2005 *Pendidikan Multikultural: Cross Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Wallace, Anthony FC.,  
1966 *Religion: An Anthropological View*, New York: Random House.
- Waters, M.  
1995 *Globalization*. London: routledge
- William Golden,  
1959 Majalah Print
- Wolcott, Harry,  
1971 “Handle with Care: Necessary Precautions in the Antropology of Schools” dalam buku *Anthropology Perspectives on Education*, New York & London: Basic Book, Inc.
- Yinger, J. Milton,  
1970 *The Scientific Study of Religion*, New York: Macmilan.
- Departemen Agama, *Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan*, tahun 2007  
\_\_\_\_\_, *Renstra Pendidikan Islam 2010-2014*  
\_\_\_\_\_, *Problematika Madrasah*. EMIS Direktorat Kelembagaan Agama Islam, Tahun 2001

## Lampiran 2

### CONTOH RENCANA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (RPP) PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI MATA PELAJARAN PKN DI MADRASAH PEMBANGUNAN

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)

Kelas/Semester: V/I

Alokasi Waktu: 2 x 40 Menit

A. *Standar Kompetensi*

*Kemampuan memahami fakta, konsep dan generalisasi tentang sistem sosial dan budaya dan menerapkannya untuk menghargai keanekaragaman sosial budaya dalam masyarakat multikultur*

B. *Kompetensi Dasar*

*Kemampuan memahami keanekaragaman suku bangsa di Maluku*

C. *Strategi Pembelajaran :*

- 1) *The power of two;*
- 2) *Small group;*
- 3) *Classroom discussion;*
- 4) *Student facilitator and explaining*

D. *Indikator*

- *Menyebutkan suku bangsa yang ada di Maluku*
- *Menyebutkan penduduk/suku asli Tual*
- *Menyebutkan pengertian Soa*
- *Menyebutkan contoh-contoh suku-suku bangsa lain yang ada di Indonesia*

E. *Materi Pokok: Masyarakat Desaku (Keragaman Suku Bangsa dan Budaya)*

F. *Nilai-nilai Multikultur*

1. *Yang Harus dikembangkan:*
  - a) *Pengungkapan diri;*
  - b) *Tidak berprasangka;*
  - c) *Menghargai;*
  - d) *Tidak membeda-bedakan*
2. *Yang Perlu dihindari:*
  - a) *Berprasangka;*
  - b) *Diskriminasi/Membeda-bedakan*

G. *Skenario Pembelajaran*

1. *Pendahuluan*

*Siswa mendapatkan penjelasan singkat tentang tujuan pembelajaran dalam kegiatan yang akan dilakukan*

**2. Kegiatan Inti**

- *Siswa dengan bimbingan guru membentuk kelompok (the power of two) sampai pada penentuan ketua kelompok sebagai peer education*
- *Masing-masing kelompok secara aktif partisipatif membaca buku PAN "SATU NUSA" hal 18*
- *Untuk memperkuat bacaan, seluruh siswa menyaksikan tayangan VCD dan PAN "SATU NUSA"*
- *Setiap kelompok melakukan diskusi (small group discussion) tentang materi yang telah dibaca dan disaksikan*

**3. Penutup**

- *Refleksi: mengadakan Tanya jawab tentang materi yang dibahas*
- *Guru memberi reward kepada kelompok terbaik*

**H. Sumber Pembelajaran**

**1. Sumber bahan:**

- @ *buku seri Pustaka Anak Bangsa PAN "SATU NUSA" Visi Anak Bangsa;*
- @ *CVD seri Pustaka Anak Bangsa PAN "SATU NUSA" Visi Anak Bangsa*

**2. Sumber Lingkungan:**

- @ *Classroom*
- @ *Lapangan*

**3. Media:**

- @ *Audio Visual*
- @ *Buku Teks*
- @ *VCD*

**I. Jenis Penilaian:**

- # *Hand out;*
- # *Performance*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Muhamad Murtadlo

Telpon : (021) 7413361  
Handphone : 0878 098 07590  
e-mail : [tadho2000@Yahoo.com](mailto:tadho2000@Yahoo.com)  
Alamat : Kompleks Perumahan Bappenas  
Blok C. 43 Kedaung Sawangan Depok 16516

• **Data Pribadi**

Tempat, Tgl Lahir : Sleman, 25 Juni 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Peneliti  
Lembaga : Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama RI  
Status : Menikah

• **Pendidikan Formal**

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (1978) Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda (1978-1984), MTs Nurul Huda (1984-1987) madrasah di kampungnya yang kebetulan lembaga pendidikan milik kakeknya. Setamat MTs, pindah ke Kota Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan di MAPK (Program Khusus yang digagas Dr. Munawir Sadzali, Menteri Agama RI) lulus (1990). Melanjutkan studi di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Tafsir Hadits (lulus 1997). Dilanjutkan ke S2 di kampus yang sama, mengambil konsentrasi Agama dan Filsafat (lulus 2001). Sekarang mulai tahun 2006 sedang menempuh S3 di Antropologi Universitas Indonesia Depok

• **Pendidikan Non Formal**

Sewaktu menempuh pendidikan dasar, ia telah mencari pengetahuan tambahan melalui pendidikan keagamaan seperti mengaji Kitab *Safinatun Najah*, *Duror Bagyah*, *Amtsilah Tasrifiyah* dengan KH Djumali, K. Dalhari. Kemudian semasa pendidikan MTs, mengaji di Pondok Pesantren Miftahul Husna Sleman Yogyakarta (1984-1987). Saat pendidikan menengah, sebagai siswa program khusus, ia mendapatkan pengajaran Kitab-kitab Kuning.

• **Kursus/Pelatihan**

Training Dasar IPNU (1998), Kursus Penelitian Sosial di Universitas Gajah Mada (1991), Training ekstra mahasiswa (1991, 1992, 1993), Kursus Jurnalistik di UGM (1993), Kursus Bahasa Inggris Program Toefl (1993), Kursus instruktur Komputer (1994), Kursus Koperasi (1998), Pelatihan Penelitian Kuantitatif (2003), Pendidikan Instruktur AKIP/LAKIP (2004), Pelatihan Managemen Proyek (2004), Kursus Toefl

(2004), Diklat Peneliti (2004), The 4<sup>th</sup> Asian Graduate Forum On Southeast Asian Studies, Singapore (May-July 2009); Pendidikan fasilitator: Penyusunan Rencana Strategik (670 jam)(2009), Diklatpim IV Kementerian Agama (2012)

- **Pengalaman Organisasi**

Sejak muda aktif di organisasi seperti Remaja Masjid di kampungnya (1984-1987), Pramuka di MTs dan MA (1984-1990), Palang Merah Remaja di MA (1987-1990), Unit Kerohanian Islam di MA (1987-1999), berbagai kepanitiaan kegiatan PHBI, pernah mengikuti pendidikan dasar di training Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), mengikuti kegiatan Gerakan Pemuda Anshor di Sleman, semasa kuliah aktif di organisasi intra kampus (Senat Mahasiswa) dan organisasi ekstra Mahasiswa. Setamat kuliah mendirikan koperasi Putra Jaya (1998). Mendirikan Jaringan Peneliti Agama dan Masyarakat yang sifatnya nasional (JPAM/2003). Bergabung ke Forum Konsultasi dan Komunikasi Umat Beragama (FKKUB) Prov DKI Jakarta (2004-sekarang)

- **Pengalaman Pekerjaan**

Menjadi pegawai negeri (PNS) tahun 1998 di tempatkan di Kantor Urusan Agama di Sleman. Bidang pekerjaan yang dilakukan meliputi mengurus Zawaibsos, sertifikasi tanah wakaf (1998-2000), PPN (2001-2003), Penatar Keluarga Sakinah (1998-2003). Tahun 2003 mutasi ke Litbang Dep. Agama di Jakarta untuk menjadi peneliti. Menjadi Pelaksana Perencanaan Sekretariat Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan (2003-2005), Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan (2005-sekarang), Tim Penulis: Buku Panduan Penyusunan Rencana Strategik Pembangunan Pendidikan Islam (2009), Tim Perumus Rencana Strategik Pembangunan Pendidikan Islam (2009), menjadi pejabat eselon pada sub bidang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan formal, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI (2011)

Di samping, pengalaman terkait pekerjaan, penulis juga mempunyai pengalaman di bidang lain, seperti : Guru di MTs Nurul Huda, Sleman Yogyakarta (1997-2000); Sukarelawan di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Prov DKI Jakarta (2004-2008); Mengajar (dosen) Manajemen dan Administrasi Pendidikan di Universitas Islam Jakarta (UNJ), Fak Agama Islam (2002-2007); Mengajar (dosen) Antropologi di Universitas Islam Al Azhar (UIA) Jakarta (2007)

- **Prestasi**

Juara kelas selama Pendidikan Dasar (MI dan MTs);  
Penerima bantuan pendidikan selama pendidikan menengah sebagai peserta program khusus Kementerian Agama di MAPK Yogyakarta;  
Penerima beasiswa Supersemar sewaktu menempuh studi S1 di IAIN Sunan Kalijaga;  
Penerima Beasiswa Kuliah S2 dari IAIN Sunan Kalijaga;  
Penerima Bea Siswa/Tugas Belajar dari Kementerian Agama untuk studi S3 di UI Depok

- **Pengalaman Penelitian :**

- 2003, Penelitian Pengembangan Ekonomi di Pesantren, Pandeglang  
\_\_\_\_\_, Penelitian Majelis Taklim di Pandeglang  
\_\_\_\_\_, Penelitian Kebutuhan Diklat di Palembang
- 2004, Penelitian Kebutuhan Diklat Pejabat Fungsional di Bali  
\_\_\_\_\_, Penelitian Pendidikan Luar Sekolah: Studi Kasus Majelis Taklim Sekumpul Martapura  
\_\_\_\_\_, Penelitian Pendidikan luar Sekolah : Studi Kasus di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin  
\_\_\_\_\_, Penelitian Pendidikan Keagamaan Pada Anak Jalanan di Jakarta
- 2005, Penelitian Kebutuhan Diklat Pengelola Zakat di Pandeglang  
\_\_\_\_\_, Penelitian Kompetensi Guru PAI di Klaten, Penelitian Pemenuhan Bahan Belajar Program Wajar Dikdas di Banjar Kalsel
- 2006, Penelitian Tipologi Pesantren di Jombang  
\_\_\_\_\_, Penelitian Tipologi Madrasah  
\_\_\_\_\_, Penelitian Pendidikan Agama Pada Anak Pasangan Orang Tua Beda Agama di Jakarta dan Yogyakarta
- 2007, Penuntasan Wajar Dikdas Dan Ketersediaan Bahan Belajar Di Pesantren Salafiyah  
\_\_\_\_\_, Penelitian Kompetensi Kepala madrasah di Cianjur
- 2008, Studi Pengembangan Program Studi Umum Pada STAIN Tulungagung Jawa Timur  
\_\_\_\_\_, Studi Persebaran Alumni MAK MAN Yogyakarta I
- 2009, Studi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Hindu Di Pasraman Saraswati Labuhan Dalam, Tanjung Seneng, Bandar Lampung
- 2010, Studi Pergeseran Pesantren (Studi Kasus Pesantren Salaf Al Anwar Sarang Rembang)  
\_\_\_\_\_, Studi Unit Cost Sertifikasi Guru Madrasah Dan Guru PAI Di Sekolah
- 2011, Studi Pengembangan Prodi Agama di STAIN Samarinda  
\_\_\_\_\_, Penelitian Pengembangan Akses Pendidikan Pada Masyarakat Suku Kubu (Orang Rimba) Bukit 12 Provinsi Jambi  
\_\_\_\_\_, Studi Pembiayaan Pendidikan di Madrasah

- **Publikasi**

- 2002, *Islam Jawa: Mencari Jalan Keluar dari Ketegangan Santri dan Abangan*. Yogyakarta: Laper.
- 2003, *Logoterapi: Terapi Psikologi Melalui Pemaknaan Eksistensi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana (Sebagai Penerjemah)
- 2005, "Agama Sipil : Sebuah Jalan Tengah ?: Antara Negara Sekuler dengan Negara Agama," *Dialog*,
- 2006, *Beberapa model Penyelenggaraan Madrasah*, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Depag RI  
\_\_\_\_\_, Reformasi Madrasah Dan Globalisasi, *Jurnal Dialog*, No. 61, Tahun xxix, Juli 2006

2007. "Penuntasan Wajar Dikdas dan ketersediaan bahan belajar di pesantren salafiyah," *Jurnal Edukasi*, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Depag RI
- \_\_\_\_\_, "Pendidikan Agama Pada Anak Pasangan Orang Tua Beda Agama," dalam Buku *Pendidikan Agama Dalam Perspektif*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- \_\_\_\_\_, "Pesantren Dan Pemberdayaan Ekonomi: Studi Kasus Pesantren Baitul Hamdi dan Pesantren Turus di Pandeglang," *Dialog*, N0. 63, Tahun XXX, Juli 2007
- \_\_\_\_\_, "Sahal Mahfudz: Menatap Modernitas dengan Tradisi Pesantren Salaf", dalam buku *Pemikir Pendidikan Islam: Biografi Sosial Intelektual*, Jakarta: Penerbit Pena (Contributor)
- 2009, "Madrasah: Globalization and Identity" (*Edukasi*, No. 3/2009)
- \_\_\_\_\_, *New Trends In Islamic Educations Institution in Indonesia: Contemporary and Global Contexts*. The 4<sup>th</sup> Asian Graduate Forum on Southeast Asian Studies, Singapore (15-17 Juli 2009)
- 2010, *Pendidikan Agama di Indonesia: Gagasan dan Praktek Layanan Pendidikan Agama*, Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan

